JURNAL MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

BALAIRUNG

SN: 1215-076X EDISI 37 | TH.XVIII | 2004

YANG TERHEMPAS YANG BERTAHAN

SEKTOR INFORMAL & SUBVERSI REALITAS

MUBYARTO

BADAN PENERBITAN PERS MAHASISWA
BALAIRUNG
UNIVERSITAS GADJAH MADA

PENERBIT: Badan Penerbitan Pers Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BPPM-UGM) BALAIRUNG **Izin Penerbitan Khusus**: SK Menpen RI No. 1039/DIRJEN/PPG/STT/1986; SK Rektor UGM No. UGM/82/7798/UM/01/37 tgl. 14 Desember 1985 **ISSN**: 0215-076X **Pelindung**: Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA (Rektor UGM) **Penasihat**: Prof. Dr. Ir. Zaenal Bachruddin, M.Sc. (WR. Bid. Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, Drs. Amir Effendi Siregar, MA., Ir. Abdul Hammid Dipopramono **Pembimbing UKM** : Anna Nadya Abrar **PEMIMPIN UMUM**: Indi Aunullah **Sekretaris Umum**: Nufudlurrofi' **Koordinator BALKON**: Lukman Solihin **PEMIMPIN REDAKSI**: M. Iqbal Muhtarom **Sekretaris Redaksi**: Gilang D. Parahita **Redaktur Eksekutif**: Tarli N., N. Budi Baskoro, Fauzul Muhammad, M. Iqbal AD., Roni Wijaya, Imam Karyadi, Sofyan Rosyidi **Redaktur Pelaksana**: Irfan Afifi, Agustinus B. Dacosta **Redaktur Bahasa**: Anna Mariana, Indiarti Yuni A. **Staf Redaksi**: Bambang P. Jatmiko, Nanang Baidlowi, Idha Saraswati (Kreatif BALKON), Karlina, Aseptyanto Wahyu, Dia Mawesti, Ahmad Ghozi, Fauziana, Chandra Puspitasari, Nurdiyanto, Pujianti Setianingsih, Teguh Azmi, M. Jhonattan, Andi Facry, Safiq Muhammadin, Eni Lestari, Erina Citta, Dedi Purwono, Angga Wijaya, Ardi Teristi H., Adi Heri, Martona Parasian, Veri Antoni, Ryan Sugiarto, Dinar Darundini, Atiyatul Izzah, Arief Sucianto, David Efendi **PEMIMPIN PERUSAHAAN**: Rini Yuni Astuti **Wakil Pemimpin Perusahaan**: Suci Dandi Pertiwi **Kabag. Keuangan**: Atika Kurniasari **Kabag. Iklan**: Titi Hidayatun **Kabag. Promosi**: Nandika Wijayanti **Kabag. Distribusi**: Indrantoro (Kreatif BALKON) **Staf Perusahaan**: Yuyun Mastutie, Asniah Miranti, Agung Wicaksono, Yelinda Selvyana, Nina Marlena, Nurina Yudistianti, Mudiza Maidihani, Lizman Arief Lubis, Reni Prasetyaningrum, Alfi Hidayatul Rahmawati, Dian Mentari Alam, Vera Dwi Puspa Dewi **KEPALA RISET DAN DOKUMENTASI**: Heru Lesmana Syafei **Sekretaris Riset dan Dokumentasi**: Reza. N. Yunanto **Staf Risdok**: Lutfah Ariana , A. Suharyanto, Annas Syaroni (Kreatif BALKON), Elistiawaty Ruhiyat, Kurnia Setiya P., Heri M. Tohari, Dwi Wulan, Muchamad Nur Wahid, Supramono, Arafah Kurniawan, Muhammad Fatoni, Tusti handayani, Qustan Abqory, Rusman Nurjaman, Nadya karimasari, Muh.Taufiqurrohman, Muhammad Mawardi, Kadir Sinambela, Juanita Wiratmaja, Bernard Patar A., Agus Baehari, Elvi Yuriayani, Cahya Tri Kusumawanti **KEPALA PRODUKSI**: Bondhan Kresna Wijaya **Wakil Kepala Produksi**: Pramuditya Prima Jati **Sekretaris Produksi**: Munawwaroh **Staf Produksi**: Hendi Primawan, Erydani Anggawijayanto, Husni Mubarok, Ahmad Sarifudin, Muhammad Satya, Bramantyo Danur, Ahmad Mukhtar, Zulva Emma, Taufan Sukma, Hera Ariani **Fotografer**: Abraham Mudito (Kreatif BALKON) **Ilustrator** : Astri Tantrina, Asa Rahmana **Ilustrator Tamu**: Erwin Rustaman, Denko **Kulit Muka** : Bondhan K, **Foto** : Abib, **Ilustrasi** : Asa
ALAMAT: Bulaksumur B-21 Yogyakarta 55281 **Faks**: (0274) 566171 **E-mail**: balairung.ugm@eudoramail.com

Sektor informal adalah salah satu bukti paradoks modernisasi di Indonesia. Modernisasi, yang dentik dengan kemajuan, post-tradisionalisme, nyatanya masih menyisakan bau-bau tradisional. Ironisnya, paradoks itu tak kian memudar seiring berjalannya waktu, bahkan ketika salah satu fragmen telah sengaja dipinggirkan sekalipun. Seperti itu pula sektor informal. Ketika pembangunan lebih menitikberatkan sektor modern, sektor informal justru menunjukkan kekenyalannya. Malah, saat krisis mendera, kegairahan di sektor ini kian berdetak nyaring. "Pasar tenaga kerja di Indonesia mengalami informalisasi," ujar Dr. Tadjudin Noor, dosen Fisipol UGM.

Meski tak begitu terikat pada struktur negara, masyarakat kelas bawah—yang menjadi kebanyakan pelaku sektor informal—bukannya tak kerepotan atas rapuhnya perekonomian nasional. Harga-harga kebutuhan yang membumbung sudah pasti bikin resah. Untungnya, kegelisahan itu tak termanifestasikan dalam bentuk ledakan sosial yang berarti. Aktualisasi keresahan itu, sejauh ini, berlangsung dalam batas kewajaran untuk sebuah negara yang relatif masih memberi ruang bagi orang untuk berteriak.

Mereka sadar, tidaklah cukup berdiam diri sembari melafal mantra demi perbaikan nasib. Mereka pun mafhum, kegetiran harus diatasi dengan aksi. Maksudnya, tak sekadar aksi menuntut, seolah perbaikan hanya terberi oleh desakan tuntutan. Tetapi, mereka telah memula aksi, minimal dari dirinya sendiri. Spirit inilah yang terbaca dari para pelaku ekonomi informal.

Sejauh ini, pandangan umum yang mengemuka mengatakan sektor informal adalah korban pembangunan! Tentu, pernyataan itu sulit dibantah. Dilema sektor informal di era modern memang berpangkal pada persoalan tenaga kerja. Tepatnya, karena negara gagal menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat dalam kerangka pembangunan sektor modern (formal), yang umumnya berpusat di perkotaan. Karena kota menjadi sentral, maka kota dipandang lebih menggiurkan bagi masyarakat desa. Kota bagai memiliki magi yang mampu menyedot warga desa. Di sisi yang berlawanan, bekerja di desa (umumnya berbasiskan pertanian) tak lagi menjanjikan, lantaran hasil yang cekak. Maka terjadilah migrasi besar-besaran dari desa ke kota.

Sayangnya, kota tak semenawan yang dibayangkan kaum urban. Tenaga kerja yang meruah tak bisa sepenuhnya disedot sektor modern. Lahan kerja formal di kota, ternyata mensyaratkan kemampuan (*skill*) dan latar pendidikan yang juga formal. Kaum urban tak memenuhi syarat itu. Pendidikan dan *skill* mereka tak memenuhi kriteria. Inilah mula mengapa sektor informal di perkotaan muncul.[1]

Tetapi, negara seperti tak mengakui anak sahnya sendiri. Cerita tentang penggusuran, penertiban, dan pembinaan, masih lekat dengan

Yang Terhempas Yang Bertahan

pelaku sektor informal. Sebab mereka menempati lahan secara ilegal, mereka harus digusur. Lantaran mereka menancapkan tenda-tenda di tepi jalan, mereka pantas ditertibkan. Karena mereka berketerampilan rendah, lagi bobrok secara manajerial, pantaslah mereka untuk dibina dan diarahkan menuju formal. Begitulah pandangan negara terhadap mereka, dari waktu ke waktu.

Bahkan, seringkali negara bersikap curang. Suatu waktu mereka dibutuhkan ketika dipandang memberi kontribusi pada sektor formal. Di saat yang lain, mereka ditendang ketika dianggap mengganggu. Sebagai contoh, dapat disimak penelitian yang dilakukan Lea Jellinek tentang masyarakat sektor informal di kampung padat, Kebun Kacang, Jakarta, yang kini telah berubah menjadi jantung metropolitan. Kebun Kacang, dahulu dihuni oleh masyarakat yang sepenuhnya bekerja di sektor informal. Singkat kisah, mereka sempat menikmati hidup lebih dari yang mereka perhitungkan di pertengahan 1970-an. Itu terjadi ketika dimulai pembangunan besar-besaran di kawasan itu. Usaha-usaha jasa sektor informal mereka, saat itu, memberi kontribusi penting bagi para buruh dan karyawan yang tengah membangun kawasan tersebut. Namun, nasib mereka berubah drastis. Setelah pembangunan usai, mereka justru dilarang berusaha di kawasan itu.[2]

Selalu berulang. Begitulah nasib sektor informal di berbagai tempat. Tetapi, mereka seakan tak tahu-menahu. Sektor informal membuktikan bahwa mereka tak akan pernah berkesudahan. Paling tidak, anggapan bahwa keberadaan mereka hanyalah sementara, tak terbukti hingga kini. Ternyata, sejarah pertumbuhan secara linier sebagaimana terjadi di Barat, tak selalu terjadi di Timur. Di pertengahan abad ke-19, Inggris sukses mengalihkan pelaku sektor informal menjadi formal di kota London. Di kota-kota di Nusantara, sektor informal tak pernah habis, meski mengalami pasang-surut.[3]

Agak kurang bijak, memang, bila kita menatap sektor informal melulu dari kenestapaannya. Benar bahwa kehadiran mereka di kota-kota modern ini lantaran struktur pembangunan yang tak memihak golongan ini. Tak dimungkiri, pilihan mereka bersetia di sektor ini, awalnya, lantaran mereka ditepikan oleh sektor formal. Pilihan terhadap sektor informal, pada mulanya, mungkin sekadar upaya untuk *survive*. Akan tetapi, kenyataannya tak selalu begitu. Sampai hari ini, sektor informal masih bertahan, bahkan banyak di antaranya yang lebih dari sekadar bertahan.

Sayangnya, wacana sektor informal belakangan kurang mengedepan. Malahan, ia seperti mengalami kemandegan. Pada ranah perspektif, pembicaraan sektor informal lebih sering berhenti pada dua kutub yang saling bersikukuh: struktural atau kultural. Padahal tak tertutup kemungkinan bagi keduanya—perspektif struktural dan kultural—untuk dipakai bersamaan, saling melengkapi.

Berangkat dari situlah, Jurnal BALAIRUNG kali ini mencoba untuk meninjau ulang pemahaman soal sektor informal terkini. Pandangan-pandangan terhadap sektor informal hingga kini umumnya masih berposisi sebagai pihak luar yang sekadar empati. Orang sering memandang sektor informal semata sebagai kaum lemah yang tak bertenaga dan karenanya harus dibantu. Sialnya, sebagai pihak luar, seringkali kita tampil *sok* pandai dan menggurui sembari menawarkan berbagai solusi yang dinilai jitu.

Memang, perspektif struktural setidaknya telah membuka mata bahwa keberadaan sektor informal merupakan bukti ketidakbecusan negara mengenali konteks penerapan sistem. Hanya saja, menempatkan sektor informal semata sebagai korban pembangunan sering berujung pada frustrasi. Struktur yang tak berpihak pada sektor informal semestinya dibongkar. Namun, walau begitu, kita semestinya juga menakar etos kultural demi menopang perubahan dalam dimensi struktural. Untuk keperluan ini, kajian yang lebih luas mesti dijelajahi. Dalam sidang-sidang redaksi

BALAIRUNG, kajian mendasar soal sektor informal ditarik dalam telaah yang agak jauh. Adanya sekat formal-informal menandakan ekonomi dualistik masih menjadi dilema di negeri ini.[4]

Bicara soal dualisme tentu saja akan menyinggung J.H. Boeke.[5] Masuknya Boeke dalam pembahasan, ternyata memicu polemik. Setidaknya, ada dua hal yang bisa dicatat. *Pertama*, selain karena telah usang oleh waktu, tesis Boeke dianggap bias Barat. Ringkasnya, Boeke ditafsirkan terlalu mengerdilkan etos masyarakat Indonesia lantaran masih berciri tradisional (pra-kapitalis). *Kedua*, oleh pendapat yang berpegang pada perspektif struktural, pemikiran Boeke dianggap ahistoris. Dalam hal ini, kategori formal-informal tak bisa disamakan dengan kategori modern-tradisional.

Kedua kritik dapat diterima. Bila bicara soal etos, misalnya, bukan berarti masyarakat negeri ini tak memiliki semangat kerja dan kewirausahaan. Wirausaha dimaksud, ialah bekerja tak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek (subsisten). Etos wirausaha sebenarnya dipunya oleh masyarakat kita. Juga, tak bisa dimungkiri, masyarakat dualistis sebenarnya lebih disebabkan oleh adanya struktur yang menindas. Bila melongok dualisme yang terjadi di paruh pertama abad lalu, terang saja penyebabnya ialah struktur ekonomi kolonialis yang menindas masyarakat pribumi.

Namun demikian, terminologi dualistik tetap dipakai di sini. Sebab, kata "formal" di satu sisi dan "informal" di sisi lain, telah menegaskan dua entitas yang berbeda. Selain itu, juga tak bisa ditegaskan secara terpisah antara modern-tradisional dan formal-informal. Dalam banyak hal corak tradisional tergambar dalam sektor informal. Demikian juga sektor formal yang diidentikkan dengan ke-modern-an. Keduanya kini berjalan bersamaan. Tetapi, tentu saja, tidak dalam kerangka yang terpisah-pisah, melainkan saling bersinggungan, menopang dan melengkapi. Asumsi inilah yang dipakai jurnal ini untuk menelaah sektor informal terkini.[6]

Dalam banyak hal, asumsi di atas coba dibuktikan BALAIRUNG lewat survai tentang fenomena warung burjo, salah satu pelaku ekonomi informal di Yogyakarta. Harus diakui, usaha burjo masih terlalu jauh untuk menggambarkan sektor informal secara umum. Tetapi, bahwa ada etos daya tahan bahkan pada beberapa titik lebih dari itu, tercermin dalam dinamika usaha warung burjo.[7]

Ada satu hal yang perlu digarisbawahi atas fenomena sektor informal di Yogyakarta. Sebagai sektor yang dari segi jumlah sebenarnya amat signifikan, mereka belum mampu melakukan perubahan pada tingkat yang lebih kualitatif. Sebagaimana ditemui dalam survai kali ini, organisasi sektor informal masih teramat lemah. Dalam banyak hal, konsolidasi internal mereka masih begitu rapuh. Jadi, masih sulit membayangkan, sektor informal di Indonesia bisa menjadi lawan sepadan sektor formal sebagaimana terjadi di Peru.[8] Di Lima, ibu kota Peru, sektor informal berhasil membangun kekuatan tersendiri dengan dasar hukum yang berbeda (*the system of extralegal norms*) dari hukum versi negara.

Mengapa hal itu tak terjadi di Indonesia? Boleh jadi ini lantaran dominasi struktur negara di Indonesia lebih condong pada liberalisasi pasar. Karenanya, sepanjang struktur perekonomian negara tetap berpegang pada sektor ekonomi modern, selama itu pula nasib sektor informal tetap berada di tepi. Selagi perhatian pemerintah masih berkutat pada bagaimana memulihkan sektor ekonomi modern, maka suara dari sektor informal tetap dianggap sepi. Karenanya, jurnal ini sengaja hadir untuk menyuarakan betapa sudah sepantasnya pilihan kebijakan pemerintah yang mengedepankan sektor ekonomi modern semata, dipupus. Pun, jurnal ini berusaha mengurai bahwa kebijakan ekonomi modern Indonesia yang pro-kapital, tak hadir dengan sendirinya. Sebab itu, pemikiran-pemikiran ekonomi dan pembangunan yang mengimani laju pertumbuhan dan investasi—yang notabene hanya menguntungkan sektor formal—selayaknya dikoreksi.

Pada akhirnya, banyak hal yang belum terjawab dalam jurnal ini. Namun begitu, momentum demokratisasi dan desentralisasi yang relatif masih terjaga merupakan saat yang tepat untuk melesakkan gagasan-gagasan yang selama ini terpinggirkan, termasuk sektor informal. Bagaimanapun, sebagai buah dari modernisasi juga, sektor informal layak diberi perhatian sejajar dengan sektor formal.

N. Budi Baskoro

1 Fenomena ketenagakerjaan sektor formal-informal ini telah diulas dengan gamblang oleh Soetjipto Wirosardjono, Pengertian, Batasan, dan Masalah Sektor Informal , dalam Prisma No.3, Maret 1985.

2 Lebih lengkap simak Lea Jellinek, Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta, (Jakarta, LP3ES, 1995).

3 Ibid, hal 231-234.

Hal ini pula yang disinyalir oleh Soetjipto Wirosardjono, op. cit

Orang pertama yang melontarkan istilah dualisme ialah J H. Boeke pada paruh pertama abad ke-20. Boeke mengatakan terdapat corak sosial dan ekonomi dualistik yang hidup saling berdampingan di tanah Jawa kala itu. Pertama, adalah corak ekonomi pra-kapitalistik (tradisional) mayarakat Jawa. Kedua, corak ekonomi kapitalistik (modern) yang diwakili oleh bangsa kolonial Belanda. Yang perlu dicatat bagi Boeke, ia menganggap bahwa masyarakat Jawa tak memiliki budaya wirausaha dan karenanya dianggap tak memiliki akar budaya kapitalistik. Ini lantaran masyarakat Jawa, kata Boeke, lebih mementingkan relasi dalam dimensi sosial kekerabatan ketimbang ekonomi.

Bagaimanapun, keberadaan sektor informal justru telah menopang kehidupan pelaku ekonomi formal juga. Telah banyak tulisan yang membuat preposisi itu. Salah satunya, untuk menyebut contoh, adalah tulisan Miftah Wirahadikusumah, Sektor Informal sebagai Bumper Pada Masyarakat Kapitalis, dalam Prisma No.5, Mei 1991.

Lebih lengkap, lihat survai redaksi BALAIRUNG dalam jurnal ini. Yang perlu dicatat dari survai itu, ternyata fenomena sektor informal lebih kompleks dibandingkan, barangkali, dengan kasus-kasus sektor informal di lain negeri. Satu yang paling khas ialah adanya unsur lokalitas dalam sektor informal di Yogyakarta (mungkin Indonesia).

Lihat Hernando De Soto, Masih Ada Jalan Lain: Revolusi Tersembunyi di Negara Dunia Ketiga, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992).
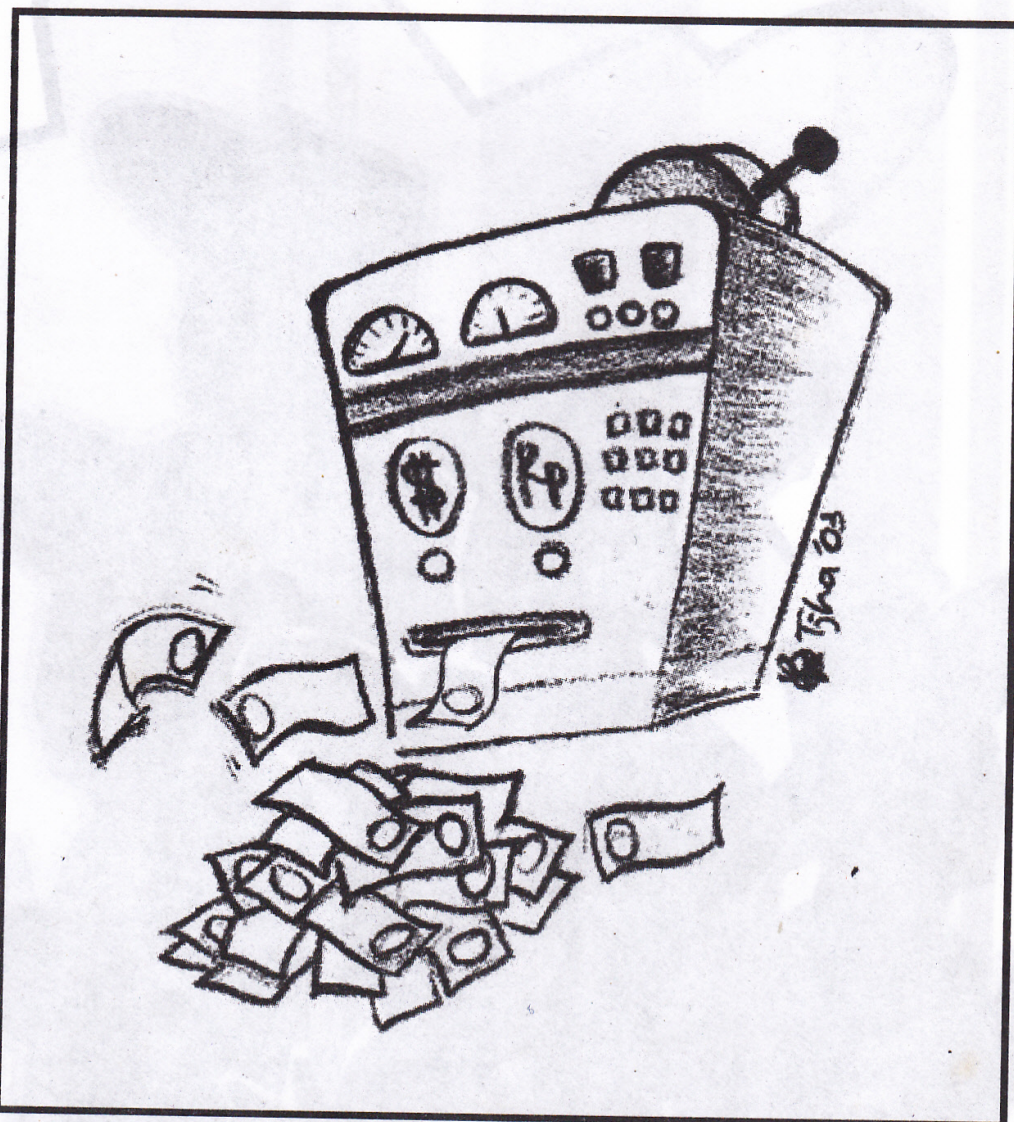
Asa.Balairung

MENCARI RAKYAT DALAM ILMU EKONOMI KITA

Sebuah Upaya Mendobrak Adagium "Size Does Matter"

hiet.balairung

PIET FITRIADY

Lahir, tumbuh, dan mendapatkan pendidikan dasar dan menengah di Karawang, Jawa Barat. Di tahun 2000, ia hijrah ke Yogya dan melanjutkan studinya di Jurusan IESP Fak. Ekonomi UGM. Aktif di Shariah Economics Forum (SEF) dan Jamaah Mahasiswa Muslim Ekonomi (JMME) UGM. Kini tinggal di PPM Daaru Hiraa Depok, Sleman.

Benarkah ada yang salah dengan ilmu dan pengajaran ekonomi kita selama ini? Bila menengok secara lebih seksama buku-buku teks ekonomi, memang akan kita dapati sejumlah kejanggalan yang mengusik. Jika ekonomi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kegiatan "rumah tangga" dalam usahanya memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas, maka mestinya unit masyarakat yang menjadi fokus studi ekonomi adalah unit yang relatif kecil. Namun dalam kenyataannya, didalam buku-buku teks ekonomi, sangat kentara sekali teropong pengamatannya lebih sering diarahkan kepada unit yang relatif lebih besar, yaitu negara. Anthony Giddens menjelaskan bahwa masyarakat modern merupakan produk dari perkembangan pervasif kapitalisme, industrialisasi, dan negara-bangsa. Negara bangsa sendiri muncul, ber-evolusi sekaligus ber-revolusi, dan dominan mewarnai perjalanan sejarah pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mungkin akar sejarah inilah yang menjadi latar belakang mengapa topik mengenai negara-bangsa begitu mendominasi perkembangan ilmu-ilmu sosial beberapa abad belakangan ini. Namun sangat disayangkan dominasi konsentrasi pada unit partikular—yang tidak benar-benar partikular—ini berakibat pada makin terpinggirkannya perhatian pada unit-unit yang jauh lebih partikular dan berskala lebih kecil, yakni rakyat, masyarakat, dan manusia. Padahal, rakyat senyatanya merupakan unit penyusun dari suatu negara-bangsa.

Sejarah, pengamatan, dan eksposisi-eksposisi dari aktivitas ekonomi manusia yang tercatat dan ditampilkan dalam buku-buku, jurnal, atau artikel ekonomi ternyata hanya berputar-putar pada satu fokus objek bernama negara.[1] Dalam pembahasan isu-isu ekonomi, terkecuali mikroekonomi tentunya, ketika berbicara tentang pendapatan, maka yang dimaksudkan adalah pendapatan negara. Begitu pula ketika dibicarakan mengenai produktivitas, konsumsi, stok uang beredar, tingkat akumulasi kapital, bahkan utang luar negeri, itu semuanya dinisbatkan kepada negara. Adapun rakyat nyaris sangat jarang sekali disinggung keberadaannya.

Alasan yang sering diungkapkan kenapa terjadi peluruhan unsur rakyat dalam peta ekonomi adalah hal ini tak lain merupakan upaya agregasi unit-unit ekonomi menjadi satu unit kesatuan ekonomi negara. Agregasi ini bertujuan agar lebih mudah dalam pengamatannya. Tapi bukankah proses agregasi ini tidak berarti penghilangan sama sekali unsur-unsur partikular penyusunnya? Tak heran banyak orang yang gelisah, mempertanyakan posisi rakyat dalam ilmu ekonomi?

Logika agregasi seperti disebutkan di atas juga mengandung suatu paradoks yang cukup menggelikan. Logika agregasi tersebut seringkali menghasilkan interpretasi yang memihak. Ketika berbicara mengenai tingkat investasi nasional ataupun ekspor komoditas nonmigas yang meningkat, maka prestasi tersebut dinisbatkan sebagai prestasi negara. Pahlawannya adalah negara, tak peduli bahwa angka tersebut tak lain adalah hasil agregasi jerih payah segenap komponen rakyat.

Sayangnya, bertolak belakang dengan logika di atas, ketika yang menjadi objek adalah angka kebocoran anggaran ataupun utang luar negeri Indonesia yang luar biasa kronis, maka dikatakan bahwa ini adalah "dosa bersama" atau "dosa nasional". Masyarakat pada umumnya sudah mengerti siapa pihak-pihak yang berjasa

dalam krisis. Mereka adalah elit, baik itu elit birokrat maupun elit konglomerat. Dengan logika paling sederhana sekalipun kita bisa tahu, pedagang kaki lima mana yang *ngemplang* utang dari lembaga-lembaga keuangan luar negeri. Dengan demikian, sebenarnya tak ada lagi celah untuk melemparkan dosa para penjahat kakap tadi sebagai sebuah "dosa agregatif".

Negara yang hakikatnya merupakan unit yang impersonal dan tunajiwa, secara salah telah dijadikan tema sentral dalam perbincangan ekonomi dan kajian sosial. Adapun manusia dan masyarakat yang jelas-jelas merupakan unit partikular yang hidup dan organis, malah mulai perlahan-lahan hilang dari peta pengamatan. Dilema inilah yang mestinya kita khawatirkan bersama-sama, yakni kemungkinan terjadinya bencana "kematian manusia" (yang kerap diungkapkan sebagai "kematian subjek") sebagaimana pernah didedah Michel Foucault.

Bencana kemanusiaan ini merujuk pada kematian konsep tertentu tentang manusia yang diberlakukan oleh tradisi humanis, dimana mestinya "manusia adalah ukuran dari segala sesuatu"—sebagaimana diwasiatkan oleh Protagoras.[2] Ternyata utopia ini mulai menjauhi realitanya. Ataukah mungkin bencana ini kongruen dengan dugaan Foucault mengenai konsep manusia, bahwa "Manusia adalah suatu temuan baru ... tetapi cepat sekali tua", dan "... mungkin sedang mendekati kematian".[3]

Bencana dehumanisasi ini menimpa hampir semua disiplin ilmu sosial. Ilmu sosiologi contohnya, yang jelas-jelas merupakan ilmu sosial yang objek studinya adalah masyarakat, demikian juga dengan antropologi yang dinisbatkan sebagai ilmu tentang manusia, tak berbeda jauh dengan ilmu ekonomi. Ilmu-ilmu tersebut kini telah jauh melupakan manusia dan hakikat kemanusiaan, dan malah menjelma menjadi disiplin-disiplin ilmu yang demikian positivistik, mekanistik, dan deterministik.

Dalam masalah krisis epitemologis ini, kita bisa menunjuk pada realita munculnya istilah-istilah fisika sosial, ekonofisika dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu sosial bergerak menuju menyerupai ilmu-ilmu eksakta. Kondisi ini berimplikasi terhadap semakin kurangnya *concern* ilmuwan-ilmuwan sosial terhadap isu dan problem kemanusiaan, apalagi usaha-usaha pencarian solusinya.

Ilmu ekonomi, sebagaimana ilmu-ilmu sosial lain, mestinya kembali kepada *khittah*-nya semula, yaitu menjadikan manusia sebagai pusat (*centrum*). Para ilmuwan sosial berkewajiban mendudukkan kembali disiplin ilmu mereka kepada fungsi asalnya, yaitu memberikan gambaran, prediksi, sekaligus alternatif solusi bagi masyarakat dalam mengatasi problem kemanusiaan. Namun patut dicatat, bahwasannya ajakan untuk kembali kepada humanisasi ilmu sosial ini tidak berarti tidak meninggalkan kecurigaan-kecurigaan sama sekali.

Diantara problem sosial kemanusiaan yang dihadapi umat manusia diantaranya adalah masalah kemiskinan, kesenjangan, dan pengangguran. Masalah-masalah tadi sedikit banyak jadi topik khusus dalam ekonomi pembangunan, yaitu topik mengenai sektor ekonomi informal. Pembahasan-pembahasan kita selanjutnya akan terdispersi sekitar isu mengenai sektor informal ini.

Para pakar ekonomi pembangunan lazimnya merunut keberadaan sektor informal dari latar belakang perekonomian yang dualistis. J.H. Boeke, yang pertama kali mengenalkan istilah ini, mendefinisikan dualisme sebagai "Bentroknya sistem sosial yang diimpor dengan sistem sosial asli yang jenisnya berbeda".[4] Bila mengikuti definisi ini, maka dalam masyarakat dualistis terdapat koeksistensi dua tipe masyarakat ekonomi, yaitu masyarakat kapitalistik yang maju, dan masyarakat prakapitalistik yang tertinggal (*underdeveloped*). Keduanya hadir secara bersamaan.

Dualisme yang demikian bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara-negara lain. Boeke menolak anggapan bahwa sumber masalah dualisme adalah akibat kolonialisme. Ia menilai penyebabnya adalah kapitalisme. Oleh karena itu, J.H. Boeke menolak dikotomi sosial antara pribumi-lokal dengan penjajah-asing dan tidak menyalahkan distorsi akibat penjajahan yang berkepanjangan. Ia lebih cenderung untuk menggunakan istilah masyarakat kapitalistik dan prakapitalistik.[5]

Mudah bagi kita untuk mengalamatkan kecurigaan kepada Boeke atas penyangkalannya terhadap akibat buruk penjajahan sebagai penyebab ketertinggalan ekonomi. Meskipun demikian, tetap tak bisa dimungkiri bahwasannya dualisme ekonomi memang benar-benar ada dalam masyarakat Indonesia. Dualisme itu sendiri merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah urbanisasi penduduk desa ke kota.

Berdasarkan analisis W. Arthur Lewis, dalam negara-negara sedang berkembang (NSB) tidak tersedia permintaan tenaga kerja yang sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Hatta, pada tingkat upah menjadi subsisten. Menurut Lewis, ini terjadi karena adanya *unlimited supply of labour* (Penawaran tenaga kerja tak terbatas—pen.). Penawaran tersebut akan terus terjadi selama penawaran tenaga kerja pada tingkat upah tertentu masih melebihi permintaannya. Kondisi ini cocok dengan kondisi negara-negara sedang berkembang, karena di sana banyak ditemui sektor-sektor ekonomi yang produktivitas

marginalnya nol, atau bahkan negatif, seperti sektor pertanian tradisional.[6]

Semenjak sektor ekonomi tradisional menumpuk di perdesaan dan sektor ekonomi modern terkonsentrasi di perkotaan, maka pekerjaan di kota dianggap lebih menarik. Kondisi inilah yang menjadi faktor penyebab mengalirnya penduduk usia produktif dari desa ke kota. Bekerja di sektor pertanian yang produktivitas marginalnya rendah sudah tidak menggiurkan lagi dari segi upah. Kondisi inilah yang dikenal sebagai *push factor* (faktor pendorong) urbanisasi. Sebaliknya, kenyataan sektor-sektor usaha modern di perkotaan menjanjikan penghasilan yang lebih baik dibanding dengan di desa ini menjadi *pull-factor* (faktor penarik) urbanisasi.

Kian derasnya mobilitas penduduk menuju kota—yang kebanyakan adalah tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih (*unskilled labour*)—di satu sisi, dan ketersediaan kesempatan kerja yang minim di sisi lain, mengakibatkan meningkatkannya jumlah pengangguran di kota-kota besar. Efeknya menjadi berantai. Pengangguran kemudian menjadi pemicu membuncahnya kemiskinan dan angka kriminalitas. Sedangkan kaburnya angkatan kerja produktif dari desa, mengakibatkan stagnasi dan bahkan involusi sektor pertanian di desa. Tak heran jika sektor pertanian terus-menerus mengerdil dan tertinggal dibanding sektor-sektor lainnya.

Untuk mengatasi masalah pengangguran, ada sebagian kalangan yang menyarankan untuk menambah sektor modern di kota secara terus-menerus, dengan maksud memperluas permintaan tenaga kerja. Alih-alih mengatasi pengangguran, upaya ini malah makin memperparah kondisi. Urbanisasi terus melonjak dan ketersediaan lapangan kerja tetap minim. Lantas, bila kebijakan semacam itu hanya menghasilkan paradoks, alternatif apa yang bisa diupayakan untuk mengatasi masalah pengangguran dan urbanisasi secara sekaligus? Salah satu jalan keluar paling realistis adalah pemberdayaan dan pengembangan sektor informal.

Sektor informal menurut *rule of thumb*-nya, tak lain adalah negasi dari sektor formal. Dikotomi formal-informal diperkenalkan lebih untuk menunjukkan bahwa dikotomi ini berbeda dengan dikotomi modern-tradisional.

Ini Adalah Masalah Ukuran

Sektor informal menurut *rule of thumb*-nya, tak lain adalah negasi dari sektor formal. Dikotomi formal-informal diperkenalkan lebih untuk menunjukkan bahwa dikotomi ini berbeda dengan dikotomi modern-tradisional. Mengapa bisa demikian? Karena sebenarnya kedua sektor tersebut adalah modern dan keduanya adalah konsekuensi dari urbanisasi. Dikotomi ini lebih merupakan usaha diferensiasi dari aspek skala usahanya, yang satu adalah *berskala-besar* sedang lainnya adalah *berskala kecil*.[7]

Meskipun kedua sektor tadi dipandang sama-sama modern dan rasional, namun tetap menyimpan satu dilema yang kronis. Dilema itu adalah masih tidak imbang dan diskriminatifnya perlakuan terhadap dua sektor ini. Sektor formal terus dianggap sebagai anak emas perekonomian, sementara sektor informal makin menjadi anak tiri.

Dalam publikasinya tahun 1972, ILO (International Labour Organization) mendefinisikan aktivitas ekonomi informal sebagai cara menjalankan usaha yang dikarakteristiki oleh (1) Entri yang mudah (2) Ketergantungan kepada sumber daya lokal (3) Kepemilikan usaha oleh keluarga (4) Skala usaha kecil (5) Padat karya dan penggunaan teknologi adaptif (6) Skill yang dibutuhkan itu Diperoleh dari luar sistem sekolah formal dan
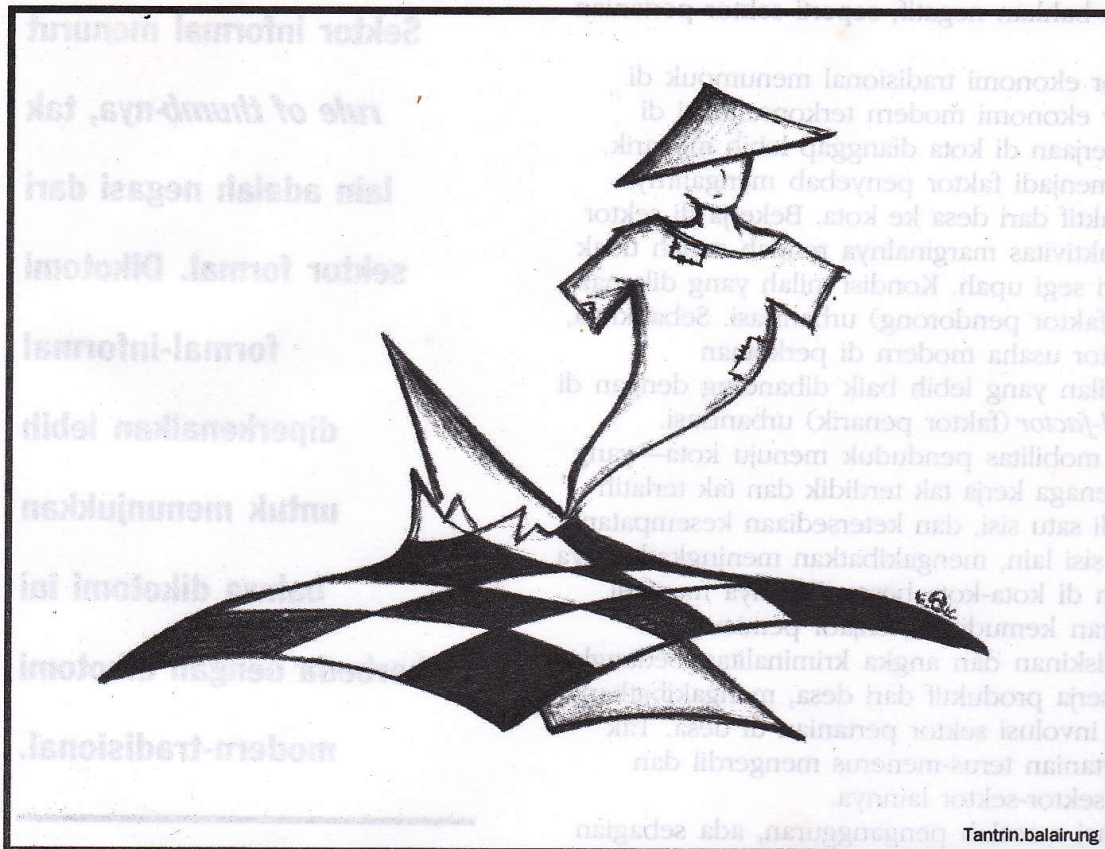
Tantrin.balairung

(7) Pasar yang kompetitif sekaligus tak diregulasi. Adapun sektor formal merupakan kebalikan dari karakteristik-karakteristik tadi, dan tentunya lebih mendapat sokongan dari pemerintah.

Kalau memang kedua sektor itu dipandang mampu menjadi motor perekonomian, lantas mengapa sektor informal terus dianak tirikan? Ada banyak alasan yang melatarinya, dan kesemuanya—tentu saja—didominasi oleh alasan-alasan ekonomis. Membesarkan sektor ekonomi formal yang rata-rata kakap dan besar tentu lebih menjanjikan kontribusi pertumbuhan yang signifikan, di samping tentu lebih menghemat energi daripada *ngemong* sektor informal yang sejak semula teri dan kerdil.

Tampaknya dilema ini akan terus berlanjut selama pemikiran-pemikiran dari tradisi neoliberalisme terus berekspansi dan berurat akar di antara pakar ekonomi kita. Mereka akan senantiasa teguh mempertahankan jargon-jargon liberalisasi—yang sebenarnya telah usang tersebut, semata-mata demi mengagung-agungkan apa yang disebut sebagai rasionalitas ekonomi.

Salah satu alasan mengapa sektor informal jarang sekali menjadi fokus perhatian pembangunan adalah karena kontribusi produksi barang dan jasa sektor ini banyak yang tidak disalurkan melalui pasar. Aktivitas ekonomi yang tidak melalui pasar ini dikenal sebagai *underground economies*. Karena tidak melalui pasar, maka aktivitas-aktivitas ekonomi tersebut tidak tercatat dalam penghitungan *Gross Domestic Product* (GDP), karena GDP hanya mencatat transaksi-transaksi ekonomi melalui pasar.[8]

Ketidak tercatatan sektor informal ini membuat ia dipandang tak perlu dikembangkan, sebab signifikansinya dalam meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi tak terukur. Dan saran seperti itulah yang sering dilontarkan oleh para *development planners* di negara-negara sedang berkembang. Ini adalah salah satu dosa terbesar para perencana pembangunan. Mereka terlalu menyibukkan diri mengupayakan semata-mata memperbagus angka pendapatan nasional tanpa memperhatikan secara mendalam permasalahan-permasalahan riil ekonomi dalam realitas objektifnya.[9]

Alasan klasik yang juga kerap dijadikan justifikasi bagi perlakuan

diskriminatif terhadap sektor ekonomi berskala-kecil adalah masalah *economic value added* (EVA, nilai tambah ekonomis). Sektor-sektor kecil dan rumah tangga, meskipun umumnya padat karya (*labour-intensive*), namun memberikan EVA yang relatif rendah. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan industri raksasa yang mayoritas padat modal (*capital intensive*), memberikan EVA yang jauh lebih besar. Menggunakan metode penghitungan pendapatan nasional manapun, sektor-sektor usaha besar akan memberikan *share* yang sangat signifikan terhadap GDP satu negara. Berbeda halnya dengan usaha kecil. Jangankan memberikan kontribusi yang besar, bisa tercatat dan terhitung pun sudah menjadi prestasi tersendiri. Sebagai contoh, di tahun 1996 diketahui sekitar 94 persen dari total *value added* sektor manufaktur itu tercatat berasal dari perusahaan-perusahaan berskala medium dan tentu saja, raksasa.[10]

Maka, menjadi sangat tidak mengherankan bila seorang Robert C. Rice, seorang Indonesianis asal negeri Kanguru, dengan penuh percaya diri pernah mengatakan bahwa meskipun banyak berjasa dalam memperparah krisis utang luar negeri Indonesia, perusahaan-perusahaan besar itu harus tetap dipelihara. Adapun usaha-usaha kecil dan menengah (UKM) diperuntukkan terutama sebagai penyedia lapangan kerja alternatif belaka. Aha!?[11]

Ada beberapa alasan lain mengapa sektor kelas kakap terus digemukkan sedangkan sektor ekonomi kelas teri dibiarkan terus mengerdil. Pertimbangannya memang semata-mata strategis ekonomis. Bila perusahaan-perusahaan besar dimanjakan oleh negara, penerimaan mereka akan terbantu untuk meningkat. Jika sudah demikian, pajak yang diterima pemerintahpun semakin besar. Pada titik ini, usaha berskala raksasa bisa dianggap sebagai sapi perah pemerintah dalam usaha menggenjot penerimaan pajak (*tax revenue*).

Berbeda kasusnya dengan sektor ekonomi kecil. Mengingat nilai tambah ekonomis produksinya yang relatif rendah, maka rendah pula tingkat penerimaan pajak yang bisa dikumpulkan pemerintah. Karenanya, menyokong dan memberdayakan UKM hanya akan semakin membebani anggaran belanja negara.

Menengok kesalahan-kesalahan esensial di masa lalu tersebut, mestinya kita bisa mengambil pelajaran dan mengupayakan perubahan-perubahan paradigmatik berkaitan dengan pemikiran ekonomi. Kini sudah bukan masanya lagi memandang sektor ekonomi informal sebagai "orang kedua" dalam menggerakkan perekonomian. Sebaliknya, bentuk-bentuk usaha sektor informal merupakan suatu bentuk *counter sub-culture* alternatif yang perlu terus diberdayakan.

Pemberdayaan secara umum merujuk kepada ekspansi kebebasan tiap orang untuk memilih dan bertindak membentuk hidup masing-masing. Pemberdayaan yang dimaksudkan di sini adalah yang benar-benar melengkapi si rakyat dengan kapabilitas-kapabilitas efektif yang dapat membebaskan dirinya dari pengurangan hak-hak dasar (*deprivation*), seperti kelaparan, malnutrisi, ataupun kematian usia dini. Dalam tataran yang lebih praktis, pemberdayaan mengandung pengertian memihak (*targetting*), mempersiapkan (*enabling*), melindungi (*protecting*) pihak yang lemah, dan mencegah keadaan persaingan yang tidak seimbang.[12]

Pendekatan pemberdayaan (*empowerment*) ini selaras dengan pandangan humanistik mengenai pembangunan yang dilontarkan oleh Amartya Sen. Sen menginginkan pembangunan itu mestinya menjadi proses yang benar-benar memperluas *entitlements* dan *capabilities* masyarakat.[13] Pendekatan pemberdayaan juga sejalan dengan konsep pembangunan yang berpusat pada manusia (*People-centered development*). Konsep pembangunan ini berupaya menaruh masyarakat pada urutan pertama, atau *putting people first*, sekaligus sumber utama pembangunan.[14]

Namun pertanyaan mendasar masih mengikuti perkembangan strategi pemberdayaan ini, yaitu apakah strategi ini mampu meng-*upgrade* sektor ekonomi informal menjadi lebih *powerful* dan kokoh. Ganjalan ini juga menimpa konsep ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan yang pada mulanya memang didefinisikan sebagai perekonomian yang melibatkan dan meletakkan rakyat semesta sebagai penyelenggara, dan hasil-hasil yang diperoleh benar-benar dipersembahkan untuk rakyat, toh akhirnya konsep ini tetap dicurigai sebagai hanya sebuah keberpihakan semu.[15]

Mengapa pandangan-pandangan pesimistis semacam itu masih meliputi dua strategi diatas? Sebabnya, tak dapat dimungkiri, sektor informal yang ingin dirangkul itu sendiripun masih menyimpan problem-problem inherennya. Jangan-jangan, harapan besar terhadap sektor informal ini tak akan bisa menjadi optimisme yang realistis!?

Sektor informal memang masih menghadapi problem-problem yang tidak hanya datang dari luar dirinya, namun juga berasal dari dalam. Salah satu masalah krusial yang dihadapi sektor informal adalah betapa sulitnya menemukan jalinan simpul keterhubungan antara bentuk-bentuk aktivitas kerja di sektor informal dengan materi pembelajaran di sekolah-sekolah konvensional. Pembelajaran di sekolah-sekolah

lebih menitikberatkan bagaimana mencapai suatu superioritas intelektualisme akademik. Sedangkan yang dibutuhkan oleh aktivitas sektor informal adalah terutama didominasi oleh skill praktis yang sedikit sekali butuh sofistikasi teori-teori ilmiah.

Oleh karenanya, bila kita menginginkan adanya *link and match* antara sistem pendidikan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi informal, maka orang-orang mestinya lebih memfokuskan perhatiannya kepada sekolah kejuruan. Karena dengan sekolah kejuruan, kita membekali generasi muda dengan keterampilan-keterampilan teknis praktis yang aplikatif. Sekolah kejuruan membantu kita memahami makna ilmu yang tepat guna, dan apa yang dapat dicapai dengan ilmu di dalam praktik. Dan ini selaras dengan wasiat seorang *founding father* kita, Mohammad Hatta.[16] Tak lupa sistem pendidikan juga diharapkan membekali anak didik dengan semangat *entrepreneurship*. Karena hanya seorang entrepreneur yang dinamislah yang mampu mendayagunakan potensinya secara optimal.

Satu diantara dinding penghalang bagi perkembangan sektor informal adalah begitu kuatnya penguasaan pasar oleh perusahaan-perusahaan berskala besar. Para pedagang pakaian dan cinderamata di pinggir-pinggir jalan di kota besar, tentu akan mengalami kesulitan untuk dapat bersaing dengan *Department Store* yang mapan dan memiliki jaringan luas. Para pengusaha rumah tangga kerajinan tangan juga mesti menghadapi persaingan dengan galeri-galeri besar yang tidak hanya menawarkan produk yang kompetitif, tetapi juga memiliki celah pemasaran yang lebih lebar.

Makanya, tak mengherankan ketika kita mendapati bahwa struktur beberapa sayap industri di negara kita, masih dikuasai segelintir perusahaan manufaktur terkemuka saja. Dan celakanya, dominasi pasar ini seringkali dibarengi oleh monopoli, sejak hulu sampai ke hilirnya. Padahal, bila kita menengok Jepang, misalnya, hatta perusahaan otomotif raksasa sebesar Honda pun masih memberikan kesempatan kemitraan kepada perusahaan kecil dan menengah untuk memasok komponen-komponen dan suku cadangnya.

Berbicara soal keterkaitan (*linkages*) antarsektor dalam perekonomian, khususnya dalam bidang manufaktur, sebenarnya kita dapat memandang persoalan ini sebagai upaya mensinergikan proses produksi. Sektor informal yang banyak berkecimpung dalam produksi barang primer, serta sektor formal yang tersebar dalam tiap lini pengolahan produk, tentunya mesti secara aktif mencari celah menuju kemitraan yang positif. Pola kemitraan yang dibangun bisa berupa pola kemitraan langsung maupun tidak langsung. Sedangkan keterkaitan itu sendiri bisa berupa *backward linkage* maupun *forward linkage*.[17]

Namun, di sini mesti digarisbawahi mengenai aturan main yang lebih menekankan pada keadilan. Jangan sampai, hubungan kemitraan ini menjadi tak lebih sebagai cara usaha-usaha berskala besar untuk mengeksploitasi UKM. Di sini kita menghadapi masalah *degree of dependence* (tingkat ketergantungan). Sektor informal, sebagai anak angkat, tentu sangat bertumpu pada bapak angkatnya (baca: pengusaha besar) yang akan menampung hasil produksinya (dalam kasus *forward linkage*). Tetapi sebaliknya, sang bapak angkat sudah barang tentu tak memiliki ketergantungan yang sedemikian besar kepada pasokan input dari anak angkatnya (sekali lagi dalam kasus *forward linkage*). Mengapa? Karena sebuah perusahaan besar tentu memiliki fleksibilitas dan keleluasaan dalam mendapatkan sumber inputnya, dan tidak tergantung pada satu sumber saja. Perbedaan tingkat ketergantungan ini pulalah yang menjadi pemicu munculnya masalah ketidakadilan.

Pandangan-Pandangan Positif

Akan tetapi, cerita mengenai sektor informal tentu saja tidak hitam semuanya. Sektor informal masih dapat dipandang sebagai alternatif bagi bangsa Indonesia dalam mengatasi masalah pengangguran, sekaligus sebagai salah satu *entry point* menuju kebangkitan ekonomi dan lepas dari krisis. Mengapa? Karena sektor informal menawarkan dua keunggulan yang tak dimiliki usaha-usaha berskala besar. Dua hal tersebut adalah daya tahan (*endurance*) yang luar biasa dalam menghadapi globalisasi, serta kepadat-karyanya dalam menampung tenaga kerja bebas dan pengangguran-pengangguran korban PHK.

Dikala perusahaan-perusahaan besar milik para konglomerat rontok satu per satu di akhir 1990-an, usaha-usaha kecil informal justru memperlihatkan ketangguhannya. Kerontokan perusahaan-perusahaan besar ini bisa dimaklumi. Selama ini mereka terbiasa dimanjakan dengan privilese insentif-insentif. Akibatnya, meruahlah budaya inefisiensi, *rent-seeking*, dan KKN. Bersama dengan BUMN, perusahaan-perusahaan ini menjadi biang dari ekonomi biaya tinggi di Indonesia. Ditambah lagi dengan ketergantungan pada pinjaman luar negeri, yang dalam perkembangannya tidak lagi menjadi unsur aditif, melainkan "adiktif". Kondisi ini tentu menjadi bencana ketika depresiasi rupiah sampai 600% menghantam sekira 6 tahun lampau. Akibatnya, nilai riil utang luar negeri naik beberapa kali lipat.

Berbeda halnya dengan usaha-usaha kecil. Mereka terbiasa ditempa oleh kondisi tiadanya sokongan fasilitas (bahkan malah dirazia,

dibongkar, digusur, dan bentuk-bentuk represi lainnya), sehingga tumbuh menjadi subekonomi yang tangguh dan tahan banting. Mereka juga tidak tergantung pada penanaman modal asing serta tak menghadapi risiko perubahan nilai tukar mata uang. Impaknya, tentu saja ketahanannya relatif lebih tangguh. Tak heran, usaha kecil dan menengah nyaris tak terpengaruh oleh ekses negatif krisis.

Kondisi berlebihnya penawaran tenaga kerja di perkotaan, selain berakibat pada munculnya pengangguran, juga berakibat pada semakin ketatnya seleksi penerimaan pegawai baru. Kondisi ini berakibat dijadikannya riwayat pendidikan formal sebagai prasyarat mendapatkan pekerjaan.[18] Jika sudah demikian, maka para pencari kerja yang berpendidikan mungkin mendapatkan peruntungan. Lantas bagaimana dengan pencari kerja yang tak berpendidikan memadai? Mereka akan tersingkir dan mesti mencari alternatif mata pencarian lain. Berwirausaha atau bekerja di sektor informal bisa menjadi alternatif bagi angkatan kerja jenis ini. Mengapa? Karena sektor informal cuma menuntut keterampilan tertentu saja dan tidak menuntut persyaratan ijasah sekolah. Jadi, sektor informal sangat efektif untuk menampung para pengangguran di perkotaan.

Masih ada satu lagi topik yang menarik berkait dengan sektor informal, yakni isu mengenai globalisasi. Pertanyaan yang umum dikemukakan adalah di mana posisi dan peran sektor informal di tengah-tengah konstelasi dunia pasca globalisasi?

Globalisasi dipandang sebagai gelombang besar yang secara agresif merombak tatanan geopolitik konvensional. Globalisasi mengakibatkan semakin meredupnya negara-bangsa dan membawa angin denasionalisasi. Sekarang sudah tak relevan lagi berbicara tentang nasionalisme-ekonomi, karena kini bangsa-bangsa sedang giat melakukan integrasi, bergerak menuju apa yang disebut Kenichi Ohmae sebagai negara-kawasan (*Region-state*).[19]

Ironisnya, seiring dengan lahirnya regionalisme baru, globalisasi malah makin menguatkan lokalitas. Sehingga wajarlah bila Roland Robertson menegaskan bahwa globalisasi itu sekaligus juga lokalisasi. Dari sini ia memperkenalkan istilah glokalisasi.[20] Akhirnya, bila kita bicara soal penguatan lokalitas, maka kita bisa bicara tentang isu sektor informal sebagai sebuah kearifan lokal.

Untuk bisa meresapi topik sektor informal sebagai sebuah kearifan lokal, kita bisa menunjuk fenomena angkringan di Yogya sebagai sebuah contoh. Angkringan yang merupakan tempat transaksi ekonomi mini, pun bisa sekaligus menjadi wahana terjadinya kontak sosial yang intim. Di sepanjang bangku-bangku angkringan, dalam heningnya malam, orang-orang dapat bercengkerama, berinteraksi membincangkan berbagai tema kehidupan secara hangat dan terbuka. Dari interaksi yang intim inilah sebenarnya sistem nilai lokal tersebut terus dipupuk. Di angkringan inilah masyarakat Yogya dapat menebalkan identitasnya sebagai warga nusantara yang kental dengan nilai-nilai solidaritas.

Nilai-nilai lokal seperti disebutkan di atas mampu menjadi benteng sekaligus amunisi dalam menghadapi ekses-ekses negatif globalisasi. Karena hanya dengan komitmen terhadap sistem nilai fundamental itulah, sebenarnya, kita bisa menyelamatkan masyarakat dari modernitas yang tak lagi memiliki sesuatu yang sakral. Sebagaimana dikatakan oleh Anthony Giddens, "Tidak seorang pun dari kita dapat menemukan makna dalam hidupnya jika tidak mempunyai sesuatu yang bernilai untuk diperjuangkan mati-matian."[21]

Terakhir, dan ini yang paling penting, dapatkah sektor informal melepaskan diri dari kungkungan "darwinisme sosial" yang masih mendominasi perekonomian kita? Pandangan mayoritas bersikukuh bahwasannya dalam iklim kompetisi yang makin keras hanya pihak-pihak yang kuat dan besar sajalah yang bisa menang dan bertahan. Adapun sektor informal, yang notabene adalah sektor ekonomi kecil dan lemah, hanya akan menjadi figuran dan pecundang dalam pergumulan yang keras. Adagium yang konsisten dipegang oleh para darwinis sosial tersebut adalah "Size does matter".[22] Untuk dapat mendobrak dominasi paradigma ini, sektor informal harus sungguh-sungguh bekerja keras menunjukkan bahwa mereka mampu berbuat sesuatu.

Kalau memang yang menjadi proyek kita adalah humanisasi ilmu ekonomi dan pembersihan dari kecenderungan bias kepada elit, maka perubahan paradigmatik yang mesti diupayakan adalah menanamkan persepsi bahwa—demi keadilan—keberpihakan kepada yang kecil dan marjinal harus menjadi fokus sikap. Namun, meskipun begitu, tampaknya proyek ini berhadapan dengan dinding kokoh pemikiran-pemikiran darwinis yang masih mendominasi. Jadi, meskipun E.F. Schumacher pernah mengatakan bahwa *small is beautiful*,[23] akan tetapi para penggemar film Godzilla akan dengan mudah bisa menjawab, tapi 'kan *size does matter* (ukuran itu *ngaruh cing*!). Tapi, benarkah demikian?

CATATAN AKHIR

1 Negara dikarakteristikkan oleh suatu kesatuan perangkat administratif atas wilayah tertentu.
2 Jostein Gaarder, Dunia Sophie, 2002, hlm. 81.
3 Sebagaimana dikutip Stuart Sims di Derrida dan Akhir Sejarah, 2002, hlm.12 dari Michel Foucault, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences, 1970, hlm. 387.
4 Mudrajad Kuncoro, Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan, 2000, hlm.155 dari J.H. Boeke, Economics and Economic Policies of Dual Society, 1953, hlm. 2.
5 Lihat Mudrajad Kuncoro, op. cit, hlm. 156.
6 Lihat W. Arthur Lewis, 1954, Economic Development with Unlimited Supplies of Labor , dalam Gerald M. Meier, editor, Leading Issues in Economic Development, 2000, hlm.297.
7 ILO Mission, Employment, Incomes, and Equality: A Strategy forIncreasing Productive Employment in Kenya, dalam G.M. Meier, editor, op. cit, hlm. 313.
8 Mudrajad Kuncoro, op. cit hlm. 23.
9 Mahbub Ul Haq, Tirai Kemiskinan, 1995, hlm.25.
10 Makalah diskusi Robert C. Rice, Indonesia and The Economic Crisis (2002), tidak diterbitkan.
11 Ibid
12 Sri Edi Swasono (1998) dan Ginandjar Karta-sasmita (1996) dalam Gunawan Sumodiningrat,
Agenda Pemulihan Ekonomi, Mewujudkan KesejahteraanRakyat Melalui Pemberdayaan dan Otonomi Daerah, 1999, hlm. 29.
13 Amartya K. Sen, A Sociological Approach to the Measurement of Poverty: A Reply to Professor Peter Townsend , dalam G.M. Meier, editor,
op. cit, hlm. 30.
14 David C. Korten (1981) dalam Moeljarto Tjokrowinoto, Politik Pembangunan, Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi, 1995, hlm. 25.
15 Saiful Arif, Menolak Pembangunanisme,
2000, hlm. 259.
16 Lihat Sindhunata, Pendidikan Meningkatkan Ketidakadilan , BASIS, no. 07-08, 2002, hlm. 3.
17 Backward linkage adalah keterkaitan satu industri dengan industri lain penyedia input, sedangkan forward linkage adalah keterkaitan dengan industri lain yang mengolah lebih lanjut output industri.
18 Lihat Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, 2000, hlm. 367-368.
19 Kenichi Ohmae, Hancurnya Negara Bangsa, 2002, bab 7.
20 Lihat Sindhunata, Dilema Globalisasi ,
BASIS, no. 01-02, 2003, hlm. 8.
21 Anthony Giddens, Runaway World, Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 48.
22 Bagi Anda yang pernah menonton atau melihat resensinya film Godzila tentu mengenal adagium ini.
23 Small is Beautiful sendiri adalah judul buku E.F. Schumacher yang dipublikasikan tahun 1973.

kalo akur gini kan asyik...
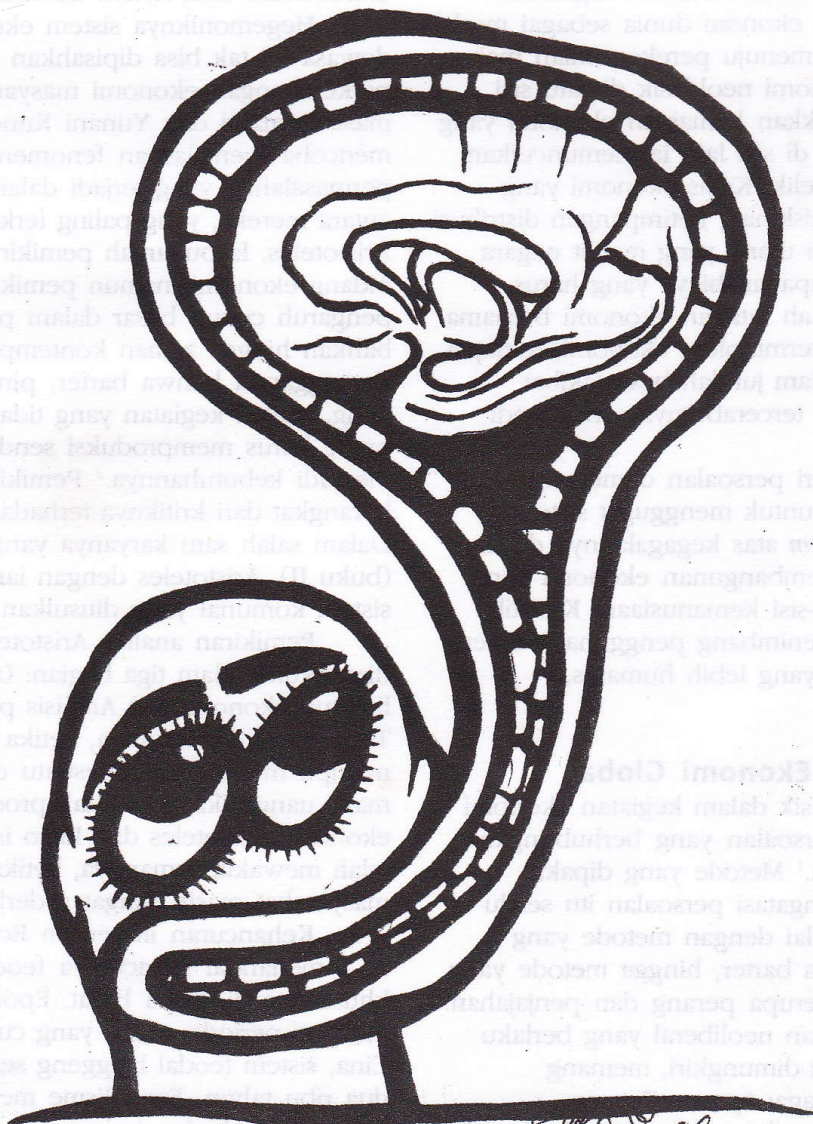
ARIEF RAHMAN HAKIM
Koordinator Front Mahasiswa Nasional Komite Kampus UGM, Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu ekonomi dan Studi Pembangunan angkatan 2001. lahir dan besar di Klaten Semasa pelajar aktif di Dewan Pelajar Klaten dan Gerakan Pramuka.

Ketika krisis ekonomi melanda Asia tahun 1997, sebuah mitos telah terbantahkan. Mitos dalam arus besar pemikiran ekonomi neoklasik yang disebut dengan *New Industrialising Countries* (*NICs*) itu digembar-gemborkan banyak ekonom dunia sebagai model paling ideal untuk menuju perekonomian maju.

Mazhab ekonomi neoklasik di satu sisi memang menampakkan kemajuan ekonomi yang luar biasa. Namun, di sisi lain ia memunculkan kegelisahan yang pelik. Krisis ekonomi yang terjadi, berikut kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, beserta utang yang melilit negara Dunia Ketiga, merupakan biaya yang harus dibayar untuk sebuah tatanan ekonomi bernama globalisasi. Dalam terminologi ekonomi, terdapat *opportunity cost* dalam jumlah besar akibat tatanan ini, berupa tercerabutnya sendi-sendi humanisme.

Berangkat dari persoalan demikian, sudah cukuplah bagi kita untuk menggugat sistem ekonomi *mainstream* atas kegagalannya dalam mengedepankan pembangunan ekonomi yang mengutamakan sisi-sisi kemanusiaan. Kini tiba waktunya untuk menimbang penggunaan sistem ekonomi alternatif yang lebih humanis, *humanomics*.

Evolusi Sistem Ekonomi Global

Persoalan klasik dalam kegiatan ekonomi manusia adalah persoalan yang berhubungan dengan kelangkaan.[1] Metode yang dipakai manusia untuk mengatasi persoalan itu selalu berkembang. Dimulai dengan metode yang sederhana semacam barter, hingga metode yang sangat barbarian berupa perang dan penjajahan. Sistem perekonomian neoliberal yang berlaku sekarang, tak dapat dimungkiri, memang menunjukkan berbagai "prestasi" yang menakjubkan. Antara lain munculnya berbagai macam perusahaan transnasional yang begitu besar, baik dari kekuatan modal maupun kapasitas produksinya. Perkembangan perkakas analisis dalam kegiatan ekonomi juga semakin menunjukkan kompleksitasnya, di samping semakin kompleks pula permasalahan yang ditimbulkan oleh sistem tersebut.

Hegemoniknya sistem ekonomi neoliberal dewasa ini tak bisa dipisahkan dari sejarah perkembangan ekonomi masyarakat. Selama masa Romawi dan Yunani Kuno, para filosof mencoba menjelaskan fenomena berikut permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Di antara mereka, yang paling terkemuka adalah Aristoteles. Ia bukanlah pemikir pertama dalam bidang ekonomi, namun pemikirannya memiliki pengaruh cukup besar dalam paradigma ekonomi bahkan hingga zaman kontemporer. Aristoteles beranggapan bahwa barter, pinjam-meminjam uang, adalah kegiatan yang tidak produktif. Setiap orang harus memproduksi sendiri apa yang menjadi kebutuhannya.[2] Pemikiran Aristoteles berangkat dari kritiknya terhadap pemikiran Plato. Dalam salah satu karyanya yang berjudul *Politics* (buku II), Aristoteles dengan lantang menentang sistem komunal yang diusulkan oleh Plato.

Pemikiran analitis Aristoteles dapat dirangkum dalam tiga bagian: (a) Definisi ruang lingkup ekonomi; (b) Analisis pertukaran; dan (c) Teori uang. Menurutnya, ketika masyarakat tidak mampu mendapatkan sesuatu dengan uang, maka uang dikatakan tidak produktif.[3] Pemikiran ekonomi Aristoteles dan Plato ini sedikit banyak telah mewakili zamannya, ketika sistem ekonomi masyarakat masih sangat sederhana.

Kehancuran imperium Romawi pada abad ke-5 menandai munculnya feodalisme, khususnya di Eropa Barat. Epos dari feodalisme meliputi periode waktu yang cukup lama. Di Cina, sistem feodal langgeng selama kurang lebih dua ribu tahun. Feodalisme memberikan pengaruh terhadap hubungan produksi dalam masyarakat yang banyak dicirikan oleh kepemilikan pribadi atas kekayaan tanah yang

demikian besar oleh tuan-tuan feodal, dan semua perjanjian penggarapan pun ditentukan olehnya. Tuan feodal, kecuali pemilik dan penguasa tanah, adalah juga penguasa dan pengendali pemerintahan negara. Sifat ekonomi feodal ini masih bersifat alamiah. Tujuan produksinya adalah untuk keperluan sendiri, baik itu untuk dikonsumsi ataupun untuk ditukar dengan barang lain. Masa feodalisme berakhir seiring dengan berkembangnya hubungan produksi dan tuntutan perkembangan tenaga produktif masyarakat yang dipengaruhi oleh semakin meningkatnya lalu-lintas modal antarnegara.

Kemajuan sistem ekonomi global salah satunya ditandai oleh adanya kegiatan perdagangan yang bersifat global. Mekanisme perdagangan global pada awalnya masih menganut doktrin merkantilisme. Pemikiran dasar dari merkantilisme adalah negara harus diberi kewenangan lebih untuk memperoleh kekayaan nasional yang diwakili oleh emas dan perak. Sistem merkantilisme sangat menekankan peran negara lewat (a) Stimulus tingkat produksi barang yang akan diekspor untuk ditukarkan dengan emas (b) Pembatasan konsumsi domestik, baik itu terhadap komoditas ekspor maupun impor. Setiap negara yang menganut merkantilisme meyakini bahwa jika ia memiliki banyak emas, maka dimungkinkan pula baginya untuk menyewa tentara dan membeli peralatan tempur, yang kesemuanya bisa digunakan untuk mencari dan mengeksploitasi tanah jajahan. Paham merkantilisme sangat dipengaruhi oleh semangat zaman abad pertengahan, ketika bangsa-bangsa dibesarkan oleh peperangan dan penaklukan. Di bawah sistem merkantilisme, negara harus membangun koloni. Tujuannya ialah agar keberadaan sumber bahan mentah sebagai komoditas yang akan dijual ke pihak lain selalu terjamin.

Seiring dengan maraknya penaklukan terhadap negara-negara jajahan, embrio-embrio dari perusahaan multinasional pun mulai mengecambah. Pada awalnya mereka muncul dengan membonceng negara induknya untuk ikut mengambil kekayaan alam negara jajahan. Kekayaan atau sumber daya itu kemudian diolah di negeri asalnya untuk kemudian dipasarkan kembali ke negara-negara miskin. Dalam perjalanannya, kongsi-kongsi dagang tersebut semakin kuat, baik secara ekonomi maupun politik. Eksistensi modal yang kian menguat tersebut kemudian menghendaki liberalisasi. Ujung-ujungnya, kegiatan ekonominya ingin lepas sama sekali dari campur tangan negara.

Sistem perekonomian liberal muncul sebagai kritik atas sistem merkantilisme yang terlampau banyak memberi peran pada negara dalam mengelola kekayaan. Namun sebelum sampai pada tahap liberalisme, Revolusi Industri terlebih dahulu memberikan kontribusi atas mulai "sepinya" sistem merkantilisme pada sekitar pertengahan abad 18. Penemuan berbagai mesin mendorong tumbuhnya industri-industri di daratan Eropa, yang kemudian berkembang menjadi sebuah ideologi.

Neoliberalisme: Sebuah Hegemoni Baru

Ekonomi neoliberal, atau biasa dikenal sebagai ekonomi neoklasik, mampu menjadi sebuah kekuatan hegemoni yang massif terhadap paradigma ekonomi dunia. Setelah tumbangnya negeri-negeri komunis akibat gencarnya penetrasi modal, maka ideologi pasar menjadi pilihan, baik dilakukan secara sadar ataupun paksaan. Ekonomi neoliberal banyak merevisi bebagai kegagalan ekonomi liberal klasik yang diusung oleh Adam Smith dengan *laissez faire*-nya.

Kegagalan sistem ekonomi kapitalisme liberal terbukti pada saat terjadinya krisis dunia (*malaise*) tahun 1930, ketika negara-negara maju disibukkan oleh persaingan untuk memperebutkan tanah jajahan. Dari sinilah mulai ada pembaruan terhadap sistem perekonomian dunia yang dipelopori oleh J.M. Keynes. Keynes mengkritik kegagalan ekonomi liberal yang tidak menghendaki peran negara. Dalil dari teori liberalisme adalah penghapusan segala peran negara dalam segala kegiatan ekonomi. Di sinilah letak kesalahan para kampiun ekonomi liberal. Mereka tidak menyadari bahwa tak setiap permasalahan ekonomi bisa diselesaikan oleh mekanisme pasar. Dalam terminologi ekonomi, permasalahan tersebut dikenal sebagai *market failure.*

Kegagalan tersebut mendorong para ekonom neoliberal untuk memodifikasi peran dan posisi negara dalam kegiatan ekonomi. Negara pada intinya kemudian diletakkan sebagai instrumen belaka dalam membangun infrastruktur bagi kegiatan ekonomi yang lebih longgar dan terciptanya sistem pasar bebas. Artinya, kapitalisme menghendaki adanya liberalisasi terhadap sektor ekonomi yang kemudian diikuti dengan liberalisasi sektor-sektor lain.

Akar-akar Neoliberalisme

Kapitalisme telah memperlihatkan berbagai penyakitnya ketika ia masih menjadi orok. Saat itu industrialisasi sedang menjadi mode di Inggris, dan kapitalisme telah menyelimuti Inggris dengan asap pekat cerobong pabrik yang digerakkan oleh eksploitasi atas buruh. Azas *laissez faire* yang didengungkan oleh Adam Smith sejak 1776, dan *Declaration of Independence* yang ditulis pada tahun yang sama, telah menjadi semangat dalam membangun sebuah tatanan yang dilandasi

semangat liberalisme. Kapitalisme mengalami perkembangan pesat pada abad ke-19. Elbert V. Bowden (1981) menyebutnya sebagai *heydey of capitalism*, yang ditandai dengan tumbuh suburnya industri-industri manufaktur, yang pada kelanjutannya menjadi sebuah entitas ekonomi yang lebih bersifat *capital-intensive* daripada *labour-intensive.*

Ada beberapa hal yang mendorong munculnya neoliberalisme. *Pertama,* munculnya perusahaan-perusahaan multinasional (*multinational corporation*—MNC) dan transnasional (*transnational corporation*—TNC) sebagai lembaga-lembaga yang memiliki kekuatan modal besar, lebih besar dari kekayaan negara-negara Dunia Ketiga. Mereka adalah entitas yang memiliki kepentingan dari agenda utama neoliberalisme, antara lain liberalisasi ekonomi. Ini diterjemahkan sebagai penghapusan segala hambatan tarif dan non-tarif dalam perdagangan internasional, dan tuntutan penghentian semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara. MNC/TNC yang hampir semuanya berkantor di negara-negara maju ini banyak memanfaatkan fasilitas infrastruktur yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Namun tentu saja gerak mereka tidak dipandu oleh semangat nasionalisme, melainkan oleh logika modal yang dilekati oleh watak akumulatif, ekspansif, dan eksploitatif.

Faktor *kedua* adalah munculnya organisasi-organisasi internasional dengan posisi tawar yang kuat dalam memaksakan agenda-agenda neoliberalisme. Saat ini terdapat *triumvirat*—WTO (World Trade Organization), IMF (International Monetary Fund), dan World Bank—yang berlaku sebagai CEO dari proses globalisasi. Lembaga-lembaga tersebut bertugas menyiapkan infrastruktur dalam melancarkan agenda neoliberalisme melalui berbagai hal, antara lain berupa penerapan sanksi atas pelanggaran dalam perdagangan bebas (posisi ini dipegang oleh WTO). Sedangkan IMF dan World Bank, yang notabene adalah institusi keuangan, lebih banyak berperan sebagai penyokong yang memperkuat posisi WTO dalam memaksakan program-programnya. Ketiga organisasi tersebut dibesarkan oleh MNC/TNC dan negara-negara maju, yang dalam WTO dikenal dengan mekanisme *green room* yang sangat tertutup dan selektif dalam memilih anggotanya.

Kemudian, faktor *ketiga* adalah terjadinya lompatan yang jauh dalam perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, transportasi, dan informasi, yang juga dipelopori oleh negara-negara maju. Hal ini sangat mendukung proses ekspansi modal dan eksploitasi terhadap bahan mentah. Kondisi ini sangat sesuai dengan watak modal yang begitu *volatile* (rentan), sehingga membutuhkan efisiensi dalam mobilitasnya.

Tabel 1
Kekayaan yang Dikuasai Golongan Kaya dan Miskin
(Konteks Global, Dinyatakan dalam Persen)

Tahun	20% Terkaya	20% Termiskin	Income Ratio (Kaya : Miskin)
1960	70,2	2,3	30 : 1
1970	73,9	2,3	32 : 1
1980	76,3	1,7	45 : 1
1989	82,7	1,4	59 : 1

Sumber: United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report (1992).

Adit.balairung

Kegagalan-kegagalan Neoliberalisme

"Don't owe, no pay!" Slogan "Tolak utang baru, hapus utang lama!" dengan lantang diucapkan oleh Lidy Nacpil dari Jubilee South Filipina, ketika ia mengakhiri komentarnya dalam diskusi tentang "Dominasi Korporasi dan Krisis Sistem Keuangan Internasional" yang diadakan dalam rangka World Social Forum di PortoAllegre.[4] Slogan tersebut menjadi simbol perlawanan Dunia Ketiga terhadap Dunia Pertama atas mekanisme ketergantungan yang ditimbulkan lewat jerat utang. Sejak diratifikasinya kesepakatan tentang liberalisasi pasar dunia dalam konteks WTO, permasalahan timpangnya distribusi pendapatan antara negara maju dan negara berkembang semakin dalam.

Laporan dari UNDP tersebut cukup memberi bukti akan betapa timpangnya perekonomian dunia yang terdikotomi atas negara miskin dan negara maju. Di samping itu, negara-negara Dunia Ketiga juga harus menanggung beban utang yang amat besar. Mekanisme utang di negara-negara Dunia Ketiga hanya akan menciptakan ketergantungan secara ekonomi dan politik terhadap negara-negara kreditur. Setiap mengucurkan kreditnya, IMF selalu memaksakan pelaksanaan agenda neoliberalisme lewat *Structural Adjusment Programme* (SAP). Intinya adalah melakukan liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi. Ketiganya merupakan pilar-pilar utama konsep pemulihan ekonomi bagi negara-negara berkembang, yang kemudian disebut sebagai Konsensus Washington (*Washington Consensus*).[5] Jumlah utang yang melilit negara-negara Dunia Ketiga selalu mengalami peningkatan yang signifikan.

Tahun 1980, jumlah utang negara Dunia Ketiga sebesar US$600 miliar dan membengkak menjadi US$2,1 triliun di tahun 1997. Besarnya jumlah utang yang harus ditanggung oleh negara-negara Dunia Ketiga tak lepas dari konstruksi paradigma yang dibangun oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang. Parameter keberhasilan program kebanyakan bersifat kuantitatif, semisal tingginya angka GNP (*Gross National Product*), masuknya FDI (*Foreign Direct Investment*), besarnya *cash flow* atas penjualan BUMN, dan efisiensi pengeluaran pemerintah lewat pencabutan subsidi. Tak banyak porsi pembicaraan yang bersifat kualitatif semacam peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu hal yang juga menjadi permasalahan adalah kerusakan lingkungan secara global. Kegiatan ekonomi produksi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional guna memenuhi permintaan pasar ternyata menimbulkan efek eksternal negatif berupa kian menipisnya persediaan sumber daya alam. Mekanisme pasar yang dijamin kesuksesannya dalam mengatasi permasalahan ekonomi manusia, justru telah membawa manusia kepada makin sulitnya pemenuhan kebutuhan hidup akibat sumber daya yang semakin langka. Kita bisa meninjau berbagai kerusakan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dari Arun hingga Papua. Contoh kasusnya sangat banyak dan bervariasi, mulai dari *genetically modified organism* (GMO)—seperti kasus *transgenic cotton* yang melibatkan perusahaan multinasional Monsanto Group di Bulukumba, Sulawesi Selatan—hingga penebangan hutan ilegal di pulau Kalimantan dan Sumatera. Kemudian kasus penambangan tembaga PT Freeport Indonesia di Papua, dan penambangan emas PT Newmont Minahasa Raya di Buyat Bay, Sulawesi Utara.[6]

Tinjauan Alternatif Paradigma Ekonomi

Persoalan kebutuhan dasar manusia yang tak dapat diselesaikan dengan teori ekonomi neoliberal memunculkan pertimbangan baru bagi hadirnya paradigma lain yang lebih mengedepankan nilai-nilai humanisme dalam mencerna persoalan. Ketika teori ekonomi neoklasik menyerahkan segala permasalahan manusia kepada mekanisme pasar, maka fungsi-fungsi dasar ilmu ekonomi sebenarnya menjadi kian tercerabut. Ketika menulis *The Wealth of Nations*, Adam Smith sebenarnya masih berbicara tentang kekayaan bangsa. Namun, paradigma neoliberal telah mengubahnya menjadi sekadar *The Wealth of Individual*, kekayaan individu. Untuk itu perlu sebuah usaha untuk meninjau kembali asumsi-asumsi yang selama ini mendasari ilmu ekonomi.

Ada beberapa hal yang selama ini menjadi titik tolak bagi para kritikus ekonomi neoliberal. Pertama, adanya ketergantungan yang sangat kuat dari negara miskin terhadap negara Dunia Pertama. Paul Ormerod pernah mengkritik dengan keras berbagai macam kegagalan ekonomi ortodoks (baca: ekonomi liberal) dalam memprediksikan bencana-bencana ekonomi dunia, seperti resesi ekonomi dunia tahun 1990-an, juga kegagalan lembaga-lembaga keuangan dunia dalam menyelesaikan krisis di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kegagalan prediksi itu tak lain disebabkan kesalahan mendasar dalam meletakkan asumsi yang melandasi bangunan teorinya.[7]

Beberapa ekonom Amerika Latin dan Afrika telah mencoba untuk menjelaskan ketergantungan negara-negara Dunia Ketiga terhadap negara-negara maju. Andre Gunder Frank, Gernando Henrico Cardoso, Theotonio Dos Santos, Samir Amin, dan banyak nama lain yang dapat kita tambahkan. Mereka banyak terinspirasi oleh pemikiran Paul Baran sebagai

tokoh awal dalam menjelaskan fenomena *dependensia* (ketergantungan). Para pemikir tersebut banyak menumpukan perhatian pada situasi ketergantungan dan keterbelakangan yang menimpa negara-negara Amerika Latin dan Afrika. Sebab, praktis hingga saat ini nestapa kemiskinan lebih banyak merundung benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Munculnya wacana baru ini menunjukkan bergeliatnya sebuah paradigma baru dalam memandang ilmu ekonomi, yakni sebagai usaha untuk menjawab permasalahan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Hal ini sejajar dengan kemunculan ilmu ekonomi klasik yang dilatari desakan permasalahan kemiskinan yang melanda zamannya.

Kemiskinan yang menjadi penyakit kronis bagi negara-negara Dunia Ketiga berdampak pada munculnya paradigma baru dalam kancah pemikiran ekonomi. Kebanyakan para pemikir terinspirasi oleh analisis Marx tentang eksploitasi kapitalisme. Andre Gunder Frank memulai pandangannya dengan mengemukakan secara umum mekanisme terjadinya proses keterbelakangan negara-negara miskin. Dalam konteks hubungan ekonomi antara negara miskin dan negara maju, Frank membuat pembagian lewat apa yang disebutnya dengan negara-negara metropolis maju dan negara-negara satelit terbelakang. Hubungan ekonomi antara keduanya merupakan aspek utama perkembangan sistem kapitalis dalam skala global. Menurut Frank, hubungan metropolis-satelit saat ini menyentuh keseluruhan sektor di negara-negara miskin. Keterbelakangan dalam sektor tradisional justru diakibatkan oleh adanya kontak dengan sistem kapitalis dunia yang masuk ke negara miskin lewat sektor modern. Tesis Frank tersebut diperluas oleh beberapa tokoh, salah satunya Samir Amin yang mencoba menjelaskan fenomena keterbelakangan dengan konsep pertukaran yang tidak adil (*unequal exchange*). Konsep pertukaran tak adil ini menunjukkan terjadinya pengalihan surplus dari negara miskin (*peripheri*) ke negara maju (*centre*).[8]

Di samping teori ketergantungan, ada beberapa mazhab teori ekonomi yang menjadi alternatif di luar mazhab neoklasik. Namun pada intinya, teori ekonomi selalu berbicara tentang pembangunan. Kemudian timbul anggapan bahwa sistem ekonomi bergantung erat dengan paham yang dianut suatu negara.[9] Sistem tersebut yang akan menentukan bagaimana corak pembangunan negara yang bersangkutan. Secara garis besar, teori pembangunan dibagi dalam empat pendekatan, yaitu teori pertumbuhan linear, teori pertumbuhan struktural, teori revolusi ketergantungan internasional, dan teori neoklasik.[10]

Dalam teori pertumbuhan linear, dikenal berbagai tahapan

Tabel 2
Jumlah Kemiskinan di Negara Berkembang (tahun 1990)

Wilayah	Tingkat kemiskinan lebih tinggi			Tingkat kemiskinan lebih rendah		
	Jumlah (juta)	Head count Index(%)	Kontribusi terhadap total kemiskinan	Jumlah (juta)	Head count Index(%)	Kontribusi terhadap total kemiskinan
Asia Selatan	562	49,0	49,8	287	25,0	44,7
India	448	52,8	39,7	226	26,6	35,2
Asia Timur	169	11,3	15,0	74	5,0	11,5
Afrika, Selatan Sahara	216	47,8	19,1	152	33,6	23,7
Afrika Utara dan Timteng	73	33,1	6,5	53	24,0	8,3
Amerika Latin	108	25,2	9,6	76	17,8	11,8
Semua NSB	1.128	29,7	100,0	642	16,9	100,0

Sumber: Bank Dunia.

Adit.balairung

proses evolusi pembangunan suatu negara. Menurut Adam Smith, teori pertumbuhan dibagi atas masa perburuan, masa beternak, masa bercocok tanam, masa perdagangan, dan yang terakhir ialah masa perindustrian. Tahapan tersebut menjelaskan proses evolusi fase ekonomi masyarakat dari yang bercorak tradisional menuju tahap perekonomian modern yang bersifat kapitalis. Adam Smith menekankan akumulasi modal sebagai syarat keberlangsungan pertumbuhan ekonomi. Akumulasi modal tersebut diperoleh dari tabungan yang kemudian dijadikan sebagai investasi. Adapun kemampuan menabung masyarakat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengeksplorasi sumber daya-sumber daya yang ada. Kelompok masyarakat yang mampu menabung tak lain adalah kaum pengusaha yang memiliki kelebihan pendapatan. Untuk memperoleh profit, pengusaha harus melakukan spesialisasi yang didukung oleh maksimalisasi produktivitas faktor produksi, seperti peningkatan keterampilan buruh dan penggunaan teknologi.

Karl Marx juga termasuk tokoh dalam aliran pembangunan linear. Sebab ia membagi perkembangan ekonomi sebuah masyarakat ke dalam tahapan-tahapan, mulai dari fase komunal primitif, perbudakan, feodalisme, kapitalisme, sosialisme, dan yang terakhir komunisme. Marx mendasarkan teorinya pada kontradiksi antagonistik dalam masyarakat dengan adanya pemilik modal dan kaum proletar. Marx sangat menekankan ajaran nilai lebih dan konsep alienasi. Sedangkan tokoh aliran linear yang lain adalah Rostow, yang membagi tahapan perekonomian mulai dari perekonomian tradisional, prakondisi tinggal landas, tinggal landas, tahap menuju *maturity* (kematangan), dan tahap konsumsi massa tinggi. Namun teori pertumbuhan linear ini telah banyak menemui kegagalan di masa lalunya, di samping kelemahan secara metodologis empiris. Tahapan-tahapan yang ditawarkan dalam teori pertumbuhan linear tersebut belum mampu menjelaskan permasalahan mendasar manusia dalam lokus ekonomi.

Teori selanjutnya adalah teori perubahan struktural. Teori ini menitikberatkan pada proses transformasi ekonomi negara Dunia Ketiga. Teori ini bertolak dari dua fakta yang paling mencolok, yaitu tentang ketimpangan dan resistensi ketimpangan tersebut terhadap perubahan. Galtung mengajak untuk menjelaskan bagaimana menghilangkan ketimpangan dengan merumuskan sebuah mazhab pembebas yang memadai secara teoritis dan praktis. Ia menegaskan bahwa saat ini sistem dominan yang sedang berkuasa adalah imperialisme, dan riil untuk melawan sistem yang dominan dibutuhkan sebuah *counter* yang memadai.[11] Arthur Lewis, yang juga termasuk tokoh dalam teori perubahan struktural, menganut azas dualisme. Ia membagi masyarakat dalam dua bagian, yakni perekonomian tradisional yang umumnya bercorak agraris, dan perekonomian industri yang dianggap sebagai sektor yang sangat penting karena produktivitasnya yang tinggi.

Dalam mazhab strukturalisme ini, *the invisible hand* dianggap benar-benar tidak tampak. Kaum strukturalis beranggapan bahwa sistem kapitalis dunia harus diarahkan atau disusun kembali untuk kepentingan negara-negara yang terbelakang. Namun sayang, pelaksanaannya tidak pernah tepat sasaran. Pemenang nobel kenamaan, Gunnar Myrdal mengemukakan bahwa redistribusi Amerika Serikat terhadap Eropa dalam bentuk Marshall Plan jatuh ke negara yang salah (negara-negara Eropa yang pada awalnya kaya). Padahal seharusnya, demikian Myrdal, dana itu diberikan kepada negara-negara miskin korban perang yang belum memiliki tradisi pembangunan dan pemulihan ekonomi.[12]

Kekecewaan para ekonom Dunia Ketiga terhadap mazhab ekonomi neoliberalisme tak hanya terjadi di Amerika Latin ataupun di Afrika, namun juga di Indonesia. Di sini kita mengenal beberapa tokoh yang memosisikan diri berlawanan dengan mazhab ekonomi neoliberal. Mereka antara lain Sritua Arif dan Mubyarto. Mubyarto dengan lantang menawarkan sistem Ekonomi Pancasila. Dalam sistem ini, Mubyarto menegaskan bahwa moral Ekonomi Pancasila akan memberi arah bagi para pelaku ekonomi. Ia menjelaskan Pancasila sebagai dasar perekonomian, sebagai berikut: "Ketuhanan Yang Maha Esa", roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", artinya ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan kemerataan sosial (egalitarianisme) sesuai azas-azas kemanusiaan; "Persatuan Indonesia" berarti prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan ekonomi; "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan", dalam hal ini, koperasi merupakan *sokoguru* perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama; "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" menunjukkan adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

Sistem Ekonomi Pancasila berangkat dari

upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, agar memiliki daya saing terhadap entitas ekonomi modern yang lebih besar. Namun, ada beberapa perbedaan pandangan mengenai sistem Ekonomi Pancasila di antara sejumlah ekonom. Emil Salim, guru besar Fak.Ekonomi Universitas Indonesia, memandang bahwa Ekonomi Pancasila bermuara pada demokrasi ekonomi dan politik. Mubyarto lain. Ia beranggapan bahwa koperasi merupakan *sokoguru* perekonomian dan sebagai bentuk paling konkret dari usaha bersama. Lain lagi menurut Soemitro Djojohadikusumo. Begawan ekonomi Indonesia itu berpendapat bahwa rakyatlah yang berperan dan berpartisipasi aktif dalam usaha pembangunan. Memang, sampai saat ini masih belum ada kesamaan pandangan atas sistem Ekonomi Pancasila. Ada yang optimis, namun banyak pula yang pesimis bahwa sistem ini adalah yang paling sesuai dan dapat membawa kemajuan bagi ekonomi Indonesia.

Berbagai teori ekonomi, baik itu yang *mainstream* maupun yang alternatif, sama-sama digugat karena mengandung banyak kelemahan. Beberapa teori masih berkutat pada perhitungan kuantifikasi matematis. Teori-teori itu tak cukup jika diterapkan untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan yang mendesak, seperti kemiskinan, kelaparan, dan kesenjangan pendapatan. Semenjak 1970-an mulai muncul pemikiran baru tentang konsep pembangunan. Pembangunan ekonomi tak lagi dimaknai semata-mata sebagai peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, namun bagaimana agar bisa mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi—artinya pembangunan ekonomi yang berwatak sosial. Untuk itu diperlukan adanya parameter alternatif dalam mengukur pembangunan. Parameter tersebut semisal *Physical Quality Life Index* (PQLI), yang memiliki komposisi antara lain: harapan hidup pada usia satu tahun, angka kematian, dan tingkat melek huruf. Untuk masing-masing indikator, kinerja ekonomi suatu negara dinyatakan dalam skala 1 hingga 100, dimana 1 merupakan kinerja terjelek sedang 100 merupakan kinerja terbaik.

Indikator yang lain adalah *Human Development Index* (HDI), yang dicanangkan oleh UNDP (United Nations Development Programme). HDI ini berfungsi untuk membuat peringkat tingkat pembangunan manusia berdasar atas tiga tujuan pembangunan, yaitu *usia*, yang diukur dengan tingkat harapan hidup; *pengetahuan*, yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca dan rata-rata tahun sekolah; dan *penghasilan*, yang diukur dengan pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan.

Di samping itu juga terdapat indikator lain yang dikembangkan oleh United Nations Research Institute on Social Development (UNRISD) pada tahun 1970 yang terdiri atas 9 indikator sosial dan 7 indikator ekonomi, yaitu: harapan hidup; persentase penduduk di daerah sebanyak 20.000 atau lebih; kombinasi tingkat pendidikan dasar dan menengah; rasio pendidikan luar sekolah; rata-rata jumlah orang per kamar; sirkulasi surat kabar per 1000 penduduk; persentase penduduk usia kerja dengan listrik; gas, air, dsb.; produksi pertanian per pekerja pria di sektor pertanian; persentase tenaga kerja pria dewasa di pertanian; konsumsi listrik, kw per kapita; konsumsi baja, kg per kapita; konsumsi energi, ekuivalen kg batubara per kapita; persentase sektor manufaktur dalam GDP; perdagangan luar negeri per kapita; persentase penerima gaji dan upah terhadap angkatan kerja.[13]

Kemunculan berbagai ilmu ekonomi alternatif memang memberikan pilihan kepada negara-negara Dunia Ketiga untuk me-reka-ulang bagaimana pelaksanaan pembangunan di negaranya. Namun permasalahannya, ketika dunia telah disatukan dalam mekanisme pasar global, sangat sulit bagi negara-negara tersebut untuk mampu bertahan dari gempuran modal. Beberapa negara yang mengklaim dirinya komunis pun sudah mulai membuka keran ekonominya. Salah satunya adalah Vietnam yang telah menerapkan program "Doi Moi" atau "Keterbukaan Politik".[14] Sejarah Dunia Ketiga tak bisa dilepaskan dari intervensi negara Dunia Pertama dan konstelasi pasar dunia.

Menimbang Posisi Sektor Ekonomi Informal

Hernando de Soto, presiden Institute for Liberty and Democracy (ILD) di Lima, Peru, sempat meneliti fenomena sektor ekonomi informal di negaranya. Hasil penelitiannya sangat mencengangkan. Ia menemukan bahwa paling tidak 60% penduduk Peru melakukan pekerjaan gelap sepanjang waktu. Lalu, berdasarkan beberapa penyelidikan berikutnya, ia menemukan lagi bahwa tingkat 50-60% itu cukup konsisten di seluruh Amerika Latin. Jumlah ini sangat tinggi dan besar sekali implikasinya terhadap pemerintah. Ia mempertanyakan bagaimana suatu pemerintah dapat mengharapkan stabilitas sosial dan politik jika kewenangannya hanya menjangkau kurang dari 40 persen penduduknya? Tidaklah mengherankan jika Dunia Ketiga mempunyai sejarah perebutan kekuasaan yang memalukan dan memilukan.

Hernando de Soto sangat menaruh perhatian terhadap permasalahan kemiskinan di negara-negara Dunia Ketiga. Perhatiannya itu bertolak dari pertanyaan kenapa setelah satu abad industrialisasi, pengalihan modal secara

besar-besaran, berbagai revolusi, dan cucuran keringat para pekerja, sebagian besar perekonomian dunia berkembang masih tetap terbelakang dan dibelenggu kemiskinan yang menyedihkan. Ia beranggapan bahwa ada yang sangat keliru dalam kearifan konvensional para spesialis pembangunan dan para pengecamnya, baik yang berada di sayap kanan ataupun kiri. Setelah melakukan penelitan yang komprehensif, akhirnya de Soto menyimpulkan beberapa alasan yang menyebabkan tidak berjalannya ekonomi di negara berkembang.

Pertama, struktur kegiatan pemerintahan dan ekonomi di negara Dunia Ketiga secara efektif menggencet unsur wirausaha, unsur yang menjadi kunci kesempatan kerja, pembentukan modal, dan pertumbuhan. *Kedua*, tidak disadari dengan sungguh-sungguh kaitan fundamental antara partisipasi ekonomi dan partisipasi politik, dan tidak memahami pula bahwa kemakmuran tanpa demokrasi adalah suatu hal yang mustahil dalam ekonomi modern.[15] Sistem ekonomi neoliberal menciptakan segmentasi dan *barrier to entry* terhadap pelaku ekonomi bermodal kecil, sebab ia hanya mentolerir pelaku ekonomi yang bermodal besar. Beberapa fakta yang disajikan Hernando de Soto telah cukup sebagai landasan untuk menyimpulkan bagaimana fungsi vital sektor informal dalam menggerakkan roda ekonomi negara Dunia Ketiga. De Soto juga menegaskan bahwa keberadaan sektor informal diakibatkan oleh sistem ekonomi merkantilis yang diadopsi ulang lewat birokratisasi, regulasi yang berlebihan, dan politisasi negara.[16]

Fenomena kemiskinan selalu eksis di manapun, dan sampai saat ini belum ada mazhab ekonomi yang mampu menyelesaikannya, baik yang mainstream maupun yang alternatif. Tak beda dengan di Peru, keberadaan sektor informal juga mencerminkan permasalahan kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia. Namun, di sisi lain, secara riil ia telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menyerap tenaga kerja.

Ada beberapa hal yang menarik berkaitan dengan keberadaan sektor informal dan neoliberalisme. Hernando de Soto sempat menekankan peran penting wiraswasta dalam sistem ekonomi yang banyak didominasi oleh negara. Fenomena ini bisa menjadi hipotesis tentang kebutuhan akan ideologi "bebas" (sebagai lawan dari "peranan negara"). Dalam hal ini, sektor informal berposisi sebagai sesuatu yang

Tabel 3
Pangsa Pekerjaan di Sektor Informal (%)

	1997	1998
Total	62.8	65.4
Pria	58.3	61.6
Perempuan	70.2	71.5
Perkotaan/ urban	42.8	45.7
Perdesaan/ rural	73.3	75.8

Sumber : Sakernas 1998

Adit.balairung

Sektor Formal

Barrier to entry tinggi
(tarif, nontarif, modal, dsb.)

margin keuntungan tinggi,
akumulasi modal cepat

Sektor Informal

barrier to entry rendah

margin keuntungan
rendah
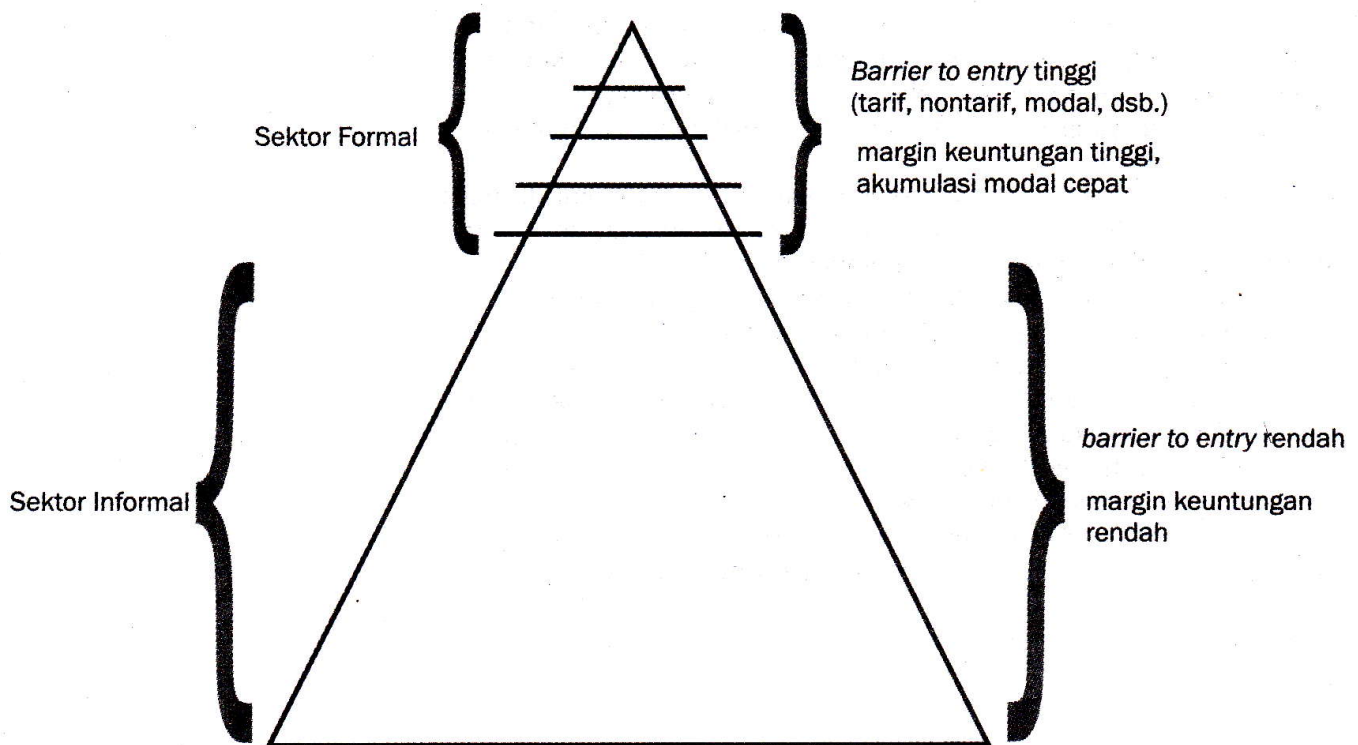
berada di luar negara.[17]

Namun, fenomena sektor ekonomi informal adalah kasus perkecualian. Ia merupakan korban kesekian kalinya dari konsep liberalisasi ekonomi. Di satu sisi, liberalisme ekonomi tidak menghendaki negara berperan terlalu jauh dalam kegiatan ekonomi, namun di sisi lain ia menghendaki persaingan yang sengit yang tentunya bukan persaingan "tangan kosong". Posisi sektor informal berada di tengah-tengah, antara peran negara dan pasar. Ia bukan hanya tergencet oleh negara yang memang tidak menaruh perhatian terhadap sektor tersebut, namun juga terdesak oleh persaingan yang muncul sebagai konsekuensi liberalisasi ekonomi. Liberalisme ekonomi hanya mengakui bahwa proses produktif akan terjadi dalam mekanisme pasar, sehingga keberadaan sektor informal tidak dimasukkan ke dalam seluruh perhitungan ekonomi nasional.

Dikotomi formal-informal yang dibedakan atas penggunaan dan kepemilikan faktor produksi, mempertegas kesenjangan antara kelompok ekonomi skala besar dengan kelompok ekonomi skala kecil. Sehingga muncullah struktur ekonomi piramida, yang sangat tidak efisien. Disebut tidak efisien karena struktur yang berada di atas (sektor formal) lebih padat modal, memiliki margin keuntungan yang besar, tapi kurang menyedot tenaga kerja. Adanya *barrier to entry* juga turut memberi andil dalam munculnya kesenjangan tersebut. Kondisi yang berlawanan terjadi pada struktur piramida di bawah yang secara kuantitas lebih banyak, namun memiliki margin keuntungan yang rendah. Sehingga terjadilah penumpukan unit usaha kecil (baca: sektor informal).

Dalam mazhab strukturalis, permasalahan sektor informal dipandang sebagai wilayah *peripheral* dalam konteks mekanisme pasar. Ia bukanlah tahapan menuju perekonomian modern, namun sebagai entitas ekonomi yang eksis dengan segala keterbatasannya sendiri. Dalam paradigma mazhab dependensia, keterbelakangan yang ada dalam sektor informal—Gunder Frank menyebutnya sebagai sektor

radisional—adalah sebagai akibat dari massifnya arus sektor modern yang memiliki berbagai kelebihan, sehingga semakin meminggirkan posisi sektor informal. Meminjam konsep pertukaran tidak adil (*unequal exchange*) yang dikemukakan Samir Amin, kita bisa menganalisis keberadaan sektor informal dalam perspektif lain.

Pertukaran yang tidak adil di sini dimaksudkan sebagai pengalihan surplus dari sektor informal ke sektor formal dalam relasi perdagangan antar-sektor. Di Indonesia, produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan besar kebanyakan dipasarkan oleh unit-unit usaha kecil yang bersifat informal. Produk-produk cepat saji seperti Indomie, Pepsi, maupun Nescaffe, banyak dijumpai di warung-warung kecil atau di warung burjo sebagai komoditas. Relasi ekonomi tersebut bukanlah tanpa permasalahan. Jika kita mencermati peranan sektor informal dalam memasarkan produk-produk perusahaan besar, seharusnya sektor informal diposisikan sebagai *branches* yang harus memperoleh berbagai insentif atas jasanya dalam memasarkan produk-produk tersebut.

Namun, keberadaan sektor informal tetap dipandang sebelah mata, dan keuntungan tetap mengalir ke perusahaan-perusahaan besar. Penggunaan jasa dari sektor informal memang bisa menghemat biaya operasional, dibanding jika perusahaan tersebut mendirikan *branches* baru yang khusus menjual produk mereka. Di sinilah letak adanya *unequal exchange*, dan sektor informal tak mampu menjadikan hal tersebut sebagai kekuatan posisi tawar.

Keberadaan sektor informal memang sempat mendapatkan perhatian serius dari banyak ekonom. Dimulai oleh J.H. Boeke dengan konsep dualisme sosialnya, dan kemudian disanggah serta disempurnakan oleh pakar-pakar ekonomi sesudahnya. Selain itu ada juga konsep segmentasi pasar tenaga kerja yang diusung oleh Chris Manning. Manning menolak anggapan bahwa yang terjadi dalam pasar tenaga kerja adalah dualisme. Menurutnya, yang terjadi sesungguhnya adalah diferensiasi akibat perbedaan teknologi. Adanya segmentasi pasar akhirnya berimplikasi pada kebijakan ekonomi yang menangani masalah upah dan alokasi tenaga kerja pada berbagai segmen ekonomi.[18]

Beberapa paradigma tersebut paling tidak mengantarkan pada kesimpulan bahwa fenomena sektor informal adalah fenomena kesenjangan yang muncul akibat tidak meratanya pembagian kue pembangunan dalam penerapan sistem ekonomi modern. Di samping itu, dikotomi formal-informal merupakan sebuah konflik yang muncul dalam keterbatasan mekanisme pasar di tengah arus besar neoliberalisme.

CATATAN AKHIR

1 Elbert V. Bowden, Economic Evolution (Cincinnati, Ohio: South-Western Publishing Co., 1981), hal. 7.

2 Ibid, hal. 21-22.

3 Eric Roll, A History of Economic Thought 3rd edition (Prentice-Hall, INC., Englewood Cliffs, N. J., 1959), hal. 31-35.

4 Kompas, Senin, 3 Februari 2003, berjudul Kapitalisme Liberal Tak Kenal Altruisme, Etika, dan Kemurahan Hati oleh Maria Hartiningsih. Dalam artikel ini sempat disinggung tentang World Social Forum yang banyak disorot sebagai ajang konsolidasi bagi negara-negara Dunia Ketiga dan kekuatan-kekuatan yang anti terhadap anasir neoliberalisme. Forum ini tak lain adalah sebuah forum tandingan bagi forum negara-negara maju dalam World Economic Forum.

5 A. Tony Prasetiantono, IMF (International Monetary Fund) , dalam I. Wibowo dan Francis Wahono (ed.), Neoliberalisme (Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003). Pada dasarnya Washington Consensus tediri dari sepuluh elemen yang disarankan untuk diimplementasikan di negara-negara yang terkena krisis. Pertama

, disiplin fiskal yang mensyaratkan kepada pemerintah agar defisit anggaran tak boleh lebih dari dua

persen terhadap PDB. Kedua, perlu adanya prioritas bagi pengeluaran publik dalam anggaran pemerintah. Di samping itu pemerintah harus memperbaiki distribusi pendapatan melalui belanja pemerintah. Ketiga, reformasi pajak. Menekankan pada perluasan basis pemungutan pajak. Keempat, liberalisasi finansial. Kelima
, kebijakan nilai tukar yang memiliki kredibilitas yang menjamin terdorongnya iklim persaingan. Keenam, mendorong liberalisasi perdagangan, dengan menghilangkan restriksi-restriksi kualitatif. Ketujuh, mendorong kompetisi antar-perusahaan domestik dengan perusahaan asing. Kedelapan, melakukan program privatisasi terutama terhadap perusahaan-perusahaan milik negara. Kesembilan, mendorong iklim deregulasi dengan menghapuskan barrier to entry. Kesepuluh, perlindungan hak kekayaan intelektual oleh pemerintah, baik terhadap sektor formal maupun informal.

[6] Aan Suryana, ibid., hal. 134.

[7] Paul Ormerod, Matinya Ilmu Ekonomi terj. Parakitri T. Simbolon (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1998), hal. 8-20. Paul Ormerod antara lain mengritik kegagalan ekonomi ortodoks dalam meramalkan tentang resesi yang menimpa negara-negara maju, antara lain Jepang, kawasan Eropa Barat, dan Amerika. Ia juga menggugat keabsahan postulat teori
demand and supply yang menyatakan bahwa harga ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Contoh lain adalah perdagangan bebas antarnegara yang menguntungkan semua pihak. Ia mencontohkan dengan studi empiris untuk menguji kebenaran teori-teori dasar ekonomi. Namun Ormerod menegaskan bahwa inti dari krisis ilmu ekonomi ortodoks adalah pada terbatasnya pembangunan teori ekonomi yang beranak-pinak berdasarkan matematika. Teori mereka bukan untuk diuji terhadap masalah yang mendesak, melainkan untuk dibela dan dipertahankan
sebagai doktrin. Hal inilah yang membedakan antara ekonomi ortodok dengan ekonomi klasik. Ciri pokok ekonomi klasik adalah ia mempelajari bekerjanya ekonomi di dalam suatu konteks sosial. Kajian ilmu ekonomi klasik bukan karena rasa ingin tahu intelektual, tapi karena masalah yang mendesak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Ilmu ekonomi ortodok lebih banyak memunculkan belukar aljabar daripada kejelasan tentang permasalahan ekonomi yang sedang melilit negara-negara miskin.

[8] Sritua Arif dan Adi Sasono, Ketergantungan dan Keterbelakangan: Sebuah Studi Kasus (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1984), hal. 23-31. Tesis tentang ketergantungan tersebut juga mendapat kritikan dari beberapa ekonom seperti Fagen, Oxaal, Palloix, dan Sao.

[9] Emil Salim, Sistem Ekonomi Pancasila , Prisma No. 5, Mei 1979, hal. 3.

[10] Mudrajad Kuncoro, Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Pembangunan (Yogyakarta: Penerbit AMP YKPN, 2000), hal. 38.

[11] Johan Galtung, Suatu Teori Struktural Tentang Imperialisme, dalam Drs. Amir Effendi Siregar (ed.), Arus Pemikiran Ekonomi Politik
(Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1991). Galtung juga menawarkan strategi-strategi untuk perubahan struktural sistem dominasi internasional. Pertama
, adanya proses horisontalisasi pusat-pinggiran yang dimaknai sebagai kondisi yang sederajat dalam melakukan perdagangan internasional, dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki, terutama oleh negara pinggiran sebagai
bargain terhadap negara pusat. Kedua, defeodalisasi terhadap mekanisme organisasional di negara pinggiran, sehingga mampu meningkatkan kontrol dalam terhadap arogansi negara pusat. Salah satu contoh konkretnya adalah organisasi tersebut mampu mengatur pemogokan pengiriman bahan-bahan mentah bila bangsa-bangsa pusat tidak menerima tipe-tipe perubahan struktural tersebut. Di samping itu Galtung juga mensyaratkan adanya strategi-strategi untuk perubahan struktural dari sistem dominasi intranasional

[12] Robert A. Isaak, Ekonomi Politik Internasional (Yogyakarta: Penerbit PT Tiara Wacana, 1995), hal 82-83.

[13] Mudrajad Kuncoro, op.cit., hal 24-29.

[14] Robert A. Isaak, op.cit., hal. xvi.

[15] Hernando de Soto, Ekonomi Informal Menjawab Marx, Titian, No. 2/1990, hal.34-39. Hernando de Soto juga mengungkapkan fakta bahwa di Lima, 37 persen rumah dibangun tanpa ijin, selain itu 87 persen dari bus di Lima dioperasikan secara gelap. Bahkan di Peru sektor informal menyumbang 38 persen GNP, 27 persen lebih tinggi dari laporan resmi.

[16] Hernando de Soto, Pertumbuhan Ekonomi Bawah Tanah di Peru , Prisma No. 5, Mei 1991.

[17] Emmanuel Subangun, Sektor Informal di Indonesia dari Titik Pandang Non-Akademik , Ibid.

[18] Mudrajad Kuncoro, op.cit., hal 155-163.
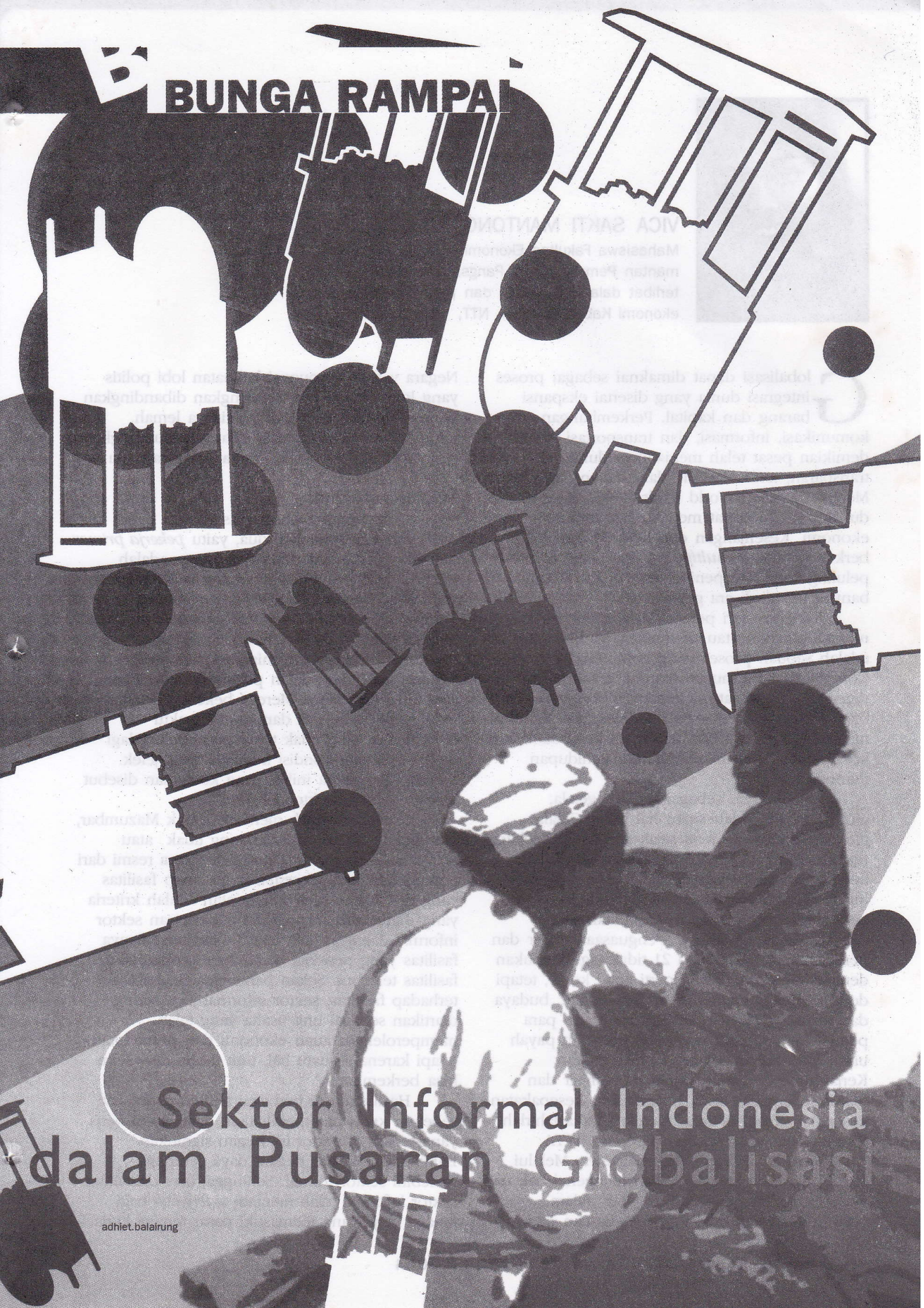
Sektor Informal Indonesia dalam Pusaran Globalisasi

adhiet.balairung

VICA SAKTI MANTONG TENDENAN
Mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM, Jurusan IESP, mantan Pemred Jurnal Pangsa 2002-2003. Pernah terlibat dalam ekspedisi dan penelitian potensi ekonomi Kabupaten Alor, NTT.

Globalisasi dapat dimaknai sebagai proses integrasi dunia yang disertai ekspansi barang dan kapital. Perkembangan komunikasi, informasi, dan transportasi yang demikian pesat telah menjadikan dunia lebih transparan, terasa sempit, dan seakan tanpa batas. Menurut laporan World Bank (1995), integrasi dunia diyakini dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Kesenjangan dan kemiskinan bisa berkurang akibat *multiplier effects,* perluasan peluang kerja dan peningkatan upah riil yang banyak terjadi di era global.

Terlepas dari penafsiran apakah hal itu menguntungkan atau merugikan, globalisasi adalah sebuah proses yang kompleks.[1] Kompleksitas ini muncul karena ia tak hanya digerakkan oleh satu kekuatan, melainkan oleh banyak kekuatan: budaya, teknologi, politik maupun ekonomi. Tak heran jika kemudian kondisi itu dapat mempengaruhi kehidupan manusia.

Sebenarnya, sebagai sebuah gejala, globalisasi bukanlah suatu hal baru. Gejala globalisasi telah muncul sejak abad ke-19 sebagai rekaan demokrasi sosial gaya lama.[2] Lalu, apa beda antara globalisasi abad 19 dengan abad 21 ini? Perbedaannya terletak pada cara dan pendekatan yang dipakai, kecepatan serta cakupan penguasaannya. Penguasaan pasar dan perdagangan pada abad 21 tidak lagi dilakukan dengan cara-cara fisik, seperti abad ke-19, tetapi dengan menggunakan instrumen politik, budaya dan teknologi. Negara-negara maju dan para pemilik modal tidak perlu lagi bersusah payah untuk melakukan transaksi perdagangan. Kerjasama pemasaran dunia diorganisir dan diatur sedemikian rupa berdasarkan kesepakatan-kesepakatan politis antar mereka. Maka lahirlah forum-forum atau organisasi seperti AFTA, NAFTA, APEC, WTO, dan sebagainya. Melalui forum itu dilakukan perjanjian mengenai hak dan kewajiban masing-masing anggota dalam mewujudkan ekspansi dan penguasaan pasar. Negara yang mempunyai kekuatan lobi politis yang kuat akan lebih diuntungkan dibandingkan dengan negara yang lobi politisnya lemah. Otomatis negara yang lebih banyak diuntungkan dengan sistem ini adalah negara-negara maju.

Sektor Informal

Orang yang bekerja biasanya dikelompokkan menjadi dua, yaitu *pekerja primer* dan *pekerja sekunder*. Pekerja primer adalah pekerja yang bekerja dengan segala kemapanan; gaji cukup dan lingkungan kerja yang baik. Termasuk dalam kelompok ini, misalnya, adalah mereka yang bekerja di kawasan Segitiga Emas (Sudirman, Thamrin, Kuningan). Sedangkan pekerja sekunder adalah pekerja yang marjinal, atau kelas pinggiran. Mereka bekerja tidak menentu dengan gaji dan jangka waktu penerimaan yang tidak tentu pula. Belum lagi lingkungan dan kondisi kerjanya yang jelek. Kelompok pekerja inilah yang kemudian disebut sebagai pekerja sektor informal.

Sektor informal, menurut Dipak Mazumbar, merupakan unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi secara resmi dari pemerintah. Jadi, *accesibility* terhadap fasilitas yang disediakan oleh pemerintah adalah kriteria yang digunakan sebagai ukuran batasan sektor informal. Dengan kata lain, bukan tersedianya fasilitas yang penting, melainkan penggunaan fasilitas tersebut. Selain parameter aksesabilitas terhadap fasilitas, sektor informal juga sering diartikan sebagai unit usaha yang telah memperoleh bantuan ekonomi dari pemerintah, tetapi karena sesuatu hal, unit usaha itu belum bisa berkembang.[3]

Hasil studi di berbagai tempat pada saat sebelum krisis memperlihatkan daya serap kerja yang terjadi di sektor ini begitu signifikan. Bahkan, di banyak negara daya serapnya melebihi sektor formal. Sehingga, bisa dikatakan sektor informal telah menjadi *safety belt* bagi tenaga kerja yang memasuki pasar tenaga kerja.

Tabel 1- PROPORSI PEKERJA INFORMAL di Beberapa Kota di Jawa dan Luar Jawa tahun 1993

Kota	Jumlah Pekerja Sektor Informal (dalam %)
Jakarta	37,1
Surabaya	34,9
Semarang	35,7
Bandung	31,9
Yogyakarta	43,4
Surakarta	40,9
Palembang	55,6
Medan	41,2
Ujung Pandang	45,1
Bandar Lampung	48,2
Padang	43,7
Samarinda	52,3
Manado	40,3

Diolah dari SUSENAS 1993 oleh Tadjuddin Noor Effendi

adhisu.bajarung

Implikasi Globalisasi Abad 21

Seperti sudah disinggung di muka, Globalisasi dapat berdampak luas pada perubahan pola hidup masyarakat. Ada beberapa pergeseran dan perubahan yang dibawa serta oleh globalisasi: dari agraris tradisional jadi masyarakat industri modern; dari kehidupan berasaskan kebersamaan ke kehidupan individualis; dari lamban jadi serba cepat; dari berasas nilai sosial menjadi konsumeris materialis; dari tata kehidupan tergantung dari alam kepada kehidupan menguasai alam; dari kepemimpinan formal ke arah kepemimpinan kecakapan (profesional).

Apa arti tentang semua ini? Kita akan menjadi pasar raksasa yang diperebutkan orang-orang di sekeliling. Bangsa kita akan dihadapkan pada "*Global Capitalism*". Kalau tak hati-hati, keadaan itu akan bergeser menjadi "*Capital Imperialism*", yang bisa dianggap sebagai pengganti "*Colonial Imperialism*", hantu yang sudah kita halau 50 tahun silam.

Di sisi lain saat memasuki era global, Indonesia sebenarnya dihadapkan pada kendala eksternal dan internal yang sama peliknya. Kendala eksternal adalah problem daya saing yang lemah dalam menghadapi pasar bebas, sedangkan kendala internalnya adalah munculnya krisis ekonomi yang mengakibatkan membengkaknya angka pengangguran dan kemiskinan.

Selama ini, sepanjang usia Orde Baru, untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi—agar legitimasi kekuasaan rezim berkuasa tidak goyah, maka penanaman modal asing dipermudah lewat bantuan berbagai kebijakan. Persyaratan penanaman modal dibuat sangat ringan dan lunak. Dengan kebijakan demikian, diharapkan modal asing akan mengalir terus dan kegiatan industri menjadi meningkat. Kerjasama (*joint*) pengusaha pribumi dengan pengusaha asing banyak dilakukan. Apakah kerjasama itu saling menguntungkan atau tidak, cukup sulit untuk dapat diketahui secara transparan. Yang jelas, beberapa perusahaan milik non-pribumi yang bekerjasama dengan penguasa kemudian berubah menjadi perusahaan raksasa. Secara makro, praktik seperti ini telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memetik banyak kekaguman.

Sejalan dengan itu, perusahaan-perusahaan pribumi yang tidak mampu bersaing dengan modal asing, banyak yang bangkrut dan gulung tikar. Angka yang bangkrut mencapai sekitar 30 persen pada 1980-1987, dan 33 persen pada 1988-1993 (lihat Tabel 1). Menurut Dawam Raharjo, sejak modal asing masuk ke Indonesia, banyak industri tradisional—terutama tekstil, gulung tikar akibat tidak mampu bersaing dengan industri modern milik modal asing. Diperkirakan, pada tahun 1969-1970 jumlah industri tekstil tradisional sekitar 324.000 perusahaan. Pada tahun 1976-1977 hanya tersisa sekitar 60.000 perusahaan. Berarti sekitar 60 persen lainnya tidak mampu beroperasi lagi.

Kehancuran industri kecil tidak hanya melanda industri tekstil, tetapi juga industri minuman tradisional. Banyak industri minuman tradisional bangkrut karena tidak mampu bersaing dengan industri minuman modern, seperti Coca Cola, Seven Up, Green Sands, dan lain-lain. Demikian juga industri kecil pedesaan yang memproduksi alat rumah tangga, yang biasanya dibuat dari tanah liat dan bambu, banyak yang gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan produk plastik industri modern. Beberapa ada yang mampu bertahan dengan melakukan diversifikasi dan peningkatan kualitas produk, seperti yang terjadi di Kasongan, Bantul, Yogyakarta. Namun demikian, kondisinya tetap saja sangat memprihatinkan.

Kehancuran industri tradisonal ini dipastikan ada kaitannya dengan perubahan gaya hidup masyarakat. Hal ini didukung dengan kondisi masyarakat yang lebih mudah terprovokasi oleh promosi dan iklan di media-media massa. *Demonstration effect* yang dilakukan media membuat *image* baru pada gaya hidup masyarakat. Ekspansi restoran gaya KFC (Kentuky Fried Chicken) dan CFC (California Fried Chicken)

bermunculan bak jamur di musim hujan. Kota kecil kabupaten juga tidak luput dari ekspansi restoran ini. Globalisasi memungkinkan masyarakat kelas menengah menikmati dan meniru gaya hidup yang dapat mereka lihat. Berbagai macam produk baru ditawarkan dengan iming-iming berbagai macam hadiah yang menggoda. Produk-produk itu adalah produk industri negara maju yang dirancang dan di sesuaikan dengan kondisi pasar setempat.

Ekspansi pasar dan mengalirnya modal asing diikuti dengan masuknya pekerja asing ke Indonesia. Pada periode 1990-1996, jumlah pekerja asing meningkat dari sekitar 18.335 menjadi sekitar 64.760 pekerja (periksa Tabel 2). Tentunya ini berimplikasi pada menyempitnya peluang kerja bagi pekerja lokal. Di samping itu, para pekerja asing ini umumnya dibayar dengan standar gaji negara asalnya, yang biasanya terpaut 10 atau 15 kali lebih besar dari standar gaji di Indonesia. Impaknya, devisa dari sektor jasa mengalami defisit, meski tak semuanya diakibatkan oleh keberadaan pekerja asing. Diperkirakan, defisit negara akibat hal ini sekitar US$ 5 miliar.

Perubahan paling penting dengan arus globalisasi adalah diperluasnya peran pasar keuangan dunia. Triliunan dollar per hari dijual dalam transaksi mata uang (Giddens, 1999: 34).[5] Pialang-pialang uang kaliber dunia dengan leluasa dan dalam tempo singkat dapat menjual-belikan mata uang sebuah negara. Transaksi yang demikian cepat ini telah membawa implikasi bagi stabilitas sistem moneter suatu negara. Sistem moneter Asia Tenggara mengalami krisis setelah terjadi permainan transaksi mata uang di pasar internasional. Mula-mula mata uang Thailand terdepreasi, kemudian mata uang Indonesia, yang berakibat pada munculnya krisis ekonomi.

Krisis moneter yang diawali pertengahan 1997 menyebabkan sendi-sendi perekonomian mengalami krisis. Sesuatu yang tidak terdugapun terjadi, sektor-sektor modern yang selama 32 tahun Orde Baru berkuasa mendapat kemudahan dan menjadi konglomerasi yang menggurita, mengalami penurunan tajam dan hancur. Parahnya, kehancuran mereka masih juga meninggalkan hutang, baik di luar maupun dalam negeri. Efeknya bisa diduga: PHK besar-besaran pun terjadi di mana-mana.

Bukan hanya perusahaan-perusahaan konglomerat saja yang gulung tikar, industri-industri yang bergantung pada bahan baku impor pun banyak yang tidak bisa beroperasi lagi, karena kian melemahnya nilai tukar rupiah. Bersama dengan itu ribuan usaha perdagangan menengah di kota-kota besar pun bangkrut. Di lain sisi, krisis politikpun terjadi, kepercayaan masyarakat pada pemerintah merosot tajam. Gelombang unjuk rasa dan kerusuhan sosial terjadi di mana-mana. Kerusuhan sosial dan amuk massa menghancurkan pusat-pusat kegiatan ekonomi. Banyak pedagang mengalami kebangkrutan karena hal terakhir ini. Akibatnya, jutaan pekerja kehilangan pekerjaan. Angkatan kerja baru juga tidak dapat memasuki pasar kerja.

Globalisasi dan Sektor Informal

Berlakunya pasar bebas, seperti pernah disinggung sebelumnya, tak hanya memunculkan sejumlah peluang dan kesempatan. Pasar bebas juga melahirkan kemirisan: serbuan tenaga kerja asing! Kompetisi demikian tentu saja akan merugikan Indonesia, sebab kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang belum mampu bersaing dengan SDM negara lain. Sekarang saja, jauh sebelum pasar bebas dunia diberlakukan, sudah terasa adanya kesenjangan. Kesempatan kerja yang ada tidak diisi oleh pencari kerja yang jumlahnya besar, karena kebanyakan mereka tidak memenuhi syarat.

Pada saat bersamaan, ketika berancang-ancang memasuki gerbang globalisasi, Indonesia diterpa badai krisis ekonomi. Perusahaan mengalami kemerosotan. Sehingga, jangankan kesempatan kerja, pekerja yang sudah ada saja banyak yang di-PHK. Karakteristik lain dari tenaga kerja kita adalah kentalnya kultur agraris dalam perilaku tenaga kerja Indonesia. Kebiasaan tergantung pada alam, sistem manual, *alon-alon waton kelakon*, kini dihadapkan pada lingkungan industrial yang sarat dengan otomatisasi dan komputerisasi.

Buruknya, kompetisi yang ketat kini bukan hanya terjadi di sektor formal. Peluang kerja sektor informal juga semakin seret. Banyak pekerja sektor formal yang tergusur kemudian banting stir ke sektor informal. Bukan hanya mereka yang tergusur, para kelas menengah juga kemudian banyak yang menengok ketahanan sektor informal. Seperti di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya, banyak kalangan kelas menegah, termasuk juga selebritis, berusaha memasuki sektor informal selama krisis. Oleh karena itu, proporsi pekerja yang memasuki sektor informal menaik dari sekitar 65% pada tahun 1997 (awal krisis) menjadi sekitar 68% pada 1998 pada saat awal krisis (lihat Tabel 2).

Sementara itu, Tabel 3 memperlihatkan pangsa sektor informal dalam kesempatan kerja menunjukkan peningkatan dari 62,8% pada 1997, menjadi 65,4% pada 1998. Jika aspek jender diikutsertakan, peningkatan pada pria lebih besar daripada perempuan. Tetapi, pada kedua tahun yang sama, proporsi pekerja perempuan yang berada di sektor informal lebih tinggi dari pekerja pria. Apabila dilihat menurut perbedaan geografis, peningkatan sektor informal dalam

Tabel 2
Pekerja Menurut STATUS PEKERJAAN
Tahun 1997 dan 1998

Status Pekerjaan	1997 (%)	1998 (%)
Formal	35,4	31,7
Informal	64,6	68,3
Total %	100	100
N (Juta)	82,5	68,3

Sumber : Susenas 1997 dan 1998

Tabel 3
PANGSA PEKERJAAN di sektor informal

	1997	1998
Total	62.8	65.4
Pria	58.3	61.6
Perempuan	70.2	71.5
Perkotaan/ urban	42.8	45.7
Perdesaan/ rural	73.3	75.8

Sumber : Sakernas 1998

kesempatan kerja lebih tinggi terjadi di wilayah perkotaan. Namun pada kedua tahun itu, proporsi pekerja di sektor informal di wilayah pedesaan jauh lebih tinggi.

Pergeseran tenaga kerja dari sektor formal ke sektor informal mengindikasikan bahwa terjadi penurunan kesejahteraan masyarakat. Namun paling tidak sektor informal dapat mencegah salah satu bencana ekonomi makro, yaitu pengangguran. Inilah kenapa sektor informal kemudian dikatakan sebagai *safety belt* bagi perekonomian Indonesia, karena menjadi alternatif usaha bagi masyarakat yang tidak mampu bertahan di sektor formal. Ganasnya persaingan bebas tidak langsung menyentuh sektor informal karena pasar bebas diasumsikan hanya dimainkan dalam skala besar. Buktinya, perusahaan-perusahaan yang kolaps merupakan perusahaan-perusahaan raksasa—jika dibandingkan dengan para pedagang eceran atau pedagang kaki lima. Mengingat semakin ketatnya persaingan di sektor informal ini maka perlu penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan di sektor ini.

Seperti dijelaskan sebelumnya, unit usaha di sektor informal sebagian besar masih belum memiliki akses terhadap fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan lambatnya perkembangan kegiatan usaha ini. Menyadari bahwa

lebih dari separuh masyarakat menggantungkan hidupnya di sektor ini, maka layaknya bagi pemerintah adalah memberi perhatian lebih pada sektor informal. Pemerintah harusnya membuat peraturan dan lembaga yang dapat melindungi eksistensi unit-unit usaha sektor informal. Selain itu, pemerintah juga selayaknya menyediakan fasilitas dan kemudahan untuk memperoleh modal usaha. Mengingat, modal yang diperlukan untuk berusaha di sektor ini relatif kecil dan biasanya tidak tersedia jaminan, maka permohonan kredit kepada perbankan sering kali tidak dapat dipenuhi. Sehingga hal ini dapat dimungkinkan dengan membentuk lembaga khusus untuk pemberian pinjaman bagi mereka yang bergerak di sektor informal. Tak hanya fasilitas fisik dan hukum yang mesti diperhatikan pemerintah, pelaku sektor informal juga perlu mendapat pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan untuk mengorganisisr kegiatan usaha. Mereka juga perlu dikenalkan dengan penggunaan alat-alat teknologi. Pasar untuk menampung dan mendistribusikan hasil produksi sektor informal juga merupakan salah satu hal yang penting mendapat perhatian dari pemerintah.

Bukanlah suatu hal yang mustahil bila kebangkitan ekonomi bangsa Indonesia dimungkinkan oleh perkembangan sektor informal. Catatan sejarah telah memperlihatkan bukti bahwa kekuatan rakyat sangat berpengaruh terhadap revolusi yang terjadi di negeri ini. Namun yang terpenting adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah bahu-membahu mengatasi masalah-masalah yang kini sedang melilit. Globalisasi atau pasar bebas—atau apapun itu—tak akan mampu mengguncangkan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, bila setiap warga negara menyadari posisi masing-masing dan mau melakukan yang terbaik bagi bangsanya.

CATATAN AKHIR

1. Lihat Anthony Giddens, Jalan Ketiga: Pembaharuan Demokrasi Sosial (terj.), (Jakarta: Gramedia, 1999), hal. 38.
2. Ibid., hal. 32-33.
3. Untuk penjelasan lebih lengkap, simak Hidayat, Peranan Sektor Informal dalam struktur ekonomi ,dalam Profil Indonesia, (Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan, 1979).
4. Tabel ini dimuat dalam makalah Tadjuddin Noor Effendi Pasar Bebas, Peluang Kerja, dan Mobilitas Pekerja yang disampaikan dalam Diskusi Panel Ahli GBHN yang diselenggarakan PPE Fak. Ekonomi UII di Hotel Radisson Yogyakarta, 23 Juni 1997.
5. Giddens, Op. Cit., hal. 34.

SAVE YOUR OWN LIVE

DON'T BE A FOOL

Gelimang Burjo Yogyakarta

Tim Survei Redaksi

Reporter:
Indi Aunullah, Nufudlurrofi, Lukman Solihin, M. Iqbal Muhtarom, Gilang D. Parahita, Agustinus B. da Costa, Irfan Afifi, Anna Mariana, Indarti Yuni Astuti, Bambang P. Jatmiko, Idha Saraswati, Karlina, Aseptyanto, Dia Mawesti, Suhandini, Fauzul Muhammad, N. Budi Baskoro, Tarli N., M. Iqbal Aji Daryono

Penulis:
Irfan Afifi, Anna Mariana, M. Iqbal Muhtarom, Bambang P. Jatmiko, Indi Aunullah, Agustinus B. Dacosta
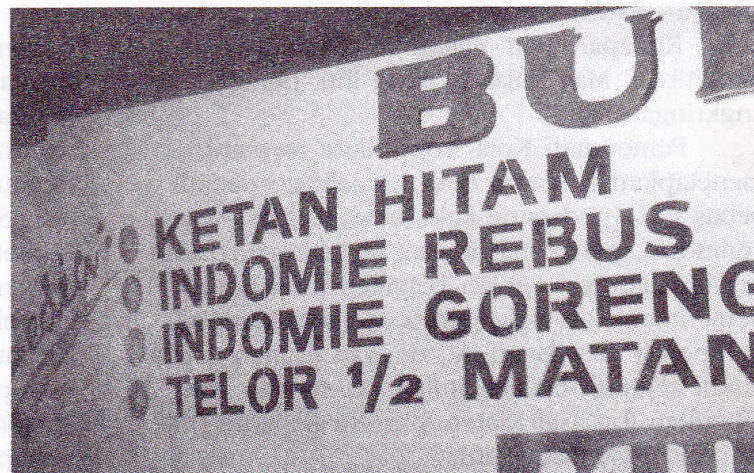
Abib.Balairung

Pertokoan di Jalan Malioboro sudah tutup semua, hampir satu jam yang lalu. Hanya ada satu-dua toko yang buka—toko yang memang 24 jam melayani pembeli. Tetapi, itu tak berarti Yogya telah benar-benar terlelap. Di tepian jalan masih banyak kerumunan orang menikmati malam.

Berjalan lurus ke selatan, menyusuri Malioboro, sampailah di persimpangan empat yang berwibawa, memancarkan aura Yogya sebagai kota tua. Di dua sudut yang bersisian, berjejer beberapa bangunan klasik peninggalan Belanda, yang kini dijadikan kantor-kantor publik. Di sudut lain, terdapat Monumen Serangan Oemoem 1 Maret dan sebuah benteng tua yang masih angkuh berdiri, Vredeburg namanya. Di seberangnya, terdapat bangunan klasik satu lagi, Gedung Agung, yang di zaman perang kemerdekaan pernah dioperasikan sebagai istana negara. Suasana malam kian lengkap dengan benderangnya cahaya lampu-lampu kota khas Yogya. Di sinilah jantung kota Yogya berada. Dari sini pula Yogya bermula. Karenanya, tempat ini pun disebut titik nol Yogya.

Malam terus melarut. Tapi, titik nol Yogya seperti baru memulai kehidupannya. Ada banyak orang yang berkelompok sembari duduk lesehan. Entah apa yang mereka perbincangkan. Mungkin berdiskusi serius. Atau, boleh jadi memang benar-benar santai. Dari gerobak-gerobak penjual kacang rebus, asap terlihat masih mengepul. Nasi bungkus yang berisi sambal teri atau tempe, masih bertumpuk di tenda-tenda angkringan (warung tenda yang menjual nasi bungkus serta berbagai penganan dan minuman tradisional lainnya—*Red.*). Ternyata, mereka memang baru buka. Kenapa? "Biar *nggak* kena operasi penertiban, Mas," ujar seorang ibu, pemilik angkringan.

Pemerintah Kota Yogyakarta memang menetapkan kawasan tersebut sebagai daerah bebas PKL (pedagang kaki lima). Tetapi kemudian, penetapan itu tak tegas benar dalam pelaksanaannya. Seolah bersikap kompromis, pemerintah kota selanjutnya membiarkan PKL beroperasi di wilayah itu, dengan catatan di atas pukul sepuluh malam! Itulah keterangan yang diberikan ibu asal Klaten tersebut kepada BALAIRUNG, malam itu.

Kisah sektor informal yang selalu bermasalah dengan pemerintah kota memang seperti tiada habisnya..Begitu pun di Yogya. Sederet kasus soal ini bisa direntang. Tentu saja, cerita soal penataan kawasan Malioboro adalah yang sering terdengar. Dan jelas bukan hanya itu. Bergeser sedikit ke arah timur titik nol Yogya, ada kawasan Shopping Center. Kawasan itu memang bukan pusat perbelanjaan modern yang wah. Di situlah, salah satunya, terdapat pasar yang memperjualbelikan buku-buku—baru maupun bekas—terbesar di kota pelajar ini. Pasar buku di Jalan Panembahan Senopati itu pun tahun-tahun kemarin pernah dipersoalkan. Mereka hendak dipindahkan oleh pemerintah ke kompleks bangunan baru yang letaknya lebih ke dalam. Terang saja, keinginan itu ditolak mentah-mentah oleh para pedagang buku. Beruntung, di Yogya, pemerintah kota lebih banyak bersikap lunak terhadap mereka—sebuah sikap yang jarang ditemui di kota-kota besar lainnya.

Dan memang pemerintah tak pernah kuasa menahan kehadiran mereka. Hanya saja, membiarkan bukan berarti melegalkan. Berbagai kasus itu justru membuktikan bahwa pemerintah tetap menganggap sektor informal sebagai pengganggu ketertiban kota. Dengan kata lain, sektor ini masih ditempatkan sebagai urutan kedua setelah sektor formal.

Hanya saja, pelaku sektor informal seperti bergeming. Mereka tetap berjalan dengan logikanya sendiri. Di Malioboro, sebagai misal, di lesehan penjual souvenir, pakaian, dan warung-warung makan, tak pernah sepi pengunjung. Begitu pula dengan sektor informal di bidang jasa. Sebut saja misalnya, cetak foto, rental komputer, *laundry*, fotokopi, sablon, stempel, terbentang hampir di setiap sisi jalan dan kompleks pemukiman, terutama di sekitar kampus. Belum lagi sektor manufaktur, yang merupakan khas kota budaya ini. Di Kotagede, kerajinan perak yang mahsyur itu pun kian semarak. Jika ditaksir, terdapat lebih dari dua ribu

unit usaha informal (sektor jasa, perdagangan dan manufaktur) di Kota Yogya (lihat Tabel 1). Itu tentu saja belum termasuk mereka yang tak terdeteksi, yang datang dan pergi.

Belakangan, di saat perekonomian formal masih saja terpuruk, keberadaan sektor informal justru kian menjamur. Hasil penelitian Akatiga (sebuah LSM di Bandung—*Red.*) terhadap pedagang angkringan di kawasan Alun-alun Selatan Yogyakarta, menunjukkan bahwa pelaku sektor informal yang kian bertambah jumlahnya merupakan akibat krisis yang terjadi di sektor formal. Mungkin pernyataan Dr. Tadjudin Noor Effendi lebih memperjelas hal ini. Menurut dosen Sosiologi UGM ini, meluapnya pekerja informal belakangan adalah akibat banyaknya tenaga formal yang mengalami PHK. "Pasar tenaga kerja Indonesia mengalami informalisasi," cetusnya.

Lebih dari itu, sebenarnya ketika sektor formal dalam keadaan "baik-baik saja" pun bukan berarti sektor informal tiada. Bedug pembangunan yang ditabuh pemerintah negeri ini, lebih berpihak pada sektor modern (formal). Akan tetapi, sektor formal, dalam kenyataannya, tiada kuat menyangga jumlah tenaga kerja Indonesia yang amat besar. Alhasil, sektor informal tetap tumbuh dan berjalan beriring dengan sektor formal. Karenanya, asumsi bahwa sektor informal hanya merupakan fenomena yang bersifat sementara seperti pernah dikoarkan JH. Boeke, tidak terbukti.

Mulanya, barangkali, terjun ke ranah sektor informal bukan pilihan, meski bukan pula sebuah keterpaksaan sepenuhnya. Walau sebagian pelaku sektor ini benar-benar berasal dari kelompok ekonomi sulit, tapi tak jarang pula dari mereka yang menuai sukses. Karena itu pula, belakangan, ada kecenderungan bahwa terjun ke sektor informal bukanlah buah keterpaksaan. Sempitnya lahan kerja yang tersedia, menyebabkan sektor informal tak sekadar menjadi ajang penyambung hidup. Tetapi, sektor ini kemudian juga menjadi lahan tempat mimpi hidup sejahtera dititipkan.

Yogyakarta memang punya kisah agak ramah soal sektor informal. Meski upaya campur tangan pihak pemerintah bukannya tak ada, namun ada citra apik soal sektor informal yang telah terlanjur melekat pada kota ini. Malahan, keberadaan sektor informal justru menjadi *trademark* kota ini. Ketika orang bicara Malioboro, misalnya, pasti yang langsung terbayang adalah deretan panjang pedagang souvenir dan pedagang makanan lesehan di sisi jalan yang telah melegenda itu.

Tak hanya penduduk lokal saja yang menekuni sektor ini, sebagaimana terlihat dari industri kerajinan gerabah dan peraknya. Tetapi juga, pelaku sektor informal dari luar Yogya pun turut mengayuh kehidupannya di kota ini. Menariknya, ada beragam jenis usaha yang menunjukkan identitas masing-masing daerah di kota ini. Sebagai contoh dalam bisnis makanan, orang mengenal angkringan dari Klaten, sate ayam dari Madura, roti bakar asli Bandung, dan sebagainya. Pada jenis usaha yang lain pun demikian. Usaha fotokopi, misalnya, identik dengan jenis usaha yang dilakoni orang Minangkabau.

Memang tak semua mereka menangguk

Tabel 1: Pelaku Ekonomi sektor Informal di Kota Yogyakarta

KECAMATAN	JENIS USAHA				JUMLAH
	JASA	PERDAGANGAN		MANUFAKTUR	
		Makanan	Non Makanan		
Wirobrajan	27	87	82	1	197
Gondomanan	41	287	419	5	752
Umbulharjo	42	196	75	42	355
Pakualaman	23	125	42	5	195
Mergangsan	13	68	39	0	120
Tegalrejo	11	49	10	0	70
Kotagede	41	36	24	92	193
Kraton	10	48	72	152	282
Mantrijeron	10	85	9	11	115
Ngampilan	8	47	11	6	72
Jetis	29	79	3	62	174
Gondokusuman	178	300	207	29	714
JUMLAH	433	1407	993	405	3239

Data diperoleh dari setiap kecamatan di wilayah kota Yogyakarta

Hendi.Balairung

sukses. Tetapi, tak sedikit juga yang berhasil. Uniknya lagi, keberhasilan usaha tak serta merta membuat mereka tampil menjadi formal. Dengan ciri, yang kebanyakan tradisional, mereka juga mampu menunjukkan watak kapitalis dan korporatifnya sebagai salah satu indikator kesuksesan. Setidaknya, hal tersebut dapat dilihat pada fenomena usaha warung bubur kacang hijau (burjo), yang menjadi objek bidikan survai ini.

Mulanya, barangkali, terjun ke ranah sektor informal bukan pilihan, meski bukan pula sebuah keterpaksaan sepenuhnya. Walau sebagian pelaku sektor ini benar-benar berasal dari kelompok ekonomi sulit, tapi tak jarang pula dari mereka yang menuai sukses.

Awal'80-an, jumlah mahasiswa Yogya belum lagi sepadat sekarang. Akan halnya dengan jumlah pelaku sektor informal, tentu saja, juga tidak semeriah saat ini. Jenis usaha warung burjo belum lagi ada. Pada saat seperti ini datang Pak Iyah, warga asal Kuningan. Ia dengan jelinya melihat peluang usaha burjo di Yogyakarta. Lelaki tua ini kemudian mendirikan warung dengan nama Sumber Vitamin, yang kini berhasil menyangga hari tuanya di Kuningan.

Menelisik siapa mulanya yang mendirikan usaha burjo di Yogya, memang rumit. Belum ada catatan terpasti tentang ini. Bang Co, penjual burjo di kawasan Jembatan Merah, mengaku bahwa pertama kali orang tuanya memulai usaha burjo pada awal 1980 di daerah Condong Catur. Kini, usaha itu telah dialihkan pada orang lain. Yang jelas sejak masa itulah usaha burjo di Yogya berangsur-angsur semakin ramai.

Kini, di sebuah perkampungan seputar kampus, misalnya, warung-warung burjo dapat ditemui dalam jarak tak lebih dari tiga ratus meter. Memang tak ada data pasti juga soal ini. Namun, jumlahnya diperkirakan tak kurang dari 500-an gerai di seantero kota Yogya dan sekitarnya. Di kawasan Kecamatan Depok Sleman, yang merupakan daerah padat kampus, jumlah mereka mencapai lebih dari seratus buah. Dari 76 gerai warung di kawasan Depok yang sempat disurvai secara mendalam oleh BALAIRUNG, didapati 48 gerai yang ternyata berdiri setelah 1997, tahun saat krisis mulai menerpa negeri ini. Itu artinya, jumlah warung burjo yang berdiri saat krisis berlangsung mencapai lebih dari dua kali lipat jumlah warung sebelum krisis (63%). Jika asumsi ini yang dipakai, tentu kita dapat membayangkan betapa banyak jumlah warung burjo di Yogya dan sekitarnya, saat ini.

Gejala itu mungkin memperkuat anggapan bahwa sektor informal menjadi tempat pelarian bagi sektor formal yang terus mengalami krisis. Boleh jadi, begitu. Tetapi, dalam kasus usaha burjo, agak sulit membuktikan anggapan itu secara utuh. Pasalnya, rerata pekerja burjo adalah mereka yang berpendidikan rendah. Separuh dari mereka malah tak tamat SMU (lihat Tabel 2).

Dengan latar pendidikan yang rendah, memang sulit bagi mereka untuk menerobos lahan kerja sektor formal. Sebab itu, cara yang mereka tempuh demi menghidupi diri ialah dengan menjalani pekerjaan sebisa tubuh mereka lakukan, tanpa *skill* yang perlu diasah secara khusus dan tak perlu modal besar, sebagaimana yang terlihat dalam usaha burjo. Sebuah profesi yang jelas tak dapat dikatakan baru, namun tak pernah bisa punah oleh beragam profesi baru yang bercorak modern dan formal.

Memang terdapat kesan bahwa usaha seperti ini amat gampang dilakoni. Tetapi, tak bisa dimungkiri, hal ini membutuhkan keliatan vitalitas. Ya, vitalitas. Bayangkan saja, sebagian besar warung burjo beroperasi 24 jam! Memang, tidak selama itu pula para pegiatnya harus terjaga. Ada pembagian

kerja di sana. Seorang karyawan warung burjo bisa kena jaga mungkin selama dua belas jam, mungkin delapan jam. Ini tergantung pada jumlah pekerja keseluruhan di warungnya, dan bagaimana *shifting* disepakati di warung tersebut.

Itu baru soal jaga untuk melayani pembeli. Kesibukan sebenarnya, jelas lebih dari itu. Ini bisa dilihat dari bagaimana mula mereka mendatangkan bahan untuk dijual, kemudian mengolah dan lantas memajangnya untuk selanjutnya siap disantap pembeli. Manakala fajar belum lagi menyingsing, kesibukan mengolah sajian untuk hari itu telah dimulai. Mereka telah harus berbagi kerja. Ada yang ke pasar mencari bahan. Ada juga yang mulai berlepotan dengan adonan penganan ringan, seperti kue molen dan tempe goreng. Atau, dalam kesempatan yang sama, mereka berdiri menghadap kompor sambil mengaduk kacang hijau di bejana. Sebagian besar aktivitas itu mereka jalani di rumah usaha yang sempit, tempat yang juga dipakai untuk beristirahat, berbagi senang serta keluh dengan penghuni lainnya.

Tabel 2
Jenjang Pendidikan Pemilik Usaha Burjo di Yogyakarta

Jenjang	Jumlah
SLTP — Maks. Lulusan SLTP	:::59 Orang
SMU — Maks. Lulusan SMU	:::37 Orang
PT — Maks. Lulusan PT	:::8 Orang

Jumlah: 104 orang

Data diperoleh dari wawancara dengan 136 pemilik burjo di Yogyakarta. Ada 32 pemilik burjo yang enggan mengakui jenjang pendidikan terakhir yang ditempuhnya.

Hendi.Balairung

Dengan segenap kesibukan itu, tentu mereka tak bisa menyembunyikan lelah dan kantuk. Karena itu, giliran tiba saat istirahat, akan mereka manfaatkan waktu itu dengan benar-benar beristirahat: tidur. Maka wajar jika siklus hidup pekerja burjo yang biasanya jaga malam, tak jauh beda dengan pola hidup kelelawar: malam melek, siang terlelap! (baca: Sepotong Hidup dalam Mangkuk Burjo).

Mereka memandang pilihan hidup seperti itu memang lebih baik. Datangnya pilihan itu pun bukannya tanpa musabab. "Kalau jadi buruh tani *mah* harus *nyangkul*, panas dan kotor. Sedangkan di sini, di burjo, walaupun hanya karyawan baru, gajinya sudah 200 ribu," terang Budi Elon, salah seorang pengusaha burjo yang telah sukses. Barangkali pengakuan Budi Elon klop dengan tesis lawas ihwal muasal hadirnya sektor informal di perkotaan: ada faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*).

Dinamika kehidupan sosial dan ekonomi di pedesaan—tempat sebagian besar penjual burjo berasal—yang relatif stagnan merupakan alasan yang mendorong penduduk desa untuk hengkang ke kota. Sementara itu, kota dengan gemerlap kehidupan modern yang lebih menjanjikan dibandingkan kehidupan desa merupakan faktor penyedot, mengapa penduduk desa menyerbu kota.

Memang, apa yang dikatakan Budi Elon sepertinya tak terlalu melenceng dengan keadaan di Kuningan. Dari pemantauan BALAIRUNG di wilayah Kuningan, sebuah kota kecil di pedalaman Jawa Barat tempat mayoritas pengusaha burjo berasal, sektor pertanian tak lagi mampu menopang hidup seluruh penduduk Kuningan. Walaupun sektor ini tetap menjadi garis utama kebijakan pemerintah Kabupaten Kuningan, tapi tetap tak dapat disangkal bahwa lahan yang tersedia tak mampu membendung jumlah penduduk yang terus membumbung (baca: Dari Kuningan Menyerbu Yogya).

Parahnya lagi, proses menuju industrialisasi yang disetir pemerintah, malah seperti hendak menikam sektor pertanian. Di saat pertanian yang belum sangat kuat dan mampu memberikan surplus bagi lancarnya proses industri, proyek mekanisasi pertanian melalui agenda revolusi hijau kian melantakkan struktur ekonomi, bahkan budaya penduduk setempat. Mereka akhirnya banyak yang kehilangan lahan penghidupan. Jikapun masih menekuni kegiatan membajak dan mencangkul, keuntungan yang diraup tidaklah seberapa karena sistem ekonomi yang tak berpihak pada mereka. Alhasil, pada saat yang bersamaan, kota yang menjadi pusat pembangunan dipandang lebih memikat dan menjanjikan. Maka, berbondonglah mereka

menyerbu kota-kota besar.

Untuk kasus burjo, ada tiga kota utama di mana warung burjo banyak bertebaran: Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Di kota-kota itu, nyatanya, mereka bisa diterima. Pada awalnya, usaha ini belum bersifat permanen dengan membuka gerai. Seperti pernah dialami Pak Iyah (80), salah seorang yang pertama kali merintis usaha burjo di Yogyakarta. Pak Iyah pada awalnya menjajakan burjo dengan berkeliling kampung di Jakarta pada 1960-an.

Fakta warung burjo jelas meneguhkan kian berseminya dualisme corak ekonomi: yang tradisional dan modern, yang informal dan formal. Keberadaan mereka, rupanya, relatif dapat diterima dan secara tak langsung turut menyangga kehidupan para urban dan pekerja formal di kota. Di Yogya, ada sedikit perbedaan yang khas dibandingkan di Bandung dan Jakarta. Jika di Bandung dan Jakarta pasar mereka adalah para buruh dan karyawan, di Yogya mahasiswa menjadi konsumen utama mereka.

Di sinilah kekhasan corak usaha ini didapati. Usaha-usaha warung burjo umumnya menempel dengan kompleks kampus dan perkampungan yang padat mahasiswa. "Konsumen di sini 90 persen mahasiswa, Mas," jelas Bang Co pemilik warung burjo Doa Abbah I. Kawasan padat kampus—dan itu berarti wilayah tempat warung burjo bertebaran—meliputi sepanjang Jalan Kaliurang, Jalan Gejayan, Jalan Babarsari, Maguwoharjo, dan

Tabel 3 Omzet Warung Burjo Dari Produk Formal Dalam Sehari

Daftar Menu	Harga (Rp)	Frekuensi	Total(Rp)
Intel Goreng	2300	41	94300
Tante Goreng	1500	18	27000
Intel Rebus	2300	66	151800
Tante Rebus	1500	13	19500
Kopi Susu	1700	3	5100
Kopi Biasa	1200	6	7200
Es Susu	1700	6	10200
Es Teh	700	94	65800
Es Coffemix	1200	8	9600
Es Milo	1200	20	24000
Es Nutrisari	1000	24	24000
Es Coca Cola	1700	2	3400
Soda Gembira	3000	4	12000
Teh Anget	700	48	33600
Coffe Mix	1200	2	2400
Milo Anget	1200	11	13200
Susu Anget	1500	13	19500
Es Sirup	800	3	2400
Total			525000

Hendi.Balairung

Sumber: Survei di warung burjo Murni Jl. Kaliurang, tanggal 13-14 Juni 2003.

Condong Catur di Yogya bagian utara. Sementara di selatan, mencakup wilayah Umbulharjo, Jalan Parangtritis, dan Gamping. Itu masih ditambah dengan kawasan kampus yang terpencar-pencar namun tak sedikit jumlahnya. Di Yogya, sedikitnya terdapat 148 perguruan tinggi. Kecamatan Depok saja, tempat survai BALAIRUNG difokuskan, memiliki tak kurang 20 kampus. Hebatnya, hampir semua kampus besar berada di wilayah ini. Misalnya, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan Universitas Sanata Dharma.

Jika warung lesehan dan pedagang Malioboro memiliki kekhasan untuk menarik minat wisatawan, maka usaha burjo mengambil sisi yang lain. Mahasiswa sebagai konsumen utama usaha burjo menambah catatan identitas relasi di masyarakat Yogya. Kebiasaan begadang pada banyak penduduk perkampungan di Yogya plus adanya aktivitas malam mahasiswa, menjadi lebih lengkap karena adanya warung burjo. Kala lapar menghampiri di ujung malam, warung burjo siap selalu dengan penganan pengganjal perut. Tak dapat disangkal jika kemudian, lewat gerai burjo, muncul dinamisme kultural baru.

Umumnya, pemilik usaha burjo memang tak berbekal kemampuan menajerial dan marketing secara formal. Tetapi *toh* mereka bisa menjalankan usahanya dengan mantap. Sejauh ini, mereka bisa mengikuti dan beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Mereka juga punya serangkaian usaha jitu untuk lebih dari sekadar *survive*. Bila diamati, ada serangkaian evolusi yang terjadi dalam usaha burjo.

Awalnya, mungkin hanya sekadar usaha dengan menjual bubur kacang hijau sebagai produk utamanya plus kopi dan berbagai makanan tradisional sebagai pelengkap. Tetapi, lambat-laun berbagai terobosan pun dilakukan. Warung-warung burjo kemudian juga menyediakan sajian yang berasal dari porduk-produk formal. Menurut Ahmad Soja, pemilik usaha warung burjo Murni, hal itu mulai dilakukan warung-warung burjo pada paruh kedua '80-an. Indofood terdepan dalam hal ini. Perusahaan yang memproduksi mie instan terbesar di dunia ini, awalnya, melakukan pendekatan dengan memberikan bonus kepada para penjual burjo. "Misalnya dikasih dua kardus, yang dibayar cuma satu kardus saja," terang Ahmad Soja.

Sejak itu, hubungan antara warung-warung burjo dan kelompok usaha sektor formal pun kian erat. Bahkan, di banyak warung, boleh dibilang sebagian besar omzet mereka berasal dari produk-produk formal ini. Ya, produk formal yang dengannya mereka mengambil keuntungan dari balas jasa menyajikannya di atas meja. Ini bisa dilihat dalam temuan survai BALAIRUNG di warung burjo Murni yang terletak di jalan Kaliurang, pada suatu hari. Hari itu, dalam sehari semalam dari Rp 847.000 pemasukan yang diraup, Rp 525.000 berasal dari produk-produk formal (lebih lengkap lihat Tabel 3 dan Tabel 4).

Tak hanya mie instan, berbagai produk

Tabel 4
Omzet Warung Burjo Dari Produk Informal Dalam Sehari

Daftar Menu	Harga (Rp)	Frekuensi	Total (Rp)
Burjo	1100	136	149600
Telur 1/2 Matang	1000	16	16000
Burjo Susu	1700	3	5100
Jeruk Panas	800	8	6400
Es Burjo Susu	1700	2	3400
Es Jeruk	800	35	28000
Es Burjo	1200	5	6000
Telur Puyuh	800	8	6400
Gorengan	300	232	69600
Kerupuk	200	33	6600
Pisang	500	21	10500
Molen	400	36	14400
TOTAL			322000

Hendi.Balairung

Sumber: Survei di warung burjo Murni Jl. Kaliurang, tanggal 13-14 Juni 2003.

minuman dari bermacam pabrik pun menghampiri warung burjo. Coca-Cola, salah satu perusahaan terbesar yang memproduksi minuman berkarbonasi pun turut membidik warung burjo sebagai arena potensial untuk memasarkan produknya. Mereka selalu memasok produknya secara kontinu, sebagaimana mereka lakukan kepada pengecer-pengecer lain.

Memang tak semua produk formal itu didatangkan oleh perusahaan yang memproduksinya. Banyak produk juga dijemput oleh para pengusaha burjo dengan membeli di pasar. Bagaimanapun, ini menandakan adanya hubungan antara sektor formal dan informal, sengaja maupun tidak. Persoalan relasi antara keduanya amat kompleks. Sepintas lalu, relasi tersebut bersifat mutualisme, saling menguntungkan. Mie instan Indofood memberikan keuntungan lebih dari separuh pendapatan umumnya bagi penjual burjo. Sedangkan, pihak Indofood sendiri begitu menyadari arti strategis warung burjo sebagai pengecer langsung produk mereka. Menurut Agus Wahono, staf marketing PT Indofood Yogyakarta, 30% penjualan Indomie terjadi di warung burjo (baca: Pasar Potensial Itu Bernama Warung Burjo).

Tetapi sebenarnya, hubungan antara warung burjo dan sektor formal tak selalu mesra. Lihatlah ketegangan yang sempat mewarnai relasi antara Arya Kamuning (AK), paguyuban pengusaha burjo Yogyakarta, dengan PT Indofood. Menyadari usahanya begitu besar menguntungkan Indofood, pengurus AK sempat meminta beberapa fasilitas kepada pihak Indofood. Kasus yang sempat bikin kesal pihak AK, salah satunya, ialah ketika proposal mereka soal penambahan angkutan mudik lebaran bagi pedagang burjo se-Yogya ditolak Indofood.

Sayang ketegangan tersebut harus menyisakan luka bagi pihak AK. Ini karena AK gagal memainkan posisi tawarnya yang sebenarnya bagus. Ancaman boikot terhadap produk Indofood yang sempat terlontar, hanya sekadar gertak sambal saja. Padahal, minimal, mereka bisa menaikkan posisi tawar, misalnya, dengan hanya menerima produk di luar Indofood. Untuk melakukan hal ini memang tak gampang. Indofood telah telanjur menguasai peta perdagangan mie di negeri ini (baca: Ketika Kamuning Membawa Layu).

Yang juga penting diperhatikan, agaknya konsolidasi internal organisasi AK perlu dibenahi. Sejauh ini, sifat paguyuban ini lebih mengedepankan sisi emosional kultural sesama mereka semata. Tapi, tidak pada kesadaran struktural sebagaimana dipunyai oleh organisasi-organisasi buruh di perusahaan-perusahaan formal.

Akhirnya, ada satu kenyataan yang tampak dari kasus sektor informal di Yogya: mereka tetap ada bahkan kian mantap justru tatkala sektor formal terpuruk. Memang tak dimungkiri, dalam beberapa hal, kehadirannya juga beriring dengan kemunculan sektor formal. Tetapi, dalam posisi itu pun justru mereka menjadi penopang sektor formal. "Sektor informal menjadi bumper kapitalisme!" cetus Miftah Wirahadikusumah. Sayangnya, kondisi itu tak membuat sektor informal dihargai, melainkan masih dipandang sebelah mata.

Padahal, lebih jauh dari itu, sektor informal memiliki sisi kemandiriannya sendiri. Ia, sekali lagi, merupakan penegasan bahwa dualisme ekonomi masih saja terjadi di sini. Tetapi tidak semata karena mereka belum memasuki tahap modern yang memiliki watak kapitalistik, melainkan seperti itulah watak kapitalistik ala sektor informal negeri ini. Memang tak sepatutnya lagi sektor informal dipandang secara dikotomis.

Kebiasaan begadang pada banyak penduduk perkampungan di Yogya plus adanya aktivitas malam mahasiswa, menjadi lebih lengkap karena adanya warung burjo. Kala lapar menghampiri di ujung malam, warung burjo siap selalu dengan penganan pengganjal perut.
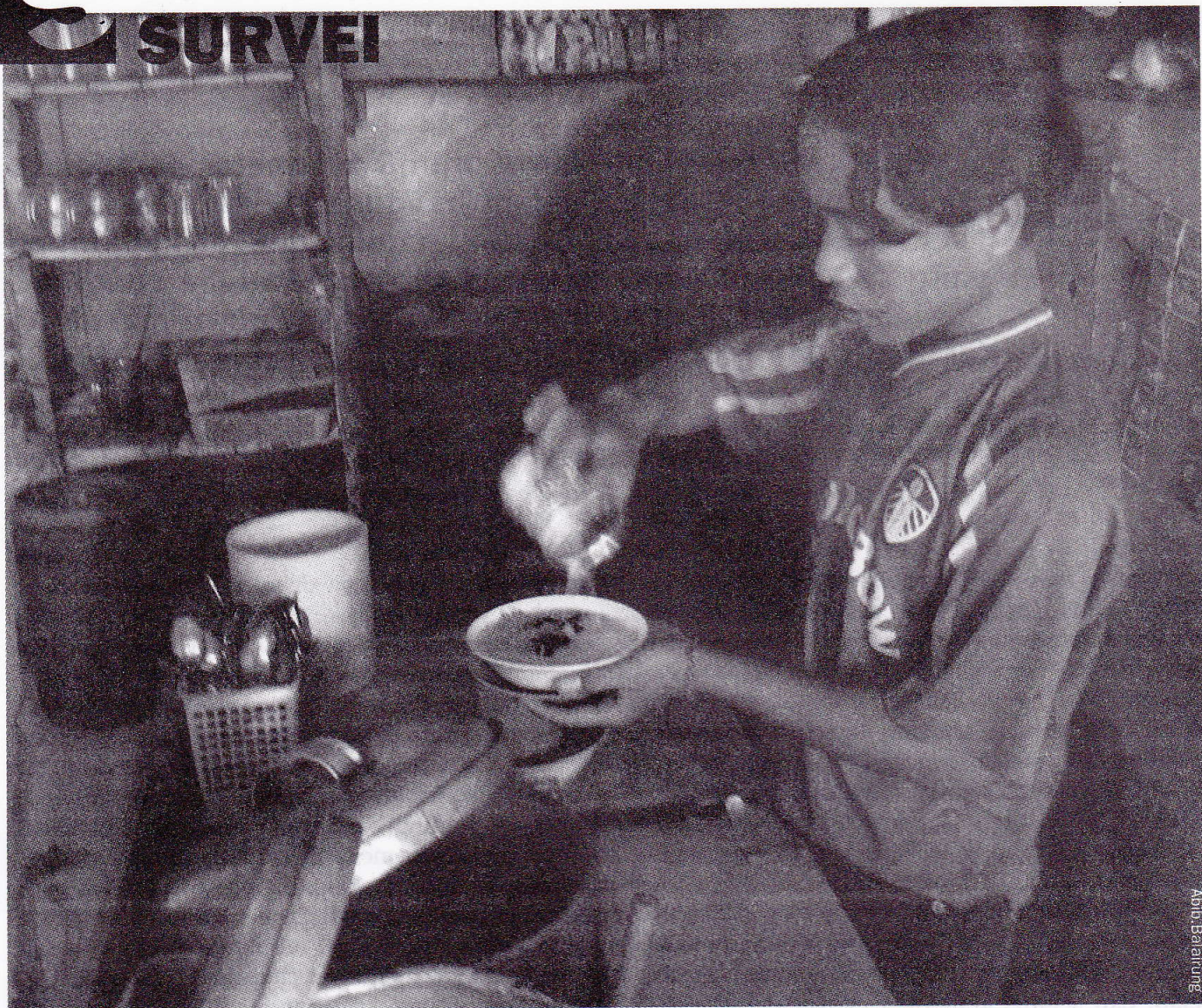
Abib.Balairung

Sepotong Hidup dalam Mangkuk Burjo

Petak kecil bangunan berukuran 3 x 5 meter persegi itu nampak beda dengan bangunan-bangunan lain di sekitarnya. Bukan soal bentuk, namun denyut kehidupan yang seolah tak pernah senyap di sana. Padahal, pagi itu, jalan aspal di depannya yang menjadi pintu masuk ke Kampung Paingan, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Sleman, belum lagi ramai.

Kang Dedy (28), pemilik bangunan, sudah terlihat asyik dengan adonan tepungnya. Di sudut lain, Adriansyah, kawannya, sibuk menggoreng. Barangkali karena hangatnya api kompor, mereka tak lagi hirau dengan hawa dingin pagi musim kemarau. Sementara, sesosok tubuh lain tampak hanya berdiri mengawasi. Dialah Rina, anak semata wayang Kang Dedy. Sesekali, gadis mungil berusia 1,5 itu menggelayut di lengan sang ibu, yang juga tengah membantu bapaknya.

Itulah sepenggal ritual yang ajeg dilakoni oleh Kang Dedy dan kawannya, sesama penjual burjo. Mereka bangun ketika orang-orang masih lelap, dan sejurus kemudian hanyut dalam kesibukan khas warung burjo: mengaduk dan menggoreng adonan, untuk disulap menjadi kue molen khas warung burjo. Empat tahun sudah Kang Dedy menjalani rutinitas demikian.

Warung burjo memang usaha yang membutuhkan ketelatenan tersendiri. Pangsa pasarnya yang kebanyakan mahasiswa, membuat usaha ini harus pula mengikuti ritme hidup khas mahasiswa: siap melayani perut yang keroncongan, kapan pun dibutuhkan. Lihat saja, dari sore hingga dini hari, warung ini selalu riuh oleh celotehan anak-anak muda. Keberadaannya berbeda dengan kebanyakan usaha lain yang paling-paling hanya buka sampai tengah malam.

Merebaknya gerai-gerai burjo di Yogya memang tak bisa lepas dari banyaknya jumlah mahasiswa yang ada di kota ini (lihat: Gelimang Burjo Yogyakarta). Dengan pelayanan yang khas, yaitu buka 24 jam non-stop (meski tak semuanya melakukan hal ini), burjo menjadi urat nadi kehidupan malam di Yogya. Namun, jangan lantas dibayangkan bahwa sang penjual *ngendon* tanpa henti menunggu pembeli. Usaha burjo ini membutuhkan paling tidak dua hingga tiga orang pekerja agar bisa buka sehari semalam.

Pola pembagian *shift* serta jumlah pekerja yang berjaga, biasanya disesuaikan dengan arus pembeli yang datang ke warung tersebut. Warung burjo Murni di Jalan Kaliurang, misalnya, membutuhkan enam orang pekerja, mengingat letaknya di kawasan yang padat lalu lintas. Mereka bergantian jaga tiap 12 jam. Ini berbeda dengan warung Doa Abbah I, yang terletak di Gang Jembatan Merah, sebelah timur Jalan Gejayan. Warung burjo yang punya empat orang pekerja ini lebih memilih untuk menerapkan pembagian enam jam kerja. Dengan pola yang demikian, seorang pekerja mengalami dua *shift* dalam sehari. Ucep (15) misalnya, sulung dari tiga bersaudara ini mendapat jatah kerja dari pukul tujuh pagi sampai satu siang, lalu dari pukul tujuh malam sampai pukul satu dini hari. Sehingga, meski sebenarnya mereka bekerja dua belas jam per hari, namun dengan pembagian *shift* semacam itu, energi mereka tak terlalu terkuras.

Pola pembagian kerja yang demikian sebenarnya masih memiliki variasi, yaitu yang bersifat tetap atau bergantian. Jika menerapkan pola bergantian, seminggu sekali para pekerja biasanya bertukar jam jaga. Mereka yang minggu sebelumnya berjaga malam, pada minggu berikutnya ganti berjaga siang. Namun jika bersifat tetap, mereka yang berjaga malam pun harus terus-terusan melek malam selama sebulan penuh.

Sebulan penuh? Ya. Paling tidak itulah yang dialami Agus (23). Ritme hidupnya berkebalikan dengan orang kebanyakan: melek semalaman, dan tidur sepanjang siang. Ia, bersama seorang rekannya, mendapat jatah menjaga warung burjo Mekar Mulya di daerah Pogung, sebelah utara Fakultas Teknik UGM, dari pukul tujuh malam sampai delapan pagi. Apa yang dialami Agus juga dialami pekerja-pekerja burjo lainnya yang berjaga malam. Apalagi, sebagai pengampu *shift* malam, kerjanya lebih sibuk dari rekan-rekannya

yang bertugas siang. Sebab, waktu malam biasanya memang lebih ramai, apalagi antara pukul delapan sampai menjelang tengah malam. Praktis, Agus baru bisa beristirahat siangnya.

Hal yang sama juga berlaku untuk pekerja perempuan. Jika mereka kebagian jatah jaga malam, maka semalam suntuk harus selalu siaga melayani pembeli. Hal ini misalnya ditemui di warung Sumber Vitamin, di bilangan Tawang Sari. Kebijakan berbeda diterapkan oleh pemilik warung Kabita, di Sagan, samping Rumah Sakit Panti Rapih. Menurut Supendi (31), salah seorang pekerja, karena ada dua pekerja perempuan di Kabita, maka warungnya tak buka 24 jam. "Paling larut sampai jam satu pagi," akunya. Meski begitu, "Mereka (pekerja perempuan—*Red.*) harus tetap bangun pagi, untuk masak, beres-beres, dan menjaga warung hingga siang," ujar penduduk

Tabel 1
Klasifikasi Pekerja Warung Burjo dan Perolehan Gaji

Klasifikasi	Lama Bekerja	Besar Gaji (Rp)
PEMULA	1-2 tahun	150.000-200.000
MENENGAH	2-3 tahun	200.000-250.000
SENIOR	3-4 tahun	250.000-300.000

Hendi.Balairung

Desa Mekar Mukti, Kecamatan Garawangi ini.

Selain mengenal pembagian *shift* dan pola tukar jam kerja, para pekerja di warung burjo juga mengenal pergantian orang. Mereka biasanya bergantian minimal dua bulan sekali. Penggantian ini tak bersifat permanen. Artinya, jika sudah dua bulan jaga, mereka berkesempatan untuk istirahat dan pulang kampung. Namun, setelah ambil rehat selama dua bulan, tibalah giliran mereka untuk kembali berjaga. *Rolling* semacam ini kemudian melahirkan siklus pulang kampung yang rutin ke Kuningan. Belakangan, kebiasaan ini mendorong munculnya bisnis travel Yogya-Kuningan. Beberapa di antaranya dikelola oleh pemilik-pemilik warung burjo besar.

Warung burjo tak hanya menampilkan sisi menarik pada jam buka semata. Seperti halnya sektor informal lain, bisnis yang sepintas kelihatan remeh-temeh ini menjadi cermin kreativitas dan daya tahan masyarakat kecil. Simaklah, meski kebanyakan dijalankan secara subsisten dan cenderung statis, usaha ini ternyata mampu menyuapi banyak mulut. Yang mengagumkan, tak sedikit para pekerja burjo yang kemudian bisa membuka warung sendiri. Bang Co (27), misalnya. Pemilik warung burjo depan Mapolda DIY, Condong Catur, ini awalnya bekerja di warung Doa Abbah I, milik kakaknya, Herman (40).

Merebaknya warung burjo di Yogya sangatlah mungkin bermula dari hal demikian. Setelah mapan, para pekerja burjo banyak yang membuka warung sendiri. Apalagi, ada beberapa pemilik yang memang mendorong dan menyokong para pekerjanya untuk membuka warung sendiri, setelah mereka bekerja beberapa lama. Warung baru biasanya meneruskan nama warung tempat mereka bekerja semula. Adanya beberapa nama warung yang sama salah satu sebabnya ialah karena kasus semacam itu, selain karena alasan kedaerahan atau kepemilikan modal. Sementara itu, para pemilik yang sudah memiliki warung tak sedikit yang mengembangkan usahanya dengan membuka cabang di daerah lain. Sehingga, warung burjo yang ada di Yogya pun kian menjamur dari waktu ke waktu.

Dalam keseharian, para pekerja di warung burjo memegang kendali penuh atas keuangan. Segala macam pengeluaran dan pemasukan diatur sendiri oleh mereka. Ini terjadi karena sebagian besar pemodal tak secara total memantau warungnya. Ketika pemilik sedang giliran beristirahat, tentu yang memegang kontrol finansial adalah pekerja. Apalagi jika pemilik atau pemodal sama sekali tak ikut menjaga, peran pekerja pun menjadi kian dominan. Pada titik ini, bisa dimafhumi jika

kemudian pola perekrutan pekerja bersifat nepotis. Sanak keluarga atau tetangga selalu menjadi prioritas utama target untuk direkrut oleh para pemilik warung burjo.

"Kalau tidak begitu, sulit pertanggungjawabannya. Para pekerja bisa saja curang dan tidak jujur," papar Rahman (27), pemilik warung burjo Saung Idaman di Karangmalang. Engkos, demikian panggilan akrab Rahman, berkongsi dengan sepupunya, Boim (25), untuk memodali Saung Idaman dua tahun lalu. Soal bagi-bagi keuntungan, Rahman mengaku sistemnya tak berdasar rerata pendapatan setahun yang diakumulasikan. Namun, giliran jagalah yang menjadi dasar pembagian laba. Bersama sepupunya, ia gantian jaga tiap satu sengah bulan sekali. Keuntungan tiap giliran menjadi hak sepenuhnya pemodal yang kena giliran. Kalau pas gilirannya sedang sepi? "Itu *sih* risiko," aku Rahman. Tapi, biar adil, waktu-waktu sepi itu biasanya digilir oleh berdua. Semisal, pada musim liburan tahun ini, Rahman yang kebetulan berjaga. Maka liburan tahun depan, giliran sepupunya yang harus berjaga. Semuanya diatur secara kekeluargaan.

Sistem pembagian keuntungan yang demikian tak hanya dipakai oleh Engkos dengan sepupunya. Sebagian besar warung burjo yang dimodali oleh lebih dari satu orang, juga turut menerapkan kebijakan serupa. Misalnya di warung Sami Asih. Warung yang terletak di Karangbendo, utara Fakultas Kehutanan UGM, ini dimodali oleh tiga orang, yang masih famili. Mereka adalah Nahrowi Ghojali (26), ayah Nahrowi yang bernama Sunarto, dan Lemon, tetangganya. Pembagian keuntungan didasarkan atas jatah *rolling*. Tiga pemegang saham bergiliran menjadi bos tiap bulannya. Bedanya, keuntungan tiap bulan tak bulat-bulat dinikmati oleh bos yang sedang jaga. Setengah dari keuntungan yang didapat harus dibagi untuk mereka yang tak berjaga. Tiap bulan, biasanya tak kurang dari dua juta rupiah yang bisa dikantongi pemilik, sebelum dibagi pemodal lainnya.

Sementara itu, bagi pemilik atau pemodal yang tak ikut berjaga, biasanya mereka hanya datang pada waktu-waktu tertentu untuk mengambil setoran. Tentang jumlah setoran, tiap-tiap pemilik tak mematok angka yang pasti. Udin, misalnya, pemilik Mekar Mulya, rutin menyambangi warungnya tiap dua minggu sekali. Sebagai patokan, ia menetapkan jumlah minimal yang harus disetor para pekerjanya, yaitu sebesar dua juta rupiah. Memang tak semua juragan menerapkan kebijakan seperti Udin. Jika Udin mematok angka pasti, maka Bos Yopie, begitu para pekerja biasa menyapa juragan warung Raja Rasa ini, tidak mematok berapa uang yang harus disetor. "Tergantung dapatnya berapa. Kalau dapat dua juta, ya dua juta," ujar Ryan Kusdianto (20), anak buah Yopie di warung yang buka di dekat Fakultas Ekonomi UII (Universitas Islam Indonesia), Condong Catur.

Jika diamati, arus perputaran uang dalam bisnis burjo tak bisa dikatakan kecil. Setoran dua juta rupiah yang dipatok Udin di atas adalah buktinya. Apalagi, perputaran uang di usaha ini juga demikian cepat. Di beberapa lokasi strategis, omzet per hari bisa di atas setengah juta rupiah. Seperti yang terjadi di warung Murni, Jalan Kaliurang, misalnya. Omzet harian di sana bisa mencapai delapan ratus ribu rupiah. Perputaran uang yang cepat juga terjadi di kawasan Seturan, Condong Catur. Di sini warung burjo Cafe Bang Udin berhasil meraup omzet hingga empat ratus ribu rupiah per harinya.

Di beberapa lokasi strategis, omset per hari bisa di atas setengah juta rupiah. Seperti yang terjadi di warung Murni, Jalan Kaliurang, misalnya. Omset harian di sana bisa mencapai delapan ratus ribu rupiah. Perputaran uang yang cepat juga terjadi di kawasan Seturan, Condong Catur. Di sini warung burjo Cafe Bang Udin berhasil meraup omset hingga empat ratus ribu rupiah per harinya.

Jika dicermati, umumnya omzet warung burjo berada pada kisaran dua hingga tiga ratus ribu rupiah tiap hari. Umumnya, sebagian besar perolehan itu didapat dari hasil penjualan bubur dan mie instan. Bisa dibayangkan berapa keuntungan yang didapat pemilik. Jumlah itu akan lebih menggelembung lagi jika pemilik punya lebih dari satu warung. Udin, misalnya. Ia tak cuma mengambil setoran dari warung yang ada di Pogung. Masih ada empat warung lagi yang dimiliki penduduk asal Desa Lengkok, Kecamatan Garawangi, Kuningan ini. Masing-masing berada di Jalan Kaliurang, dua di daerah Janti, dan satu lagi terletak di Jalan Solo. Semuanya menggunakan nama sama, Mekar Mulya. Bisa dibayangkan, jika warungnya beromzet sama, dalam sebulan Udin bisa menggemukkan rekeningnya dengan delapan juta rupiah. Meski, dalam kenyataannya, omzet tiap warung sangat tergantung pada lokasinya.

Dengan omzet harian berkisar 200 ribu sampai 300 ribu, para pemilik mampu menggaji pekerjanya sebesar Rp150 ribu hingga Rp300 ribu per bulan. Jumlah ini boleh jadi kecil jika dibandingkan dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003 yang mencapai Rp360 ribu. Namun, jika diamati lebih jeli, upah pekerja burjo bisa dianggap lebih besar. Pasalnya, jumlah itu adalah gaji bersih, belum termasuk uang makan dan keperluan sehari-hari yang semuanya dijatah bebas, tinggal merogoh laci. Jumlah ini akan terus membesar jika menghitung ongkos pulang kampung atau sakit yang juga harus ditanggung pemilik. Tak heran, jarang terdengar ada kasus perselisihan antara pemilik warung dengan pekerjanya.

Kalaupun ada masalah, musababnya lebih ke soal suasana kerja yang kadang tak nyaman. Ini dialami Sarip (15). Karena pemilik warung terkesan cuek, pemuda asal kampung Cidieng Hilir, Kecamatan Cidaho, Kuningan, ini memutuskan untuk hengkang dari tempat kerjanya, sebuah warung di bilangan Condong Catur. Kini, kakak satu adik ini sudah jenak bekerja di warung Kabita, yang terletak di pinggiran rel kereta api daerah Sapen.

Perbedaan upah yang diterima tiap pekerja umumnya tak hanya berlandaskan senioritas atau lamanya bekerja. Beberapa pertimbangan lain juga turut menentukan upah yang akan diterima. "Mereka yang sudah berkeluarga bayarannya memang dibedakan," aku Toto (40). Pemilik warung Mang Toto di Gang Buntu, Gejayan, ini menjelaskan bahwa perbedaan itu karena pertimbangan kelayakan. "Beban mereka 'kan lebih besar, harus menghidupi anak istri," imbuhnya. Untuk itu, ia minimal membayar Rp300 ribu per bulan buat mereka. Sementara, jika sudah agak lama, ia berani membayar di atas Rp350 ribu. Jumlah itu, papar bapak dua anak ini, lepas dari ramai atau tidaknya pembeli. "Kalau sedang sepi, ya itu risiko pemilik," ujarnya kalem.

Umumnya, para pemilik cenderung memilih mempertahankan pekerja lama ketimbang merekrut pekerja baru. Karena itu, mereka lebih memilih menaikkan gaji pegawai dibanding

Tabel 2
Persentase Penduduk Kabupaten Kuningan Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 1998-2001

	1998	1999	2000	2001
Tidak/Belum Sekolah	6,75	7,86	7,56	6,63
Tidak/Belum Tamat SD	23,57	21,62	24,37	21,37
Sekolah Dasar/MI	47,91	48,29	45,74	49,85
SLTP Sederajat	10,07	13,55	11,27	10,82
SMU Sederajat	5,64	4,14	5,79	5,26
SMK Sederajat	4,41	2,29	3,91	3,44
Diploma/Akademi (D1-D3)	0,59	1,79	1,74	1,78
Universitas/D4	1,06	0,46	0,61	0,85
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kuningan 2001

Hendi.Balairung

melakukan perekrutan. "Lebih baik menambah gaji pegawai daripada harus merekrut orang baru," ujar Entis Sutisna, lelaki asal Desa Babakan Reuma, Kecamatan Garawangi, Kuningan, yang juga ketua Paguyuban Aria Kamuning. Kebiasaan mempertahankan orang lama ini bisa dimaklumi. Peran pekerja yang vital membuat pemilik enggan bertaruh dengan kehadiran orang-orang baru. Karena itu para pemilik umumnya lebih memilih menyamankan pegawai lama dengan kenaikan gaji. Secara garis besar, jika dirinci, para pemilik biasanya mengklasifikasi pengupahan dalam beberapa kategori (Lihat Tabel 1).

Demikian kentalnya nepotisme, membuat hubungan antara pemilik dengan pekerja warung burjo lebih banyak disandarkan pada rasa saling percaya. Bahkan, saking percayanya, kadang para pekerja tak tahu persis apa dan bagaimana bosnya. Mereka sudah merasa puas hanya dengan mengetahui sapaan akrabnya. Wahyu Febriana (15), yang baru tiga bulan bekerja di Mekar Mulya, misalnya, hanya tahu bahwa majikannya dipanggil dengan sapaan Mas Udin. Bagaimana keadaan sang majikan lebih jauh, ia mengaku tak banyak tahu. *Toh*, kentalnya sistem kekeluargaan ini nyata mempermudah rekrutmen. Pengambilan pekerja baru, seringkali, terjadi begitu saja saat pulang kampung.

Apa yang dialami Ucep (15) bisa dijadikan contoh. Pemuda yang hanya lulus SD ini awalnya bekerja di sebuah restoran di Bandung. Setelah tiga tahun, ia pindah ke Jakarta, bekerja di sebuah warung soto. Satu waktu, saat mudik ke kampung, secara kebetulan ia bertemu dengan Herman Suherman (40). Pertemuannya dengan Mas Herman, demikian Ucep menyapanya, itulah yang membawanya ke Yogya. Kini, sudah delapan bulan ia melayani pembeli warung burjo Doa Abah I, milik Herman.

Bicara soal tenaga kerja urban kadang tak bisa lepas dari soal pertanian di desa. Diskursus tentang proses alih kerja dari bertani ke sektor jasa ataupun industri, nampaknya sah untuk menjelaskan fenomena berbondongnya orang Kuningan bekerja di bisnis burjo. Jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di sekitarnya, luas lahan pertanian di Kuningan bisa dibilang relatif sempit. (Baca: Dari Kuningan Menyerbu Yogya). Sehingga, mengimani ajaran pembangunan yang dianut selama ini, pengharapan masyarakat pun tak begitu antusias terhadap sektor ini. Apalagi bagi generasi muda, gemerlap kota dengan segala hiruk-pikuknya lebih menantang dibanding kubangan lumpur di sawah. "Kalau jadi buruh tani *mah* harus nyangkul, panas, dan kotor. Sedangkan di sini, di burjo, walaupun hanya karyawan baru, gajinya sudah 200 ribu," aku Budi Elon, pemilik warung burjo Raja Rasa 10 dan Sukamampir ini.

Kecilnya rata-rata kepemilikan lahan kian menjadikan urbanisasi sebagai satu pilihan menarik. Sebuah paradoks, memang. Desa tak lagi menjadi tempat yang nyaman untuk dihuni, justru karena keberhasilan pembangunan itu sendiri. Deraan modernisasi telah melucuti legitimasi sektor agraris sebagi pusat kekuasaan. Menurut Dr. Irwan Abdullah, peneliti di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, proses delegitimasi tersebut telah mengakibatkan masyarakat desa seolah didorong untuk mendekati pusat modernitas. "Dan itu direpresentasikan oleh kota," paparnya.

Demikian kentalnya nepotisme, membuat hubungan antara pemilik dengan pekerja warung burjo lebih banyak disandarkan pada rasa saling percaya. Bahkan, saking percayanya, kadang para pekerja tak tahu persis apa dan bagaimana bosnya.

Bak gayung bersambut, keadaan ini ditimpali oleh meruyaknya cerita sukses para perintis usaha burjo. Proses imitasi pun terjadi. Banyak orang kemudian lebih memilih mengaduk rebusan kacang hijau dibanding mencangkul tanah di sawah. "Alternatif yang paling baik di tengah situasi yang kompetitif biasanya ya dengan meniru mereka yang sudah berhasil," jelas Dr. Tadjudin Noer Effendi. Lebih jauh, dosen Sosiologi UGM ini menyebutkan bahwa angka kepastian hasil di sektor pertanian saat ini memang sangat minim, bahkan minus. Dalam kondisi seperti ini, amatlah rasional bila penduduk desa coba mencari peruntungan lain sebagai bentuk adaptasi. Alternatif itu adalah keluar dari desa, tambah Tadjudin.

Meski demikian, perkembangan usaha burjo tak serta merta mematikan sektor pertanian. Adanya *rolling* kerja masih menyisakan celah-celah waktu untuk menggarap sawah. Apalagi, menurut pengakuan sebagian besar pekerja burjo, pada dasarnya mereka tetap memandang penting pertanian. Hingga tak heran jika banyak dari mereka yang membayangkan untuk kembali bertani, meski umumnya baru dilakukan saat mereka tua dan tak lagi kerja di burjo. "Kalau sekarang memang lebih menarik kerja di burjo," aku Rahman, pemilik Saung Idaman. Di antara para pengusaha burjo yang juga mempunyai lahan pertanian adalah Nahrowi Ghojali, salah satu pemilik Sami Asih. Ia dan keluarganya memiliki lahan pertanian yang terhitung cukup.

Hanya saja, jika ditelusuri, memang tak banyak pekerja atau pemilik burjo yang seperti Nahrowi dan keluarganya. Tak heran jika keadaan Desa Kertayasa, salah satu produsen burjo terpenting di Kuningan, kian tak mencerminkan tradisi agraris, meski sawah masih membentang luas di sana.

Indonesia, seperti halnya negara-negara berkembang lain, memang menghadapi persoalan struktural klasik yang pelik. Buruknya pola kepemilikan atas tanah membuat perbandingan antara luas tanah dengan jumlah penduduk menjadi begitu timpang (Kuntjoro-Jakti, 1986). Apalagi, surplus tenaga kerja yang kian pesat sejak awal pertumbuhan ekonomi tak bisa diimbangi oleh daya serap sektor industri modern. Transformasi dari pembangunan pertanian ke industrialisasi ternyata tak dibarengi dengan transformasi tenaga kerja antara keduanya. Dampaknya, sebagian besar angkatan kerja harus mencari jalan sendiri untuk bertahan hidup. Sektor informal muncul sebagi penolong yang melancarkan kembali macetnya transformasi tenaga kerja ke sektor modern. Bagi penduduk Kertayasa dan Mekar Mukti, dua desa yang mendominasi domisili pekerja burjo, sang penolong itu adalah burjo.

Kisah jaya para perintis menarik banyak orang untuk berduyun-duyun turut mengukir sukses yang sama. Dengan perputaran uang yang demikian cepatnya, usaha ini dinilai lumayan menjanjikan. Apalagi, buat mereka yang tak cukup mengenyam pendidikan. Pendapatan satu atau dua juta rupiah per bulan tentu sudah terhitung besar. Memang bukan kebetulan jika pekerja burjo sebagian besar hanya lulusan SD, atau bahkan cuma jebolan SD. Jumlah mereka sepadan dengan tingkat pendidikan masyarakat Kuningan secara keseluruhan (lihat Tabel 2).

Rendahnya tingkat pendidikan sebenarnya tak terlalu berpengaruh terhadap kinerja mereka. Sebab, secara umum, bekerja di burjo memang tak membutuhkan banyak keahlian. Sebagai modal, mereka hanya perlu disiplin, bisa memasak, ramah, jujur, dan mau kerja keras.

Memang, pekerja yang berpendidikan agak memiliki nilai lebih. Pasalnya, jika menilik tanggung jawab, mereka sebenarnya secara tak langsung dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial yang bagus. Bagaimana tidak, karena pengelolaan burjo sehari-sehari memang sepenuhnya dikendalikan mereka. Apa yang dialami Agus bisa dijadikan contoh. Bersama dengan rekan-rekannya, ia hanya ditinggali modal dan tempat usaha, yaitu warung Mekar Mulya. Udin, majikannya, cuma tahu beres saja. Sang juragan tinggal mengambil keuntungan tiap dua pekan. Praktis, tak ada campur tangan berarti dari juragannya terhadap rutinitas keseharian mereka.

Pada titik ini, terlihat sektor informal memang menghadirkan ruang-ruang remang yang sukar dipahami. Apa yang terjadi di warung burjo adalah buktinya. Sekilas, usaha di sektor ini terlihat biasa-biasa saja: pengelolaan sederhana, modal seadanya, perencanaan yang minim, serta kontrol yang lemah. Namun, segenap "kebiasaan" itu ternyata tak membuat usaha pinggiran ini surut dan rapuh.

Buktinya, warung burjo yang ada di Yogya bisa terus mengisi banyak perut. Dari sekitar 75 warung yang ada di Kecamatan Depok, Sleman, jika dirunut jumlah tanggungan yang membebani pemilik atau pekerja, jumlah ini akan menghasilkan deret ketergantungan yang signifikan. Tak kurang dari 700-an orang yang menggantungkan hidupnya dari bisnis burjo ini. Dari ke-75 warung tersebut ada 134 pemilik yang mempekerjakan sekitar 160 orang pekerja. Selain itu ada 111 istri dan 162 anak yang mampu dihidupi oleh ke 134 orang yang mempunyai warung burjo tersebut. Sedangkan dari 168 pekerja tersebut, ada 39 orang yang ditanggung oleh para pekerja tersebut.

Apalagi, angka itu belum mewakili keseluruhan warung burjo yang ada di Yogya

yang jika merujuk data Paguyuban Aria Kamuning, terdapat sekira 400-an warung dengan 1500 pekerja. Angka 1.500 memang terhitung kecil bila dibandingkan dengan seluruh penduduk Kuningan yang berjumlah 987.700 jiwa. Namun bila dikerucutkan ke sejumlah desa-desa tertentu tempat asal para pekerja, seperti Desa Kertayasa, Sindang Agung, Mekar Mukti, Cimindi, dan Babakan Reuma, maka angka itu akan terlihat signifikan. Lebih-lebih bila dihitung berdasar komposisi penduduk berusia 10 tahun ke atas.

Sayangnya, cerita sukses dan arti penting warung burjo dalam menghidupi denyut nadi ekonomi sebagian masyarakat Kuningan tak teraba oleh catatan statistik resmi. Item mata pencaharian sebagai pekerja burjo belum masuk dalam hitungan. Ia masih digolongkan sebagai "pekerjaan lain-lain". Sehingga, jejak-jejak fakta bahwa warung burjo adalah ciri khas Kabupaten Kuningan dan memiliki arti strategis dalam menggerakkan ekonomi rakyat, masih sukar untuk ditelusuri. Buku *Kuningan Menembus Waktu*, yang dicetak luks dan berisi *database* Kabupaten Kuningan, tak bercerita seculpun tentang warung burjo.

Modernisasi memang terlalu congkak untuk mengakui segala sesuatu yang tak berasal darinya. Meski telah menyangga sebagian besar angkatan kerja, sektor informal tetap dipandang sebelah mata, bahkan dianggap devian. Pada titik ini, bisa dipahami kenapa keampuhan burjo masih tak diperhitungkan oleh benak para pengambil kebijakan. Untunglah, di tengah silang sengkarut wajah ekonomi negeri kita saat ini, masih ada sekelompok masyarakat yang tetap teguh dengan kemandiriannya.

Secara simbolis, kemandirian itu pun tercermin pada lambang Desa Kertayasa, Kecamatan Garawangi: mangkuk burjo. Tak bisa disangkal, karena memang dari mangkuk burjolah masyarakat Kertayasa menjaga agar kebutuhannya selalu cukup. Dengan mangkuk burjo, mereka terus menyambung hidup.
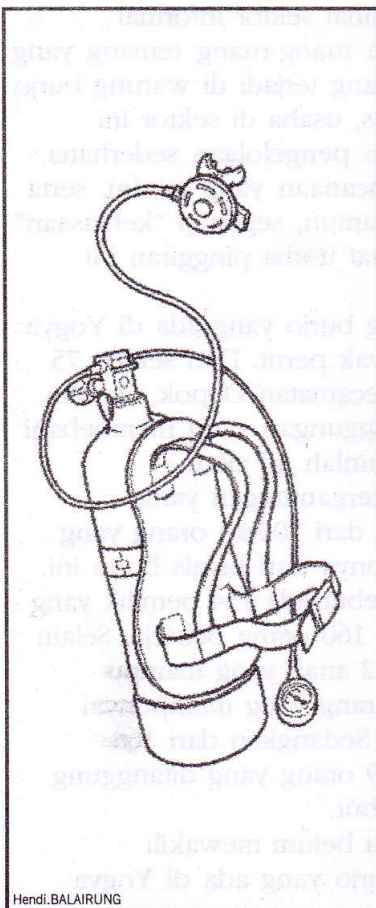
Dari Kuningan Menyerbu Yogya

Abib.Balairung
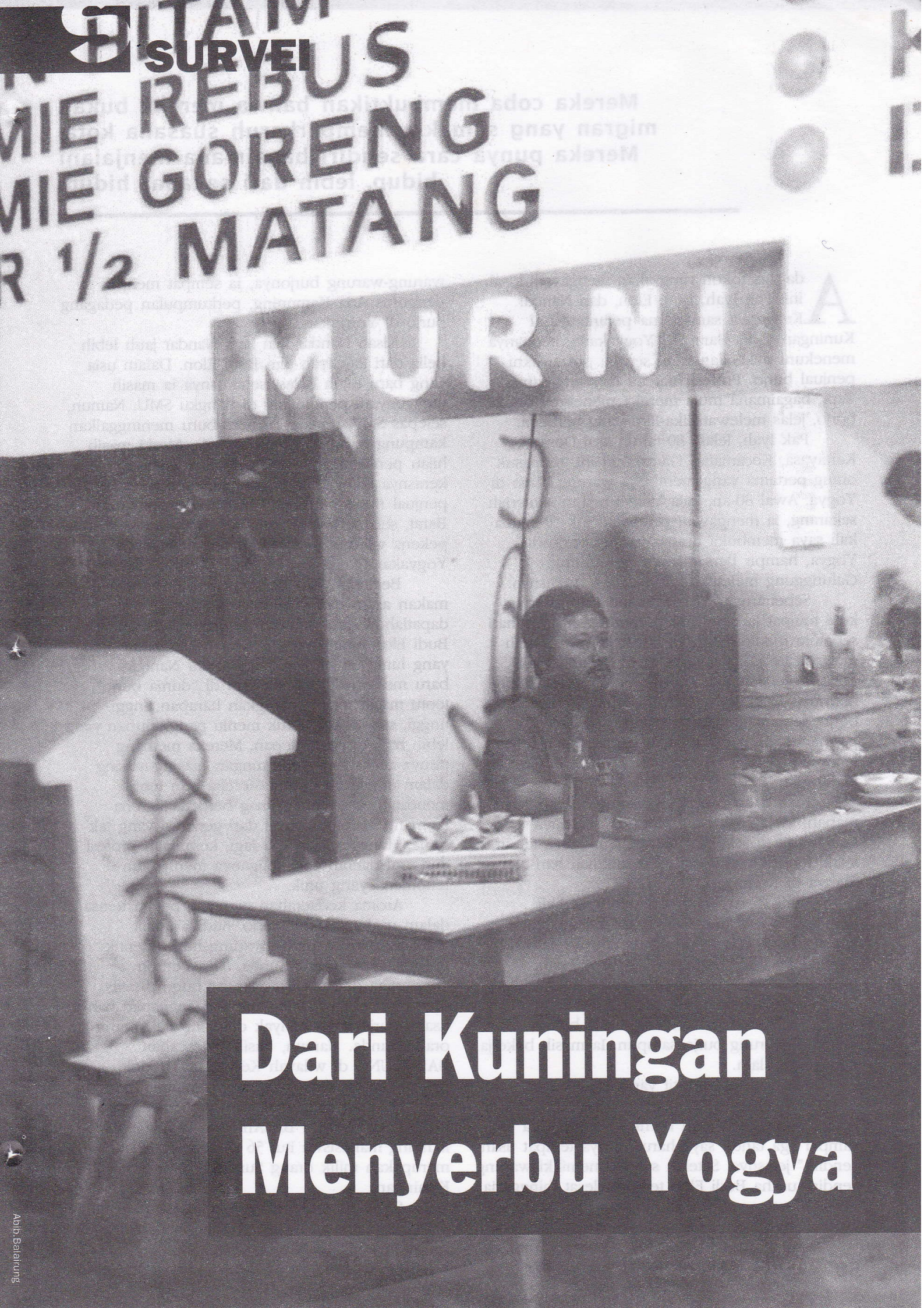
Mereka coba membuktikan bahwa mereka bukan migran yang semakin memperkeruh suasana kota. Mereka punya cara sendiri bagaimana menjalani hidup, lebih dari sekadar hidup.

Ada tiga tokoh yang akan mengawali kisah ini: Pak Iyah, Budi Elon, dan Nandar. Ketiganya sama-sama perantau asal Kuningan, Jawa Barat. Di Yogyakarta, ketiganya menekuni pekerjaan yang serupa pula, yakni penjual burjo. Profesi mereka memang sama. Tapi, bagaimana mula mereka menekuni dunia burjo, jelas melewati lika-liku yang berbeda.

Pak Iyah, lelaki 80 tahun asal Desa Kertayasa, Kecamatan Garawangi ini, termasuk orang pertama yang membuka warung burjo di Yogya. Awal 80-an, kala Yogya belum semeriah sekarang, ia mengawali pekerjaan ini. "Pertama kali saya membuka usaha warung burjo di Yogya, hampir bersamaan saat Gunung Galunggung meletus (1981—*Red.*)," tukasnya.

Sebenarnya, Yogya bukan satu-satunya kota tempat ia mengadu peruntungan. Jauh hari sebelum merambah kota ini, Pak Iyah pernah melawat ke Jakarta, pada masa '60-an. Sejak itulah kesetiaan Pak Iyah terhadap usaha burjo bermula. Masa itu, Pak Iyah belum berjualan burjo dengan membuka warung secara permanen. Ia harus menelusuri sesaknya lorong kampung demi kampung dengan memikul jualannya.

Kini "karir"nya di usaha burjo telah relatif mapan. Melalui warung yang didirikannya yang saat ini dikelola oleh anaknya, Sumber Vitamin, lelaki tua ini telah berhasil menikmati hari-hari tuanya di Kuningan.

Budi Elon punya cerita yang sedikit berbeda. Ia kini dapatlah dikatakan sebagai juragan burjo. Tiga warung di Yogya telah dimilikinya. Jelas, keberhasilan yang telah dicapainya itu tak datang dengan tiba-tiba. Budi Elon memula bekerja di usaha burjo semenjak ia menuntaskan sekolah. Ketika itu, ia belum memiliki warung burjo satupun. Ia masih bekerja pada orang lain.

Ada satu hal positif yang layak dicatat dari Budi, yakni jiwa wirausahanya yang selalu ingin maju. "Sejak mula saya berfikir, selama dua sampai tiga tahun saya harus punya tempat usaha sendiri," jelasnya. Setelah sukses memiliki warung sendiri, usaha Budi Elon terus melesat, hingga ia pun sukses membuka warung-warung baru. Bahkan di tengah kesibukannya mengelola warung-warung burjonya, ia sempat menjadi pengurus Aria Kamuning, perkumpulan pedagang burjo di Yogyakarta.

Kisah Nandar lain lagi. Nandar jauh lebih belia dari Pak Iyah dan Budi Elon. Dalam usia yang baru tujuh belas, seharusnya ia masih mengenyam pendidikan di bangku SMU. Namun, selepas SMP, remaja ini buru-buru meninggalkan kampung halaman untuk bekerja. Meski masih hijau pengalaman, Nandar telah mencecap kerasnya iklim ibukota, dengan bekerja sebagai penjual nasi di daerah Pejompongan, Jakarta Barat, selama hampir setahun. Kini, ia menjadi pekerja warung burjo Kabita, di bilangan Sagan, Yogyakarta.

Begitulah. Pak Iyah yang telah banyak makan asam dan garamnya berbisnis burjo, dapatlah disebut sebagai pelopor. Sedangkan Budi Elon kiranya pas mewakili gambaran figur yang lumayan berhasil. Sementara Nandar, yang baru mengawali petualangan di "dunia burjo", tentu masih membentangkan harapan tinggi-tinggi, setidaknya untuk meniti penghidupan yang lebih baik di masa depan. Mereka memang punya cerita dan peruntungan masing-masing dalam menjalani usaha. Mereka pun tentu mencatat pengalaman yang berbeda karena memang mereka berasal dari generasi yang tak sama. Hanya saja, sekali lagi, kesamaan profesi dan asal daerah dari ketiganya merupakan fenomena yang unik.

Aroma kedaerahan memang begitu terasa dalam usaha warung burjo. Sudah jamak diketahui bahwa usaha warung burjo identik dengan orang-orang Sunda. Tiga contoh pengusaha dan pekerja warung burjo di atas memang belum cukup mewakili anggapan bahwa usaha burjo lebih banyak dilakoni oleh orang-orang Sunda. Namun, hasil pencacahan BALAIRUNG di wilayah Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, hampir bisa membenarkan anggapan itu. Dari 75 warung burjo yang disurvai BALAIRUNG di kawasan kantung mahasiswa itu, 56 di antaranya merupakan milik orang Sunda, khususnya Kuningan.

Segelintir masyarakat lokal, dalam hal ini orang Jawa, mulai melirik usaha ini. Bahkan, ada

pula warung burjo yang dimiliki oleh orang Minangkabau, asal daerah yang dalam dunia usaha lebih dikenal dengan rumah makan dan fotokopi. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, usaha-usaha burjo yang dimiliki oleh orang-orang non-Sunda pun tetap memiliki hubungan dengan orang-orang Sunda. Warung burjo Mitra Andalas di daerah Nologaten, sebagai misal, merupakan warung hasil alih tangan dari orang Sunda. Beberapa warung yang dimiliki orang Jawa di daerah Pogung contoh lainnya. Di sana, ternyata, pekerja-pekerjanya berasal dari Sunda. Dari sisi kepemilikan, beberapa warung burjo itu, merupakan milik keluarga campuran Sunda-Jawa. Karenanya, mungkin tak terlalu berlebihan bila ada ungkapan: di mana ada burjo di situ ada orang Sunda.

Tabel 1
Luas Lahan Pertanian Di Kabupaten Kuningan Dan Sekitarnya

Kabupaten	Luas Sawah (Ha)	Luas Daerah (Km²)	Penduduk (Juta)
Ciamis	54.849	2.520,54	1,58
Cirebon	56.067	974	1,9
Kuningan	29.550	1.117	0,9
Majalengka	51.087	3.209	1,1
Indramayu	118.513	1.935,27	1,5

Sumber: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. Kuningan

Hendi.Balairung
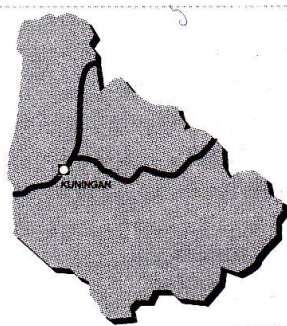
Dari mana pangkalnya hingga orang-orang Sunda bisa menyesaki Yogya dengan gerai-gerai burjonya? Kisahnya, mungkin, bisa dirunut sejak Pak Iyah membuka warung burjo di kota budaya ini. Di kota ini, mulanya, Pak Iyah pernah bekerja sama dengan Ahmad Soja, orang yang kelak menjadi terkenal di antara sesama pedagang burjo. Selanjutnya, Ahmad Soja berhasil mendirikan warung burjo sendiri dengan nama Murni, di Jalan Kaliurang. Dalam perkembangannya, bisnis Murni melaju cepat. Layaknya perusahaan korporasi, kini tak kurang dari dua puluh gerai Murni tersebar di seantero Yogya.

Tentu saja, Murni berbeda dengan bisnis-bisnis korporasi formal yang telah menggurita, semisal KFC dan McDonald. Untuk membuka Murni-Murni yang baru, tak perlu ada lisensi dari si empunya Murni. Cukup dengan adanya hubungan kekerabatan, Murni baru bisa lahir. Dalam hal ini, saudara atau teman dekat Ahmad Soja, misalnya, kapan saja bisa membuka gerai burjo baru dengan nama Murni. Tentu saja, asal memiliki modal.

Murni bukan satu-satunya "korporasi" warung burjo di Yogya. Pun ada nama-nama lain, semisal Kabita, Raja Rasa, Panghegar, dan Sumber Vitamin. Biasanya, kelompok-kelompok burjo yang berbeda itu menandakan perbedaan asal mereka juga. Murni, misalnya, adalah pedagang-pedagang burjo yang berasal dari Desa Kertayasa. Sedangkan Kabita, untuk menyebut contoh lainnya, berasal dari Desa Mekar Mukti. Kebetulan kedua desa itu masih dalam satu wilayah Kecamatan Garawangi, Kuningan.

Kuatnya ikatan primordial tersebut, tak bisa dilepaskan dari konteks sejarah munculnya desa-desa di Sunda. Terbentuknya desa-desa di Sunda, berawal dari persekutuan-persekutuan adat yang ada dalam suatu wilayah, namun terpisah dari kelompok lainnya. Desa kemudian menjadi sebuah institusi yang otonom, yaitu suatu lembaga yang dapat mengatur diri sendiri. Karena itu, desa bukan hanya merupakan suatu kesatuan sosial semata, tapi juga merupakan unit kesatuan hukum dan ekonomi. Tegasnya, desa adalah kesatuan hidup manusia atau suatu kesatuan kebudayaan (Ekadjati, 1995).

Usaha warung burjo hanya merupakan satu contoh dari sekian banyak lokus-lokus usaha sektor informal yang membawa aroma kedaerahan di Yogya. Ada kelompok pedagang sate yang identik dengan orang Madura, pecel lele yang khas Lamongan, roti bakar dari Bandung, atau warung angkringan dari Klaten. Boleh jadi ini merupakan kasus yang memang jarang terjadi di negeri orang.

Menurut Dr. Irwan Abdullah, Staf Peneliti Pusat Studi Kependudukan (PSK) UGM, munculnya usaha-usaha sektor informal seperti warung burjo, terkait dengan lunturnya kekuasaan agraris yang berada di pedesaan. Ujar Irwan, kekuasaan agraris dalam hal ini adalah sebentuk tata aturan yang dipatuhi oleh segenap warga masyarakat, ketika mereka masih memposisikan pertanian sebagai mata pencaharian utama.

Melunturnya nilai kekuasaan agraris itu, lanjut dosen Antropologi UGM ini, juga dipicu oleh arus modernisasi yang lebih berpusat di kota. Akibatnya, orang desa bermimpi untuk menjadi orang kota. Untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu, mereka memanfaatkan relasi mereka yang berada di kota. "Pada situasi semacam itu, kegiatan-kegiatan ekonomi sektor informal

menjadi jalan yang memberi fasilitas bagi impian-impian orang desa. Mereka difasilitasi oleh adanya jaringan penjual burjo, pedagang kaki lima, dan sebagainya," jelas Irwan panjang-lebar.

Komentar beberapa pekerja warung burjo pun seperti mengamini apa yang dikatakan Irwan Abdullah. Simaklah penuturan Nandar. Menurutnya, selain tak memiliki keterampilan yang memadai untuk bekerja di sektor formal, dirinya juga tak memiliki sawah yang bisa digarap. Budi Elon menambahkan, mengolah sawah, baginya, tak bisa lagi diandalkan untuk menopang ekonomi keluarga.

Ciri agraris yang perlahan memudar jelas dilihat, misalnya, dari *lifestyle* masyarakat Desa Kertayasa, tempat migran penjual burjo kebanyakan berasal. Walau sekitar 80% dari wilayah desa seluas 106 hektar ini didominasi oleh lahan pertanian, namun kondisi permukiman di sana menunjukkan bahwa daerah tersebut telah begitu bercorak kota. Hampir tak ada lagi rumah *gedhek* (rumah yang dindingnya tebuat dari bambu). Lebih banyak bermunculan bangunan perumahan baru yang terbuat dari beton, dengan arsitektur ala rumah-rumah kaum menengah perkotaan. Ini sekaligus mencirikan bahwa mereka telah relatif sejahtera secara ekonomi.

Pudarnya kebiasaan-kebiasaan masyarakat pedesaan yang bercorak agraris dapat dilihat pula dari kenyataan bahwa hampir tak ada lagi penduduk yang memelihara hewan ternak di Kertayasa. Padahal, hewan ternak berfungsi untuk menunjang pertanian. Tak tercium lagi bau khas kandang, yang lazim ditemui di daerah agraris. Memang ada beberapa keluarga yang memelihara kambing. Tetapi, jumlahnya tak lebih dari sepuluh Kepala Keluarga (KK), dari total 487 KK yang ada di Desa Kertayasa.

Laju modernisasi yang tak memihak pada desa, memang membuat sektor pertanian menjadi turun gengsi. Padahal, kebijakan pembangunan di atas kertas masih menempatkan sektor ini sebagai prioritas. Bagaimana dengan yang terjadi di Kuningan? Rupanya, kebijakan seperti itu pula yang masih dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan, daerah yang paling banyak menghasilkan usahawan-usahawan burjo. Bahkan hingga 2005 nanti, Kuningan tetap memproyeksikan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan daerah. Langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kuningan sebenarnya tidak keliru. Sebab, Kuningan memang bukan daerah yang diperuntukkan bagi pengembangan industri.

Lahan pertanian di Kuningan yang meliputi lahan persawahan, ladang, dan empang, luasnya sekira 55% dari luas total wilayah kabupaten. Namun, bila dibandingkan dengan daerah-daerah yang berbatasan langsung dengannya, seperti Ciamis, Cirebon, Majalengka, serta Indramayu, luas lahan sawah yang terdapat di Kuningan relatif lebih sempit (Lihat Tabel 1).

Sebenarnya, Pemerintah Kuningan cukup realistis. Dengan lahan yang tak begitu luas, pencapaian sektor pertanian hanya ditargetkan bagi pemenuhan kebutuhan daerahnya saja. Tetapi, persoalan tak berhenti sampai di situ. Kabupaten yang ber-PAD (Pendapatan Asli Daerah) terkecil di Jawa Barat ini tetap saja tak dapat mengandalkan sektor pertanian, kendati cuma untuk pemenuhan kebutuhan sendiri. Sebab, banyak orang yang kini tak lagi memiliki sawah. Ini disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk di daerah yang relatif kecil ini terus meningkat. Hal ini jugalah yang kemudian disinyalir sebagai faktor kuat terjadinya gelombang migrasi dari daerah tersebut ke kota-kota besar.

Di Desa Kertayasa, misalnya, lahan pertanian menjadi susut

Tak tercium lagi bau khas kandang, yang lazim ditemui di daerah agraris. Memang ada beberapa keluarga yang memelihara kambing. Tetapi, jumlahnya tak banyak.

lantaran beralih menjadi perumahan. Ini bisa diidentifikasi dari hasil pencatatan Kantor Kecamatan Garawangi. Selama 2001, lahan persawahan yang berubah fungsi menjadi lahan permukiman tercatat mencapai 12,21 hektar. Karenanya, wajar jika kemudian banyak warga Kertayasa yang merantau dan menekuni usaha sebagai penjual burjo.

Sayangnya, seberapa banyak warga Kertayasa yang merantau dan apa profesinya, belum tercatat secara terperinci. Catatan di Kantor Desa Kertayasa menyebutkan kategori "lain-lain", untuk seluruh warganya yang bekerja di luar Kertayasa. Menariknya, kategori "lain-lain" inilah yang justru paling besar. Dari 2.422 warga Kertayasa, sebanyak 1.801 orang, termasuk dalam kategori "lain-lain" itu. Belum teridentifikasi, berapa di antaranya yang berprofesi sebagai penjual burjo (lihat Tabel 2).

Sejauh ini, Pemerintah Kuningan bukannya tak berupaya. Pada 2001, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan mencatat kenaikan jumlah produksi padi dari 350.000 ton pada 2000, menjadi 370.164 pada 2001. Ada kenaikan hanya sekira 5,4%. Kondisi tersebut kemudian memaksa Pemerintah Kuningan untuk menerapkan berbagai program yang tetap berorientasi pada agrobisnis dan agroindustri. Targetnya, tentu saja untuk menaikkan PAD.

Kuningan memang bukan daerah yang diproyeksikan sebagai sentra industri. Berbeda dengan daerah tetangganya, Cirebon yang berada di pesisir, wilayah Kuningan di pegunungan seolah memang hanya pas bagi pengembangan sektor pertanian. Sayang, pertumbuhan penduduk yang terus melaju, secara perlahan menyebabkan lahan yang sedianya bagi pertanian pun harus berbagi untuk kepentingan permukiman.

Dalam kondisi seperti itu, industri kecil dalam skala rumah tangga (*home industry*) sempat menjadi alternatif. Maka, sejak tahun '90-an mulai bertumbuhan rumah-rumah industri kecil di daerah ini. Jenis usaha pengolahan makanan masih menjadi yang terbanyak. Namun, ada juga usaha logam dan elektronika serta industri kerajinan tangan. Akan tetapi, kontribusi industri kecil di daerah ini belum begitu terlihat.

Dunia baru ini masih terbentur pada sulitnya pemasaran. Alasannya, sebagaimana diterangkan Bambang Wahyudi, Kepala Seksi Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kuningan, adalah tak sesuainya produk yang dihasilkan dengan permintaan pasar. Satu-dua jenis usaha memang ada yang mulai sukses. Misalnya, industri bawang goreng yang bermitra dengan Indofood. Karena dinilai tersendat-sendat, maka Dinas Perindustrian Kuningan pun merasa perlu campur tangan. Beberapa upaya dilakukan, salah satunya melalui pemberian suntikan kredit usaha. Walau demikian, upaya ini tetap masih jauh panggang dari api.

Tak hanya industri kecil sebagaimana disebut di atas yang diberi peluang meraih bantuan. Jenis usaha warung burjo pun turut diberi kesempatan. Pemerintah Kuningan juga telah menawarkan bantuan dana kepada para pedagang burjo di Yogya, berupa bantuan dana bergulir, yang besarnya Rp300 juta. Namun hingga kini, pihak pengusaha burjo, dalam hal ini diwakili oleh Aria Kamuning, merasa belum siap untuk menerimanya.

Edi Carwa, Kepala Dusun Pahing di Kertayasa, menilai bahwa cara yang ditempuh pemerintah kurang tepat. Berbagai persyaratan untuk mendapatkan kredit, dipandang masih terlampau rumit. Karenanya, warga enggan memanfaatkan kredit yang ditawarkan. "Sepanjang tahun 2002, hanya ada satu orang yang bersedia menerima bantuan," jelas lelaki yang juga pernah berjualan burjo di Yogya ini.

Hasil penelusuran BALAIRUNG di Bank Swamitra, salah satu BPR di Kuningan membuktikan betapa enggannya warga memanfaatkan bantuan. Ena Tohana, Account Officer Bank Swamitra, berani memastikan bahwa selama ini hanya ada satu nasabah yang mengunakan dana pinjaman dari bank tersebut untuk usaha burjo. Selebihnya, dana yang disalurkan banyak dimanfaatkan oleh para pedagang kelontong. Menurut laki-laki lulusan STIE Kuningan ini, sebenarnya usaha warung burjo juga dipandang tidak memenuhi kualifikasi sebagai penerima kredit. Pasalnya, usaha ini tidak memiliki nota yang pasti mengenai pendapatan yang diperoleh.

Keengganan warga untuk menerima bantuan juga dipengaruhi oleh kultur masyarakat Kertayasa yang memiliki latar ikatan

Tabel 2
Diferensiasi Profesi Penduduk Desa Kertayasa

Profesi	Jumlah
KERAJINAN INDUSTRI DAN RUMAH TANGGA	10 orang
PERTANIAN	567 orang
PERDAGANGAN DAN JASA	25 orang
LAIN-LAIN	1801 orang
PETERNAKAN	14 orang
PERIKANAN	5 orang

Sumber: Pemerintahan Desa Kertayasa Tahun 2002

Hendi.Balairung

kekeluargaan yang teramat kuat. Berdasarkan penjelasan Iing Durahim, pengusaha burjo asal Kertayasa, keengganan meminjam bantuan, apalagi yang berasal dari bank, terjadi karena dianggap terlalu membebani. Adanya persyaratan, semisal sertifikat tanah, membuat warga tak berani mengambil risiko. Masyarakat masih percaya cara-cara yang sedari lama telah dilakukan. Sebagaimana dikatakan Maman, pemilik warung burjo Kabita, mereka lebih memilih untuk bekerjasama dengan anggota keluarga sendiri daripada harus meminjam ke bank.

Acapkali pemerintah terlalu memandang pelaku sektor informal sebagai kelompok yang lemah dan harus dibantu, diberdayakan serta dibina. Lantas, muncullah serangkaian program bantuan buat mereka. Kenyataannya, apa yang ditawarkan pemerintah tak selalu berkenan bagi pekerja burjo.

Sebenarnya, para penjual burjo hanya ingin bebas saja dalam berusaha. Tentu, tetap berusaha dengan tidak merugikan pihak lain. Seperti yang dituturkan Heri, salah satu pemilik warung burjo Baraya III. Dirinya mengaku merasa bebas ketika menekuni usaha warung ini. Bagi lelaki yang pernah bekerja di Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta ini, dengan membuka usaha warung burjo, dirinya bisa menentukan segala sesuatunya. Berbeda, ujarnya, ketika bekerja di pabrik, yang mesti terikat dengan berbagai macam peraturan.

Naro, salah seorang pekerja warung burjo, juga berkomentar senada Heri. Baginya, daripada bekerja di pabrik yang paling tinggi hanya mendapat gaji Rp200 hingga 300 ribu untuk ijazah SMP atau SD seperti mereka, lebih baik bertengger di depan tungku burjo sembari melayani pembeli. "Kerja di burjo lebih santai. Sewaktu-waktu bisa istirahat. Bisa lebih bebas karena milik sendiri dan hasilnya lebih lumayan," jabar lelaki yang mengaku saban bulan menerima Rp2 juta dari warung burjonya itu.

Sayang, agaknya anggapan terhadap pekerja burjo sebagai *the others* belum pupus. Padahal, pekerja burjo bisa memberikan bukti yang berbeda. Dengan kesahajaannya, para migran Kuningan ini terbukti tak menyandarkan kesusahannya pada pihak lain. Dengan kekerasan usahanya, nyatanya mereka bisa diterima khalayak. Dengan demikian mereka pun mampu mengatasi kesulitan ekonominya sendiri, dengan tak terlalu banyak menuntut pada pemerintah yang semestinya bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya.

Lebih dari itu, karena usaha burjo jualah, beberapa pengusaha burjo bisa memberi andil bagi pembangunan fisik di daerahnya, semisal pesantren, masjid, dan lapangan olahraga. Baru-baru ini, salah satu pondok pesantren di Dusun Manis, Kertayasa, diperluas. Menurut Ucin Muhsin, pengasuh pesantren itu, hampir keseluruhan dana pembangunan pesantren berasal dari sumbangan para pengusaha burjo. Uang yang terkumpul dari mereka, ujar Muhsin, mencapai Rp270 juta. Sedangkan pemerintah hanya memberi bantuan Rp300 ribu.

Profesi sebagai pekerja burjo lebih dari sekadar kebanggaan bagi penduduk Kertayasa. Karenanya wajar saja, jika Anda berkunjung ke Desa Kertayasa, Kecamatan Garawangi, Anda akan menyaksikan gambar mangkok burjo sebagai lambang desa. Sebuah penghargaan yang memang sudah selayaknya.

Lebih dari itu, karena usaha burjo jualah, beberapa pengusaha burjo bisa memberi andil bagi pembangunan fisik di daerahnya, semisal pesantren, masjid, dan lapangan olahraga.

Abib.Balairung
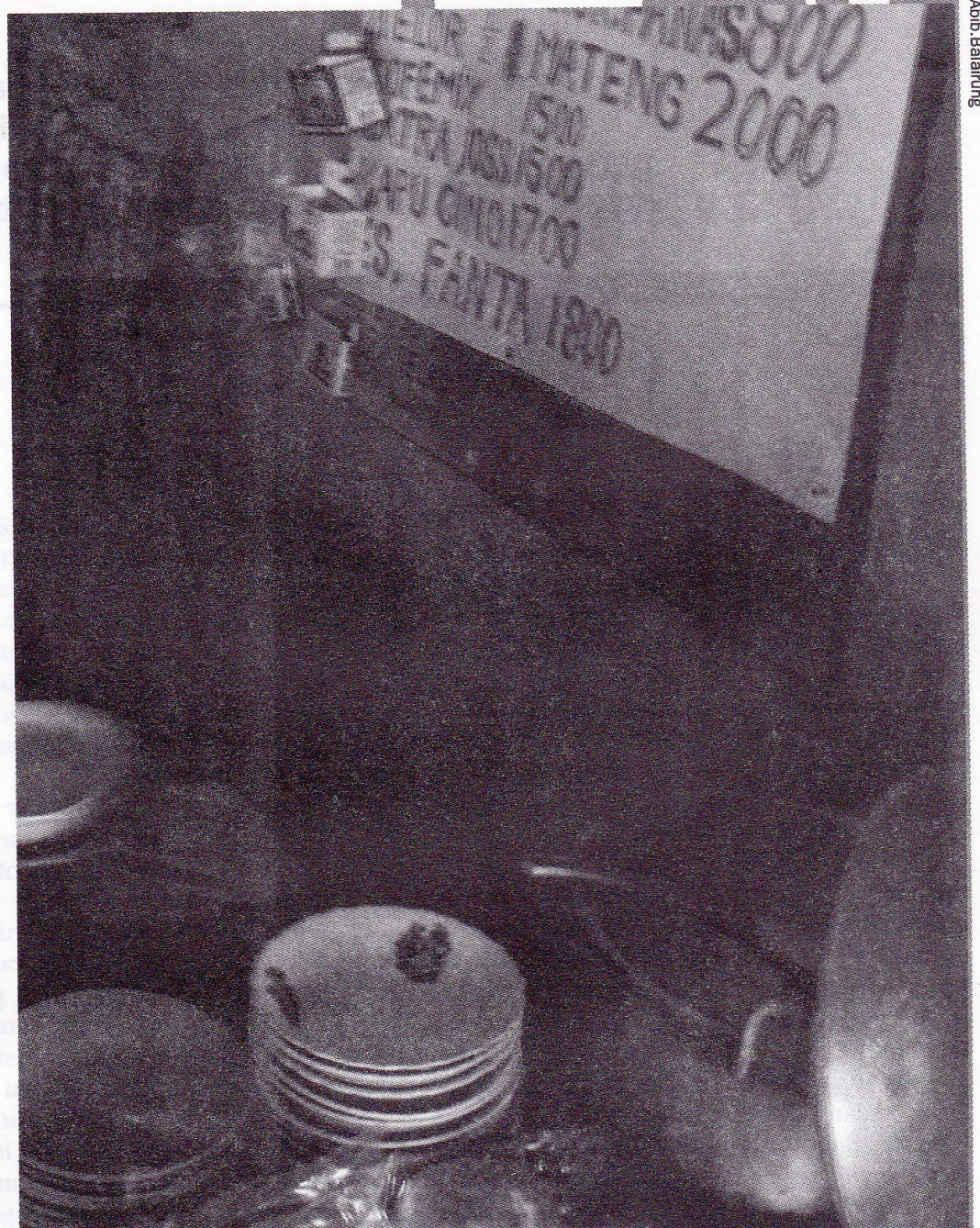
Pasar Potensial Itu Bernama Warung Burjo

Cepatnya perputaran uang dan barang di warung burjo membuat mereka menjadi incaran banyak perusahaan. Berbagai cara pun ditempuh oleh pelaku sektor formal itu agar penjual burjo bersedia menjadi pengecer produk mereka.

Warung bubur kacang hijau, sesuai namanya, menyajikan menu utama bubur kacang hijau. Tapi selain itu, di sana juga tersedia banyak pilihan menu lain. Tak hanya produk-produk sektor informal semacam gorengan, kerupuk, es teh, dan es jeruk. Beragam jenis produk sektor formal pun disajikan. Mulai dari mie instan, kopi, susu, minuman penyegar, minuman berserat, minuman suplemen, hingga minuman berkarbonasi.

Ini bisa segera terlihat ketika kita masuk di warung-warung burjo. Di warung Kabita, sebelah selatan RS Panti Rapih, misalnya, kita akan disambut oleh tumpukan kardus Indomie dan Gaga Mie yang ditata berjajar di rak pada dinding bercat biru yang mulai pudar. Rak berisi tumpukan bungkus rokok terpasang di dinding sebelahnya. Di bawahnya terentang tali tempat menggantungkan beraneka macam minuman instan dalam kemasan *sachet*: Milo, Coffeemix, Nescafe, Energen, Nutrisari, Ademsari, Extra Joss, dan banyak lagi. Sedang di sampingnya, nampak barisan botol Coca Cola, Sprite, dan Fanta.

Bahkan, jika dihitung-hitung justru produk sektor formallah yang lebih banyak memberi sumbangan pada omzet warung burjo ketimbang penjualan bubur kacang hijau sendiri. Paling tidak, setengah dari omzet warung burjo berasal dari penjualan produk sektor formal. Misalnya, warung Kabita milik Maman (31) dan Uhud (35), dalam sehari semalam bisa menjual rata-rata dua kardus atau 80 bungkus mie instan. Dengan harga jual Rp1700, yang didapat dari mie instan saja sudah Rp136.000, atau 54% dari total omzetnya yang tak jauh dari kisaran Rp250.000. Ini belum lagi ditambah hasil penjualan produk sektor formal yang lain, semisal aneka minuman instan yang juga sangat diminati konsumen.

Tentang alasannya menjual banyak produk formal, Maman mengaku hanya mengikuti tren. "Apa yang lagi disukai pembeli, ya, saya jual," tutur pria yang merantau ke Yogya sejak 1986 ini. Dengan menjual barang dagangan yang lengkap, menurut Maman, konsumen akan lebih tertarik membeli di warungnya. "Kalau mereka pesan ini ada, pesan itu ada, pasti tertarik ke sini lagi," ungkap pria asal Desa Mekarmukti ini tentang kiatnya berjualan.

Tak seperti pengecer pada umumnya, warung burjo tak hanya menjual produk sektor formal dalam bentuk "mentahan". Mereka mengolah dan menjualnya dalam kondisi siap santap. Justru dari servis inilah keuntungan yang cukup besar bisa mereka tangguk.

Menariknya, sebagai pengecer plus, para penjual burjo ternyata cukup kreatif dalam menjalankan usahanya. Berbagai produk sektor formal itu tak diolah begitu saja menurut cara saji standar. Dengan cerdas, modifikasi pada produk-produk itu dilakukan. Mie instan, misalnya, tak sekadar direbus dan dihidangkan dengan bumbu dari pabrik, tapi juga dilengkapi dengan helai-helai irisan sayuran macam sawi atau kubis. Dan bagi yang berminat, tersedia mie plus telur, atau dikenal dengan sebutan "intel" (Indomie telur). Bahkan di beberapa warung burjo, tersedia pula tambahan bawang goreng dan daging. Selain itu, bubur kacang hijau yang biasanya dicampur santan, ada pula yang dihidangkan dengan campuran susu. "Bursus" (bubur susu), namanya.

Tak hanya makanan, minuman pun tak luput dari kreativitas mereka. Jadi tak usah heran jika di warung burjo Anda menemui minuman yang tak biasa, dengan nama yang aneh pula. Di antaranya, ada "Susi" dan "Josua". Jangan salah, keduanya bukan nama *eneng geulis* dan *akang kasep* penjual burjo. "Susi" adalah nama minuman hasil paduan susu dan sirup, sementara

Abib.Balairung
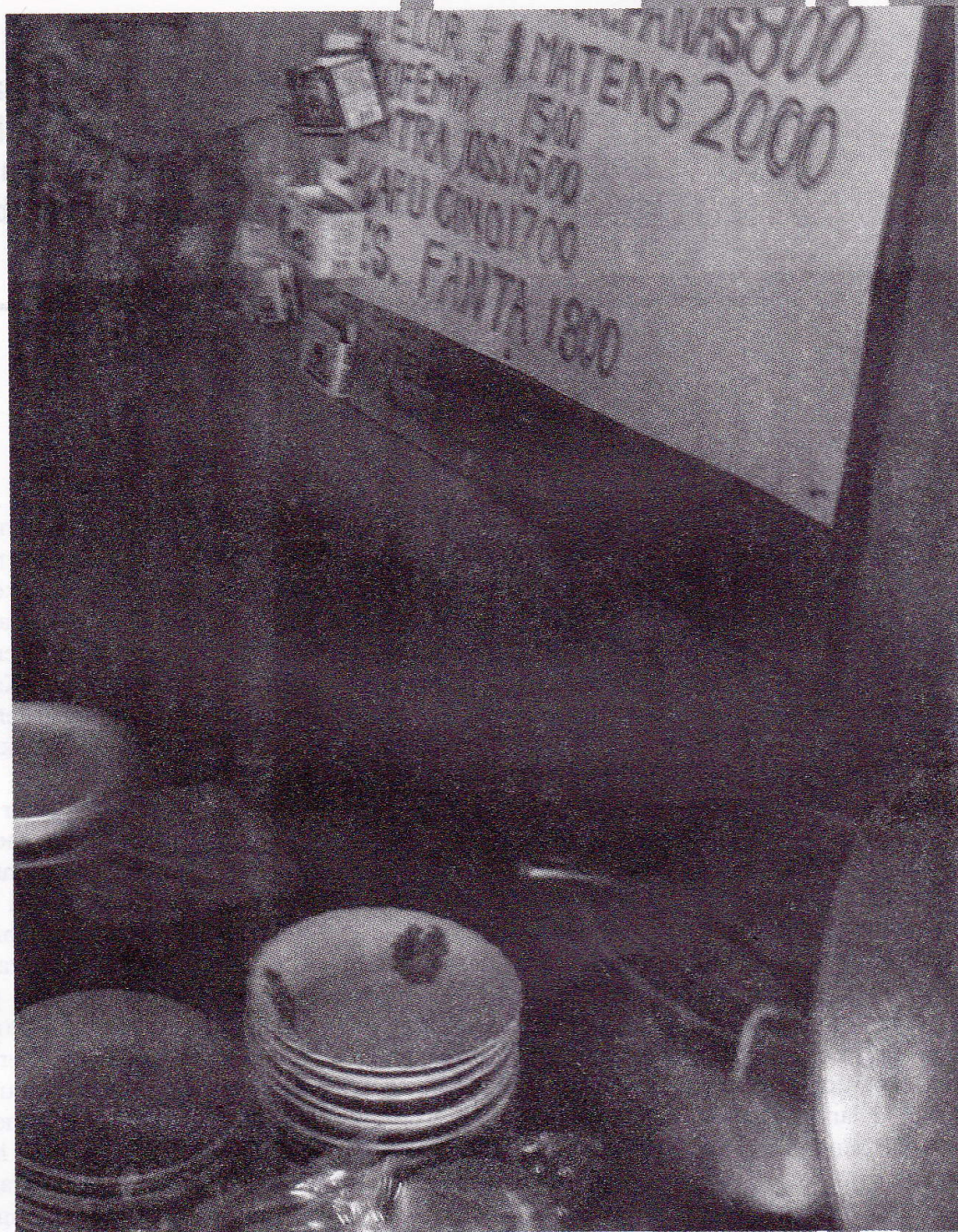
Pasar Potensial Itu Bernama Warung Burjo

"Josua" singkatan dari Extra Joss dan susu. Yang lebih unik, di sebuah warung burjo di daerah Krapyak tersedia Extra Joss yang diseduh bukan dalam air seperti biasanya, tapi dalam air soda. Anda juga bisa menikmati lezatnya Soda Gembira, kendati harganya relatif tak murah. Paduan rasa dan harga itu juga yang membuat minuman yang dinikmati dengan menuangkan air soda di atas lapisan susu dan sirup itu kerap hanya dinikmati oleh orang-orang yang sedang merayakan kegembiraannya.

Memang belum ada angka pasti tentang jumlah warung burjo di seluruh Yogya. Lembaga-lembaga pemerintah rupanya tak tertarik untuk mengadakan pendataan terhadapnya. Bahkan, lembaga yang khusus menangani data-data statistik semacam Biro Pusat Statistik (BPS) pun tak memiliki data ini. Namun, ada beberapa angka yang bisa digunakan sebagai perkiraan. Pihak PT Indofood Sukses Makmur Tbk., produsen mie instan bermerek dagang Indomie dan Sarimi, misalnya, menyebut angka 500 sebagai perkiraan jumlah warung burjo di Yogya. Iing Durahim (33), sekretaris Paguyuban Aria Kamuning, perkumpulan penjual burjo di Yogya, juga mengaku tak bisa memastikan jumlah warung burjo di Yogya. "Ada perkiraan jumlahnya sekitar 700-an," ujar pemilik tiga warung burjo di Yogya ini. Tapi ia menambahkan dengan yakin, "Jumlahnya pasti tak kurang dari 400 warung."

Angka itu cukup besar, mengingat persebaran warung burjo terpusat di kawasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Di Sleman pun hanya wilayah-wilayah sekitar kampus yang memiliki warung burjo cukup banyak. Di wilayah Kecamatan Depok, Sleman saja terhitung ada sedikitnya 116 warung burjo. Ini bisa dipahami, karena sebagian besar kampus di Yogya berada di kawasan kecamatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Yogyakarta. Dan tentu saja, konsumen warung burjo kebanyakan adalah para mahasiswa pendatang yang tinggal di rumah-rumah pondokan sekitar kampus.

Lokasinya yang dekat dengan tempat tinggal mahasiswa itu, membuat tingkat aksesibilitas warung burjo jadi tinggi. Merekalah yang langsung berhadapan dengan konsumen. Selain itu, jam operasi yang lama, bahkan sebagian besar buka 24 jam, menjadikan tingkat penjualan burjo cukup tinggi.

Peran strategis ini sangat diperhitungkan oleh pelaku sektor formal, terutama para produsen barang konsumsi sehari-hari (*fast-moving consumer goods*). Dengan menguasai pasar warung burjo, mereka tak perlu

Tabel 2
Persentase Rata-rata Penjualan Mie Instan Dari Omzet Harian Warung Burjo

PENJUALAN MIE INSTAN PERHARI

1/2kardus x Rp 1600 =Rp 32.000
2 kardus x Rp 1600 =Rp 128.000

OMZET HARIAN WARUNG BURJO

Rp 150.000 - Rp 350.000

PERSENTASE
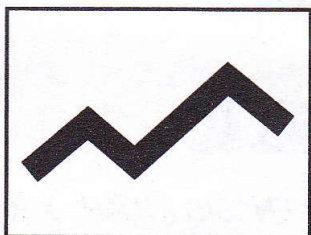
21,3% - 35,6%

Keterangan: satu kardus mie instan berisi 40 bungkus, dengan harga jual rata-rata Rp 1600 per bungkus

Hendi.Balairung

Tabel 1
Jenis Produk Sektor Formal yang Umumnya Dijual di Warung Burjo

Mie Instan

INDOMIE	PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR, JAKARTA
SARIMIE	PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR, JAKARTA
GAGAMIE 100	PT JAKARANA TAMA, BOGOR

Kopi Sachet

COFFEMIX	PT SARI INCOFOOD CORPORATION
NESCAFE	PT NESTLE INDONESIA, LAMPUNG
CAPPUCINO	PT SARI INCOFOOD, TG. MORAWA
GOOD DAY	PT SANTOS JAYA ABADI, SIDOREJO
TORABIKA	PT EKA SEMESTA, TANGERANG

Susu Sachet

MILO	PT NESTLE INDONESIA, KEJAYAN
ENERGEN	PT KAKAO MAS GEMILANG, TANGERANG
STMJ	PT SIDO MUNCUL, SEMARANG

Minuman Berkarbonasi

COCA COLA	PT COCA COLA
FANTA	PT COCA COLA
SPRITE	PT COCA COLA

Minuman Berserat

VEGETA	PT SARI ENESIS INDAH, JAKARTA
FIBER	PT DANKOS LABORATORIES, JAKARTA

Hendi.Balairung

Sari Buah

NUTRISARI	PT NUTRISARI INDONESIA, BOGOR
MARIMAS	PT ULAM TIBA HALIM, SEMARANG

Minuman Suplemen

EXTRA JOSS	PT BINTANG TOEDJOE, JAKARTA
FIT UP	PT KONIMEX, SOLO

Minuman Penyegar

ADEM SARI	PT SARI ENESIS INDAH, JAKARTA

Susu

SUSU BENDERA	PT FOREMOST, JAKARTA
KRIMER	PT FOREMOST, JAKARTA
INDOMILK	PT INDOLACTO, JAKARTA
KREMER	PT INDOLACTO, JAKARTA
CARNATION	PT NESTLE INDONESIA, KEJAYAN
MILKMAID	PT NESTLE INDONESIA, LAMPUNG
ENAAK	PT AUSTRALIA INDONESIA MILK INDUSTRIES, JAKARTA

Rokok

GUDANG GARAM	PT GUDANG GARAM TBK., KEDIRI
DJARUM SUPER	PT DJARUM, KUDUS
DJI SAM SOE	PT HM. SAMPOERNA, SURABAYA
A MILD	PT HM. SAMPOERNA, SURABAYA

membangun gerai sendiri. Memanfaatkan warung-warung burjo yang tersebar di wilayah Yogyakarta itu menjadi pilihan jalan yang ditempuh. Ketika produk mereka tersedia di warung burjo, tingkat probabilitas daya beli konsumen menjadi lebih besar. Karena itu, wajar jika para produsen sektor formal bersaing memperebutkan pasar warung burjo. Seperti diungkap Agus Wahono, staf marketing PT Indofood Yogya, "Kalau kita menguasai burjo, maka kita bisa menguasai yang lain." Tak ayal, beraneka jenis produk sektor formal berebut pasar di warung burjo (lihat Tabel 1).

Karena banyaknya produk formal yang memperebutkan pasar warung burjo, tak heran jika terjadi persaingan. Maka, berbagai cara pun dilakukan oleh pelaku sektor formal, untuk merebut hati para pedagang burjo. Akan tetapi, karena status warung burjo yang tak berbadan hukum, perusahaan-perusahaan itu tak bisa mengikat warung-warung tersebut dengan kontrak resmi. Maka, dipilihlah cara-cara lain untuk membina kedekatan dengan penjual burjo. Fiber, misalnya. Untuk usaha pendekatan itu, produsen salah satu merek minuman berserat ini memberi spanduk gratis pada mereka. Tentu saja di spanduk itu terpasang logo produknya.

Sementara itu, PT Coca Cola memberi pelayanan pada penjual burjo dengan pasokan produk secara rutin. Sebenarnya, ini tak hanya dilakukan produsen minuman berkarbonasi ini pada warung burjo. Hampir semua pengecernya dipasok secara langsung dan berkala.

Dari berbagai produk sektor formal yang dijual di warung burjo, yang cukup dominan adalah mie instan. Tak seperti jenis produk formal lainnya yang diwarnai persaingan, pasar mie instan di warung burjo praktis dikuasai oleh produk-produk Indofood. Indofood memproduksi empat merek mie instan: Supermie, Sarimi, Indomie, dan Sakura Mi. Dari empat merek ini, Indomie dan Sarimi-lah yang banyak dijumpai di warung-warung burjo. Hanya pada beberapa warung saja ditemui mie instan merek lain. Itupun tetap disertai mie produksi Indofood. Jadi, bisa dikatakan bahwa tak ada warung burjo tanpa Indomie atau Sarimi, lebih-lebih pada warung yang memiliki ruang usaha permanen.

Pilihan ini bukan semata-mata spekulasi. Sebab, pendapatan yang diperoleh dari penjualan mie instan cukup besar. Tingkat penjualannya sangat tinggi. Sebuah warung burjo bisa menjual rata-rata setengah hingga dua kardus mie tiap harinya. Ini berarti penjualan mie instan menyumbangkan sedikitnya 20% dari total omzet harian warung burjo (lihat Tabel 2).

Bahkan, untuk beberapa warung burjo yang ramai, jumlah itu bisa berlipat ganda. Di Murni, misalnya. Warung burjo di Jalan Kaliurang ini dalam sehari-semalam bisa menghabiskan hingga delapan kardus mie. Dengan omzet harian sekitar Rp700.000, maka tak kurang dari 70%-nya berasal dari penjualan mie instan.

Laba yang bisa didulang pun relatif tak sedikit. Tiap menjual sebungkus Indomie goreng, sedikitnya Rp675 masuk ke kocek penjual. Jika sehari semalam terjual setengah kardus saja, untung akan terkumpul sebesar Rp13.500. Angka ini bertambah bila yang terjual adalah Indomie rebus. Perbungkusnya bisa ditangguk sedikitnya Rp700 (lihat Tabel 3).

Semula, tak ada yang mengira bila akhirnya bisa begini. Pada awal kehadirannya di Yogya tahun '80-an, warung burjo

Karena banyaknya produk formal yang memperebutkan pasar warung burjo, tak heran jika terjadi persaingan. Maka, berbagai cara pun dilakukan oleh pelaku sektor formal, untuk merebut hati para pedagang burjo. Akan tetapi, karena status warung burjo yang tak berbadan hukum, perusahaan-perusahaan itu tak bisa mengikat warung-warung tersebut dengan kontrak resmi.

belum menjual mie instan. Yang dijual hanya bubur, kopi, dan roti sebagai pelengkap bubur. Ini dikisahkan Ahmad Soja, pemilik Murni. Baru sekira tahun 1986, sebagian warung burjo mulai menjual mie instan.

Saat itu, Indofood melakukan pendekatan dengan memberikan bonus kepada para penjual burjo. "Misalnya dikasih dua kardus, yang dibayar cuma satu kardus saja," papar Soja yang juga mantan ketua Paguyuban Aria Kamuning, perkumpulan penjual burjo di Yogya, periode 1997-2002 ini. Hal yang sama juga dikisahkan oleh Iing Durahim, sang sekretaris.

Dan hingga kini, Indomie dan Sarimi tetap jadi merek yang dominan di warung burjo. Ini bisa dipahami karena mie instan yang pertama kali menguasai pasar adalah dua merek mie produksi Indofood itu. Konsumen lebih mengenal keduanya. Tak heran jika warung-warung burjo memilih mengikuti selera pasar dengan menjual Sarimi dan Indomie.

Heri, salah satunya. Penjaga warung burjo Baraya III di bilangan Babarsari ini, mengatakan bahwa dia memilih Indomie karena merek ini yang lebih laris. Hal senada juga diungkapkan oleh Udin (30), pemilik warung burjo Cafe Bang Udin yang bertempat di Villa Seturan B19, Seturan.

Tak hanya warung burjo yang berkepentingan terhadap produk Indofood. Sebaliknya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk. juga memiliki kepentingan yang besar terhadap warung-warung itu. Produsen mie instan terbesar di dunia ini sangat memperhitungkan warung burjo sebagai garda depan pemasar produknya.

Ini tak mengherankan, karena penjualan mie instan sangat penting bagi Indofood. Di tahun 1999 saja, penjualan mie instan menyumbangkan 37% dari total penjualan bersih Indofood. Dan dari jumlah itu, hampir setengahnya (44%) berasal dari Indomie. Sarimi dan Supermi hanya berandil masing-masing 28% dan 18%.

Dan ternyata, di wilayah Yogyakarta, 30% penjualan Indomie terjadi di warung burjo. Ini diakui oleh Agus Wahono, staf marketing PT Indofood Yogyakarta. Karena itu, warung burjo menjadi cukup berjasa di mata Indofood.

Untuk hitung-hitungan detail, Agus mengaku pihaknya memang belum punya angka pasti. Tapi, dari hasil survai ia merata-rata setiap warung burjo dalam sehari bisa menjual setengah kardus Indomie. Dengan perkiraan jumlah warung burjo di Yogya sebanyak 500-an, dalam satu harinya terjual tak kurang dari 250 kardus

Tabel 3 Keuntungan Harian Rata-rata Warung Burjo Dari Penjualan Indomie	MI GORENG	MI REBUS
Harga Beli	Rp 37.000 per kardus/ Rp 925 per-bungkus	Rp 31.000 per kardus/ Rp 775 per-bungkus
Harga Jual	Rp 1600 per bungkus	Rp 1600 per bungkus
Keuntungan	Rp 675 per bungkus	Rp 825 per bungkus
Keuntungan Harian Rata-Rata	1/2 kardus x Rp 750 (Rp 15.000)- 2 kardus x Rp 750 (Rp 60.000)	

Hendi.Balairung

Keterangan: Satu Kardus Mie Instan Berisi 40 Bungkus, Dengan Keuntungan Penjualan Rata-rata Rp 750 Per Bungkus

Indomie.

Namun rupanya, pihak penjual burjo punya perhitungan sendiri. Iing Durahim, membantah perkiraan Indofood itu. Menurutnya, angka persentase penjualan Indomie di warung burjo dari total penjualan di Yogya jauh lebih banyak dari itu. "Kita menghitung rata-rata yang terjual sehari ada dua dus. Sebenarnya banyak yang lebih. Tapi mereka (Indofood—*Red.*) hanya mau *ngitung* setengah dus," tuturnya. "Saya menghitung dengan jumlah warung terendah yaitu 400 buah," tambah penduduk asli Desa Kertayasa, Garawangi ini. Dengan memakai kalkulasi Iing, seluruh warung burjo di Yogya menjual sekira 800 kardus Indomie tiap harinya. Hebat.

Dengan angka penjualan yang cukup tinggi itu, wajar jika Indofood sangat berkepentingan terhadap warung burjo. Buktinya, meski sudah mendominasi pasaran mie instan di warung burjo, mereka tetap melakukan pendekatan-pendekatan untuk mengikat loyalitas pedagang burjo pada produknya.

Selama ini, Indofood tidak mengadakan kontrak-kontrak khusus dengan warung-warung burjo. Upaya yang dilakukan lebih mengarah pada pendekatan emosional. "Kita membuat hubungan baik dengan mereka, ya *good will* lah. Kita mengikat hubungan yang saling menguntungkan," jelas Agus.

Bentuknya bermacam-macam. Tiap tahun, Indofood mengadakan jumpa pelanggan. Dalam acara yang diselenggarakan tiap bulan September ini, semua penjual burjo diundang. Di sana, mereka dihibur dengan pertunjukan musik dangdut dan pengundian berbagai hadiah, dengan syarat membawa bungkus produk-produk Indofood.

Menurut Agus, untuk menyebarkan undangan pihaknya mendatangi tiap warung. Meski begitu, ia mengakui bahwa tak semua mendapatkannya karena data yang dimiliki belum lengkap. Tak ada persyaratan khusus bagi penjual burjo untuk mengikuti pertemuan tahunan itu. Jadi jika ada yang belum mendapat undangan pun, bisa langsung minta pada pihak penyelenggara.

Pada pertemuan terakhir di Gedung Pamungkas, sebelah timur Stadion Kridosono, September 2002 lalu, Indofood menyebar 400 undangan. Jumlah ini dipastikan akan bertambah pada tahun selanjutnya. "Perkembangan burjo itu pesat sekali. Sekarang 400, tahun depan bisa 500," tutur Agus, yakin.

Kunjungan silaturahmi ke warung-warung burjo juga tak terlupakan. Hal ini dilakukan untuk menampung permasalahan yang dialami para penjual burjo. "Mereka (Indofood—*Red.*) biasanya datang ke warung-warung, *nanya-nanya* soal jualan," ungkap Ahmad Soja. Selain itu, sejak 1995, setelah Paguyuban Aria Kamuning mengajukan proposal untuk mudik bersama, Indofood juga menyediakan bus untuk mudik bagi para penjual burjo di Yogya.

Tak cukup sampai di situ, ternyata. Spanduk gratis yang bertuliskan nama warung, juga diberikan pada warung-warung burjo. Sebenarnya ini pun iklan gratis bagi Indomie, karena logonya turut *mejeng* di spanduk-spanduk itu. Tentang ini, Agus sambil tersenyum menjelaskan, "Ya, itu bisa dikatakan iklan gratis. Tapi pihak burjo sendiri lebih suka ada logo Indomie-nya. Jadi kalau *nggak* ada Indomie-nya, mereka tidak mau." Pria asal Kebumen ini lalu menambahkan dengan mantap, "Karena, terus terang, loyalitas konsumen pada Indomie itu tinggi."

Upaya mendekati penjual burjo dengan memberi spanduk ini tak hanya dilakukan Indofood. Gagamie juga memulai hal

Tak cukup sampai di situ, ternyata. Spanduk gratis yang bertuliskan nama warung, juga diberikan pada warung-warung burjo. Sebenarnya ini pun iklan gratis bagi Indomie, karena logonya turut *mejeng* di spanduk-spanduk itu.

serupa. Spanduk berwarna merah bertuliskan "WarGa" (warung Gaga) juga tampak, misalnya di warung Kabita milik Maman dan Uhud, di Sagan.

Tapi rupanya, apa yang diberikan Indofood ini tak memuaskan semua penjual burjo. Para penjual burjo di Yogya merasa dianaktirikan. Menurut mereka, penjual burjo di Yogya tidak diperlakukan seistimewa rekan-rekan mereka di Jakarta. "Di Jakarta, ada kegiatan kuningisasi (pemberian spanduk berwarna kuning—*Red.*), bingkisan ketika lebaran, dan lain-lain. Pokoknya program di sana lebih komplit," ungkap Maman, pemilik dua warung burjo di bilangan Sagan, Yogyakarta.

Hal yang sama juga dikeluhkan Iing Durahim. "Kalau di Jabotabek yang tak ada paguyubannya saja bisa dilayani dengan bus yang dikawal polisi, dan masih diberi paket tas dan makanan, di Yogya hanya diberi jatah lima bus DAMRI. Padahal penjual burjonya ada 1200. Ini 'kan *nggak* mencukupi," keluhnya, membandingkan. Bagi Iing, ini tak adil. "Padahal kalau dilihat prospeknya, burjo di Yogya tak kalah dengan yang di Jabotabek. Namun kenapa perlakuan Indofood di Yogya dan Jabotabek jauh berbeda?"

Tak hanya itu. Soal spanduk pun bermasalah. Spanduk gratis dari Indofood juga tak terdistribusi secara merata. Iing sebagai sekretaris Paguyuban Aria Kamuning, pada pertemuan di Gedung Pamungkas September lalu, menyatakan bahwa ia ia takkan memasang spanduk bila belum semua warung burjo mendapatkan jatah spanduknya. Ia juga berharap bahwa penjual burjo lain turut solider dengan tidak memasang spanduk dulu, jika belum semua rekannya mendapat jatah.

Dari kekecewaan-kekecewaan ini, sempat muncul ide untuk memboikot produk Indofood. Paguyuban Aria Kamuning berencana akan menjual asetnya pada perusahaan yang lebih mau peduli pada nasib penjual burjo dan paguyubannya (baca: Ketika Kamuning Membawa Layu...).

Tentang ancaman itu, Agus menganggapnya hanya suara-suara sepihak. "Itu bukan suara mayoritas burjo," bantahnya. Namun demikian, pihaknya tetap akan menanggapi keluhan-keluhan itu.

Tapi nampaknya rencana boikot itu memang tak akan berjalan mulus. Sebab, ternyata tak semua penjual burjo sepakat dengannya. Otoy Toyib (44) salah satunya. Pemilik warung burjo Kang Jujuk di bilangan Tambakbayan, Babarsari ini mengaku tak setuju dengan ide itu. Alasannya, jika turut memboikot, maka ia harus menggunakan mie selain poduk-produk Indofood. Padahal, selera konsumen telah kadung lengket pada cita rasa Indomie. Maka, ia pun khawatir pendapatan warungnya akan menurun karena penjualan mie merek lain tak akan selaris Indomie. "Kecuali paguyuban atau pabrik lain itu mau tanggung jawab terhadap kerugian kalau kita ganti mie," tantang pria beranak dua ini. Kurangnya konsolidasi Paguyuban Aria Kamuning juga menyulitkan terwujudnya upaya boikot ini.

Kisah perjalanan Indomie dari pabrik hingga ke warung burjo ternyata cukup panjang dan berliku. Sebelum tersaji dalam mangkuk di meja dan siap disantap, ada banyak tangan yang mesti dilalui oleh sebungkus Indomie.

Setelah selesai dari proses produksi dan pengemasan, Indomie akan disalurkan oleh distributor. Dalam kelompok Indofood, yang jadi distributor bagi Indomie adalah salah satu anak perusahaannya, PT Indomarco Adi Prima. Selain mendistribusikan Indomie, Indomarco yang 80% sahamnya dibeli Indofood 1997 lalu, juga menangani distribusi Supermi.

Ada sebagian warung burjo yang disuplai langsung dari Indomarco. Tapi jumlahnya tak banyak. Warung-warung yang disuplai langsung ini biasanya adalah warung dengan tingkat penjualan mie cukup tinggi. Misalnya warung Murni di Jalan Kaliurang. Hal yang sama juga dialami warung burjo Doa Abbah I, di Jembatan Merah, Gejayan. Encu (27), sang pemilik, mengaku menerima pasokan Indomie dengan sistem bon. Setelah barang habis, barulah ia membayar. Warung Murni yang dikelola Iing Durahim di Jalan Monjali, juga mendapat pasokan langsung dari Indomarco. Syarat untuk bisa mengambil Indomie dengan sistem bon pun tak sulit. "Cuma butuh *ngisi* formulir dari Indomarco, sama fotokopi KTP," tutur Iing.

Sedang warung burjo lain yang tak dipasok langsung dari Indomarco, biasanya membeli stok Indomie-nya di pasar-pasar. Banyak penjual burjo yang sudah langganan pada pengepul di pasar. Para pengepul inilah yang mendapat pasokan dari Indomarco. Mang Ahlan, misalnya, lebih memilih membeli Indomie langsung ke pasar. Pemilik warung burjo Raja Rasa di belakang kampus UPN (Universitas Pembangunan Nasional) Veteran ini mengaku tak enak jika harus memutuskan hubungannya dengan pengepul dan membeli langsung pada Indomarco. Selain alasan tak enak, penjual burjo juga lebih memilih membeli mie di pasar karena alasan waktu. Sebab, seringkali persediaan mereka lebih dulu habis sebelum datang pasokan dari Indomarco.

Tapi jalur distribusi Indomie tak selalu sesederhana itu. Antara Indomarco dan pengepul di pasar itu kadang masih ada perantara lain,

bahkan tak hanya satu lapis. Ini dituturkan oleh Ir. Candra Mulyadi Wiharjo (33), pemilik Pangan Jaya, salah satu pemasok yang menyuplai Indomie ke pengepul di pasar. Candra sendiri berada pada lapis ketiga. Di atasnya masih ada orang lain yang mengambil Indomie langsung dari Indomarco.

Candra yang alumnus Teknik Elektro Universitas Atma Jaya Jakarta ini, melalui karyawannya menjual langsung ke para pengepul di pasar. Anehnya, Indomie yang dipasok oleh Pangan Jaya bisa lebih murah dibanding dari Indomarco. Selisihnya bisa mencapai Rp500 per kardus. Bedanya, pihak Indomarco menjual Indomie dengan sistem bon, sedang Chandra menjualnya dengan *cash*.

Pihak Indomarco sendiri ketika dihubungi menolak memberi keterangan. Erwin, *Sales Manager* PT Indomarco wilayah Yogya menyatakan bahwa urusan distribusi adalah urusan dapur mereka yang tak bisa dibocorkan. "Persaingan *brand* mie instan sekarang ini cukup ketat, karena itu kita mesti hati-hati," dalihnya diplomatis.

Peta Distribusi INDOMIE

Keterangan:
* Jumlah pemasok perantara bisa lebih dari satu lapis.

Data diolah dari hasil penelusuran lapangan

Dengan proses distribusi yang berlapis-lapis semacam ini, tak aneh jika warung burjo yang jadi pihak terakhir tak mendapat diskon sekecil apapun. Harga jual Indomie kepada mereka sama saja dengan pada pembeli-pembeli lain. Sementara para pemasok lapisan atas bisa mendapat diskon dan berbagai macam hadiah. "Kemarin, pemasok di atas saya dapat tiket pesawat ke Korea," cerita Candra. Ini cukup mengherankan karena warung-warung burjo bisa dikatakan ujung tombak penjualan Indomie.

Agus sendiri mengakui Indofood kesulitan memberi diskon khusus, karena penjual burjo tidak langsung membeli melalui distributor. "Jika kita ingin memberikan diskon, maka melalui grosir-grosir itu, melalui pengepul-pengepul," tambahnya.

Warung burjo dengan jumlahnya yang besar, tingkat penjualan yang tinggi, aksesibilitas dan waktu operasi yang juga tinggi merupakan pangsa pasar yang potensial bagi pelaku sektor formal. Dan rupanya, keberadaan pangsa pasar potensial ini kian disadari. Karena itu, peta persaingan pun makin ramai. Mestinya, banyaknya pelaku sektor formal yang menginginkan pasar ini meningkatkan posisi tawar warung burjo Tapi benarkah nyatanya demikian? Rasanya belum. Ada banyak hal yang melatarinya.

Hubungan antara usaha sektor informal dan sektor formal seringkali dilihat sebagai pembinaan. Yang satu membina yang lain, yang besar membantu yang kecil. Perspektif ini dibangun berdasar asumsi bahwa hubungan itu saling menguntungkan. Tapi masalahnya, sudahkah keuntungannya berimbang? Atau ada satu pihak yang lebih beruntung dibanding yang lain? Atau malah hubungan kedua sektor ini memang sekadar hubungan bisnis belaka?

Ketika Kamuning Membawa Layu...

Tantrin.Balairung

Enam kali tujuh meja biru kursi plastik merah cahaya neon dinding biru muda kaleng krupuk hijau biru kaleng susu cokelat mangkuk porselen putih merah dandang alumunium kacang hijau botol kecap botol saus kardus Indomie ayam bawang goreng bilik tidur jemuran handuk pembeli memesan penjaja *ngrumpi*......

Keriuhan itu tak sungguh-sungguh terjadi. Usai maghrib, lazimnya tempat-tempat sejenis, hanya ada beberapa gelintir orang di dalam bangunan itu. Tempatnya terselip di sebuah kompleks perumahan, sebelah barat laut kota. Nuansa interiornya simpel, namun bukannya "minimalis" seperti layaknya gaya arsitektur masa kini. Bangunan itu lebih tepat dikatakan sederhana. Maka, tak banyak yang bisa mengenalinya sebagai markas besar sebuah organisasi berkekuatan ribuan orang, yang tersebar di seluruh penjuru propinsi.

Murni, begitu nama yang tercetak pada spanduk di muka, memang cuma sebuah warung burjo. Tapi selain menjajakan makanan, warung yang terletak di kawasan Nandan ini sekaligus menjadi tempat pemusatan "roda pemerintahan" Aria Kamuning (AK), sebuah organisasi paguyuban yang mewadahi para pedagang burjo di Yogyakarta.

Perkara tumpang-sari penggunaan tempat bukan hal yang aneh di negeri ini. Apalagi kalau sang pelaku terlibat dalam keduanya. Seperti yang dilakukan oleh Iing Durahim, sang empunya Murni. Selain berdagang burjo, pria warga Dusun Manis, Desa Kertayasa ini juga memegang jabatan sebagai sekretaris di AK. Meski baru enam bulan, akunya.

Hingga kini, lanjutnya, AK belum punya kantor sekretariat yang tetap. Jangankan untuk membangun sebuah kantor, membuat atribut organisasi saja tak mampu. Bahkan, inventaris "kantor" ini hanya berupa sebuah map berisikan proposal dana, semacam buku pegangan yang memuat AD/ART paguyuban, serta buku notulensi rapat.

Perihal pendirian sekretariat, ayah dua putri itu berterus terang bahwa AK pernah mengajukan permohonan bantuan kepada Indofood. Namun, produsen mie instan ini tak setuju dengan tawaran itu. Penolakan ini adalah salah satu babak terpanas dalam pergolakan hubungan AK dan Indofood.

Benci tapi rindu. Hubungan pengurus AK dengan manajemen Indofood perwakilan Yogyakarta bak judul lagu cengeng tahun '80-an gubahan Rinto Harahap itu. Sejatinya, hubungan mereka bersifat saling menguntungkan. Indofood memasok bahan baku kepada para pedagang burjo, yang notabene merupakan anggota AK, sementara warung-warung burjo juga menjadi ujung tombak distribusi produk Indofood.

Sedari awal, Indofood pun menyadari posisi strategis itu. Karenanya, ada rencana untuk memberikan sedikit penghargaan atas warung burjo, dengan membagikan spanduk (*banner*) bertuliskan nama masing-masing warung. Niatnya baik, karena dengan program pembagian spanduk itu kedua pihak akan diuntungkan. Bagi warung burjo, spanduk dan nama yang jelas terbaca merupakan salah satu pemikat para pembeli. Bagi Indofood, juga sebuah langkah promosi karena di sudut spanduk masih diembel-embeli logo Indofood.

Namun entah apa yang terjadi, ada saja masalah yang membuat hubungan mereka tak semulus yang diharapkan. Beberapa pedagang mengeluh karena tak menerima jatah spanduk di saat rekan mereka yang lain mendapatkannya. Atas nama solidaritas, pengurus AK pun mengimbau para anggotanya untuk tak memasang spanduk-spanduk itu.

Masalah spanduk bukan yang pertama dan terakhir, karena ada kejadian lain sewaktu lebaran tahun lalu. Dalam momen Idul Fitri yang seharusnya digunakan sebagai saat yang tepat untuk saling bermaafan, justru percekcokanlah yang meletup. Mula perkaranya soal angkutan mudik.

Sejak 1995, Indofood memfasilitasi kegiatan mudik lebaran para pedagang burjo yang hampir semuanya berasal dari Kabupaten Kuningan. Waktu awal keberadaan fasilitas transportasi mudik itu, perusahaan yang sempat dinakhodai oleh konglomerat Sudono Salim ini menyediakan lima buah bus berkapasitas 315 orang. Waktu itu

memang masih mencukupi. Namun dalam rentang waktu 8 tahun, jumlah anggota Aria Kamuning telah bertambah dengan pesat.

Memang, hingga saat ini belum diketahui secara pasti jumlah pedagang burjo di Propinsi DIY. Namun, merunut data terakhir AK (tahun 2003), setelah dibulatkan, di wilayah ini ada 400 warung burjo dengan 1500 orang pekerja, termasuk pemiliknya. Ini belum jika mengikuti perkiraan Iing. Iing memperkirakan saat ini jumlah burjo telah mencapai 700 buah. Jadi, Total 2000 orang pun terlibat di sana. Perhitungan ini bertolak dari sifat organisasi AK yang berupa paguyuban dengan sifat keanggotaan yang cair. Artinya, setiap pekerja burjo, baik pedagang atau pemilik dan karyawannya, dianggap sebagai anggota AK.

Ketika anggota paguyuban telah mencapai jumlah sebesar itu pun, ternyata jumlah kapasitas bus tak ditambah. Padahal, mereka semua tentu ingin pulang mudik ke kampung halaman. Apa lacur, "DAMRI yang saya mintanya dua puluh, yang dikasih hanya lima," keluh Iing. Alhasil, sebagian dari mereka terpaksa tak mendapat tempat duduk. Mereka pun harus betah berdiri selama tujuh jam, untuk menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 350 km!

Kalau mengingat hal itu, kegeraman Iing tak dapat ditutup-tutupi. "Saya ingin supaya semua orang burjo di Yogya itu bisa pulang *bareng-bareng,*" harapnya ketika ditemui di kantor biro travel Idaman Asri yang terletak di Madukismo, Bantul; sebuah usaha perjalanan yang melayani jalur Yogyakarta-Kuningan. Maka ia dan dan beberapa kolega sesama pedagang termasuk Entis Sutisna, pemilik Idaman Asri, mengajukan persoalan ini kepada Indofood. Tapi hasilnya nihil hingga kini.

Di mata pengurus AK, lagi-lagi Indofood membuat kesalahan. Sewaktu dipersoalkan, tanggapan yang diberikan pun tak pernah dianggap memuaskan. Akumulasi rasa kecewa dan amarah yang membuncah itu membulatkan tekad pengurus AK: aksi nyata harus segera dilakukan. Segenap anggota akan digerakkan untuk melakukan boikot terhadap produk-produk Indofood. Caranya dengan tidak menjual produk-produk itu di warung milik mereka. Alasannya, sejak awal tak ada kontrak tertulis yang mengharuskan pedagang burjo menggunakan produk-produk Indofood. Bahan-bahan seperti mie instan pun akan didatangkan dari produsen lain dengan kerja sama lebih lanjut.

Pengurus berharap dari proses ini dapat dihasilkan kontrak baru dengan sistem imbalan yang lebih jelas dan menguntungkan. Setiap produsen mie instan yang ingin produknya dijajakan harus membayar dalam jumlah tertentu sebagai uang kontrak. Mekanismenya tak berbeda dengan produsen pakaian olahraga yang mensponsori (*endorsing*) atlet. "Jadi, nanti sistem jual beli ke kita itu lain. Jika Indofood misalnya beli ke kita 2 juta, maka produk lain yang semula belinya 1 juta akan menaikkan jadi 2 juta. Lebih tinggi!" ujar Iing.

Gagasan substitusi produk ini cukup beralasan mengingat saat ini produk mie instan yang beredar di pasaran tidak hanya keluaran Indofood (Lihat: *Pasar Potensial Itu Bernama Warung Burjo*). Pastinya, posisi tawar pedagang burjo di hadapan produsen mie instan pun meningkat.

Mereka berhak melakukan itu karena sebagai salah satu mata rantai distribusi produk Indofood, sumbangan burjo kepada Indofood tak bisa dianggap remeh. Merujuk perkiraan pengurus AK, paling tidak 70% keuntungan Indofood Yogyakarta berasal dari transaksi dengan pedagang burjo. Cuma, AK tak mengetahui jumlahnya dengan pasti. Perhitungan ini didasarkan kepada laporan manajemen Indofood pada tahun-tahun sebelumnya, sebab Indofood enggan membeberkan data keuntungan terbaru.

Di sisi lain, sedikit banyak pedagang burjo terkena cipratan laba dari posisi mereka sebagai ujung tombak pemasaran produk Indofood. Jadi, sebenarnya kedua belah pihak sama-sama untung. Namun, betulkah begitu?

Menurut Ari Sudjito, sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, kendati ada selisih keuntungan, "....nilai lebih yang diperoleh dari sistem produksi itu sangat tak imbang, sehingga kita bisa mengatakan bahwa keuntungan itu terserap pada industri mie itu." Maka, pilihan boikot dianggap Ari sebagai strategi yang tepat untuk menaikkan daya tawar pedagang. Pasalnya, ketiadaan kontrak telah menyulitkan pedagang dalam mencari dasar hukum untuk menuntut Indofood.

Lain pendapat akademisi, lain pula kata praktisi. Bagi Eroroi, pedagang burjo di dekat kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), kebutuhan ekonomi keluarga lebih utama daripada tuntutan macam begitu. Putra Desa Sindang Agung, Kuningan ini merasa jeri. Hanya gara-gara boikot, ia khawatir warungnya akan jadi sepi. Pendapatnya bukan tanpa alasan. Indomie, salah satu mie instan produk Indofood yang biasa dijajakan selama ini, sudah telanjur lekat di lidah konsumen.

Penolakan senada juga diungkapkan Salam Garai dan Otoy Toyib. Dalam pandangan Salam, penentuan barang yang dijual adalah hak otonom masing-masing pemilik, dan AK tak berhak mengintervensi. Sementara itu, justru lemahnya soliditas AK yang membuat Toyib meragukan keberhasilan rencana pemboikotan

itu. "Indofood *emang* bisa dibilang pelit. Tapi kalau mau boikot, pikir-pikir dulu. Belum tentu semua orang *dagang* burjo dari Kuningan mau bersatu. Nanti saya rugi sendiri!" tandas pemilik warung di Tambakbayan, Babarsari ini.

Jelas sudah, pengurus AK telah gagal menyatukan persepsi anggotanya. Keinginan pengurus untuk menaikkan posisi tawar paguyuban di hadapan pihak luar tak mendapat dukungan. Justru kepentingan-kepentingan ekonomis individual mengalahkan tujuan bersama sebagai kelompok.

Dalam hemat Ari Sudjito, ada yang salah dengan paguyuban ini. *Pertama,* perbedaan persepsi di kalangan pedagang burjo disebabkan oleh kurangnya kesadaran politik mereka. Mereka tak sadar menjadi bagian dari kelas yang dipinggirkan dan secara struktural tertindas oleh kekuatan modal besar—dalam hal ini Indofood. "Persoalannya, bagaimana orang sadar akan penindasan dalam sistem yang mereka jalani?"

Kurangnya kesadaran politik membawa kepada kesalahan *kedua.* Pentingnya organisasi sebagai alat perjuangan untuk melawan kekuatan modal yang menindas, terlupakan. "Kalau dia (organisasi) hanya untuk *sharing* kultural, susah! Organisasi itu, supaya berdaya, harus diisi dulu roh perjuangannya. Kalau tak ada, ya mandeg, statis, involutif," terusnya.

Harapan tumbuhnya kesadaran politik di antara pekerja burjo memang tak mudah tergapai, mengingat tingkat pendidikan rata-rata mereka yang terbilang rendah. Dari 103 pedagang burjo di Kecamatan Depok, Sleman, lulusan SMU hanya 35 orang. Apalagi dengan sarjana yang cuma berjumlah 4 orang.

Tingkat pendidikan yang rendah ini menyebabkan lemahnya landasan konseptual untuk menganalisis fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan mereka. Karena itu, Ari menganjurkan perlunya pendidikan politik kepada pekerja burjo, baik dilakukan oleh kalangan mahasiswa maupun LSM. Apabila kesadaran politik telah dimiliki, maka AK akan menjadi sebuah organisasi gerakan yang berkekuatan. Semua kritikan pun akan dapat dirontokkan, termasuk kritik Toyib ihwal lemahnya kohesi antarelemen di dalam organisasi AK saat ini. Tapi tunggu dulu. Ibarat tamsil "tak ada asap tanpa api", bagaimana bisa Toyib menilai seperti itu?

Rupa-rupanya, pengurus dan anggota AK tak mengambil pelajaran dari usia paguyuban yang sudah cukup uzur. Pasang-surut dinamika organisasi ini tak bermuara kepada kearifan dalam menyikapi keadaan. Padahal, AK sudah dirintis semenjak 1989, ketika pertama kalinya seorang lelaki bernama Sukiman hijrah ke Yogyakarta. Setelah warung burjonya di Bogor ludes dilalap api, Kiman, begitu sapaannya, mengadu peruntungan di Yogya.

Tampaknya bisnis ini sudah menjadi jalan hidupnya. Di tempatnya yang baru ia kembali membuka burjo, tepatnya di Jl. Hayam Wuruk, Lempuyangan. Pengalamanlah yang membuat laki-laki separuh abad ini dituakan oleh pedagang lainnya, meskipun ia masih baru di tempat ini.

Sebulan sekali, di warung Kabita yang sekaligus menjadi tempat tinggal Kiman, diadakan pertemuan antarpekerja burjo. Salah satu menu acaranya adalah arisan. Maklum, mereka terbilang masih saling bertetangga, karena sama-sama berasal dari Desa Kertayasa, Kuningan. Awal-mulanya, hadirin yang

SUKIMAN
Pendiri Arya Kamuning dan Pemilik Warung Burjo Kabita

Pengalamanlah yang membuat laki-laki separuh abad ini dituakan oleh pedagang lainnya, meskipun ia masih baru di tempat ini.
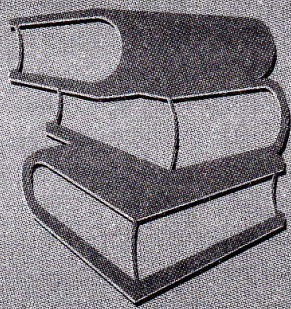
Tabel 1
Tingkat Pendidikan Pedagang Burjo di Kecamatan Depok, Sleman

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SD	29,66%
SLTP	23,72%
SMU	29,66%
Perguruan Tinggi	3,38%

Data hasil survei BALAIRUNG, Mei 2003

Hendi.Balairung

datang baru 20-an orang. Di antaranya ada Ahmad Soja, Toyib, dan beberapa pedagang lain selain tuan rumah.

Memasuki tahun kedua, *kongkow-kongkow* itu makin ramai. Bersamaan dengan itu, Indofood yang menyadari arti penting kehadiran burjo menawarkan fasilitas angkutan mudik lebaran bagi mereka. Agar prosesnya lancar, Indofood meminta agar dibentuk sebuah organisasi payung. Tanggal 7 Agustus 1994, arisan kekeluargaan ini resmi menjadi paguyuban Aria Kamuning (AK). Nama itu sendiri berasal dari nama seorang bangsawan Kuningan pada abad ke-16. Menurut catatan awal, jumlah anggotanya sebanyak 65 orang.

Dibawah kepemimpinan Kiman, AK maju pesat. Berbagai urusan usaha dibicarakan bersama. Mulai dari cara berinteraksi dengan penduduk setempat, prosedur perizinan pendirian warung, sampai dengan masalah keamanan. Yang terakhir ini sering menjadi masalah utama. Berbeda dengan sekarang, pada masa itu tak ada burjo yang buka selama 24 jam penuh. Selain sepi konsumen, kerap kali terjadi aksi pemalakan yang dilakukan preman. Untunglah, kita hidup di Indonesia, tempat "pendekatan kekeluargaan" masih dikedepankan. Untuk itu, pengurus AK merekrut *backing* tentara. Lamudin, mantan Komandan Rayon Militer Pengok, sempat menjadi "pembina" sampai akhir hayatnya.

Bak LSM, rezim Kiman melakukan kegiatan-kegiatan pencarian dana (*fundrising*). Setiap anggota diwajibkan membayar iuran bulanan sebesar Rp3000. AK juga bekerjasama dengan Dian Asri sebuah distributor bahan-bahan kebutuhan burjo. 25 sampai 50 perak dari setiap *item* barang yang dipasok, mereka sisihkan untuk paguyuban. Bisa jadi sudah keranjingan, sampai-sampai setiap penumpang bus mudik lebaran yang sedianya digratiskan (*prodeo*) masih harus menambah 2000 hingga 3000 rupiah per orang.

Salam, bendahara AK kala itu, menghamparkan segenap alasan pemungutan iuran. Penarikan ongkos bus, demikian pedagang burjo yang telah lama membuka usahanya di Pasar Gading ini mencontohkan, ditujukan sebagai uang lelah bagi pengurus yang menyampaikan informasi angkutan mudik itu kepada anggota. Lagi pula, waktu itu kas organisasi tak banyak dan bahkan sering kosong. Pemasukan-pemasukan dari anggota maupun dari pihak luar kerap ludes untuk satu acara saja.

Dalam versi Salam, semua itu sudah dijelaskan sewaktu rapat dan pertemuan AK. "Seandainya kini ada pihak yang berkeberatan, itu karena mereka tak hadir," dakwanya.

Sontak, para anggota yang tertimpa tuduhan itu memberikan pledoi. Persoalan inefisiensi biaya di atas kembali dipertanyakan. Bagaimana mungkin kas AK seret? "Kalau anggota ada 400 orang dan setiap orang dipungut, bayangkan saja besarnya!" ujar Yogi dari selatan Universitas Sanata Darma (USD), Mrican. Jawabannya hanya satu: korupsi. Diduga, dana bantuan dari Indofood sering disunat tanpa ada pertanggungjawaban dari pengurus.

Berat rasanya bagi pekerja burjo untuk menyisihkan uang yang mereka kumpulkan dengan susah-payah, apalagi tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Belajar dari yang sudah-sudah, mereka hanya mau mengeluarkan uang dari kantong hanya bila pengurus menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan. Kalau dibiarkan berlarut-larut, persoalan ini bisa menjadi bom waktu karena kepercayaan anggota merupakan salah satu syarat mutlak bagi keberlangsungan organisasi.

Anggota-anggota AK juga menyoroti bobroknya kinerja kepengurusan ini. Daftar kekecewaan anggota ini bisa bertambah panjang dengan adanya inkonsistensi kebijakan dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat.

Waktu itu akhir dekade '90-an. Runtuhnya rezim Orde Baru menyisakan panasnya gejolak politik. Demonstrasi, bencana banjir, dan aksi premanisme yang marak membikin pekerja burjo melakukan eksodus besar-besaran dari Jakarta. Sebagian besar dari mereka berpindah ke Yogya, sebagaimana dengan rekan sedaerah mereka yang sebelumnya bekerja di pabrik. Seperti halnya fenomena *gold rush* di Amerika pada awal abad ke-20, Yogya tiba-tiba disesaki oleh warung-

warung burjo. "Dalam seminggu bisa muncul lima belas sampai dua puluh warung burjo," cerita Maman, pemilik warung di selatan RS Panti Rapih.

Suasana tegang tak dapat dielakkan. Pedagang yang sudah lebih dulu eksis merasa terancam dengan kehadiran pendatang baru. Apa ada pedagang yang dengan begitu saja ikhlas kehilangan konsumen? Melihat gelagat buruk itu, Kiman sebagai ketua AK secara lisan mengikrarkan sebuah aturan bersama: barangsiapa yang hendak membuka warung baru, harus terletak dalam radius minimal 200-300 meter dari gerai-gerai yang sudah ada.

Tapi apa yang terjadi? Bak menelan liur sendiri, aturan itu dilanggar sendiri oleh sang ketua sekaligus pembuatnya. Tahun 1997, panji-panji burjo Kabita milik Kiman merambah Jl. Timoho, selatan IAIN Sunan Kalijaga. Padahal, dalam jarak yang tak lebih dari 200 meter, Kurengkauan milik Ohamad Toha sudah lebih dahulu bercokol. "Dia sendiri yang menetapkan aturan, dia sendiri yang melanggar," ujar Oha seolah menirukan isi sebuah lagu dangdut. Hanya lantaran ia menghargai senioritas Kiman, Oha memilih diam dan membiarkan tindakan invasi itu.

Sewaktu ditanya tentang perkara ini, Kiman membantah pernah menetapkan aturan pembatasan jarak. "Sebetulnya *nggak* ada aturan itu," kelitnya. Dalam pandangan Kiman seakan ingin menunjukkan hikmah peristiwa ini, jarak yang dekat malah bisa membuat mereka bisa bersaing dengan sehat dan saling belajar. Tapi seperti apa persaingan yang sehat dan saling belajar itu? Yang jelas, Oha hanya bisa memendam lara itu sendiri. Pergantian tampuk kepemimpinan dari Kiman kepada Ahmad Soja pada tahun itu cuma membuat luka ini meluruh, namun tak pernah sembuh.

Dalam acara pemilihan di tempat asal mereka, Soja terpilih secara demokratis. Bersama Salam dan Yanto Rusma (keduanya masih terhitung kerabat), ia merintis usahanya pada tahun 1981. Berawal dari sebuah gerai di Sendowo, dekat RSU Dr. Sardjito, trio Soja-Salam-Yanto terus mengepakkan sayapnya dengan mengusung label "Murni". Kini, Soja sudah menanamkan modalnya pada empat warung. Hasil kerja kerasnya membuahkan sebuah rumah berlantai dua dan sebuah mobil Kijang. Dua orang anaknya pun dapat merengkuh bangku perguruan tinggi.

Sayang, sukses bisnis Soja tak berbanding lurus pada kinerjanya di AK. Selama periode 1997-2002, nasib AK berada pada garis abu-abu: antara ada dan tiada. Rapat anggota jarang digelar. Sementara itu, setiap pedagang seperti berjalan sendiri-sendiri. Persoalan-persoalan yang muncul karena kehadiran pendatang baru, baik perebutan lahan maupun persaingan harga, diselesaikan antarindividu. Bahkan, pekerja burjo yang baru menjejakkan kaki pasca tahun 1997 hampir-hampir tak mengetahui keberadaan AK. Pudarnya popularitas paguyuban itu diamini beberapa pedagang burjo yang disambangi BALAIRUNG.

Latar belakang pendidikan yang rendah dan wawasan Soja yang minim dianggap oleh beberapa pedagang burjo sebagai penyebab dari kegagalannya dalam menakhodai AK. Ia dinilai tak cakap dan tak memiliki wawasan berorganisasi yang cukup.

Lain kata anak buah, lain pula kata majikan. Dalam versi Soja, sudah sejak awal ia enggan dipilih menjadi ketua. Ia menerimanya karena terpaksa. Ia berdalih, alih-alih memikirkan organisasi, mengurusi usahanya pun sudah bikin sibuk. Dalam

Berat rasanya bagi pekerja burjo untuk menyisihkan uang yang mereka kumpulkan dengan susah-payah, apalagi tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Belajar dari yang sudah-sudah, mereka hanya mau mengeluarkan uang dari kantong hanya bila pengurus menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan.

menunaikan tugas, ia kesulitan melakukan koordinasi karena jumlah pekerja burjo yang semakin banyak. Apalagi, kala itu ia belum mempunyai kendaraan yang efektif untuk pemantauan.

Di mana-mana, sikap setengah hati seperti yang ditunjukkan Soja selalu bikin rugi. Lebih-lebih jika anggota-anggotanya tak memiliki kesadaran berorganisasi yang cukup. Dahulu saja, ketika jumlah anggota baru 60-an, yang ikut arisan cuma separo. Bila ada rapat, tak banyak yang mau datang dan itu selalu molor. "Alasannya selalu ada. Ya sibuk *lah*, ada kerjaan *lah*, capek *lah*...," papar Soja mengenang masa lalu. Air mukanya sendu. Pada umumnya pekerja burjo bersedia hadir bila ada "keuntungan langsung yang bisa didapat", yang dalam hal ini mereka terjemahkan sebagai hadiah (*door prize*).

Tingkat partisipasi pedagang burjo dalam kegiatan organisasi tehitung rendah. "Mereka hanya mau jadi anggota, tanpa mau bersusah-payah mengatur orang lain," kali ini Salam yang mencurahkan perasaannya. Mengatur sekian banyak pedagang yang memiliki pemikiran dan cita-cita yang berbeda-beda memang tak mudah. Dalam hal ini rezim Soja terpaksa bertekuk lutut. Untuk sekian lama, AK senyap dari kegiatan.

Tibalah pertengahan 2002, tatkala Indofood menggelar temu pelanggan dengan pekerja burjo. Beberapa orang pedagang muda bertemu dan berbincang-bincang dengan intens. Mereka adalah Entis Sutisna, Iing Durahim, dan Maman. Merasa prihatin dengan ketidakjelasan AK, tercetuslah ide untuk membentuk kepengurusan baru. Ternyata setelah ide ini digulirkan, hampir semua perwakilan dari desa-desa yang menjadi sentra pedagang burjo di Kuningan mengucapkan kata sepakat. Bahkan Indofood bersedia memberikan bantuan dana penyelenggaraan.

Maka, 12 Desember 2002, diadakan kembali pemilihan di kampung halaman yang menghasilkan nama Entis Sutisna sebagai ketua baru. Warga Desa Babakan Reuma ini didampingi oleh Nana Purba dari Cimindi sebagai wakil ketua, dan Iing Durahim yang menjabat sekretaris. Musyawarah juga memasukkan secara resmi perwakilan dari setiap desa di Garawangi ke dalam struktur kepengurusan.

Pada awal '90-an, gelombang migrasi "manusia burjo" menerpa Yogyakarta dan kota-kota lain, dari Desa Kertayasa, Kecamatan Garawangi. Waktu itu, belum banyak warung burjo di Yogya. Dari yang sudah ada, sebagian besar bergabung dalam "korporasi" Murni dan Kabita. Keduanya ini masing-masing dicukongi oleh Soja dan Kiman, semuanya warga Kertayasa. Jaringan burjo milik penduduk desa lain, yakni Raja Rasa (Cimindi) dan Panghegar (Pangkalan), cuma ada di beberapa titik.

Kelahiran AK tak bisa lepas dari kebesaran nama Kertayasa. Awal pendiriannya berasal dari pertemuan santai dan arisan antarwarga Kertayasa di Yogyakarta yang sama-sama berjualan burjo di Yogyakarta. Makin lama hubungan mereka makin solid, meskipun arisan sudah berubah menjadi paguyuban. Malah dominasi Kertayasa mendapatkan legitimasi karena dua orang warganya duduk di kursi kepemimpinan AK selama dua periode awal. Malah, pada waktu mudik lebaran, pertemuan antarpedagang burjo se-Kuningan juga diadakan di desa ini.

Tapi kini, bisnis burjo nyaris lepas dari monopoli mereka. Tercatat, paling tidak ada 12 desa di Kuningan yang menjadi daerah asal para pedagang burjo. Tiga di anatarnya ialah Sindang Agung, Mekar Mukti (hasil pemekaran Kertayasa), dan Kertawangunan. Ada pula pedagang yang berasal dari kabupaten lain di Jawa Barat, semisal Ciamis. Bahkan penduduk asli Yogya juga tak mau kalah.

Seperti sudah diduga, timbul gesekan ketika orang-orang non-Kertayasa belakangan bergabung di AK. Kadang kala hanya karena sentimen primordial yang sepele, seperti pada lebaran 2002. Seolah tak mengetahui bila kapasitas kendaraannya tak memadai, lima buah bus angkutan mudik dijadikan rebutan antarutusan desa di AK.

Pada akhirnya, sebagian besar bus kembali berada di bawah kendali orang-orang Kertayasa. Tak dapat dimungkiri, kekecewaan membekas di hati warga desa-desa yang lain. "Harusnya ada pemeratan transportasi mudik yang adil dan tak didominasi oleh orang-orang Kertayasa," ungkap Setyono, pedagang dari desa Cimindi yang memulai usahanya sejak 1994. Tentu masih ada Setyono-Setyono lain yang merasa dinomorduakan.

Upaya penghapusan dendam semacam itulah motif di balik terpilihnya ketua dan wakil ketua AK yang bukan berasal dari Kertayasa. Termasuk juga pengakomodasian perwakilan-perwakilan dari 12 desa di Garawangi ke dalam kepengurusan. Kedua hal tersebut tak muncul begitu saja, melainkan buah dari tawar-menawar politik antarpihak yang menyusun konstelasi kekuatan di dalam AK.

Enam bulan sudah Tisna memegang tampuk kepemimpinan. Tapi hampir tak ada koordinasi di peguyuban ini. Sang ketua terlalu disibukkan dengan Idaman Asri, kelompok bisnisnya yang bergerak di bidang jasa travel dan distribusi barang kebutuhan burjo. Urusan organisasi lebih banyak dijalankan oleh Iing yang sebenarnya berposisi sebagai sekretaris. Tak

mengherankan, sebab Iing lebih banyak makan asam-garam, sedangkan Tisna baru dua tahun terakhir ikut bermain di bisnis ini.

Dr. J. Nasikun mengajukan solusinya. Menurutnya, seperti halnya pada organisasi lain, pengurus paguyuban yang dipilih harus memenuhi kualifikasi tertentu. Kemampuan mengakomodasi kepentingan ekonomi anggota lebih penting daripada sekadar persoalan primordial. "Walaupun sama-sama dari Kuningan, kepentingan-kepentingan yang masuk di dalamnya bukan lagi primordialisme, tapi bagaimana pemimpin bisa meyakinkan bahwa organisasi punya makna dan manfaat positif." Caranya, dosen senior di Sosiologi UGM ini meneruskan, "Mari kita inventaris dulu kepentingan yang didapat ketika berorganisasi, lalu dirumuskan secara demokratis supaya orang-orang bisa memiliki." Hal-hal seperti ini lalai dikerjakan oleh rezim Tisna.

Padahal, upaya perlawanan pekerja burjo terhadap Indofood ibarat perseteruan Daud melawan Goliath. Baik mereka yang tergabung dalam AK, maupun yang membawa bendera apapun, harus menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah terlebih dahulu.

"Obati dulu luka-luka itu. Orang masih terluka dengan kepengurusan yang dulu." Seperti saran Oha, posisi tawar pekerja burjo bisa maksimal jika saling bergenggaman erat dan merapatkan barisan. Organisasi masa kini berbeda dengan kereta api zaman dulu. Untuk tuntutan yang lebih fundamental dan gerakan yang lebih bergigi, tak ada yang bisa naik dengan percuma.

Kata Mereka Tentang Sektor Informal

Aristokrasi Para Profesional

Ditemui di sela kesibukannya sebagai ketua CAFEO (Conference ASEAN Federation of Engineering Organization), Airlangga Hartarto mengaku sangat bangga dengan kesuksesan acara yang digelar Oktober lalu di Hotel Sheraton Yogyakarta.

Kesibukan merupakan keniscayaan bagi ayah tiga putra ini. Bahkan, seakan belum cukup sibuk dengan aktivitasnya sebagai praktisi bisnis yang berkecimpung di bidang teknologi serta aplikasi komersialnya, Airlangga berencana untuk terjun ke dunia politik dalam waktu dekat ini. "Ah, saya *sih* ikut yang menang saja. Pokoknya lihat saja nanti," selorohnya begitu ditanya warna bendera partai politik yang akan dipilihnya.

Menurutnya, aristokrat yang mengurus negara ini sebaiknya dipegang jajaran profesional dari praktisi bisnis. Alasannya, karena para *businessman* tahu cara bermain dengan regulasi. "Tidak ada kekhawatiran bahwa para profesional akan terlalu asyik bermain dengan politik, dan melupakan ladang bisnisnya. Beginilah tren pemerintahan di negara-negara maju seperti Amerika dan Italia yang presidennya berasal dari kalangan pengusaha," ujarnya mantap saat ditanya mengenai tren pemerintahan di masa yang akan datang.

Ditanya tentang sektor informal di Indonesia, peraih dua gelar master dari Monash dan Melbourne University ini menyatakan bahwa sebenarnya sektor ini potensial. Hanya saja, para pelakunya kurang memiliki jiwa *entrepreneurship*.

R.Y.A.

dok / Bal

Pemerintah Belum Optimal Membina Sektor Informal

Demikian, Jusuf Kalla, Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), menilai usaha pemerintah dalam membangun ekonomi sektor informal. "Pemerintah memang belum bisa dikatakan optimal membangun ekonomi sektor informal. Kalau dikatakan sudah, pasti negara ini sudah makmur sejahtera," ujarnya sambil tersenyum, ketika ditemui di kantornya, di jalan Medan Merdeka Jakarta.

Namun demikian, menteri yang juga pengusaha ini mengatakan bahwa telah terdapat kemajuan yang cukup signifikan dalam perhatian pemerintah terhadap sektor informal. Buktinya, terdapat dana pinjaman khusus bagi para pengusaha kecil sebesar Rp42 trilyun yang mulai diluncurkan Februari lalu. Untuk proyek ini pemerintah bekerjasama dengan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang beroperasi di seluruh kabupaten di Indonesia.

"*Nggak* mungkin pemerintah mengabaikan sektor informal. Siapa lagi yang mengatur usaha rakyat kecil ini kalau bukan pemerintah? Soalnya kalau *nggak* diatur justru bikin pusing," demikian ditambahkan menteri yang ramah dan murah senyum ini ketika ditanya mengenai sikap pemerintah yang selama ini pilih kasih antara sektor formal dengan sektor informal. "Tidak benar kalau pemerintah lebih memihak sektor formal atau pengusaha besar. Nyatanya ada kementerian yang khusus mengurusi masalah usaha kecil dan menengah. Ini bukti keseriusan pemerintah," lanjut Menkokesra.

R.Y.A.

dok / Bal

Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM

Sebagai wujud kepedulian, untuk menanggulangi beban keluarga miskin, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok akibat kenaikan harga-harga, Pemerintah Republik Indonesia telah menyusun program bantuan melalui bantuan kompensasi pengurangan subsidi BBM.

Alasan utama penyaluran bantuan
Kompensasi pengurangan subsidi BBM ini diberikan oleh pemerintah dalam berbagai bentuk, disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan peruntukannya.

Siapa saja yang berhak menerima bantuan?
Bantuan hanya diperuntukkan bagi pihak-pihak yang paling membutuhkan, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Mekanisme pelaksanaan pemberian bentuk dan jenis-jenisnya dapat dilihat sebagimana penjelasan terlampir.

MUDES (Musyawarah Desa)

MUDES adalah unsur masyarakat sekaligus kader-kader yang terdiri dari:
- Kades / Lurah
- Dewan Kelurahan / Badan Perwakilan Desa (Baperdes)
- RT / RW
- PKK
- Pemuka Agama
- Pramuka
- Majelis Taklim
- LSM
- Karang Taruna / Mahasiswa
- Kader Puskesmas

MUDES melalui kader-kadernya menentukan dan memutuskan siapa saja yang akan menerima bantuan

4. Bantuan Raskin
Beras murah untuk keluarga miskin dapat dibeli dengan harga Rp 1000/kg. Tiap keluarga diberi kesempatan untuk membeli sebanyak 20 kg/bulan selama 12 bulan.

RASKIN

RASKIN

5. Bantuan Pendidikan Agama
Bantuan Khusus Murid (BKM) berupa beasiswa bagi murid MI,MTs, dan MA, serta: Bantuan Khusus Guru (BKG) bagi guru RA, guru MI, guru MTs, dan guru MA.

9. Bantuan dana Bergulir KSP/USP
Diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil melalui perkuatan struktur keuangan, pelayanan usaha simpan pinjam dan kelangsungan usaha ekonomi produktif KSP/USP-Koperasi yang tersebar di 375 kabupaten/kota di 30 propinsi.

KOPERASI BAKSO

3. Penyediaan Sarana Air Bersih
Bantuan penyediaan prasarana dan sarana air bersih di setiap propinsi.
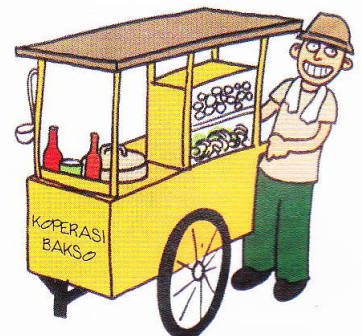
2. Bantuan Pelayanan Kesehatan
pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas untuk keluarga miskin, pelayanan kebidanan oleh bidan desa bagi ibu hamil; pelayanan rujukan di 417 rumah sakit untuk rawat inap; penyediaan vaksin Hepatitis B gratis untuk bayi keluarga miskin; dan perbaikan Posyandu.

4. Bantuan Pendidikan Umum
Bantuan Khusus Murid (BKM) berupa beasiswa bagi murid SD, Sekolah Menengah, mahasiswa, bantuan pendidikan luar sekolah/pemuda, dan bantuan pendidikan orientasi keterampilan hidup.
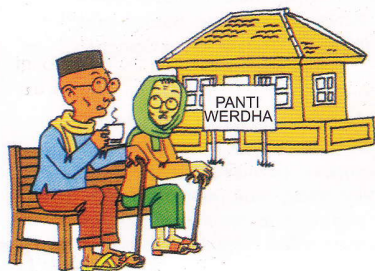
6. Bantuan Sosial
Bantuan makanan bagi penghuni panti yang tersebar di seluruh Indonesia sebesar Rp 2.250 /jiwa/hari selama 365 hari, dan bantuan kepada panti-panti dalam kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebesar Rp 10 juta/panti.

7. Bantuan Transportasi
Pengadaaan bus sedang, lanjutan pembangunan 2 unit kapal penyeberangan untuk wilayah KTI dan KBI, lanjutan pembangunan 1 unit kapal penyeberangan perintis untuk Propinsi NAD, dan 1 unit kapal untuk kabupaten Mimika Propinsi Papua, pembangunan 4 unit kapal perintis (masing-masing untuk: NAD, NTT, Sulut dan Gorontalo), serta lanjutan pembangunan 8 unit kapal perintis laut untuk KTI, pembangunan 1 unit kapal perintis laut tahap I untuk Jawa Timur.

8. Bantuan Pemberdayaaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)
Di kabupaten-kabupaten/kota-kota di seluruh propinsi dan pembangunan uni *solar packed dealer* untuk nelayan (SPDN) di desa-desa nelayan yang tidal terjangkau SPBU Pertamina.

10. Bantuan Alat Kontrasepsi
Berupa pemenuhan kebutuhan KB (alat kontrasepsi) bagi 3,4 juta pasangan usia subur dari keluarga miskin di 21 propinsi.

11. Bantuan Perluasan Lapangan Kerja Produktif dan Penanggulangan Pengangguran
Untuk kawasan Transmigrasi (Padat Karya Produktif) TKI di 96 kabupaten; pendayagunaan TKPMP/TKS di 202 kabupaten; pelatihan KTM di 110 kabupaten; pembinaan sektor informal/asongan di kabupaten; peningkatan/rehabilitasi jalan melalui padat karya produktif, jembatan dan bantuan usaha ekonomi produktif untuk pendatang tanpa ijin (TPI) serta bantuan modal pengembangan wirausaha mandiri di 19 kabupaten.

SUBSIDI BBM DIKURANGI
KEBUTUHAN DASAR TERPENUHI

Informasi lebih lanjut, hubungi:
Sekretariat/Unit Layanan Masyarakat
TIM KOORDINASI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI
Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

UGM Jangan Cuma Jadi Menara Gading

dok / Bal

Percakapan selama dua jam di kantor Pemda DKI Jakarta pagi itu terasa sangat menyenangkan. Saat itu, BALAIRUNG menemui Hari Sandjoyo, salah satu alumni UGM yang saat ini menjabat sebagai Asisten Perekonomian Sekda (Sekretariat Daerah) DKI Jakarta, untuk berbincang tentang pembangunan ekonomi sektor informal.

Menurutnya, memang dilematis memegang tanggung jawab sebagai pejabat Pemda. Pihaknya seringkali dituding kurang memperhatikan ekonomi sektor informal yang tidak memberikan kontribusi pajak bagi pendapatan daerah. Apalagi di kota seramai Jakarta yang dihuni oleh dua belas juta jiwa.

"Sektor informal memang selalu menjadi dilema dalam pembangunan ekonomi daerah. Di satu sisi, sangat banyak masyarakat yang terbantu dengan ladang ekonomi ini, tapi di sisi lain banyak masalah yang kemudian timbul di belakangnya," ujar ayah dua putra ini ketika ditanya tentang kedudukan sektor informal dalam pembangunan ekonomi daerah. "Kita itu bingung. Kadang, maksud baik kami diterjemahkan sebagai tindakan pilih kasih dan tidak memihak rakyat kecil," demikian Hari Sandjoyo menanggapi beberapa tudingan miring yang diarahkan pada Pemerintah Daerah (Pemda). Selama ini, Pemda sering dianggap menafikan sektor informal.

Menurut Sandjoyo yang berperawakan tinggi dan mengaku jago main basket saat masih kuliah ini, Pemda selalu berusaha mencari jalan keluar yang terbaik bagi masalah ini. Bahkan, Pemda juga bekerjasama dengan beberapa universitas, seperti UGM, untuk mengatasi permasalahan penataan sektor informal. "UGM itu 'kan sekolahnya orang-orang yang punya idealisme! Seharusnya jangan cuma jadi menara gading saja, tapi mampu menghasilkan produk-produk yang aplikatif untuk membantu masyarakat," demikian harapnya.

R.Y.A.

Sektor Informal Punya *Size Economic* yang Cukup Tinggi

dok / Bal

Namanya Sampurno. Mantan aktivis Dema (Dewan Mahasiswa) UGM tahun '74-'76 ini menyelesaikan studi strata 1-nya di Fak. Farmasi UGM. Saat ini ia menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) RI.

Meski ditemui di sela jadwalnya yang padat, namun ayah dua putra ini tetap menyambut ramah BALAIRUNG. Perbincangan singkat namun hangat ini berkisar seputar sektor informal dan keterlibatan Badan POM dalam memajukan sektor ekonomi ini. "Sektor informal, terutama industri rumah tangga, mempunyai *size economic* yang cukup tinggi. Bayangkan saja, ada lebih dari 500 ribu industri rumah tangga di Indonesia yang senilai dengan Rp20 trilyun dan 1,5 juta tenaga kerja," demikian Sampurno membuka percakapan.

Tentang keterlibatan Badan POM dalam membina industri rumah tangga di Indonesia ia menjelaskan, "selama ini kami telah mencoba turut andil dalam membangun sektor informal melalui penyuluhan dan training mengenai *higienitas* produk yang dihasilkan oleh industri rumah tangga di seluruh kabupaten di Indonesia. Kadang sangat sulit membuat masyarakat mengerti tentang aturan dalam memberi bahan pewarna ataupun pengawet dalam makanan."

"Kami berkeinginan untuk mendidik pelaku industri rumah tangga di Indonesia, agar produk mereka mampu bersaing dengan produk luar yang saat ini membanjiri pasar dan supermarket di seluruh Indonesia. Bahkan kami berencana menyelenggarakan pemberian anugerah bagi pelaku industri rumah tangga yang kami nilai cukup berhasil dalam menerapkan konsep *higienitas* pada produknya," ujar Sampurno menceritakan rencananya ke depan.

R.Y.A.
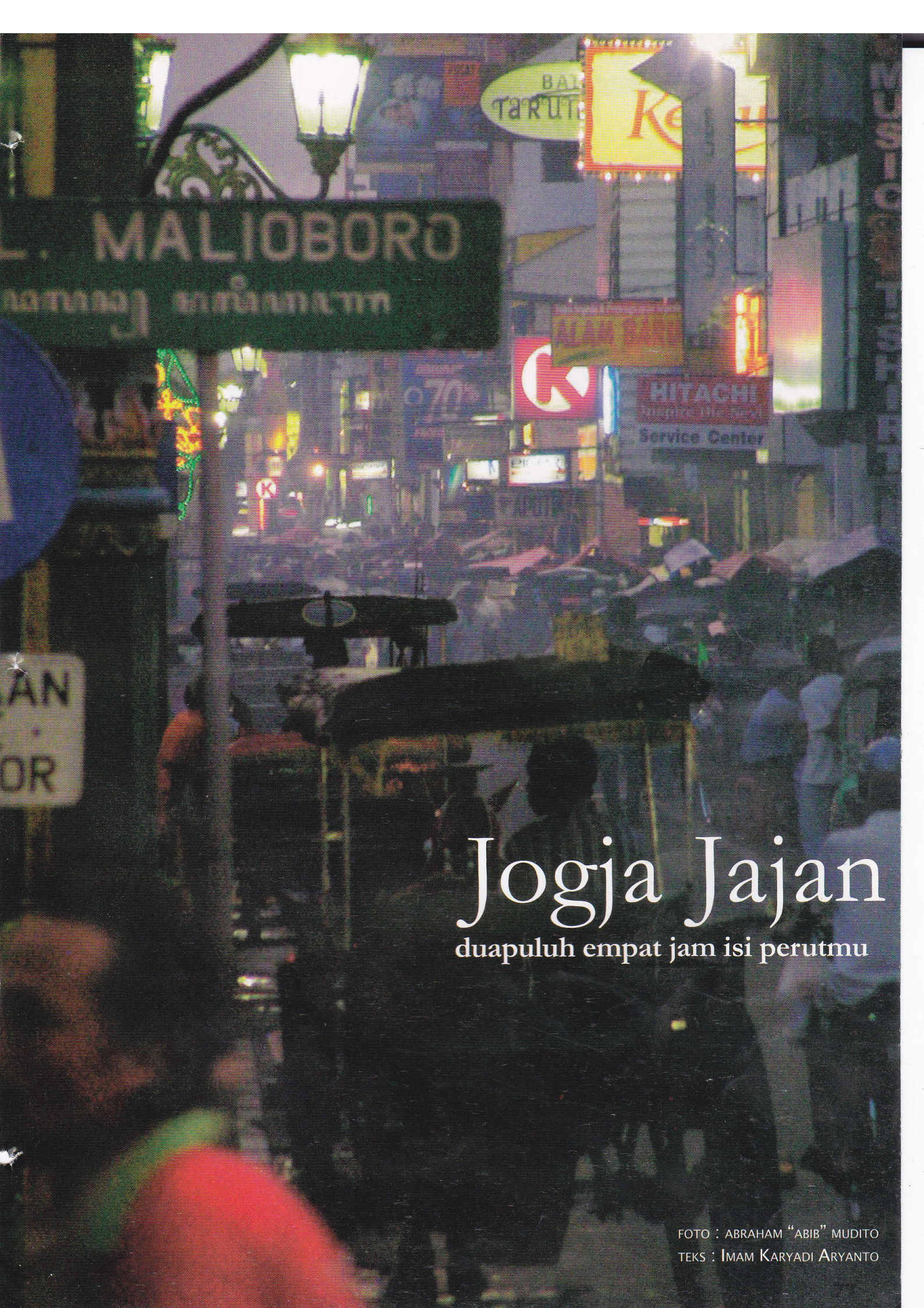
Jogja Jajan

duapuluh empat jam isi perutmu

FOTO : ABRAHAM "ABIB" MUDITO
TEKS : IMAM KARYADI ARYANTO

Menu hari ini - sego kucing, sate usus, dan berbagai macam gorengan tersedia setiap hari di atas gerobak angkringan. Dengan harga Rp 300,- sampai Rp 1000,-, cukup untuk membuat perut sedikit terisi.
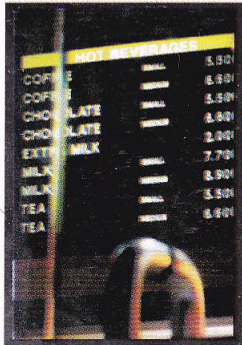
Tiada awal pun akhir untuk urusan perut. Jogja atawa Jogjakarta adalah tempat yang tepat untuk itu 24 jam makan tanpa henti. Kita tidak akan mati kelaparan di kota ini, dijamin.
Nasi Uduk, Pecel Lele sudut Gejayan, Bubur Ayam Boulevard , gerai-gerai Burjo, Gudeg Wijilan, café-café bohem, deretan junk food bermerk, hingga lesehan nuthuk Malioboro membuat hasrat lidah tetap bergoyang. Bisa lupa diri, karena warung-warung itu tak pernah mati. Hanya silih berganti.

Gerobak angkring - Jenis gerobak makanan ini tersebar hampir di seluruh jogja. Konsumen setia angkringan biasanya makan sambil bersantai tanpa harus diburu waktu

Malioboro, jalan yang telah melegenda, adalah salah satu pilihan cerita tentang mulut dan perut. Karena Malioboro adalah jantung, di mana selera makan mengaliri nadi denyut rantai makanan manusia di kota ini. Empat puluh persen (40%) orang mengunjungi tempat yang mengenal penerangan sejak 1917 di malam hari. Malam, waktu yang menarik orang menikmati santapan atau pergi ke peraduan.

Malioboro sang jantung kota menawarkan berbagai rasa lezat pun *klangenan*, selain tumpang tindih kaki lima dan antrian kendaraan biang kemacetan. Tebaran bau ayam potong bertepung, bersaing dengan gorengan dan nasi kucing dari gerobak kayu. Kepungan kuliner bergincu dan tempat berpendingin ruangan menyisakan sudut-sudut sederhana, murah namun *cozy*.
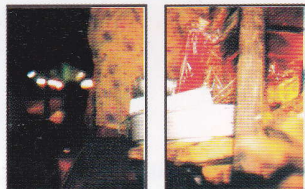
Fast food ala angkring - pelayanan yang disediakan oleh si penjaja makanan dan minum angkring relatif cepat, karena hanya menyajikan menu sederhana, seperti es jeruk, wedang jahe, susu, teh, dsb

Siap melayani - Penjual angkringan biasanya sudah menggeluti bidang ini sejak bertahun - tahun. Peralatan yang digunakan bisa diwariskan dari generasi ke generasi

enja di depan angkringan - sajian makanan rakyat yang hadir di saat orang-orang selesai eraktifitas. Sebuah *buffet* tradisional *all you can eat.*

ngkringan, sudut bersahaja nan *cozy* itu menjamur menjadi *ndmark*. Angkringan, warung desa dari Klaten ini menjadi merek enerik makanan di Jogja setelah gudeg dan bakpia. Tua-muda, esar-kecil, bule-pribumi, pelancong-penetap, pernah makan disini. ereka mengenal sego kucing, sate usus, gorengan, teh jahe, seperti alnya empat sehat lima sempurna.

ngkringan menjadi alternatif pilihan bagi selera pas-pasan atau pun ereka yang bergaya eksentrik. Tukang becak, mahasiswa sampai eniman betah berlama-lama bercengkerama kadang berdiskusi isini. Buka dari esok hingga fajar, mengganti giliran jaga

ngkringan menjadi ibu kandung perkembangan budaya, bukan arena urusan perut. Tetapi karena wacana yang kadang datang tiba-a dalam slilit wedang jahe dan terpaan angin malam nan nakal.
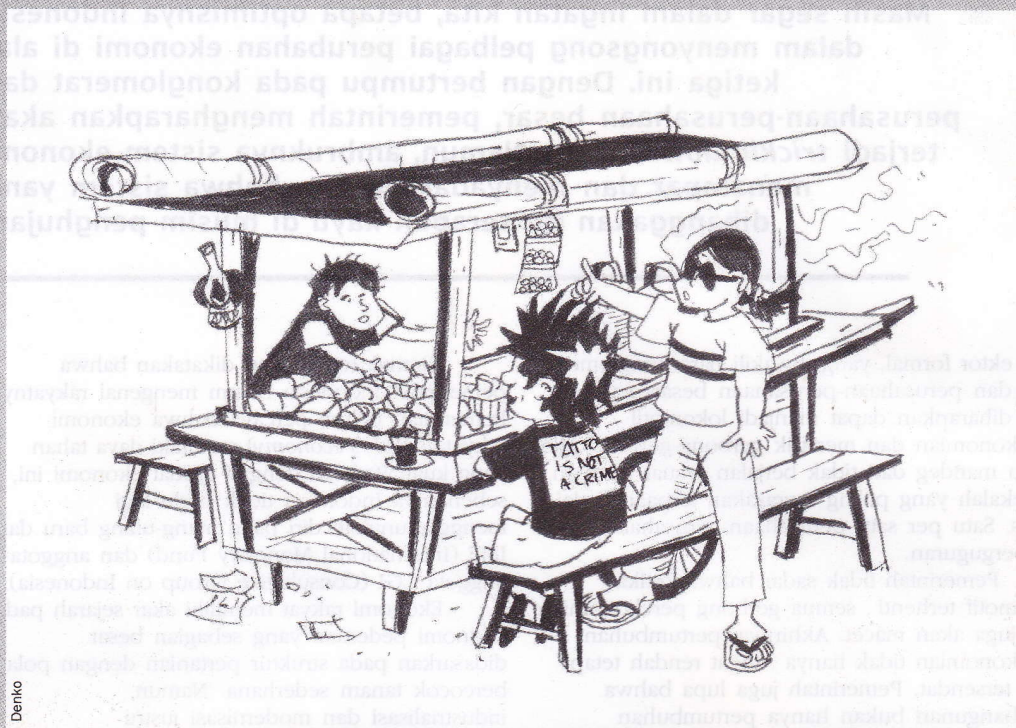
Jauh Panggang dari Api:

Pendidikan yang Berpihak pada Sektor Informal

TIM PELAKSANA RISET
Roni Wijaya, Sofyan Rosyidi, Heru Lesmana S., Lutfah Ariana, A. Suharyanto, Heri M. Tohari, EListyawaty R., Kurnia Setya P., Annas S.
PENULIS
A. Suharyanto

Masih segar dalam ingatan kita, betapa optimisnya Indonesia dalam menyongsong pelbagai perubahan ekonomi di alaf ketiga ini. Dengan bertumpu pada konglomerat dan perusahaan-perusahaan besar, pemerintah mengharapkan akan terjadi *trickle down effect*. Namun, ambruknya sistem ekonomi menampar dan menyadarkan kita bahwa sistem yang dibanggakan itu serapuh kayu di musim penghujan.

Sektor formal, yang diwakili para konglomerat dan perusahaan-perusahaan besar, yang diharapkan dapat menjadi lokomotif perekonomian dan menarik gerbong-gerbong lain justru mandeg dan tidak berjalan sesuai harapan. Merekalah yang paling merasakan terpaan badai krisis. Satu per satu perusahaan-perusahaan besar itu berguguran.

Pemerintah tidak sadar bahwa ketika lokomotif terhenti , semua gerbong perekonomian lain juga akan macet. Akhirnya, pertumbuhan perekonomian tidak hanya sangat rendah tetapi juga tersendat. Pemerintah juga lupa bahwa pembangunan bukan hanya pertumbuhan ekonomi, melainkan sebuah proses multidimensional.[1] Walhasil, bisa dimaklumi jika kemudian krisis ekonomi meluas menjadi krisis multidimensional.

Kebijakan pemerintah yang bias formal dalam proses pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini menyisakan masalah pemerataan dan keadilan. Model ini hanya menyemai makin banyaknya perusahaan-perusahaan besar (*corporate giant*). Padahal pemerintah mengemban misi Trilogi Pembangunan yang salah satunya adalah pemerataan, terutama dalam kesempatan kerja dan berusaha. Sehingga sudah selayaknya jika kebijakan-kebijakan ekonomi yang merangsang pertumbuhan sektor "bawah", khususnya sektor industri pedesaan dan sektor informal perkotaan segera dioperasionalkan.[2]

Sejatinya, perusahaan-perusahaan besar sebagai perwakilan sektor formal bukannya tanpa persoalan. Meski selama ini kontribusinya terhadap pendapatan negara memang tidak diragukan, sektor ini tak mampu menyerap banyak tenaga kerja, dan pada gilirannya ikut memperdalam jurang perbedaaan pendapatan antarwarga masyarakat. Jajaran data yang disajikan berbagai penelitian makin menampakkan ketidakmampuan sektor formal dalam membuka kesempatan yang lebih luas bagi para penduduk usia kerja.

Kiranya tepat kalau dikatakan bahwa pemerintah Indonesia belum mengenal rakyatnya. Pemerintah belum percaya bahwa ekonomi rakyat (*people's economy*) memiliki daya tahan yang kuat. Padahal dengan modal ekonomi ini, sebenarnya Indonesia tidak perlu lagi menggantungkan diri pada utang-utang baru dari IMF (International Monetary Fund) dan anggota-anggota CGI (Consultative Group on Indonesia).[3]

Ekonomi rakyat memiliki akar sejarah pada ekonomi pedesaan yang sebagian besar didasarkan pada struktur pertanian dengan pola bercocok tanam sederhana. Namun, industrialisasi dan modernisasi justru menyebabkan involusi pertanian. Bisa ditebak jika hasilnya adalah larinya tenaga kerja pertanian ke sektor-sektor non pertanian. Beralihnya tenaga kerja dari sektor tradisional tidaklah diketahui dengan pasti, namun menjamurnya sektor informal memberi petunjuk ke arah itu.

Sektor informal berperan besar dalam menyerap tenaga kerja. Sektor industri yang notabene diharapkan dan direncanakan menjadi tulang punggung perekonomian negara ternyata sangat sedikit menyerap tenaga kerja, karena industri modern tak lagi padat karya tapi padat modal. Penelitian yang dilakukan ILO (International Labour Organization) di kota-kota besar di Asia menunjukkan bahwa sekitar 50% angkatan kerja kota bergulat di sektor informal. Namun ironisnya, meski jumlahnya yang sangat besar, perbincangan mengenai sektor informal di Indonesia baru mengemuka belakangan setelah terjadi krisis moneter.[4]

*****

Salah satu ciri yang dapat ditemui pada sektor informal adalah rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki para pelakunya.[5] Hal ini terkait erat dengan karakteristik sektor informal yang menggunakan teknologi tradisional, memiliki skala operasi relatif kecil karena modal dan perputaran usahanya juga kecil, tidak terorganisir

dengan baik, dan ketrampilan para pelakunya didapat dari pengalaman. Penyebab utamnya adalah karena sektor informal lebih banyak dipengaruhi variabel-variabel sosial budaya dari pada variabel-variabel ekonomi.[6]

Dengan paparan di atas, lebih mudah memahami mengapa pelaku sektor informal berpendidikan rendah. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa subjek yang berpendidikan tinggi tidak memasuki sektor informal. Hal ini ditengarai karena pendidikan tidak berpihak pada sektor informal. Pendidikan telah mengajarkan subjek didik untuk mengikuti sistem jalur kerja yang sudah ada. Terlepas apakah jalur yang dipersiapkan ini efektif bagi keberagaman individu atau tidak. Pendidikan hanya berupaya menjadikan anak didik siap untuk memasuki lapangan sektor formal, bukan mengarahkan anak didik untuk dapat mengembangkan kemampuan dalam dirinya.

Pendidikan hanya menghasilkan anak didik yang siap menjadi "kuli" atau pekerja siap pakai. Anak didik tak disiapkan menjadi wiraswasta (*entrepreneur*) yang sanggup menciptakan lapangan kerja sendiri. Berpikir seperti itu, sebenarnya, mungkin terwujud jika pendidikan memfokuskan diri pada *human capability* atau *basic competence*. Dengan demikian, subjek didik tidak akan gamang ketika berhadapan dengan tantangan zaman. Persoalan seperti keterbatasan daya tampung sektor formal akan teratasi dengan pengembangan kemampuan personal.

Terlepas dari keterbatasan daya serap tenaga kerja sektor formal, banyaknya lulusan perguruan tinggi yang menjadi pengangguran patut jadi perhatian tersendiri. Gerangan apakah penyebabnya? Kerap kali kita menemui lulusan perguruan tinggi yang kebingungan mencari kerja karena sektor formal penuh sesak. Tidakkah ini berarti bahwa mahasiswa hanya diarahkan untuk bekerja dan bukan untuk mengembangkan potensi dirinya?

Nampaknya, pendidikan khususnya pendidikan tinggi telah salah dengan hanya membentuk manusia-manusia robot siap kerja. Pendidikan tidak berpihak pada pengembangan mahasiswa menurut kemampuan individu yang bervariasi. Ini berarti pendidikan telah memperkecil kesempatan individu

Apakah Anda memiliki pekerjaan sampingan, usaha mandiri, atau keduanya?

75,6% **Tidak memiliki keduanya**
16,6% **Memiliki pekerjaan sampingan**
5,5% **Memiliki usaha mandiri**
2,4% **Memiliki keduanya**

75,6%
16,6%
5,5%
2,4%

Angga.Balairung
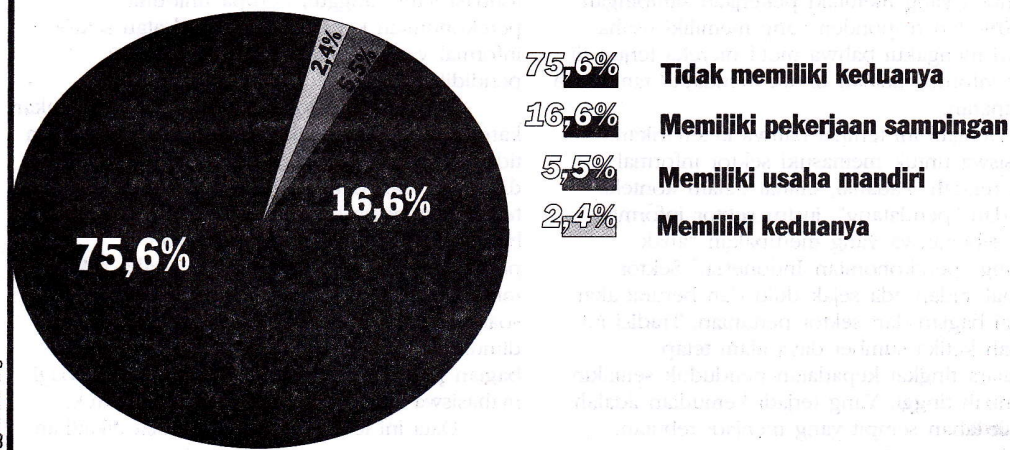
untuk menemukan potensi dalam dirinya. Sedangkan kemampuan menciptakan lapangan kerja baru, termasuk di sektor informal, sangat tergantung pada pendidikan yang diterima individu.

*****

Dengan latar ini, Jurnal BALAIRUNG kali ini melakukan jajak pendapat (polling) guna menguak pendapat mahasiswa tentang ketidakberpihakan pendidikan pada sektor informal. Selain itu, jajak pendapat ini juga hendak mengetahui tingkat ketertarikan mahasiswa pada sektor informal.

Yang diteliti dalam polling ini adalah mahasiswa UGM. Sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di Indonesia dengan 18 fakultas, 71 jurusan, dan 41 program diploma, UGM dinilai cukup representatif sebagai populasi. Populasi penelitian adalah mahasiswa UGM angkatan 1998-2002 yang berjumlah 35.518. Untuk memperoleh jumlah sampel yang diinginkan, dilakukan pengacakan sistematis dengan metode *simple random sampling.* Acak sistematis merupakan pola pengambilan sampel penelitian yang mengikuti jarak (*range*) tertentu. Selain itu, juga dimasukkan variabel lain yang mungkin secara signifikan akan turut mempengaruhi validitas data. Variabel yang dimaksud adalah perbandingan mahasiswa eksak dan noneksak. Dari hasil pengacakan sistematis, didapat responden sebanyak 127 orang.

Hasilnya, 16,5% dari keseluruhan sampel memiliki pekerjaan sampingan, 5,5% memiliki usaha mandiri, dan 2,4% memiliki keduanya. Penelusuran lebih dalam mengungkapkan hal yang menarik. 47,6% dari mereka yang memiliki pekerjaan sampingan dan 60% dari yang memiliki usaha mandiri merasa pendapatan rutin mereka tidak cukup untuk biaya hidup. Ini sejalan dengan alasan mereka terjun dalam sektor informal: menambah pendapatan. 76,2% dari responden yang memiliki pekerjaan sampingan dan 60% dari responden yang memiliki usaha mandiri mengakui bahwa motif mereka terjun di sektor informal adalah untuk mendapat tambahan pendapatan.

Dengan ini terlihat bahwa ketertarikan mahasiswa untuk memasuki sektor informal masih rendah. Padahal, dilihat dalam konteks "asli" dan "pendatang", justru sektor informal inilah sebenarnya yang merupakan "anak kandung" perekonomian Indonesia.[7] Sektor informal sudah ada sejak dulu dan berurat-akar sebagai bagian dari sektor pertanian. Tradisi ini berubah ketika sumber daya alam tetap sementara tingkat kepadatan penduduk semakin bertambah tinggi. Yang terjadi kemudian adalah sepetak lahan sempit yang menjadi rebutan. Alternatif yang diambil untuk mengejar "setoran kehidupan" tak lain adalah *rame-rame* pergi ke kota memasuki sektor non pertanian.

Ketidakberpihakan pendidikan pada sektor informal juga dipertanyakan. Terlihat bahwa disiplin ilmu yang dipelajari tidak menunjang mahasiswa dalam upayanya memasuki sektor informal. Kenyataan ini diperlihatkan oleh 4,8% responden yang mempunyai pekerjaan sampingan dan 10% yang memiliki usaha mandiri dengan alasan untuk mempraktekan disiplin ilmu masing-masing. Berarti ada 93,5% pelaku sektor informal di kalangan mahasiswa yang tidak bertujuan mempraktekan disiplin ilmu mereka dalam usaha yang mereka geluti.

Apalah guna teori tanpa praktek. Rendahnya pemindahan disiplin ilmu dari teori ke dalam praktek tentu saja memunculkan pertanyaan: seberapa besar minat mahasiswa pada disiplin ilmu yang dipilihnya? Karena jika pilihan yang telah mereka ambil ternyata keliru, yang terjadi adalah sebuah keterpaksaan.

Ketika mahasiswa lulus, ia sama sekali tidak tahu apa yang mesti dikerjakan karena ia tak dibekali kemampuan lain. Yang diketahui hanyalah sebatas disiplin ilmu yang diajarkan. Hal ini tak akan terjadi seandainya pendidikan lebih menitikberatkan pada singularitas individu. Peserta didik akan dibekali pengetahuan yang berfungsi untuk memecahkan masalahnya sendiri secara praktis dan efektif. Sehingga pada akhirnya, pendidikan adalah sebuah pengembangan kefektifan personal. Dan semuanya akan terwadahi, termasuk sektor informal. Setidaknya, seorang mahasiswa akan mendapat bekal pengetahuan dan kemampuan yang diminatinya.

Bisa jadi pada perkembangan selanjutnya sektor informal yang dihuni pelaku yang berpendidikan tinggi akan bermetamorfosis menjadi formal. Namun, implikasinya akan baik. Sistem perekonomian kita akan mempunyai fondasi yang tangguh berupa unit-unit perekonomian kecil, sektor formal atau sektor informal yang dijalankan pelaku dengan pendidikan tinggi.

Memasuki sektor informal boleh saja bukan karena alasan pendidikan tapi peran pendidikan tidak boleh dilupakan. Sebab pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan bagaimanapun juga tetap menunjang setiap kegiatan individu. Aneh bila 54,8% dari responden mengakui perkuliahannya tidak menunjang usaha sektor informal yang mereka geluti. Kalau mau bicara soal perkuliahan, maka seharusnya tidak dimungkiri bahwa proses perkuliahan sebagai bagian pendidikan pastilah jadi penunjang bagi mahasiswa ketika turun di lapangan praktek.

Data ini lebih mengagetkan bila dikaitkan

dengan keinginan mahasiswa untuk melanjutkan usahanya setelah lulus kuliah yang cukup besar yaitu 64,5%. Bila dirinci, sebanyak 57,1% responden yang memiliki pekerjaan sampingan dan 80% responden yang memiliki usaha mandiri berniat meneruskan usaha mereka. Jadi, meski proses perkuliahan tidak terlalu mendukung usahanya namun keinginan untuk terus menghidupi usaha sektor informal yang sekarang mereka jalani masih menggebu-gebu.

Sedangkan soal pilihan setelah lulus, perusahaan swasta masih menjadi favorit. 63,8% responden berencana untuk bekerja di perusahaan swasta. Sementara 23,6% responden memilih untuk membuka usaha sendiri dan sisanya memilih untuk mengabdi pada negara dengan menjadi pegawai negeri.

Di sini terlihat bahwa kecenderungan mahasiswa untuk masuk ke sektor formal lebih besar ketimbang ke sektor informal. Hanya sedikit mahasiswa yang mempunyai keinginan untuk terjun ke sektor informal sebagai alternatif pertama. Setidaknya, lebih separuh yang memilih bekerja di perusahaan swasta. Pilihan untuk berebut sedikit kursi di sektor formal masih menjadi *mainstream*. Baru sesudah terdesak, sektor informal dijadikan alternatif.

Bagaimanapun, sektor informal tetaplah sebuah alternatif. Padahal dengan makin banyaknya lulusan perguruan tinggi yang membuka usaha mandiri, diharapkan sektor informal ini akan dikelola dengan lebih profesional. Makin banyak variabel sosial budaya yang hilang dan digantikan variabel ekonomi. Pada gilirannya, akan terjadi formalisasi.

Dengan membuka usaha mandiri berarti mahasiswa telah mengembangkan jiwa wiraswasta, istilah yang dipopulerkan Josept Schumpeter (1883-1950), seorang ahli ekonomi Austria. Ia berpendapat bahwa keseluruhan proses perubahan ekonomi akhirnya tergantung pada pribadi pelakunya, yaitu jiwa wiraswasta. Kewiraswastaan (*entrepreneurship*) pertama kali akan menyangkut sebuah perubahan. Wiraswasta selalu mencari perubahan, menanggapinya, dan memanfaatkannya sebagai suatu peluang. Setiap perubahan ditanggapinya secara kreatif dan inovatif. Wiraswasta melihat perubahan sebagai norma dan sesuatu yang sehat. Biasanya,

Sekarang ini, mau tidak mau perguruan tinggi dituntut untuk menyiapkan lulusannya agar siap berwiraswasta, tidak hanya siap pakai. Dengan hanya menyiapkan mahasiswa yang siap pakai, perguruan tinggi tak ubahnya pabrik robot yang mencetak mesin-mesin

Alasan memiliki pekerjaan sampingan

Alasan	Persentase
Menambah pemasukan	76,2%
Menambah pengalaman	14,2%
Menyalurkan hobi	4,8%
Untuk biaya hidup	4,8%
Mempraktekkan disiplin ilmu	0%
Lain-lain	0%

Angga.Balairung
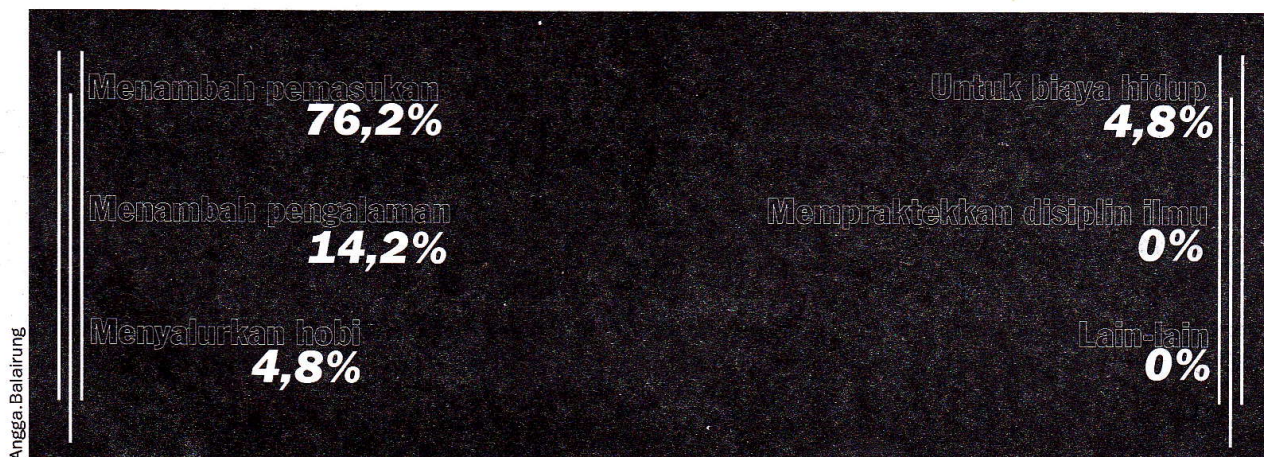
mereka tidak menciptakan perubahan sendiri, karena mereka sendiri biasanya bukan penemu. Kewiraswastaan meliputi penggabungan kekuatan untuk memulai perubahan dalam produksi.

Sekarang ini, mau tidak mau perguruan tinggi dituntut untuk menyiapkan lulusannya agar siap berwiraswasta, tidak hanya siap pakai. Dengan hanya menyiapkan mahasiswa yang siap pakai, perguruan tinggi tak ubahnya pabrik robot yang mencetak mesin-mesin. Pendidikan, dengan meninggalkan pemberdayaan sektor informal, telah memilih jalannya untuk tidak mempercepat proses perubahan ekonomi.

Data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 1998, menunjukkan tingkat pengangguran angkatan kerja berpendidikan diploma dan universitas mencapai 12%. Realitas menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga kerja terampil golongan menengah dan berkeahlian sarjana masih belum terpenuhi, sementara penawaran kelas tenaga kerja tersebut justru berlebih. Tak ada

Rencana utama setelah lulus kuliah

63,8%
23,6%
13,4%
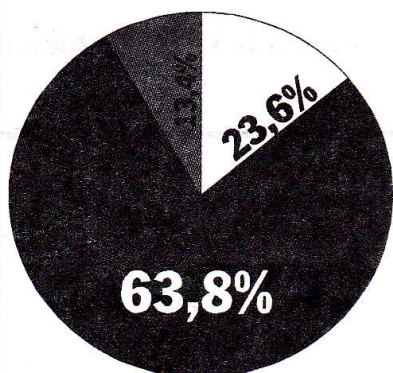
- Bekerja di perusahaan swasta (nasional/internasional)
- Berwiraswasta (mempunyai usaha mandiri/ memulai segala sesuatu dari nol)
- Menjadi pegawai negeri (dosen, guru, tentara, karyawan BUMN)

Alasan memiliki usaha mandiri

Menambah pemasukan
60%

Menambah pengalaman
30%

Mempraktekkan disiplin ilmu
10%

Untuk biaya hidup
0%

Menyalurkan hobi
0%

Lain-lain
0%

Angga.Balairung

yang lebih mungkin selain adanya gap yang serius antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Salah satu sebabnya adalah ketidakmampuan pendidikan dalam menyiapkan lulusannya untuk memasuki dunia kerja. Lulusan hanya diberi satu arah: sektor formal. Kenyataan ini hanya makin memperkuat ketidakberpihakan pendidikan terhadap proses perubahan ekonomi, perubahan yang digawangi sektor informal.

CATATAN AKHIR :

1. Mier sebagaimana dikutip Nurjaman Arsjad, Harga Pertumbuhan Ekonomi dalam Analisis CSIS Tahun xxvii, No.2 April-Juni, 1998, hal. 144
2. Tentang ini, periksa Bambang Tri Cahyono, Pengembangan kesempatan kerja, (Yogyakarta: BPFE Ekonomi & Andi Offset, 1983).
3. Ibid., hal.57. Prof. Mohan Rao dari Department of Economics, University of Massachusetts, dalam Konferensi INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) ke-13 yang diadakan di Yogyakarta 28 September-2 Oktober 2002 lalu, menyindir cara-cara ortodoks yang dilakukan pemerintah sebagai kehabisan akal dengan singkatan TINA (*There Is No Alternative*), sebagaimana dikuti dari tulisan Mubyarto di webmaster@ekonomi-rakyat.org.
4. Lihat Revrisond Baswir, Agenda ekonomi kerakyatan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IDEA, 1997).
5. Hidayat, Peranan sektor Informal Dalam Struktur Perekonomian DIY , dalam Model Pembangunan yang Diterapkan di DIY dengan Potensi Wilayah Yang Ada, Publikasi Seskoad 1978 (tidak diterbitkan) hal. 86-87.
6. Bambang Tri Cahyono, Op. Cit., hal. 58.
7. Revrisond Baswir, Op. Cit., hal. 41.

Asa.Balairung

Memulung Serpihan Sektor Informal

dalam Pembangunan Ekonomi Orde Baru
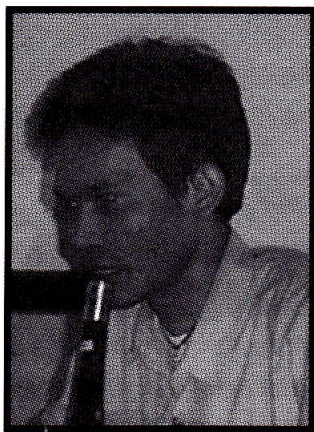
YACOB YAHYA
Lahir dan besar di Pati. Sejak 2000, menjadi mahasiswa di Jurusan Akuntansi Fak. UGM. Sempat menjabat Pemred BPPM Equilibrium FE UGM (2002-2003) dan Pemred Jurnal Muamalah SEF (Shariah Economics Forum) UGM (2003).

BETA PERKASA
Mahasiswa Jurusan IESP Angk. 1998 ini lahir di Jakarta. Ia mantan Pemred Jurnal Pangsa (2000-2001) dan Pemred BPPM Equilibrium FE UGM (2001-2002). Kini sedang menyelesaikan skripsi dengan konsentrasi Agribisnis.
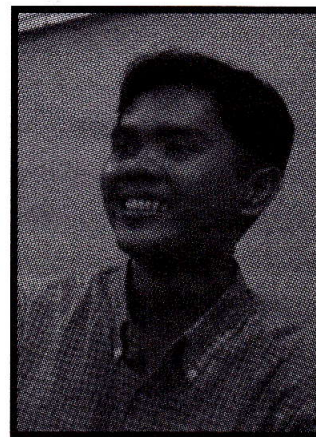
Para pengamat pernah memberikan pujian kepada pemerintah Orde Baru (Orba). Hanya dalam waktu satu dekade lebih sedikit, Indonesia dielu-elukan sebagai contoh sukses dari Asia. Indonesia dipandang sebagai negara yang paling baik dalam mengendalikan inflasi pada tahun 1966-1968. Presiden Soeharto pun pernah memperoleh penghargaan internasional atas keberhasilannya memimpin Indonesia dalam produksi bahan pangan dan keluarga berencana.[1]

Sayangnya, puncak kegemilangan itu berakhir akibat krisis ekonomi dan moneter pada 1997-1998. Bahkan, pada tahun 1998, Indonesia sempat dinobatkan sebagai negara "terkrisis". Krisis tahun itu merupakan krisis terburuk dalam sejarah negeri ini. Segala kegemilangan runtuh sekejap, hanya dalam satu malam. Wajar saja, jika Hal Hill mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan "laboratorium yang baik" dalam kasus pembangunan.[2] Berbagai pergolakan, perubahan, dan perombakan ekonomi-politik selalu mewarnai lembar sejarah negeri ini.

Tulisan ini akan mencoba untuk mengurai historiografi perekonomian Indonesia era Orba serta menilik posisi sektor informal, sektor yang selama ini hanya dianggap sebagai *bumper* pengaman pada saat perekonomian sedang mengalami resesi hebat. Sektor informal, sejauh ini, hanya dipandang sebelah mata dalam wacana perekonomian Indonesia. Karenanya, sebelum mengulas perihal sektor informal, praktik pembangunan perekonomian negeri ini juga perlu dikupas terlebih dahulu.

Awal Pembangunan Ekonomi Orde Baru

Perekonomian Indonesia pada era rezim Soekarno begitu terpuruk. Kegagalan Soekarno di bidang ekonomi inilah yang menjadi salah satu penyebab kejatuhannya. Pada bulan Desember 1965, harga-harga petrolium naik hingga 250 kali lipat. Pada periode itu pula diberlakukan kebijakan rupiah baru dengan memangkas tiga nol di belakang. Nilai nominal seribu rupiah menjadi satu rupiah. Puncak penderitaan rakyat meletus, ditandai maraknya demonstrasi mahasiswa memprotes kenaikan harga plus antikomunis pada tahun 1966.

Tak lama kemudian, muncullah Soeharto sebagai pengganti Soekarno. Dan istilah "Orde Baru" pun mencuat sebagai pembeda dengan era lalu yang suram, yang kemudian dilabeli sebagai "Orde Lama" (Orla). Orba dimulai sebagai koreksi atas segala penyimpangan yang terjadi pada masa Orla. Orba mengantarkan Indonesia pada era pembangunan ekonomi yang berkiblat pada kapitalisme.

Maka, pemerintah Orba pun sibuk mengirim para mahasiswanya belajar ke Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan besar melalui yayasannya, semisal Ford Foundation dan Rockefeller Foundation.[3] dengan tangan terbuka mengucurkan beasiswa. Sebagaimana dikatakan Emil Salim,[4] di bawah kepemimpinan Dekan Sumitro Djojohadikusumo, Fak. Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) saat itu memang

sedang kekurangan dana untuk menyekolahkan para dosennya ke luar negeri. Lantas, Ford Foundation mengulurkan bantuan dana lewat *Affiliation Program University of Indonesia with University of California, Berkeley, USA* mulai tahun 1958.

Beberapa jebolan FEUI terpilih, dikirim ke Berkeley untuk melengkapi ilmu pengetahuannya, bahkan beberapa hingga meraih gelar Ph.D. Mereka antara lain Emil Salim, Widjojo Nitisastro, dan Sadli. Mereka itu pulalah yang kemudian menjadi arsitek ekonomi dalam pembangunan yang dilangsungkan Orba, yang oleh Nono Anwar Makarim disebut sebagai mafia Berkeley.[5]

Ford Fondation ternyata tak sakadar main-main dengan proyek bantuannya itu. Paul Hoffman, pimpinan Ford Foundation saat itu, juga merangkul perguruan-perguruan tinggi terbaik di Amerika Serikat selain University Of California Berkeley. Misalnya, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cornell University serta Harvard University. Kucuran beasiswa itu mampu menciptakan intelektual Indonesia untuk menjadi administrator modern dalam pemerintahan. Ini sejalan dengan slogan Ford Foundation, "tak mungkin membuat satu negara menjadi modern tanpa menciptakan kaum elit yang modern terlebih dahulu".[6]

Orde Baru dan Pembangunan

Pendidikan Amerika yang ditempuh para arsitek ekonomi Orba itu, kemudian dipraktikkan mentah-mentah dalam pembangunan Orba. Tak heran, jika kemudian teori-teori linear tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang sukses diterapkan di negara asal teori-teori itu pun dipraktikkan di Indonesia. Maka, pemerintah Indonesia mengimani teori pertumbuhan ekonomi model Rostow[7] dan semangat investasi ala Harrord-Domard.

Dalam pandangan Rostow, ada lima tahapan yang harus dilalui negara-negara berkembang untuk menjadi negara maju. Dimula dari masyarakat tradisional, pra-kondisi lepas landas, lepas landas (*take off*), tahap kedewasaan dan masa konsumsi tinggi.

Sedangkan model Harrord-Domard mensyaratkan investasi untuk menopang pembangunan ekonomi. Investasi diyakini memiliki watak ganda, yaitu menciptakan pendapatan yang disebut dampak permintaan dan memperbesar kapasitas produksi dengan meningkatkan stok modal atau dampak penawaran.[8] Model ini menggunakan prinsip *saving ratio* (rasio tabungan terhadap pendapatan nasional) atau s, dan *capital output ratio* (rasio modal terhadap pendapatan nasional/COR) atau k. Kaitan antar dua variabel di atas dalam mempengaruhi pertumbuhan ditunjukkan dengan persamaan $g=s/k$, dimana g adalah pertumbuhan. Jika s meningkat dan k semakin rendah, *ceteris paribus*, maka pertumbuhan ekonomi bertambah, begitu pun sebaliknya.[9]

Dalam hal tabungan untuk investasi, Rostow lebih mengutamakan tabungan dalam negeri. Sebab, tabungan dalam negeri akan disertai perubahan dalam masyarakat yang akan beranjak dari satu tahap ke tahap selanjutnya atas kesadaran dan kemampuan masyarakat sendiri.

Rekonstruksi model itu, merupakan hasil potretan Rostow dan Harrord-Domard terhadap praktik pembangunan yang telah dijalankan oleh negara-negara maju, seperti Eropa Barat, Amerika Utara dan Uni Soviet. Goresan sejarah pembangunan ekonomi (modern) mereka bermula dari surplus sektor pertanian (tradisional) yang dijadikan tabungan masyarakat, kemudian dikemas sebagai pembentukan modal untuk investasi bagi keperluan produksi pada periode berikutnya.

Para arsitek pembangunan ekonomi Orba memang meyakini bahwa investasi menjadi syarat mutlak untuk menjalankan roda pembangunan. Namun, suntikan tabungan dalam negeri untuk investasi sulit diadopsi oleh Indonesia. Sebab strategi ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kesenjangan antara investasi dengan tabungan (*invesment gap*), pemerintah Orba amat berharap kucuran modal dari luar negeri. Dana segar dari luar ini lebih cepat diperoleh yang selanjutnya digunakan sebagai investasi untuk mencapai target pertumbuhan.[10]

Di Indonesia, jejak kaki paradigma Rostow mudah terlacak dari praktik pembangunan yang dikenal dengan Pelita (Pembangunan Lima Tahun) dan PJP (Pembangunan Jangka Panjang). Tetapi, dalam kenyataannya, praktik pembangunan ala Rostow itu tak kunjung menuai hasil. Jargon lepas landas yang kian nyaring disuarakan pemerintah pada awal dekade 90-an, akhirnya lenyap seiring badai krisis yang menghantam negeri ini.

Selain itu, pemupukan modal yang tidak berasal dari dalam negeri, tidak diikuti sebagian besar pelaku ekonomi dalam negeri. Alhasil, pertumbuhan yang mengagumkan tidak diiringi aspek pemerataan.[11]

Secara praksis, penerapan model pembangunan ekonomi tersebut, juga ditopang dengan kebijakan politik yang mengedepankan pentingnya stabilitas. Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr memang menjelaskan bahwa proses interaksi dalam pembangunan terdiri atas tiga tahap, yaitu Input, Konversi, dan Output.[12] Inputnya adalah stabilitas sedangkan outputnya adalah pembangunan. Lihat bagan.

Franz Magnis-Suseno menyatakan bahwa
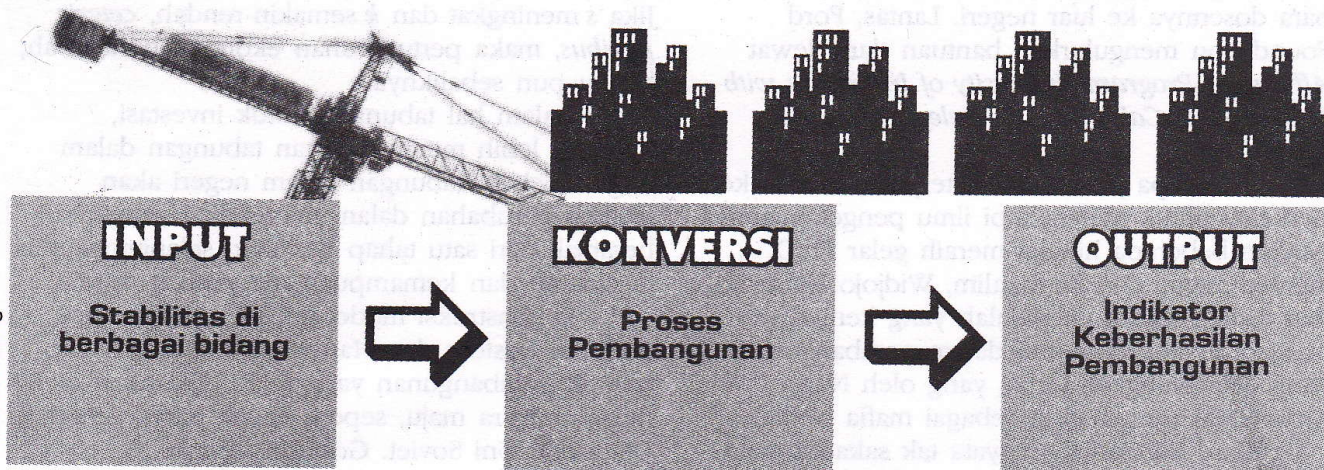
pembangunan tidak mungkin terlaksana tanpa stabilitas. Ketentraman dalam masyarakat, keamanan, kebebasan dari ketakutan akan dirampok, ditembak, diusir oleh perang, dan seterusnya, adalah syarat agar masyarakat dapat membangun kehidupan yang sejahtera.[13]

Sayangnya, demi menjaga stabilitas itu, pemerintah Orba sering betindak terlampau berlebihan. Kesan represif pun tidak bisa dielakkan. Serangkaian kooptasi politis dilakukan terhadap pihak-pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah.

Pertumbuhan di atas Pemerataan

Untuk mengukur berhasil-gagalnya suatu program, diperlukan suatu indikator. Indikator yang paling mudah dan enak digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan adalah pendapatan nasional.[14] Bila pendapatan nasional meningkat, maka pembangunan dianggap sukses. Karenanya, pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan nasional dengan mengedepankan sektor riil—ekspor, impor, serta investasi.

Demi mendukung pencapaian di sektor riil itu, pemerintah menyuarakan keunggulan komparatif.[15] Dalam hal ini, keunggulan komparatif Indonesia ialah tenaga kerja yang sangat murah. Para investor asing tentu saja berminat menanamkan usahanya di negeri yang melimpah tenaga kerja ini.

Untuk menstimulus laju dana, diperlukan lembaga *intermediari* yang baik, yaitu sektor perbankan. Diharapkan, dengan suburnya sektor perbankan iklim investasi dan penyediaan dana bagi masyarakat dapat dilakukan dengan baik. Selain itu, utang juga merupakan resep yang harus diambil untuk membangun. Perhitungannya, setelah berhasil membangun, negara debitur—dalam hal ini Indonesia, dapat mengembalikannya. Kesejahteraan dengan demikian dapat dikecap oleh seluruh rakyat (*trickle down effect*).

Pilihan pola-pola tersebut diambil demi mengejar pertumbuhan. Laju pertumbuhan akan berpengaruh positif bagi perhitungan pendapatan nasional. Tetapi, mengejar pertumbuhan semata, akan mengabaikan pemerataan. Namun, dalam pandangan neoliberalis, dengan pertumbuhan yang bagus, maka pemerataan akan tercapai dengan sendirinya. Pada era 1955 sampai dengan 1960-an, Sir Arthur Lewis menulis, bahwa yang pertama harus diperhatikan ialah persoalan pertumbuhan, bukan distribusi. Dan pada 1957 Bauer dan Yamey berpendapat, redistribusi pendapatan dengan memihak

kepada golongan miskin tidak mungkin dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam arti *output* per kapita lebih besar.

PBB(Perserikatan Bangsa-bangsa) pun terkesan mengesampingkan pemerataan sebagai hal utama yang harus didahulukan negara. Bagi PBB, tujuan yang paling umum dari pembangunan ekonomi adalah memaksimalkan pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi. Prof. Harry Johnson pada tahun 1962 menekankan bahwa tidak bijaksana bagi negara yang menikmati pertumbuhan cepat untuk bersikeras membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan menjamin pemerataan ekonomi dan distribusi pendapatan yang adil.[16]

Senada itulah, nyatanya, kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh Orba. Bahkan, Anne Booth, pemerhati kebijakan ekonomi Orba menulis, secara realistis pemenuhan kebutuhan pokok dan pemerataan hanya mungkin dipecahkan jika Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang memadai. Booth meramalkan bahwa pemerataan akan tercapai menjelang tahun 2000.[17] Dengan demikian, pertumbuhan adalah sasaran jangka pendek yang harus dipertahankan untuk meraih pemerataan yang akan dicapai pada jangka panjangnya.

Pertumbuhan pesat memang tercapai. Setiap tahunnya Indonesia mendulang angka sekira 7%. Namun, masalah pemerataan belum tersentuh. Selain itu, pembangunan ekonomi Indonesia belum mampu menyejajarkan posisi dengan negara-negara Asia Tenggara. Pada tahun 1995, pendapatan per kapita Indonesia masih di bawah US$1.000 (US$980) per tahun. Angka tersebut merupakan yang terendah se-ASEAN. Secara berurutan, Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura meraih angka US$1.050, US$2.740, US$3.890, US$25.160, dan US$ 26.730.[18] Perbandingan indikator-indikator ekonomi Asia Tenggara dapat dilihat pada tebel 1.

Begitulah, dari segi teori ekonomi, pembangunan berhasil apabila ada kenaikan besar dalam volume dan nilai produksi, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Akan tetapi, jumlah angka kemiskinan Indonesia pada 1998 adalah 24,2% atau 49,5 juta orang.[19]

Paparan di atas menandakan suatu kekhawatiran yang terpendam. Adalah Krugman, Lau, dan Young yang mencuatkan kekhawatirannya. Menurut mereka, kejayaan ekonomi Asia Timur tidak akan bertahan lama. Tentu saja, tesis ini berbeda dengan ramalan sebagian besar arsitek ekonomi Orba.[20]

praktik kolusi plus nepotisme, yang disebut-sebut sebagai salah satu faktor pemicu kehancuran ekonomi Indonesia, pun menjadi-jadi. Hal ini terlihat dari penguasaan usaha-usaha besar, seperti bisnis baja, plastik, tekstil, semen, cengkeh, dan jalan tol.

Pembangunan dan Praktik Kolusi

Pertumbuhan terus dipacu tidak hanya melalui kebijakan-kebijakan sektor riil. Selain mementingkan stabilitas politik, sebagaimana telah disinggung di atas, pemerintah cukup aktif dalam merangkul para pengusaha swasta. Karenanya, hubungan antara penguasa dengan pengusaha pun terjalin mesra.[21] Penguasa berpikir bahwa akan lebih sulit jika mengharapkan pembangunan dari bawah. Pemerintah menilai perkembangan golongan menengah ke bawah dinilai lambat. Pemerintah lebih menaruh harap pada golongan konglomerat bermodal besar. Hubungan inilah yang kemudian berimbas pada terbentuknya mental

Tabel 1. Indikator-indikator Asia Tenggara, 1991-1998 (%)

	Indonesia	Malaysia	Philipina	Singapura	Thailand
Pertumb. GDP 1991-95					
1991-1995	7,8	8,7	2,2	8,5	8,6
1996	8,0	8,6	5,5	6,9	5,5
1997	4,7	8,0	5,1	7,8	-0,4
1998	-13,6	-6,7	0,0	13	-6,5
Inflasi					
1991-1995	8,9	3,6	10,5	2,6	4,8
1996	6,5	3,5	8,4	1,4	5,8
1997	11,6	2,6	5,1	2,0	5,6
1998	65,0	5,4	9,0	-0,2	8,1
Neraca sekarang/GDP					
1991-1995	-2,4	-7,0	-3,6	12,9	-6,2
1996	-3,3	-4,9	-4,5	15,0	-7,9
1997	-2,9	-5,2	-5,2	15,4	-2,0
1998	5,4	7,5	1,2	17,8	8,1
Neraca pemerintah/GDP					
1991-1995	-0,2	0,3	-1,6	12,4	2,8
1996	1,2	1,1	-0,4	13,9	2,4
1997	1,2	5,5	-1,8	6,0	-0,9
1998	-5,5	-1,0	-3,6	-1,0	-4,5

Bondhan.Balairung

Sumber : Hal Hill (2001), hal 343

kolusif.[22] Dan benar saja, praktik kolusi plus nepotisme, yang disebut-sebut sebagai salah satu faktor pemicu kehancuran ekonomi Indonesia, pun menjadi-jadi. Hal ini terlihat dari penguasaan usaha-usaha besar, seperti bisnis baja, plastik, tekstil, semen, cengkeh, dan jalan tol.

Dualisme Ekonomi

Pembangunan ekonomi yang mengedepankan sektor riil, telah mengarahkan perubahan dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Pada titik ini—saat pemerintah menjalankan praktik ekonomi modern—corak nyata kehidupan ekonomi tradisonal juga masih berlangsung. Alhasil, dualisme kehidupan ekonomi yang senjang tetap mencolok.

Kariawan[23] mencoba menjelaskan dualisme struktur perekonomian Indonesia dalam beberapa segmen. *Pertama*, pasar barang. Aktivitas ekonomi di sektor modern dan tradisional merupakan dua sisi yang sangat mencolok perbedaannya. Sektor modern ditandai dengan skala usaha yang relatif lebih besar di topang modal yang melimpah. Belum lagi manajemen yang handal yang dijalankan oleh para pekerja dengan pendidikan yang cukup tinggi. Pemerintah pun kerap kali meninabobokan sektor ini dengan berbagai proteksi. Sedangkan sektor tradisional terseok-seok karena modal yang kecil, manajemen seadanya dan digerakkan oleh pekerja dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Kedua, pasar uang. Di sektor modern, terdapat lembaga keuangan seperti Bank, BPR (Bank Perkreditan Rakyat), asuransi dan lainnya. Sektor ini bekerja dengan arah yang jelas, jaringan usaha yang luas dan kuat, serta adanya perlindungan regulasi. Sedangkan, di sektor tradisional terdapat lembaga keuangan seperti

arisan, rentenir dan lainnya. Biasanya likuiditas kecil, persyaratan yang mudah dan kerap dijadikan *The lender of the last resort*[24] bagi masyarakat bawah.

Ketiga, pasar tenaga kerja. Tenaga kerja yang bergerak di sektor modern biasanya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, jam kerja dan pendapatan yang teratur juga produktivitas yang tinggi. Lain halnya dengan tenaga kerja pada sektor tradisional. Biasanya tingkat pendidikan mereka rendah, *skills* seadanya, jam kerja dan pendapatan yang tidak teratur dan produktivitas yang rendah.

Dualisme sosial dan ekonomi, memang, bukan gejala baru di Indonesia. Fenomena ini pertama kali disuarakan oleh J.H. Boeke pada paruh pertama abad ke-20. Boeke memandang bahwa kegiatan ekonomi, masyarakat Indonesia masa itu, terbelah menjadi dua. *Pertama*, masyarakat kapitalis dengan ciri keinginan yang tidak terbatas, penggunaan teknologi maju, ekonomi uang dan berbagai jenis organisasi kerja sama. *Kedua*, masyarakat prakapitalis yang hampir tanpa modal, tidak mengenal pasar, tidak percaya pada investasi modal yang mengandung risiko dan penggunaan teknologi sederhana. Dalam hal migrasi, masyarakat ini enggan untuk meninggalkan desanya. Kalaupun terjadi migrasi, selalu dengan intervensi pemerintah. Masyarakat ini biasa dikenal masyarakat subsisten.[25]

Pandangan Boeke itu, barangkali telah banyak terpatahkan, kini. Soal urbanisasi misalnya. Seiring pemusatan pembangunan di perkotaan, perpindahan penduduk besar-besaran dari desa ke kota, kini menjadi ciri utama pola demografi di Indonesia. Rachbini melihat kesan bahwa faktor pendorong (*push factor*) lebih kental ketimbang faktor penariknya (*pull factor*).[26]

Urbanisasi besar-besaran ini menyebabkan semakin bengkaknya jumlah dan tingginya kepadatan penduduk terutama di kota-kota besar. Lahan untuk pemukiman semakin menyempit sehingga harga tanah di kota kian mahal. Sebaliknya, angkatan kerja mengalami *over-supply* yang menyebabkan semakin tertekannya gaji buruh.

Urbanisasi besar-besaran ini menyebabkan semakin bengkaknya jumlah dan tingginya kepadatan penduduk terutama di kota-kota besar. Lahan untuk pemukiman semakin menyempit sehingga harga tanah di kota kian mahal. Sebaliknya, angkatan kerja mengalami *over-supply* yang menyebabkan semakin tertekannya gaji buruh

Gejala dualisme ternyata menjadi pekerjaan rumah bagi pemegang kebijakan Orba. Berbagai jurus dikeluarkan untuk menghilangkan dualisme ini. Sistem ekonomi uang yang ada di kota-kota dan sistem subsisten di sebagian besar kawasan pedesaan dijembatani dengan memodernkan infrastruktur perekonomian.[27] Langkah ini diambil dengan menggunakan instrumen dari sistem ekonomi uang yaitu dengan mengandalkan peubah investasi, moneter, fiskal, harga, subsidi perdagangan dan lain sebagainya. Hasilnya pun dapat dikatakan lumayan. PDB (Pendapatan Domestik Bruto) mengalami peningkatan seraya meningkatnya output sektor-sektor modern seperti pertambangan, konstruksi, industri pengolahan perhubungan dan lain-lain. Sektor pertanian sempat terbantu oleh subsidi dan input pupuk, persyaratan kredit dan penerapan teknologi dalam proses produksi.[28]

Menjenguk Sektor Informal di Daratan Teoretis.

Kesenjangan antara kota dan desa begitu lebar. Sehingga upaya pemerintah dalam memperhatikan persoalan di desa, seperti disinggung di atas, tampak sia-sia. Corak ekonomi dualisme pun masih berlangsung. Ironisnya, itu justru terjadi di perkotaan, tempat dimana ekonomi modern dibesarkan. Wujud dualisme ekonomi itu, kini lebih dikenal sebagai ekonomi sektor formal (modern) dan ekonomi sektor informal (tradisional).

Kehadiran sektor informal, yang belakangan kian ramai, tentu tak lepas juga lantaran krisis ekonomi yang menghantam negeri ini tak kunjung berakhir. Pertanyaannya, mengapa sektor informal ini muncul? Sumodiningrat melihat keadaan ini disebabkan oleh model pembangunan yang telah diterapkan. Penerapan model pembangunan ala Rostow dan Harrord-Domard bersikeras untuk menggenjot pertumbuhan dengan memanjakan sektor industri pengolahan yang dinilai cepat menghasilkan nilai tambah (*value added*).[29] Industrialisasi yang dilakukan menggunakan teknologi yang padat modal. Strategi pertumbuhan ini kurang memperhatikan aspek pemerataan dengan membawa pelaku ekonomi pinggiran lain untuk sekadar mencicipi kue pembangunan.[30] Selain itu, teknologi padat modal menyebabkan terbatasnya kesempatan kerja yang menyebabkan melonjaknya pengangguran.

Ungkapan senada juga dinyatakan oleh Hidayat.[31] Menurutnya, sektor informal muncul lantaran kebijaksanaan yang terburu-buru untuk meninggalkan sektor pertanian dan memasuki sektor industri (transformasi struktural), yang dinilai lebih prospektif untuk menciptakan nilai tambah. Pada tahun 1980 proporsi nilai tambah pertanian masih sebesar 24% dari PDB kemudian turun menjadi hanya 16% pada tahun 1998. Sebaliknya, industri manufaktur cenderung meningkat. Pada 1980 proporsi nilai tambah industri manufaktur yang sebesar 13% dari PDB, meningkat menjadi 24% pada 1995.[32] Namun, transformasi struktural tersebut tidak diikuti oleh tumbuhnya kesempatan kerja. Akibatnya arus tenaga kerja yang sudah meninggalkan pertanian (desa) tidak tertampung dalam rumah industrialisasi yang menyebabkan makin menggeliatnya sektor informal di perkotaan.

Zein Nasution memberi dua alasan mengapa rumah industrialisasi ini tak berdaya dalam menyerap tenaga kerja.[33] *Pertama*, terjadinya *dynamic insufficient*. Kapasitas akumulasi yang relatif rendah dalam sektor industri. Sumber-sumber investasi lebih banyak dialokasikan untuk produksi barang-barang mewah bukan barang-barang produksi. Sehingga surplus yang diperoleh tidak dialokasikan kembali untuk perluasan produksi (ekspansi). Padahal, perluasan kapasitas produksi diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak. *Kedua*, penggunaan teknologi padat modal dalam sektor industri. Pola ini tidak hanya lemah dalam menyerap tenaga kerja tetapi juga malah menjurus pada penurunan nilai tambah per pekerja. Walaupun pada 1971 dan 1980 persentase tenaga kerja di sektor industri dari keseluruhan pekerja di sektor non-pertanian meningkat dari 19% menjadi 20,8%[34] namun dari sisi nilai tambah per pekerja ternyata sektor indutri memperlihatkan kinerja yang menurun, yakni dari 6,54% menjadi 2,66%.[35]

Sementara itu, basis utama perekonomian di pedesaan yaitu sektor pertanian, seakan tak ramah lagi untuk menjamu para angkatan kerja. "Revolusi Hijau", program yang digemari oleh negara-negara berkembang untuk mengembangkan pertanian, malah menciptakan pengangguran. Program yang menggunakan bibit padi hasil silang dan pemuliaan menjadi ciri khasnya yakni HYVs (*High Yieldy Varieties*), bibit unggul yang generasi lanjutnya bernama VUTW (Varietas Unggul Tahan Wereng) telah mengubah beberapa kecenderungan dalam pola kerja pertanian pedesaan,[36] terutama dalam penggunaan teknologi mekanik.

Marcelinus Molo mencatat ada tiga faktor yang mendorong masuknya alat-alat mekanik pertanian ke daerah padat penduduk seperti Jawa dan Bali. *Pertama*, Kebijakan pemerintah, subsidi kredit, pajak impor yang rendah. *Kedua*, anjuran yang terkesan berlebihan, terutama oleh para pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah dalam penggunaan alat-alat mekanis. *Ketiga*, kepentingan berbagai kelompok pengusaha yang jaringannya amat kompleks.[37] Ternyata penggunaan alat-alat mekanik ini lebih ekonomis, efisien dan output yang dihasilkan pun lebih banyak ketimbang memakai tenaga manusia dan hewan. Modernisasi pertanian ini telah mengurangi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Pada tahun 1970 proporsi tenaga kerja di pertanian sebesar 66% dari keseluruhan pekerja, kemudian menurun menjadi 55% pada tahun 1990.[38]

Sektor Informal: Beberapa Pengertian

Istilah sektor informal (*informal sector*), sebenarnya, pertama kali dicetuskan oleh Keith Hart yang dituangkan dalam penelitiannya di Ghana 1973. Hart mengungkapkan bahwa sebagian besar kesempatan kerja penduduk kota tidak terdaftar (*unnumerated*). Pekerja yang berkecimpung di sektor ini biasanya adalah tenaga kerja sendiri yang tidak dibayar. Para pekerja ini adalah migran dari pedesaan yang tidak mendapat jatah kesempatan kerja di daerah asalnya karena keterbatasan keahlian dan pengalaman yang disyaratkan oleh sektor formal.[39]

Dari sini, dapat diamati bahwa variabel kunci Hart dalam memetakan sektor informal terletak pada rasionalisasi pekerjaan. Apakah pekerja diatur atas gaji tetap, teratur, permanen atau tidak. Apakah bentuk perusahaannya terdaftar atau tidak. Juga, apakah produktivitas perusahaan tersebut tinggi atau rendah.[40]

Salah satu karakteristik dari sektor informal

TABEL 2

BEBERAPA DEFINISI SEKTOR INFORMAL

ILMUWAN	TERMINOLOGI	PENJELASAN
1. Boeke	Sektor ekonomi kapitalis dan prakapitalis	Ciri kapitalistis: Produksi untuk mencari laba dengan faktor produksi modal yang dominan; struktur organisasi terpisah dari keluarga; motif terpisah dari nonekonomi; skala produksi besar dan dijual ke pasar. Prakapitalistis: produksi untuk mencari kepuasan tenaga kerja, struktur organisasi sama dengan keluarga, motif ekonomi berbaur dengan motif nonekonomi, skala produksi relatif kecil dan tidak dijual ke pasar.
2. Geertz	Bazar ekonomi dan firm centered economy	Bazaar: kelanjutan dari sistem ekonomi agraris. Firm centered: memiliki ciri kapitalistis.
3. Mazumbar	Sektor dengan proteksi ekonomi yang tidak mendapat proteksi	Proteksi ekonomi: tingkat produktivitas tenaga kerja relatif tinggi dan ada perlindungan perburuhan karena ada serikat buruh. Yang tidak mendapat proteksi: tingkat produktivitas tenaga kerja relatif rendah dan tidak ada perlindungan perburuhan sebab tidak memiliki serikat buruh.
4. Milton Santos	*Circuit Superiur dan Inferiur*	Superiur: proses produksi sudah mekanisasi dan maju. Inferiur: proses produksi masih tertinggal.
5. Weeks	*Enumerated dan unenumerated sector*	Enumerated: terdiri dari unit usaha yang terorganisasikan dengan baik dan berskala besar. Unenumerated: terdiri dari unit usaha berskala kecil yang dikelola secara swakarya.

DIOLAH DARI BERBAGAI SUMBER

Bondhan.Balairung
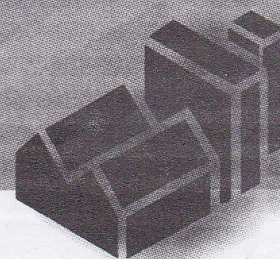
yang cukup banyak mengundang perdebatan adalah "proteksi ekonomi". Ciri ini digunakan oleh *International Labor Organization* (ILO) untuk membedakan sektor formal dengan informal. Sektor formal mendapat berbagai perlindungan usaha dari pemerintah sedangkan sektor informal tidak memperolehnya. Bantuan ekonomi yang diberikan pemerintah tersebut akan diberikan jika ada perserikatan buruh, pemberian kredit dengan fasilitas bunga yang relatif rendah, perlidungan dan perawatan tenaga kerja dan perlindungan hak cipta.[41]

Jika membincangkan tentang sektor informal biasanya selalu tergambar pedagang kaki lima (PKL), padahal PKL ini hanya salah satu jenis dari usaha di sektor informal. Dalam pengklasifikasian sektor informal, El Shaks memberikan dua tipologi[42] yaitu: *pertama*, unit usaha yang memberikan layanan vital bagi masyarakat kota dan bersifat melengkapi (*complement*) sektor formal seperti pengusaha transportasi, pedagang makanan, angkutan jasa kecil-kecilan, dan lain-lain. *Kedua*, kegiatan ekonomi yang cenderung bersifat personal, marjinal dan ilegal. Tipologi ini biasanya tanpa modal dan lebih mengandalkan pada kekuatan

fisik seperti pembantu rumah tangga, pengamen, pengemis, pemulung, dan sebagainya.

Sementara itu, Hidayat mencoba membuktikan bahwa pemerintah telah membantu sektor pinggiran ini.[43] Namun, dari hasil penelitian empirisnya, masih banyak pelaku sektor informal yang belum mengunyah nikmatnya bantuan pemerintah. Maka, Hidayat menekankan bukan pada masalah ada atau tidak adanya bantuan, melainkan adalah faktor *accessibility*.[44]

Pada tahun 1978, Hidayat pun menyusun 11 ciri pokok sektor informal yang kemudian dipakai oleh Biro Pusat Statistik (BPS) sebagai landasan survai nasional tentang pekerja sektor informal.[45] Ciri-ciri tersebut, yaitu:

1. Kegiatan usaha tidak terorganisasi dengan baik karena tidak menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal.
2. Pada umumnya tidak memiliki izin usaha.
3. Pola kegiatan tidak teratur, baik dari segi lokasi maupun jam kerja.
4. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak dapat dinikmati sektor ini.
5. Unit usaha sudah keluar dan masuk dari satu subsektor ke lain subsektor.
6. Teknologi yang dipergunakan bersifat primitif.
7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga kecil.
8. Kurang diperlukan pendidikan formal sebab lebih mengandalkan pengalaman sambil bekerja.
9. Pada umumnya unit usaha termasuk golongan *"one-man enterprise"* dan jika memperkerjakan buruh biasanya berasal dari ikatan keluarga.
10. Sumber dana modal lebih banyak dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi.
11. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsikan oleh golongan masyarakat kota/desa berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga yang berpenghasilan menengah.

Tabel 3

PERBEDAAN SEKTOR FORMAL DAN SEKTOR INFORMAL

KARAKTERISTIK	SEKTOR FORMAL	SEKTOR INFORMAL
Modal	Relatif mudah diperoleh	Sukar diperoleh
Teknologi	Padat modal	Padat karya
Organisasi	Birokrasi	Organisasi/ikatan keluarga
Kredit	dari lembaga resmi	Lembaga keuangan tidak resmi
Serikat Buruh	Sangat berperan	Tidak berperan
Bantuan Pemerintah	Penting untuk kelangsungan usaha	Tidak ada
Hubungan dengan Desa	*One-way traffic* untuk kepentingan sektor informal	Saling menguntungkan
Sifat dunia usaha	Sangat bergantung dari perlindungan pemerintah atau impor	Berdikari
Persediaan barang	Berdasarkan kontrak kerja	Berdasarkan saling percaya

SUMBER : Hidayat, hal 10

Bondhan.Balairung

Tabel 4

PERBANDINGAN JUMLAH PEKERJA SEKTOR FORMAL/INFORMAL

	1971a	1980b	1990c
Pekerja di kota (000)	6051	9780	19.000
Pekerja di sektor Informal (000)	1500	3501	8066
Proporsi Pekerja sektor Informal terhadap pekerja di kota (%)	24,8	35,7	42,4

SUMBER : Tadjudin Noer Effendi, *Pembangunan Krisis dan Arah Reformasi*, (Muhammadiyah University Press, Surakart,a 2000)

Bondhan.Balairung

Tabel 5

LAPANGAN KERJA PER SEKTOR DI INDONESIA 1961-1990

	Sumbangan (%)				Pertumbuhan (%)		
	1961	1971	1980	1990	1961-71	1971-80	1980-90
Pertanian	73.0	65.8	56.1	50.1	28.2	24.4	34.1
Industri :	8.1	10.1	13.3	17.0	20.6	23.7	26.7
Manufaktur	5.9	75.8	9.2	11.6	18.2	13.6	18.1
Konstruksi	1.8	1.9	3.2	4.1	2.6	7.5	6.5
Jasa :	8.9	24.1	30.6	32.9	51.2	51.8	39.2
Perdagangan	6.9	11.0	13.1	15.0	32.4	20.1	20.0
Transportasi	2.2	2.4	2.9	3.7	3.8	4.4	5.9
Keuangan	9.8	10.7	14.6	14.2	15.0	27.4	13.2
Lainnya							
Total	100	100	100	100	100	100	100
(dlm ribuan)	32.911	39.163	51.196	70.608	6.252	12.033	19.412

SUMBER :BPS via Hall Hil (2001) hal.33

Bondhan.Balairung

Secara lebih rinci, Hidayat membagi sektor informal perkotaan meliputi: industri kerajinan rakyat, bangunan, jasa (perorangan, kemasyarakatan, hiburan), perdagangan (keliling dan menetap) dan angkutan (tenaga manusia dan hewan).[46]

Sementara itu, jika mengacu pada berbagai definisi tentang dualisme ekonomi, maka sektor informal merupakan ekonomi pra-kapitalis, bazaar, yang tidak mendapat proteksi, *inferiur* dan *unenumerated*. Lihat ringkasan definisi sektor informal dalam tabel berikut.

Dalam berbagai sisi unit usahanya, sektor informal amat berbeda dengan sektor formal yang biasanya memiliki sumber daya "lebih" dan skala usahanya pun cukup besar (lihat tabel 3).

Selayang Pandang Sektor Informal di Lautan Praktis

Dengan segala keterbatasan yang melingkupi dirinya, sektor informal terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah

Tabel 6

PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI INDONESIA 1982 (juta jiwa)

LAPANGAN USAHA	DESA	%	KOTA	%	JUMLAH	%
Perdagangan	4,63	42,30	2,01	50,40	6,64	44,40
Industri	2,78	25,50	0,32	8,10	3,10	20,70
Jasa-jasa	1,45	13,30	0,80	20,10	2,25	15,10
Bangunan	1,03	9,50	0,38	9,50	1,41	9,40
Lain-lain	1,04	9,40	0,50	11,90	1,54	10,30
Jumlah	10,93	100,00	4,01	100,00	14,94	100,00

SUMBER : BPS via Revrisond Baswir (1998), hal.76

Bondhan.Balairung

yang cukup signifikan. Bahkan dapat dikatakan, sebagian besar pekerja di Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor informal.Untuk lebih jelasnya, periksa tabel 4-6.

Cukup kuatnya sektor informal dalam menyerap tenaga kerja tentu tak serta-merta diiringi dengan tingginya produktivitas. Hal ini tidak mengherankan. Sebab, tenaga kerja yang beraktivitas disektor ini memiliki skill yang pas-pasan, pendidikan yang relatif rendah dan teknologi yang masih sederhana.

Mayoritas pelaku sektor informal, memang masih rendah tingkat pendidikannya. Ternyata tingkat pendidikan yang hanya sampai SD mencapai hingga 51,7% sedangkan yang mencapai SMP dan SMA masing-masing sebesar 26,5% dan 21,8% (lihat tabel 7).

Ditengok dari jenis usahanya, sektor informal banyak yang bergerak di sektor perdagangan. Paling tidak, hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM pada tahun 1999 di kota Yogyakarta, membuktikannya. Kelompok terbesar adalah usaha makan dan minuman (43,3%), juga penjual kebutuhan sehari-hari seperti beras, rokok, gula, dan lain-lain (14%). Tak mengherankan memang. Sebab, produk yang diperdagangkan merupakan kebutuhan sehari-hari (yang ingin segera diperoleh konsumen) dan termasuk jenis yang habis pakai. Selain itu, ternyata jenis usah tekstil, pakaian, kulit juga menduduki proporsi cukup besar (13,8%). Bisa jadi karena menjual produk-produk khas Yogya, seperti pakaian Batik, yang tentu amat diminati turis domestik dan mancanegara (Lihat tabel 8).

Untuk memulai usaha tentu dibutuhkan modal. Ada berbagai cara untuk menyiasati minimnya modal yang dimiliki oleh pekerja yang bergerak di sektor informal. Penelitian yang

Tabel 7

TINGKAT PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN

JENIS USAHA	SDN*	SLTP	SLTA
Makanan dan minuman	48,0	51,2	40,8
Tekstil, pakaian, kulit	6,0	8,1	7,0
Kebutuhan sehari-hari	34,0	27,9	23,9
Kertas, plastik, koran	4,0	2,3	15,6
Kerajinan, mainan, aksesoris	8,0	10,5	12,7
TOTAL PERSEN	100	100	100
N (total : 325)	168	86	71
% Terhadap Total N	51,7	26,5	21,8

SUMBER : Data Primer, PPK-UGM, 1998* (Agus Joko Pitoyo, hal 89)
*Termasuk didalamnya yang tidak tamat SD

Bondhan.Balairung

PERSEBARAN SEKTOR INFORMAL MENURUT JENIS USAHA

Tabel 8

JENIS USAHA	JUMLAH	%
Makanan dan minuman	2.295	43,3
Tekstil, pakaian, kulit	734	13,8
Kebutuhan sehari-hari	744	14,0
Kertas dan plastik	228	4,3
Kelompok Jasa	655	12,4
Kerajinan, mainan, aksesoris	645	12,2
TOTAL	5.301	100,0

SUMBER : Data Primer, PPK-UGM, 1998* (Agus Joko Pitoyo,hal 84)

Bondhan.Balairung

dilakukan oleh Cahyono E.S., Susetyo dan Nanang T, tentang PKL di Tanjung karang, Lampung dapat menggambarkan hal ini.

Biasanya modal untuk memulai usaha berasal dari tabungan pribadi yang kadang merupakan tabungan dari hasil pekerjaan di bidang lain. Jika uang pribadi kurang tentu mencari pihak lain untuk memenuhi kebutuhan modal. Biasanya yang sering membantu adalah melalui perkumpulan arisan, kerabat dan orang tua. Ada juga yang memperoleh kredit. Namun, kreditor biasanya tidak resmi, sebab jika melalui lembaga resmi akan berhadapan dengan tembok prosedur yang berliku, syarat-syarat yang rumit serta jumlahnya yang terbatas.

SUMBER MODAL PKL

Tabel 9

SUMBER MODAL	Frekuensi	PERSENTASE
Uang Pribadi	34	56,67 %
Orang Tua/pribadi	17	28,33 %
Pihak Tidak Resmi	9	15,0 %
Kredit Resmi	-	-
TOTAL	60	100

SUMBER : Data Primer (Cahyono ES, hal.64)

Bondhan.Balairung

Tabel 10 KEUNTUNGAN RATA-RATA PER HARI

Keuntungan Bersih Per Hari	Jumlah	Persentase
Kurang dari Rp50.000	7	17,5 %
Rp50.000 - Rp75.000	16	40 %
Rp75.000 - Rp100.000	10	25%
Lebih dari Rp100.000	7	17,5 %

SUMBER : Data Primer (Yasinta Natalia Wulansari, hal. 61)

Bondhan.Balairung

Pinjaman dari pihak yang tidak resmi, bisa mencapai 20-30%. Namun, fleksibilitas menjadi ciri dari jenis pinjam-meminjam di sektor ini. Syarat yang diperlukan mudah: hanya ikatan kepercayaan. Untuk proses pembayaran, jika belum memiliki uang bisa ditunda atau bahkan tidak melunasinya. Pihak peminjam pun tidak dapat melaporkan hal ini pada pihak berwenang sebab usaha ini tidak sah.[47] (Lihat tabel 9).

Kegiatan usaha sektor informal yang hanya mengejar target subsisten ternyata perlu dipertanyakan kembali (untuk beberapa kelompok usaha). Penelitian yang dilakukan oleh Yasinta,[48] terhadap PKL di sepanjang Jalan Kaliurang dan Jalan Gejayan Yogyakarta mencoba mengorek ini. Bagi pemilik usaha, ternyata keuntungan rata-rata per hari yang diperoleh cukup besar. Selanjutnya, setelah dikurangi biaya gaji buruh, sisanya dapat dijadikan pemupukan modal, yang dapat digunakan untuk ekspansi, mendirikan usaha (informal) lain atau bahkan bisa melangkah ke (usaha) sektor formal (Lihat tabel 10).

Terjadinya *over-supply* angkatan kerja akan menyebabkan rendahnya gaji buruh. Hal ini pun dialami oleh para buruh di sektor informal. Ternyata upah buruh PKL per bulan sekitar Rp 100.000-Rp 150.000 masih cukup besar sekitar 47,5%. Padahal, Upah Minimum Provinsi Yogyakarta pada tahun 2002 sebesar Rp 321.750 (Lihat tabel 11).

Walaupun pihak pemerintah (kota) selalu menuding pedagang kaki lima karena penggunaan fasilitas umum yang ilegal dan mengganggu ketertiban dan keamanan terutama di trotoar namun ternyata PKL (Yogyakarta) memberikan sedekah yang cukup besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lihat tabel 12.

Kesenjangan dan keterbelakangan sudah menjadi ciri umum di negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia. Penerapan resep model-model ekonomi yang diadopsi dari Barat, ternyata tidak berhasil mengangkat kesejahteraan masyarakat secara merata. Memang, pertumbuhan ekonomi melesat dan munculnya proyek-proyek industri yang gagah perkasa. Tidak sedikit juga

Tabel 11 UPAH TENAGA KERJA PKL

UPAH PER BULAN	JUMLAH	PERSENTASE
Rp 100.000 - 150.000	19	47.5 %
Rp 150.000 - 200.000	9	22.5 %
Rp 200.000 - 250.000	5	12.5 %
Rp 250.000 - 300.000	5	12.5 %
Lebih dari Rp 300.000	1	2.5 %

SUMBER : Data Primer. Yasinta Natalia Wulansari, hal. 58

Bondhan.Balairung

Tabel 12

KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PENERIMAAN (juta rupiah)

JENIS PENDAPATAN DAERAH	1991/1992	1992/1993	1993/1994	1994/1995	1995/1996
Pajak Pembangunan I	24,46	24,83	32,19	36,60	43,87
Retribusi Luar Pasar	88,22	96,23	221,43	225,14	232,01

Bondhan.Balairung

SUMBER : Data Primer, PPK-UGM, 1998 (Agus Joko Pitoyo,hal 93)

para penguasa di Dunia Timur mendapat acungan jempol dari para koleganya di Barat, karena prestasi mereka dalam pembangunan ekonomi. Namun, berbagai paradoks pembangunan amat kentara. Pembangunan yang berpeluh keringat tetap saja menyisakan sebagian masyarakat yang masih berkubang dalam himpitan ekonomi. Lokomotif pembangunan ekonomi yang telah dijalankan hanya mengangkut gerbong yang berisi sebagian kecil kelompok masyarakat. Sedangkan kelompok mayoritas penumpang tak terangkut.

Sektor informal merupakan potret dari kelompok yang tak terangkut. Para terdidik yang menikmati kursi kekuasaan seakan memandang sebelah mata terhadap sektor ini. Padahal, stabilitas yang diinginkan oleh para penguasa secara tidak langsung dibantu oleh pertumbuhan sektor informal yang mampu menampung para penganggur yang tidak terserap oleh sektor formal. Bantuan dan perhatian terhadap kelompok marginal ini seakan sulit diharapkan dari para penguasa.

Dalam memahami (tidak hanya memandang) sektor informal tidak hanya menjadi pekerjaan rumah pemerintah kota (pemkot) dengan retribusinya. Tetapi jauh lebih mendasar adalah landasan yang paradigmatik dalam menyelesaikannya. Langkah yang seharusnya ditempuh bukan dengan penyelesaian bersifat makro yang sebatas berniat menghapus gejala luar dari gejala informalisasi dan marjinalisasi ekonomi tetapi terletak pada sistem formal ekonomi dan politik secara makro.[49]

Karena kelemahan ekonomi yang melekat di sektor informal, mereka pun dianggap apatis. Dalam proses bargaining politik dalam penetuan kebijakan mereka lebih sering menjadi objek dan dimanfaatkan ketimbang ikut serta di dalamnya. Tak heran, berbagai program untuk menghabisi aset-aset mereka oleh pemkot mendapat perlawanan yang tak berarti. Justru rangkaian program yang menggusur ekonomi informal tanpa alternatif yang memadai adalah program yang menyesatkan karena yang diatasi bukan akar masalahnya tetapi hanya gejala dari permukaan dari sistem ekonomi yang dualistik.[50]

Pilihan kebijaksanaan dengan berbagai instrumen ekonomi uang hanya menyentuh dan semakin memanjakan kelompok ekonomi modern. Pertimbangan dengan hanya melihat peubah investasi, moneter, fiskal, harga subsidi mengacu pada bekerjanya sektor ekonomi modern.[51] Pertambahan investasi yang diharapkan mampu mengurangi jumlah pengangguran cukup signifikan ternyata kurang efektif. Sebab, investasi dialokasikan untuk industri yang hanya menembak pasar internasional, juga yang dapat menyerap barang setengah jadi, barang jadi, teknologi dan mesin-mesin produk industri luar negeri yang haus pasar. Sulit dipungkiri, strategi tersebut mampu menggenjot tingkat PDB dan pendapatan per

kapita namun tetap saja sektor tradisional/informal kontribusinya di pandang sebelah mata. Bahkan promosi investasi dan industri asing dalam taraf tertentu malah dapat mendesak lapangan kerja dan pasar yang semula menjadi layanan sektor tradisional/informal.[52]

Sistem ekonomi uang dan corak ekonomi subsisten yang berdampingan tentu tidak akan terjadi percakapan yang egaliter dan seimbang. Ruang eksploitasi menjadi tidak mudah untuk dipersempit. Kenyataan historis dan empiris ini memang sulit dihilangkan. Maka, kehadiran sektor informal dalam tubuh perekonomian Indonesia menjadi sah adanya dan inheren.

Sektor informal sendiri pun semakin berkembang dengan menunjukkan kontribusi yang tidak dapat disepelekan dalam perekonomian. Beberapa peran vital dimainkan dengan cantik, seperti kuatnya daya serap tenaga kerja, menstimulus daya beli, memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau bahkan menjadi pemasar-pemasar yang handal bagi produk-produk dari perusahaan raksasa. Oleh sebab itu, jika sektor ini tidak diiringi situasi yang kondusif peran-peran yang telah dijalankan menjadi mandul.

Sektor informal ini menjadi ciri dari kelompok yang mandiri secara ekonomi. Walaupun, sekilas terlihat kecil dan tak bertenaga namun kesan berwibawa cukup kuat terasa, sebab tidak bergantung payung pemerintah dan tidak mengemis dana luar negeri. Dengan fleksibilitas, kreativitas didukung *network* yang kuat diantara para pemain, sektor ini mampu menangkap peluang-peluang pasar sebagai sumber penghidupannya.

Perkembangan sektor informal pun bukan mustahil akan melangkahkan kakinya ke sektor formal. Sifat kompetitif yang amat kental akan menempa mereka menjadi *enterpreneur* yang handal. Walaupun masih sederhana, secara bertahap diharapkan mampu membenahi manajemen dan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan/diperdagangkan agar usahanya berkesinambungan.

CATATAN AKHIR: :

1. Hal Hill, Ekonomi Indonesia terj. Tri Wibowo Budi Santoso & Hadi Susilo (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), hal. 4-5.
2. Ibid., hal. 1.
3. Sang Dermawan Berwajah Ganda? TEMPO, 7 Oktober 2001.
4. Emil Salim, dalam Mohamad Ikhsan, et. all. (ed.), 80 Tahun Mohamad Sadli Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru (Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS, 2002), hal. 4-6.
5. Nono Anwar Makarim, Lima Pesan Sadli (Atau Baca Buku di Tepi Kolam), dalam Mohamad Ikhsan, et.al. (ed.), op. cit., hal. 24.
6. Sang Dermawan Berwajah Ganda, *loc.cit.*
7. Muhadi Sugiono, Kritik Antonio Gramci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 103. Lihat pula Kevin P. Clements, Teori Pembangunan dari Kiri ke Kanan (terj). Endi Haryono (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 25. Koreksi pula pada W.W. Rostow,Lima Tahap Pertumbuhan Masyarakat: Sebuah Pengantar, dalam Amir Effendi Siregar (ed.), Arus Pemikiran Ekonomi Politik Esai-esai Terpilih (Yogyakarta: PT Tiana Wacana, 1991), hal. 1-13. Pencangkokan pemikiran Rostow ke dalam tataran praksis pembangunan perekonomian di Indonesia juga dapat dibaca pada Sjahrir, Analisis Ekonomi Indonesia (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 14-15.
8. Ibid, hal.229.
9. Gunawan Sumodiningrat, dalam makalahnya Sektor Informal Sebagai Lapangan Pekerjaan Transisi Menuju Periode Ekonomi Lepas Landas, yang dipresentasikan pada Seminar Mobilitas Penduduk dan Sektor Informal di Indonesia , yang diselenggarakan oleh Pusat Antar Universitas (PAU) Studi Sosial,

Divisi Demografi Kependudukan UGM,Yogyakarta, 8-9 Februari 1988, hal 51-77.

[10] Paham ini dikenal dalam teori Dorongan Kuat (Big Push Theory) yang dikonstruksikan Prof. N. Rosenstain-Roden. Tesis ini tidak percaya dengan cara kerja Sedikit demi sedikit yang akan menjadi bukit dalam pembangunan. Namun, dibutuhkan jumlah minimum investasi untuk mendorong program pembangunan agar berhasil. Juga dibutuhkan tercapainya ekonomi eksternal yang muncul dari proyek-proyek industri yang beruntun dan secara teknik berkaitan.

[11] Sumodiningrat,op. cit.,hal. 10-11.

[12] Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., Pendekatan Pembangunan terhadap Sistem Politik: Sebuah Ikhtisar, dalam Amir Effendi Siregar (ed.), op. cit., hal. 19.

[13] Franz Magnis-Suseno, Dampak Komunikasi Internasional terhadap Tuntutan Demokratisasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia , dalam Syamsudin Haris & Riza Sihbudi (ed.), Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 82.

[14] Dudley Seers, Arti Pembangunan, dalam Amir Effendi Siregar (ed.), op. cit., hal. 107.

[15] Suatu keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dari sumber daya yang sama dibandingkan dengan sumber daya negara lainnya. Misalnya keunggulan tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan tenaga kerja negara lainnya; keunggulan produk Amerika dibangdingkan dengan produk (yang sama) negara lainnya; dan lain-lain. Konsep ini dicetuskan oleh pemikir klasik, David Ricardo.

[16] M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Pers bekerja sama dengan Tazkia Institute, 2000), hal. 154.

[17] Anne Booth dan Peter McCawley, Penutup: Melihat ke Depan, dalam Anne Booth dan Peter McCawley (ed.), Ekonomi Orde Baru terj. Boediono (Jakarta: LP3ES, 1982), hal. 418-419. Sayang, pandangan futuristik ini toh akhirnya kini tak terbukti.

[18] Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi (Yogyakarta: BPFE, 2000), hal.24.

[19] Ibid.

[20] Edison Hulu, Kekhawatiran di Balik Keajaiban Ekonomi Indonesia, Prisma No. 5, 1997, hal. 27-28. Meskipun demikian, tesis dan hipotesis ini sangat kental akan pemikiran neoliberalisme. Indokator pendukung tesis tersebut antara lain total faktor produktivitas yang lamban, campur tangan pemerintah terhadap mekanisme pasar yang masih kuat, serta sangat lambannya usaha integrasi perekonomian negara terhadap perekonomian dunia. Jika ketiga indikator ini tidak diperbaiki, maka negara Asia Timur termasuk Indonesia yang memiliki keajaiban ekonomi tidak akan bertahan lama. Dengan kata lain, untuk mempertahankan kegemilangan ekonominya, setiap negara harus semakin membuka diri atau menganut neoliberalisme dan mendukung globalisasi.

[21] Indria Samego, Politik Pembangunan Orde Baru: Beberapa Interpretasi Teoritik Mengenai Peran Negara dalam Mengembangkan Perusahaan Nasional, dalam Syamsudin Haris & Riza Sihbudi (ed.), op. cit., hal. 134-137.

[22] Ibid.

[23] Hendi Kariawan, Dinamika Perkembangan Teori Ekonomi dan Implikasinya bagi Indonesia, Prisma No.10 Tahun XV 1986, hal.65-67.

[24] Istilah ini biasanya menggambarkan fungsi bank sentral sebagai banknya bank umum (commercial bank) dalam sumber pengaman terakhir . Misalnya jika bank umum dalam keadaan darurat mengalami kesulitan likuiditas maka bank sentral dapat memberikan bantuan likuiditas. Lihat Nopirin,Ekonomi Moneter, Edisi Ke-4, Cetakan Keenam, 1998, hal.45

[25] ML.Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, terj. Cetakan Ketujuh, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 1999), hal 201-203.

[26] Didik J. Rachbini, Dimensi Ekonomi dan Politik pada Sektor Informal, Prisma, No.5, Mei 1991, hal 5.

[27] Sutjipto Wirosardjono, Pengertian, Batasan dan Masalah Sektor Informal, Prisma, No.3, 1985, hal 3.

[28] Ibid.

[29] Selisih antara total pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk dan biaya masuk dari bahan - bahan mentah, komponen atau jasa-jasa yang dibeli untuk memproduksi produk tersebut. Nilai tambah juga dapat dikatakan nilai yang ditambahkan oleh suatu perusahaan ke bahan-bahan dan jasa-jasa yang dibelinya melalui produksi dan usaha-usaha pemasarannya. Lihat Christopher Pass, et. al., Kamus Lengkap Ekonomi, terj. edisi Kedua, (Jakarta: Erlangga, 1994), hal. 677.

[30] Sumodiningrat, op. cit.,hal.11.

[31] Hidayat, op. cit.,hal.13.

[32] Tulus Tambunan, Perekonomian Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hal.112.

[33] Zein Nasution, Sektor Informal di Perkotaan: Rumusan Permasalahan Sebagai Pra-Hipotesis Pembinaan dalam Seminar Mobilitas Penduduk dan Sektor Informal, Pusat Antar Universitas (PAU)

Studi Sosial UGM Divisi Demografi Kependudukan UGM, Yogyakarta 8-9 Februari 1988.

34 Sensus Penduduk tahun 1971 dan 1980, dalam Zein Nasution, op.cit.,hal.10-11.

35 Untuk setiap Rp1 milyar nilai tambah industri berdasarkan harga konstan tahun 1973. Lihat Sritua Arief, Industrial Restructruring, Technological Development and Implication for Manpower Planning: The Indonesian Case,
dalam RIHED/ARTEP, Manpower Planning in ASEA Countries, Singapore,1985, dalam Zein Nasution, op. cit., hal.10-11.

36 Molo memberikan lima kecenderungan perubahan pola kerja di sektor pertanian akibat modernisasi pertanian. Tengok Marcelinus Molo, Sektor Informal dalam Spektrum Kesempatan Kerja dan Ekonomi Rumah Tangga Pedesaan , Makalah Seminar Mobilitas penduduk dan Sektor Informal di Indonesia , PAU Studi Sosial, Divisi Demografi Kependudukan, UGM, Yogyakarta, 8-9 Februari 1988, hal.2-3, atau simak pula Sjafri Sairin, Beberapa Masalah Derep: Studi Kasus Yogyakarta, Prisma, No.9, 1976, hal.58-67.

37 Molo, ibid., hal.2.

38 World Bank database dalam Tulus Tambunan, op. cit., hal.65.

39 Papola, T.S., Urban Informal Sector in a Developing Economy, Vikas Publishing House PVT, Ltd, New Delhi, 1986 hal.8 dalam Sumodiningrat, op. cit., hal.7.

40 Sumodiningrat, op. cit., hal 8.

41 Aris Ananta dan Prijono Tjiptoherijanto, Sektor Informal: Suatu Tinjauan Ekonomis, Prisma, No.3, 1985, hal.19-20.

42 Salah El Shaks, On City Size And The Contribution ofThe Informal Sector: some hipotheses and research questions , Regional Development Dialogue,5 (2) :67-81 dalam Agus Joko Pitoyo, Pedagang Kaki lima pada Masa Krisis, Jurnal POPULASI, Vol.10, No.2, Tahun 1999, hal. 73-97.

43 Sejak sekelompok peneliti perintis pada tahun 1976-78 yakni Sethuraman (ILO) pemerintah mulai tertarik untuk memberikan perhatian dalam bentuk penelitian, pengembangan dan pembinaan sektor informal. Misalnya menyediakan biaya penelitian atas persetujuan Bappenas yang disalurkan melalui Depnaker dan LIPI pada tahun 1976, 1977 kemudian Lokakarya Nasional tentang Kebijaksanaan terpadu sektor informal oleh Depnaker, Kantor Menneg Ristek, BKKBN, dan Leknas pada bulan Januari 1983 di Jakarta dan kegiatan-kegiatan lainnya, dalam Hidayat, Posisi dan Peranan Strategis Sektor Informal dalam Pembangunan Nasional Indonesia, dalam Seminar Mobilitas Penduduk dan Sektor Informal di Indonesia PAU Studi Sosial
UGM, di UGM 8-9 Februari 1988, hal.4-5.

44 Ibid, hal 7.

45 Ibid, hal. 9.

46 Hidayat, op. cit.,hal.12-13.

47 Cahyono ES., hal. 63-64.

48 Yasinta, Analisis Urbanisasi di Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman, Pedagang Kaki Lima, Jalan Kaliurang dan Jalan Gejayan., skripsi Strata-1, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta, 2003.

49 Rahbini, op. cit., hal 9.

50 Ibid, hal 11.

51 Wirosardjono, op. cit., hal.9.

52 Ibid.
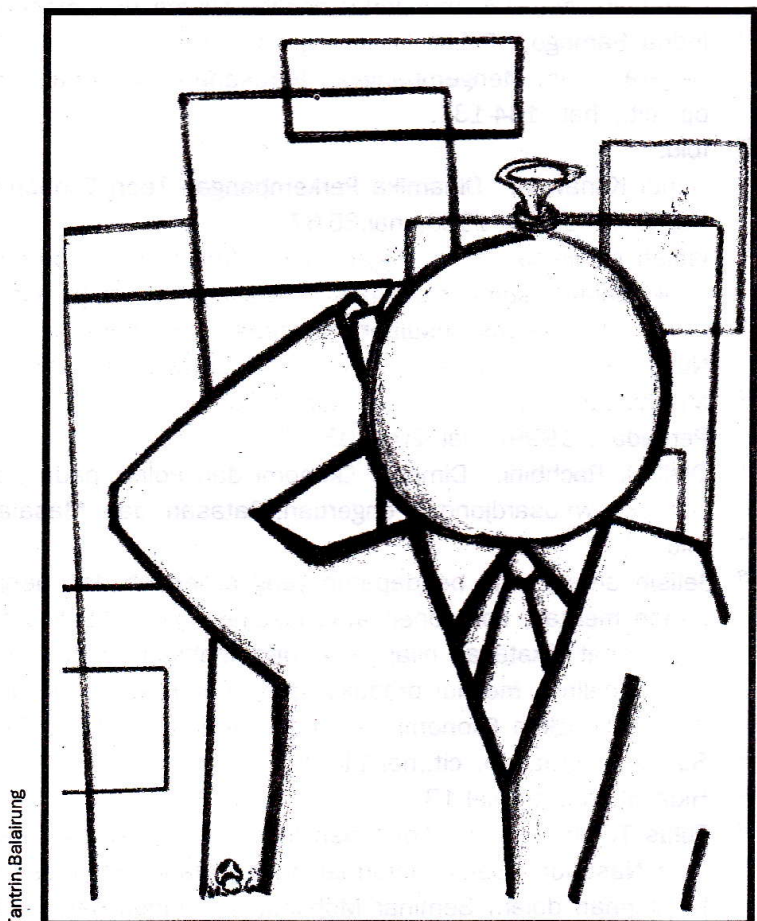
Tantrin.Balairung

“SEMUT MEMBUKA JALAN, GULA DIMAKAN TUAN”:

Informalitas Perekonomian dalam Historiografi Ruang Perkotaan Yogyakarta

YOSHI FAJAR KRESNO MURTI

Bekerja di Yayasan Pondok Rakyat, sebuah LSM yang bergerak di bidang advokasi permukiman rakyat. Tinggal di komunitas Sekolah Malam Terban, lembah sungai Code. Pernah berkuliah di jurusan teknik arsitektur di sebuah perguruan tinggi yang seperti kantor dan domisilinya, berada di

Ihwal pemanfaatan dan konfigurasi ruang dimana berbagai kekuatan politik (makna) dipraktekkan bertautan dengan politik ruang. Di sana terpaparkan kisah-kisah tentang manusia dan ruang yang ditempatinya, termasuk interaksi pelaku profesi sektor informal dengan ruang kota.

Kenyataan itu terjadi persis di depan mata. Wajah kawasan perkotaan di sekitar kita semakin kompleks, dan jalanan tambah kacau. Begitu pula di kota Yogyakarta dan kawasan sekitarnya—ketika ketika krisis ekonomi mulai menggempur negeri ini semenjak tahun 1997—jalan serentak diduduki dan ruang perkotaan diserbu oleh orang-orang dari berbagai penjuru.

Pada waktu itu, secara kasat mata berjalanlah mekanisme yang dianggap berada di luar jalur yang semestinya namun justru menghidupi kota: mekanisme perekonomian informal. Jika seluruh ciri aktivitas di dalamnya digunakan untuk melihat wajah perkotaan, maka hampir seluruh aktivitas perekonomian kota akan dijalankan dan menemui bentuknya dalam ciri-ciri tersebut.

Maka, kategorisasi formal-informal dalam mekanisme itu menjadi kabur. Dalam sektor perdagangan, nalar cara berjualan yang dianggap informal menjadi perpanjangan dari cara formal. Korporasi internasional yang dianggap sebagai sektor formal pun menghalalkan cara-cara informal dalam menggerakkan roda produksinya. Di kawasan perbelanjaan Malioboro, sebagian Pedagang Kaki Lima (PKL) lebih memilih minuman ringan berkarbonasi daripada, taruh amsal, Es Cendol sebagai barang dagangan. Produk yang pertama dipromosikan besar-besaran sehingga citranya lekat di benak konsumen. Risiko kerugian akibat rendahnya penjualan pun bisa ditekan.

Tulisan ini hadir dari titik berangkat tinjauan politik keruangan, masih dalam semangat untuk mencari pemahaman tentang wajah perekonomian (rakyat) Indonesia mutakhir. Kota adalah ruang bertemu, berelasi, dan sekaligus menjadi tempat penyempitan berbagai kepentingan akumulasi kapital di antara penguasa, pemodal, dan masyarakat. Karena di sana kekuatan politik (makna) dipraktekkan, maka banyak makna yang hadir di tempat itu.

Dalam pengertian politik ruang sebagai politik pemaknaan terhadap ruang (perekonomian) perkotaan, tulisan ini merupakan studi awal mengenai jejak-jejak perebutan, penggunaan, dan pemaknaan terhadap ruang perkotaan. Kedudukan penulis sebagai warga ruang kota Yogyakarta, termasuk keterlibatannya bersama para pedagang jalanan dan tukang becak, sangat mempengaruhi tulisan ini.

Perubahan Spasial sebagai Perubahan Cara Hidup

Penelitian Lea Jellinek di Kebon Kacang, Jakarta (1968-1975) menunjukkan transformasi kehidupan sebuah perkampungan ketika terjadi pembangunan kawasan perkotaan dalam bentuk pengembangan jalan.[1] Seiring dengan itu, jenis-jenis pekerjaan seperti pekerja musiman, penjaja makanan, dan penarik becak menjamur bak cendawan di musim hujan. Perubahan spasial (tata ruang) kota—tanda masuknya modernisasi di dalam pembangunan—menghadirkan berbagai cara bagi banyak orang untuk menghadapi tekanan-tekanan perubahan yang menghimpit ruang kehidupannya.

Konteks perubahan spasial memiliki narasi yang berbeda-beda di setiap tempat, namun juga menunjukkan beberapa bentuk yang sama secara keseluruhan. Di Yogyakarta, tahun-tahun pendirian Ambarukmo Palace Hotel (APH) di timur kota diingat-ingat penduduk di kampung-kampung sekitar sebagai titik perubahan kehidupan banyak orang. Ada tiga hal yang dapat dicermati dari pendirian hotel ini. *Pertama,* rujukannya pada sebuah kurun waktu ketika pertumbuhan (baca: pembangunan) kawasan perkotaan mulai menggerakkan dan digerakkan oleh arus urbanisasi, pencari kerja, dan pencari tanah. *Kedua,* posisinya sebagai tanda modernisasi perkotaan melalui pembangunan

yang membutuhkan simbol-simbol identitas. *Ketiga,* momentumnya menjadi gejala awal investasi di bidang properti.[2]

Berdirinya hotel ini menjadi tengara tumbuhnya keramaian di wilayah timur Yogyakarta. Proses pendiriannya memakan waktu yang lama dan mengubah pola-pola kehidupan masyarakat di sekitarnya dengan cepat. Penjaja makanan, pelacur jalanan, dan penjual bahan bangunan marak, sebagaimana halnya dengan munculnya titik pemberhentian angkutan umum yang baru dan berdirinya permukiman di pinggiran sungai. Pola keruangan, jenis pekerjaan, daerah asal penduduk, dan nilai-nilai kehidupan juga bertambah dan berkembang.

Dari kaca mata spasial, fenomena ini menandai banyak digunakannya kosakata "pendatang". Mereka mengisi celah-celah di dalam ruang perkotaan, berbeda dengan *wong asli* yang telah lama tinggal di suatu bagian kota, atau dengan pendatang jenis lain yang memiliki status sosial-ekonomi yang lebih tinggi (pelajar dan mahasiswa, wisatawan, atau pembeli tanah, dll).

Beiringan dengan itu, perubahan spasial juga dipicu dengan pendirian kantong-kantong hiburan di tengah kota, seperti gedung bioskop. Pusat tak lagi berada di wilayah Kraton yang berada di (tengah) kota, namun mulai menyebar. Orang-orang pun pergi ke kota tak hanya untuk mengikuti ritual, namun juga untuk mencari hiburan.

Sebutan *wong ndalan* (orang jalanan) lazim dipakai untuk mengidentifikasi orang-orang yang *keluyuran* di jalanan, terlebih pada malam hari. Jalanan secara spasial menjadi

Abib.Balairung

wilayah "tak bertuan" di luar rumah yang mempunyai stigma yang buruk. Orang-orang yang bekerja di jalanan pun sering mengidentifikasi dirinya dengan sesuatu yang buruk pula. Pedagang jalanan, penarik becak, ataupun sopir angkot tak jarang menyembunyikan identitas pekerjaannya ketika berada di daerah asal, meskipun juga karena merasa pekerjaan jalanan tak memiliki masa depan yang jelas.

Di balik pendirian APH memang ada kisah pembentukan titik-titik keramaian yang diisi oleh pekerja informal yang dipicu dan tumbuh bersamaan dengan perubahan fungsi spasial perkotaan. Tamsil "ada gula ada semut" berlaku sebaliknya. Pengandaian kota gula mengabaikan—bahkan menghilangkan—kisah perjuangan hidup pencari kerja yang datang ke kota sebagai semutnya. Kota adalah lampu gemerlap yang menarik laron pencari kerja, sedangkan kenyataan bahwa laron itu rontok satu demi satu tak dianggap penting, persis seperti lagu "Siapa Suruh Datang Jakarta" yang dulu sempat terkenal. Historiografi perkotaan macam ini memastikan anggapan bahwa rontoknya laron yang disimbolkan dalam bentuk pengusiran dan penggusuran itu sebagai bagian dari kesalahan mereka sendiri.

Dari titik pandang spasial, ada logika ilutif dalam ungkapan ini. Dari studi Kebon Kacang hingga kasus pendirian APH, kesemuanya menunjukkan perubahan fungsi spasial kota sebagai akibat pembangunan yang mengutamakan simbol-simbol modernitas dan implikasinya pada penciptaan pekerja informal. Justru para pekerja ini yang menjadi kunci sebenarnya bagi pendirian simbol-simbol modernitas itu.

Pendirian APH sebagai simbol modernisasi terkait erat dengan konsep kota Yogyakarta yang menjadi bagian dari proyek politik identitas negara. Pada waktu itu, keberadaan gedung tinggi di kota-kota menjadi kebanggaan tersendiri bagi kejayaan negara. Lebih jauh, implikasinya di tingkat lokal adalah keharusan yang ditanggung untuk terus membangun dan memugar fasilitas, serta menambah fungsi kota yang lainnya: jalan, tempat wisata, hingga gedung pemerintahan.

Mekanisme baru hasil dari jalinan kerjasama, jalur distribusi, dan hubungan kekerabatan primordialistis diantara pekerja sektor informal selalu membayangi mekanisme perekonomian "resmi" yang diciptakan oleh pemerintah lewat perencanaan kota. Pendirian APH menunjukkan pergeseran sosial dan spasial wilayah Kraton sebagai sentrum yang menyebar. Harus diakui, pekerja informal ikut menyumbangkan peran yang tak kecil.

Keramaian kawasan di sekitar APH yang terjadi lewat aktivitas informal di sekitarnya menegaskan identitas dan keberadaan APH sebagai simbol modernitas. Kawasan ini menjadi sebuah ruang yang hidup dan secara otomatis terkait dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Mekanisme informal membuat jalinan ini bisa terjadi.

mBabat Alas: Membuka Ilusi Historiografi Ruang Perkotaan

Ceritera ruang perkotaan adalah ceritera tentang jalinan aktivitas dan kehidupan informal. Perubahan fungsi (tata) ruang perkotaan sebenarnya tercipta dan diciptakan oleh aktivitas informal, walaupun perubahan tersebut dibayangkan, direncanakan, dan dicoba dilaksanakan "dengan sebaik-baiknya" oleh pemerintah kota (pemkot).

Malioboro tahun '70-an menjadi buktinya. Salah satu pusat perdagangan dan keramaian di kota ini masih sepi. Beberapa bagiannya ditumbuhi semak belukar dan disesaki sampah yang menggunung. Saat itu beberapa orang dari kab. Gunung Kidul, D.I.Y., datang dan menduduki ruang-ruang yang belum mendapat terjangkau lampu penerangan jalan itu—termasuk tempat yang dianggap angker—dengan bermodalkan kenekadan. Mereka membersihkan semak-semak, membuat penerangan, dan mendirikan tenda untuk berjualan (*mbabat alas*).

Resiko bukannya tak ada. Bahaya konflik dari aparat pemerintah dan preman terus mengancam pedagang sektor informal itu. Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, akhirnya di tempat itu tercipta keramaian. Sebagai agen-agennya sebut saja sais andong, pedagang pasar, dan wisatawan. Inilah hasil jalinan aktivitas perekonomian yang alamiah muncul.

Narasi *mbabat alas* (membuka lahan baru) menyertakan kisah perjuangan pencari sekaligus pencipta lahan pekerjaan di kota. Ritus ini memunculkan sentrum-sentrum aktivitas perekonomian secara informal dan berimplikasi besar terhadap aktivitas sejenis di sekitarnya dan di seluruh kota. Tapi kini; para pedagang jalanan itu, para pencipta keramaian itu, para pembuka pasar itu; semakin terdesak ke bagian yang lebih dalam dan jauh dari tempat semula. Lahan-lahan yang mereka rintis kini menjadi lokasi bisnis yang strategis sehingga menjadi incaran pemilik modal besar. Dengan mengantongi ijin dan label "resmi" dari pemerintah, mereka masuk dan merebut pasar yang sudah terbentuk dari jalinan sejarah yang panjang.

Historiografi spasial perkotaan telah menghilangkan jejak pencari kerja dalam pembentukan kota. Peran jalinan perekonomian informal yang sebenarnya memberikan kebesaran makna kepada ruang-ruang (ekonomi) perkotaan terabaikan, dan yang tercatat hanya keberhasilan pembangunan dan penataan kota. Di Indonesia,

banyak pemkot dinilai sukses dari keberhasilannya menciptakan dan menjaga kelangsungan penataan kota sesuai fungsi yang ditetapkan. Caranya, bisa dengan mengusir pelaku perekonomian sektor informal dan menggusur permukiman kumuh.

Konsep penataan kawasan perkotaan tak pernah mengantisipasi masuknya pencari kerja dari luar daerah, kendati mereka akan menciptakan mekanisme perekonomiannya sendiri tanpa banyak campur tangan dari pemerintah. Konsep ini pun tak sekali-kali menganggap mereka sebagai salah satu agen penentu fungsi ruang perkotaan. Tanpa pernah disejahterakan sebagaimana layaknya warga kota, mereka dijadikan sapi perahan; ujung tombak perintisan fungsi-fungsi tertentu untuk penataan.

Momen pemindahan pasar dapat dijadikan buktinya. Hampir setiap orang penjual di pasar (seperti Beringharjo di Yogyakarta) mempunyai cerita tentang perpindahan tempat berjualan sebagai akibat kebijakan kota. Perkembangan pasar memang sering tak cukup diantisipasi. Atas nama estetika dan fungsi ruang perkotaan, pemkot memindah beberapa pasar di wilayah kota ke tempat-tempat yang akan ditumbuhkan walaupun kerap tak sesuai dengan fungsi kota. Penghuni pasar yang dipindahkan harus (kembali) *mbabat alas;* menumbuhkan tingkat perekonomian sebuah wilayah. Saat wilayah tersebut sudah berkembang, bukan tak mungkin pem-*mbabat alas* ini lagi–lagi disingkirkan. Mereka ujung tombak pertumbuhan dan anak tiri pembangunan secara sekaligus.

frustrasi. Struktur yang tak berpihak pada sektor informal semestinya dibongkar. Namun, walau begitu, kita semestinya juga menakar etos kultural demi menopang perubahan dalam dimensi st

Politik Identitas dan Penguasaan Makna Ruang Kota yang Rapuh

Kasus penggusuran dan pengusiran sejak zaman Orde Baru membuat negara berhadap-hadapan dengan kaum migran pencari kerja. Pendatang kebanyakan memang menjalankan mekanisme perekonomian di luar rencana "resmi" yang direstui pemkot. Terbatas dan mahalnya tempat tinggal memaksa tak sedikit yang tinggal dengan liar. Dengan legitimasi keresmiannya, pemkot mengklaim sebagai pembuat rencana, sedangkan penghuni permukiman liar dianggap berada di luar rencana. Vonis segera dijatuhkan; pemkot menganggap penggusuran dan pengusiran sebagai metode yang layak, meski sebenarnya penghuni permukiman liar juga merupakan salah satu bagian dari "masyarakat" kota. Logika apakah yang berada di balik itu?

Kebijakan tata ruang kota sangat terkait dengan persoalan pilihan politik identitas. Sebagai sebuah strategi pelaksanaan program pembangunan, rezim Orde Baru sadar pentingnya pembentukan identitas kota. "Yogyakarta Berhati Nyaman" bukan slogan yang jatuh begitu saja dari langit, melainkan buah konstruksi politik makna yang sangat mempengaruhi cara pandang dalam perencanaan dan perlakuan (tata) ruang kota.

Walaupun dalam kenyataannya dipersepsi dan diterjemahkan dengan berbeda-beda oleh banyak orang, identifikasi ini seringkali menjadi legitimasi etis bagi penguasa yang berebut ruang kota. Atas nama "Berhati Nyaman" (Bersih, Sehat, Aman, dan Nyaman), pembangunan kota Yogyakarta dijalankan. Segala "ketidaknyamanan" mau tak mau disingkirkan, sedangkan pertanyaan, "kenyamanan

menurut siapa?" tak pernah dijelaskan. Kota-kota lain di Indonesia pun direncanakan dalam politik identitas yang serupa.

Reformasi dan pergantian kekuasaan tak menghapus logika politik identitas dalam perencanaan tata ruang kota. Pemberlakukan UU No.22/1999 tentang Otonomi Daerah malah membuat Yogyakarta makin sah mempercantik diri, siap-siap "dijual". Beberapa keterputusan ekonomi dengan pusat sebagai buah otonomi daerah memaksa pemerintah daerah melakukan diferensiasi untuk menarik masuknya kapital. Dalam konteks provinsional, dipasang juga slogan "*Jogja Never Ending Asia*" sebagai penyiasatan terhadap semakin terbukanya kompetisi pariwisata di tingkat internasional.

Dengan citra identifikasi diri kota Yogyakarta sebagai kota yang aman, nyaman, bahkan religius; kota ini dikemas layaknya barang dagangan. Berbagai acara diselenggarakan, dan ruang fisik kota dibenahi: lampu-lampu jalanan kian gemerlapan; taman dan trotoar diperbaiki dan direnovasi.

Tapi logika itu malah membuat perencanaan kota Yogyakarta semakin kabur. Perencanaan kota bukan berdasar kepada evaluasi persoalan-persoalan masa kini dan imajinasi ke masa depan, tapi lahir dari proses pengingatan model-model sebelumnya yang mengejawantah dalam slogan-slogan pembangunan kota. "Yogyakarta Berhati Nyaman" lebih dipahami dalam konteks pendirian hotel untuk menampung wisatawan, dan lalu cara menarik pengunjung datang ke sana. Logika perencanaan kota dihadir-hadirkan melalui politik identitas yang oleh para penguasa bisa dijadikan sebagai legitimasi penguasaan makna ruang kota.

Nyatanya, politik identitas memberikan kontribusi besar terhadap pendekatan perencanaan tata ruang kota yang selama ini dikenal: ilegal-legal, atau formal-nonformal. Perihal kejelasan kriteria legalitas dan ilegalitas, itu soal lain. Belum ada konsensus yang mantap dan memuaskan semua pihak. Saat pedagang menggunakan ruang publik seperti taman kota untuk aktivitas perdagangan (terlarang secara hukum), mereka dianggap sebagai penyebab kesemrawutan dan ketidaktertiban. Namun, ketika taman itu dipakai oleh produsen rokok untuk menggelar pertunjukan musik, perbuatan ini malah dipuji karena menambah pemasukan daerah dan promosi wilayah. Mana yang benar?

Penguasaan makna ruang perkotaan dengan pendekatan konsep legal–ilegal yang rapuh harus berhadapan dengan pemaknaan lain dalam ruang kota yang sama. Ibarat pepatah "guru kencing berdiri, murid kencing berlari", segala macam penyimpangan dalam tata ruang kota dimulai dari atas.

Sekaten: Ruang Negosiasi Kota yang Tak Pernah Selesai

Tak afdol rasanya berwisata ke Yogyakarta tanpa menikmati riuhnya *Sekaten*. Perayaan ini digelar Kraton untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW (Maulid Nabi), sebuah hari besar dalam agama Islam yang banyak dianut penduduk setempat. Sebulan suntuk, lapangan Alun-Alun Utara kebanjiran orang yang haus hiburan dan ingin berbelanja di pasar malam.

Diam-diam, *Sekaten* merupakan ruang praktek berbagai kepentingan. Perencana kota senang karena peristiwa ini mendukung citra Yogyakarta, sedangkan pemkot panen pemasukan dari pasar malam. Kraton bisa menghidup-hidupkan kejayaan masa lalu melalui sisa-sisa ritual ini, sementara sebagian masyarakat menjadikannya sebagai peluang emas untuk ikut mengais remah-remah kue kapital.

Citra *Sekaten* tak betul-betul tradisional dan eksotis sebagaimana dibayangkan perencana kota dalam kerangka politik identitas. Pengunjungnya justru banyak berasal dari luar kota; setidaknya penghuni perkampungan pinggiran. Apalagi, nyatanya di dalam momen ini segala ilegalitas bisa dibelokkan dan dipersepsikan secara berbeda oleh masing-masing pihak.

Pedagang jalanan bebas berjualan tanpa batas waktu dan tempat seperti yang ditetapkan pemkot. Mereka menyerbu dalam jumlah yang lebih banyak, menduduki setiap meter ruang yang kosong, menempatkan gerobak jualan sepanjang waktu, mendirikan tenda sesuai selera masing-masing, dan memasang papan nama seenaknya.

Warga yang tinggal di sekitar lokasi juga mendapat cipratan keberkahan. Para penganggur membuka jasa parkir dengan menguasai badan jalan dan halaman rumah tetangga serta membuat karcis parkir sendiri; melebihi kekuasaan pemkot sebagai pihak penarik retribusi parkir yang resmi.

Turut beraksi pula abdi dalem (semacam karyawan) Kraton yang menyambi menjual karcis bersama para pemalsu karcis, seperti halnya dengan penjudi dan penjual kupon judi, pengemis dan pencopet, pelacur perempuan dan waria, penjaga keamanan-cum-preman, dan penjual barang-barang palsu dan terlarang. Di luar Sekaten, mereka dianggap ilegal dan terkadang dirazia.

Sekaten adalah potret ruang perekonomian kota yang diwarnai dan dihidupkan oleh aktivitas masyarakat kebanyakan, sekaligus gambaran penerjemahan mereka terhadap politik identitas kota. Di sisi lain, perayaan ini sekaligus menunjukkan pemahaman yang rapuh tentang kesepakatan terhadap konsep legal-ilegal, sehingga mudah diplesetkan dalam ruang negosiasi yang sangat longgar. Kekuasaan pun

sangat mungkin berada di tangan pemilik modal yang dapat membeli keputusan, atau pada pemegang pemilik kekuatan (kekerasan) yang dapat memaksakan keputusan. Bisa jadi, jalinan keduanya.

Ruang Kekerasan yang Tiba-Tiba dan Kebijakan yang Tambal Sulam

Di tengah alotnya negosiasi ruang kota, berbagai kepentingan politik dipraktekkan dalam jalurnya sendiri-sendiri dan menciptakan jalur kehidupannya sendiri. Ketika terjadi persinggungan kepentingan antarpihak, kekerasan sering menjadi jawaban. Bila negara lemah seperti akhir-akhir ini, konflik perebutan ruang kota (penggusuran) menjadi bersifat sporadis, kontekstual, dan bervariasi. Lain dengan masa Orde Baru, kala negara masih kuat dan pemerintah daerah berlomba-lomba melakukan penertiban.

Peta konflik itu kini semakin kompleks. Pemkot sering tak satu suara, terlebih dengan massa rakyat. Dalam situasi demikian, para penengah (kebanyakan preman) tampil menjadi perantara. Studi Henk Schulte Nordholt menunjukkan, sejak zaman kolonial orang-orang tengah (*middleground*) tampil sebagai perantara pemerintah kolonial dan masyarakat desa. Dengan kedudukan yang dapat bergerak bebas, para preman bisa mengambil keuntungan dari kedua belah pihak. Seluruh tindakannya murni dilandasi oleh kepentingan pribadi.[3]

Dalam kasus perebutan ruang kota, negara via pemkot sering menggunakan preman untuk mengontrol aktivitas perekonomian tak resmi, misalnya pengorganisasian. Dalam beberapa kasus pada masa Orde Baru, pola seperti ini efektif untuk memelihara ketertiban, mengeruk kapital, dan memperoleh dukungan massa. Rezim Soeharto sukses baik secara organisasional maupun dalam menanamkan ketergantungan pada diri massa rakyat kota yang bekerja di jalur tak resmi. Melalui kader partai, organisasi afiliasi dan organisasi profesi informal, mereka mampu menggalang dukungan massa sekaligus mendapatkan ruang kontrol yang hegemonik. Untuk bisa masuk dan melakukan pengorganisasian di sana, memang diperlukan dana dan SDM yang tangguh secara fisik—preman tentu masuk di dalamnya.

Lain dulu, lain sekarang. Pedagang jalanan di Malioboro Selatan mampu menekan pemkot untuk mengeluarkan dana penyediaan sarana dan prasarana di tempat mereka yang baru. Sebelumnya semenjak krisis ekonomi pada tahun 1998, mereka menempati daerah terlarang untuk kegiatan jual-beli. Konflik diantara kedua belah pihak tak pernah selesai. Hingga pada awal tahun 2003 ini, saat para pedagang didampingi oleh Gun Jack, tokoh masyarakat yang akrab dengan kalangan bawah tanah.

Rumit benar peta konflik perebutan ruang perkotaan Yogyakarta. Memang fekuensi kekerasan negara di waktu-waktu yang lalu, seperti penyitaan alat, pengangkutan gerobak, sampai pembakaran di lokasi, sudah menurun. Tapi wajah kekerasan itu tetap ada dan beralih wujud menjadi preman. Inilah potret narasi kebangkrutan negara yang terpecah-pecah dalam beragam kekuatan politik dan dimanfaatkan oleh orang-orang tengah. Mereka tak hanya kawin dengan institusi negara, namun telah melahirkan anak-anaknya dalam masyarakat kota.

Meski begitu sempit, ruang negosiasi tata ruang perkotaan bukan hanya melahirkan dan memperkuat nalar premanisme, tapi juga membawa kepada pemahaman tentang fenomena kota yang tiba-tiba dan membuat tergagap-gagap. Tindakan baru diambil sesudah peristiwa terjadi (*post factum*), sehingga fenomena perkotaan menjadi fenomena pengklaiman. Sawah diklaim menjadi pertokoan dan perumahan, dan kota diklaim sebagai simbol identitas tertentu.

Proses pengklaiman ini hampir tak pernah disosialisasikan. Tiba-tiba saja sebuah pusat perbelanjaan dibangun di tepi jalan besar. Banyak orang yang tak pernah tahu proses pergantian kepemilikan lahan, sementara pergantian itu sering diikuti dengan pergantian fungsi yang mempengaruhi kehidupan orang banyak. Tak heran jika muncul pengklaiman terhadap ruang publik perkotaan, terutama oleh orang-orang tanpa akses ke ruang kota. Tiba-tiba trotoar dan jalan dipenuhi pedagang, perempatan jalan dibanjiri pengemis, dan rumah-rumah didatangi tenaga penjualan partikelir (*sales*).

Di tingkat pengambilan keputusan, kegagapan pemkot tergambarkan dalam mengikuti perubahan fisik dan non-fisik yang begitu cepat membuahkan kebijakan tambal-sulam. Keputusan politik negara tak pernah menyentuh permasalahan sebenarnya yang menyangkut kepentingan beragam pihak. Mereka sering kehilangan pengetahuan dan mengalami disorientasi. Kebijakan yang diputuskan hanya mengobati salah satu dari sekian persoalan kota, dan selebihnya muncul "penyakit" lain yang semakin akut.

Pemindahan pasar jalanan ke lahan yang baru lebih ditujukan untuk memenuhi legitimasi estetika kota dan penumbuhan wilayah baru. Kebijakan ini diambil tanpa melihat persoalan secara komperensif; tanpa dukungan perangkat aturan, dilaksanakan tanpa koordinasi, prosesnya birokratis, dll.

Hajaran krisis ekonomi dan pergolakan pergantian rezim seharusnya memberikan pelajaran kepada kita. Apa-apa yang dianggap informal dan ilegal nyata-nyatanya menjadi mekanisme yang berjalan dan menggerakkan

dinamika kehidupan banyak orang di negeri ini. Dengan pengakuan itu, perlu perubahan besar-besaran pada cara pandang dan praktek politik yang selama ini digunakan dan dijalankan, termasuk dalam konteks sejarah ruang kota.

CATATAN AKHIR:

1. Lea Jellinek, Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta (Jakarta: LP3ES, 1994).
2. Yoshi Fajar Kresno Murti, Akses ke Lahan Kota, Majalah Warta Kampung, Edisi 10, 2003, hal. 11.
3. Lihat, Henk Schulte Nordhold. Kriminalitas, Modernitas, dan Identitas dalam Sejarah Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
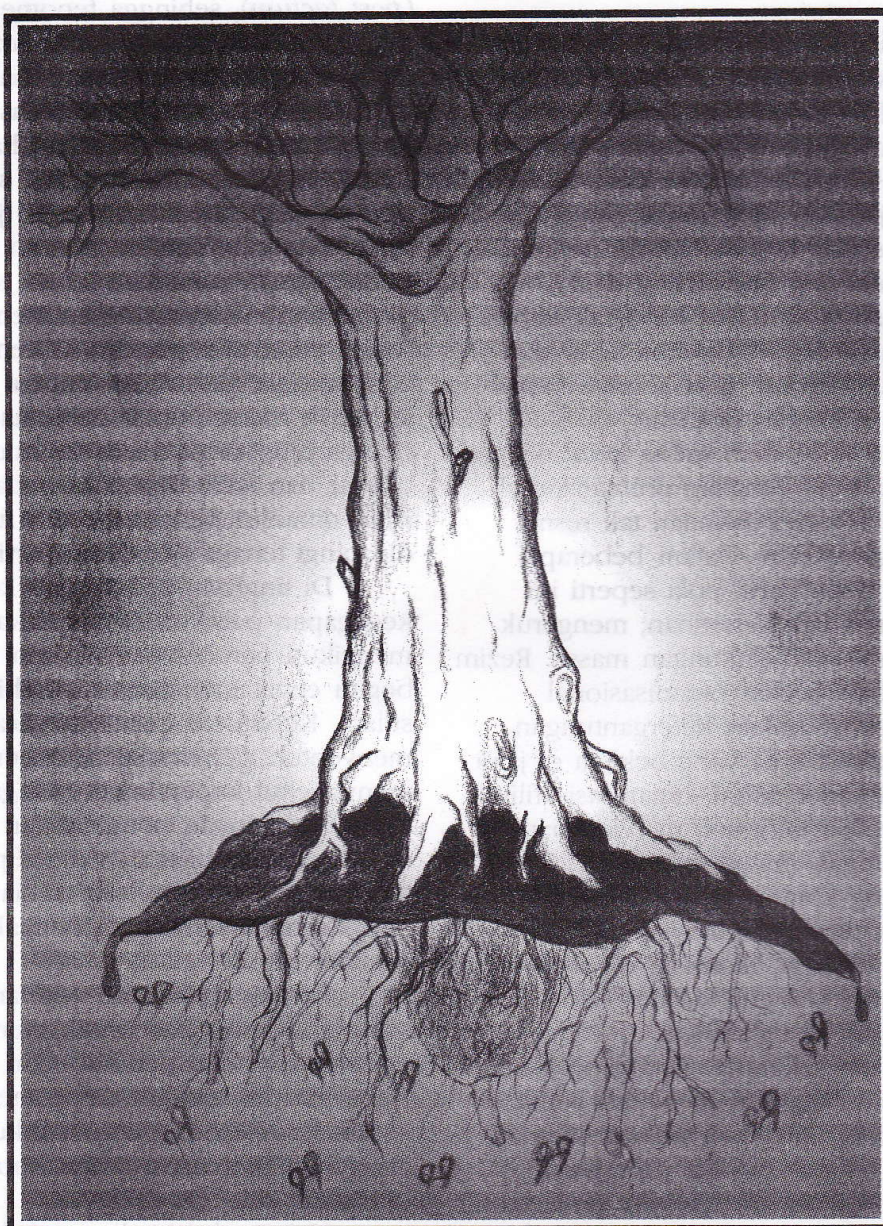
Asa.Balairung

MUBYARTO

ILMU EKONOMI YANG KITA AJARKAN KELIRU

Boleh jadi namanya tak setenar Sri Mulyani Indrawati, Chatib Basri atau ekonom-ekonom selebritis lain yang banyak bermunculan seiring dengan krisis yang mendera bangsa ini. Namun siapa sangka kalau laki-laki ini adalah sosok yang penuh kontroversial dalam jagad ekonomi Indonesia. Komentar-komentarnya memang jarang dikutip media massa, meski sebenarnya ia punya segudang obsesi dan cita-cita terhadap dunia ekonomi Indonesia.

Bermula diawal tahun 80-an, pendapatnya tentang Ilmu Ekonomi Pancasila memancing polemik soal paradigma dan epistemologi ilmu ekonomi Indonesia dengan Arief Budiman, seorang yang dikenal amat setia dengan sosialisme. Tak urung gagasannya tersebut membuat ia dicap ekonom yang ngawur karena pikiran-pikirannya yang normatif. Tak Cuma itu, ia pun dituduh punya maksud politis dengan konsep Ekonomi Pancasilanya sampai-sampai Presiden Soeharto, kala itu, ikut mengomentari perihal gagasannya tersebut.

Seperti tak kenal lelah, di tahun 1997 ia kembali terlibat polemik. Kali ini dengan Kwik Kian Gie. Jika dulu ia harus berhadapan dengan Arief Budiman yang sosialis maka kini ia harus meladeni seorang ekonom yang percaya dengan ekonomi pasar. Lengkap sudah "musuh-musuhnya", meski diserang oleh banyak pihak, secara meyakinkan ia tetap berpendapat "kapitalisme dan sosialisme sama-sama tidak dapat dipercaya".

Kini, di jaman yang acap disebut era reformasi ayah berputra empat ini dengan cukup leluasa mengembangkan gagasannya tersebut tanpa harus takut dituduh macam-macam. Disaat sebagian orang merasa alergi mendengar kata Pancasila, Ia, sebaliknya malah semakin percaya diri. Ide-ide yang dulunya dianggap sepi oleh banyak pengamat, kini ia realisasikan dengan mendirikan Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP). Disitu Ia mengomandoi sejumlah ekonom muda untuk proyek Teori Ekonomi Pancasilanya. Selain untuk penebusan dosa, katanya.

Tak hanya itu, seakan ingin menjawab keraguan sebagian orang, ia lantas menggandeng seorang ekonom Amerika Daniel W. Bromley untuk menulis sebuah buku berjudul "A Development Alternative for Indonesia". Masih dengan penuh yakin ia menulis bahwa Ekonomi Pancasilalah yang sesuai dengan Indonesia.

Tidak berhenti disitu,di tahun 2001 pada saat proses pembahasan amandemen pasal 33 ia menyatakan mengundurkan diri dari Tim Ahli Panitia *Ad Hoc* Badan Pekerja MPR. Yang jadi pangkal soal adalah penghapusan asas kekeluargaan yang ia rasa sudah mengkhianati ideologi bangsa.

Begitulah, meski sudah pensiun sebagai guru besar semangatnya tak menyurut. Sebuah perbincangan yang bertenaga di kantornya membuktikan. Tiga jam lebih ia luangkan untuk berbincang dengan BALAIRUNG. Berikut petikannya:

"...saya merasa berdosa karena telah mengajarkan ilmu ekonomi yang keliru kepada mahasiswa."

Sebenarnya, bagaimana konsep Ekonomi Pancasila yang sering Anda tawarkan itu?

Ekonomi Pancasila itu ekonomi pasar yang mengacu pada setiap sila Pancasila. Kalau kita jabarkan sila-sila Pancasila, sila *ketuhanan yang maha esa* itu artinya ekonomi harus mendasarkan diri pada moral, karena Tuhan-lah sesungguhnya yang menjadi pemilik dan penguasa atas semua ini. Kedua, *kemanusiaan yang adil dan beradab*, artinya ekonomi itu harus bersifat manusiawi dan adil, menganggap sama semua manusia, satu dengan yang lain tidak boleh ada yang mempunyai kedudukan atau hak yang lebih tinggi. Lalu *persatuan Indonesia*, ini adalah bentuk nasionalisme ekonomi, bahwa setiap kebijakan harus sejalan dengan nafas nasionalisme. Contohnya adalah ketika kita memutuskan cerai dengan IMF (International Monetary Fund—*Red.*), itu sebenarnya menguntungkan ekonomi Indonesia. Terus sila keempat, *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*, ini adalah prinsip demokrasi ekonomi, bahwa setiap orang, meski dia itu miskin ataupun lemah, tetap harus diikutsertakan dalam tiap pembuatan kebijakan. Lalu yang terakhir, *keadilan sosial*, ini sudah jelas yang dituju.

Jadi, kalau lima sila itu kita peras secara analitis, sila pertama dan kedua itu menjadi dasarnya, yaitu moral dan kemanusiaan; sila tiga dan empat itu caranya, berupa nasionalisme yang demokratis; lalu sila kelima itu adalah tujuannya, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persis seperti cerita *tata, titi, tentrem, kerta raharja*, benar-benar adil dan makmur.

Apa yang selama ini mendorong Anda begitu gigih untuk memperjuangkan Ekonomi Pancasila?

Waktu pulang dari Amerika saya yakin, saya merasa berdosa karena telah mengajarkan ilmu ekonomi yang keliru kepada mahasiswa. Mahasiswa saya diajari ilmu ekonomi yang bukan ekonomi Indonesia, tapi ilmu ekonomi Amerika. Kalau diklasifikasikan, dosanya itu saya pisahkan menjadi tiga. *Dosa pertama*, ekonomi yang kita ajarkan itu selalu mengacu pada buku Adam Smith, *Wealth of Nations* (*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, terbit pada 1776—*Red.*). Padahal dalam bukunya yang pertama, *The Theory of Moral Sentiments*, yang ditulis 17 tahun sebelumnya (1759—*Red.*), berbeda sekali isinya. Dalam buku pertama, Smith mengatakan bahwa manusia adalah *homo socius*, sedangkan pada buku kedua ia menulis bahwa manusia adalah *homo economicus*. *Nah*, yang diajarkan pada mahasiswa kita adalah bahwa manusia itu hanya *homo economicus*. Ini 'kan dosa. Sehingga semua mahasiswa ekonomi kemudian mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang rasional, padahal tidak! Itu hanya di buku kedua Smith, sedangkan buku pertama mengajarkan bahwa manusia adalah *homo socius*, yang hidup bersama, yang mementingkan moral, tidak mengejar kepentingan ekonomi semata, tidak *selfish*. Jadi, seharusnya dua buku itu diajarkan secara bersama, bahwa manusia adalah *homo socius* dan *homo economicus*, tidak seperti sekarang ini yang diajarkan hanya buku kedua.

Kemudian *dosa kedua* adalah pembedaan ilmu ekonomi dalam dua bentuk, yaitu ekonomi normatif dan ekonomi positif. *Nah*, yang kita ajarkan selama ini adalah ilmu ekonomi yang positif. Jadi yang normatif, yang *das sollen* itu *nggak* perlu. Persoalannya, yang positif (*das sein*) dalam buku-buku ekonomi Amerika itu ketika diterapkan di sini tidak lagi *das sein*, tapi *das sollen*. Artinya, harus dilihat dulu apakah contoh-contoh dari buku Amerika itu cocok untuk diterapkan di Indonesia atau tidak. Jadi, *das sein* itu harus
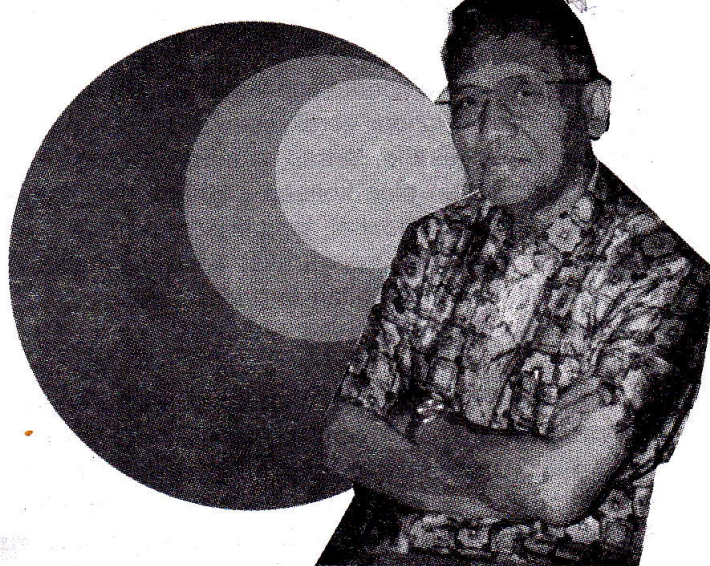
disesuaikan dengan kondisi Indonesia lewat penelitian-penelitian. Sehingga, sebenarnya ekonomi positif dengan ekonomi normatif itu sudah tidak perlu lagi dibedakan, karena pada akhirnya ilmu itu harus disesuaikan dengan kondisi riil masyarakatnya. Makanya 62% mahasiswa Harvard mengatakan bahwa perdebatan positif dan normatif itu tidak perlu lagi dilakukan. Lha, kok kita malah masih membeda-bedakannya?!

Lalu *dosa ketiga*, guru-guru Indonesia yang pulang dari luar negeri kebanyakan hanya mengajar secara deduktif, bersifat *text book*, sedangkan metode induktif tidak pernah dilaksanakan. Sehingga, banyak hal yang harus dirombak dalam buku dan pengajaran ekonomi kita. Seperti di SMP (Sekolah Menengah Pertama—*Red.*) misalnya, yang namanya rumah tangga itu diajarkan semata-mata hanya bisa menjadi konsumen. Padahal, itu 'kan tidak benar. Itulah yang harus kita luruskan. Terus teori yang menyebutkan bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas, itu juga 'kan keliru, membuat manusia menjadi serakah. (*Mubyarto lantas membacakan beberapa terjemahan ayat Al-Quran, sebagai bukti kontradiksi teori tersebut dengan ajaran agama yang dia yakini. Ia juga menerangkan kontradiksi itu juga terjadi dengan ajaran agama-agama lain*). Jadi, bisa dikatakan teori neoklasik itu anti-agama. Dosa-dosa itulah yang ingin saya tebus, di antaranya dengan mendirikan Pustep (Pusat Studi Ekonomi Pancasila—*Red.*) ini.

Jika diamati, sebenarnya banyak cita-cita Ekonomi Pancasila yang senafas dengan konsep Ekonomi Islam, yang kini kebetulan sedang naik daun. Kenapa tidak beralih saja ke konsep ekonomi tersebut? Apalagi tulisan-tulisan Anda kan kini kian sering mengutip ayat!?

Saya pernah berceramah di Semarang, yaitu di Unnes (Universitas Negeri Semarang—*Red.*), ada mahasiswa Unnes mengatakan pada saya, "Jangan mimpi, Pak! Ekonomi Pancasila itu sudah jelas *nggak* realistis, yang betul adalah ekonomi syariah." Saya menjawab, "Anda telah bersikap apriori dengan mengatakan Ekonomi Pancasila itu *nggak bener*, hanya mimpi. Anda juga apriori ketika mengatakan bahwa ekonomi syariah itu benar, riil. Saudara sebagai mahasiswa jangan berpikir apriori, sebab bisa saja Ekonomi Pancasila itu terbukti, dan bisa saja ekonomi syariah itu menghadapi masalah." Intinya, Anda sebagai anak muda jangan apriorilah.

Kalau saya mau menerangkan dengan lebih realistis, sebetulnya Islam itu 'kan berasal dari Arab, lalu disebarluaskan ke banyak negara, termasuk Indonesia. Dulu, waktu awal kita merdeka, teman-teman kita yang dari timur, yang bukan Islam, menuntut agar Piagam Jakarta dihapus. Kalau tidak, mereka tidak mau masuk menjadi bagian Republik Indonesia, ingin mendirikan negara sendiri. Waktu itu bapak-bapak kita yang dari Islam itu mengalah. Pemikirannya, kalau kita ingin mendirikan Indonesia, maka Piagam Jakarta harus dicabut. Itulah yang terjadi. Jadi, kalau menurut saya, Pancasila adalah de-Arabisasi dari Islam, yang telah menyatukan negara ini. Tapi ini tidak berarti Islam kemudian menjadi kecil, tidak.

Nah, sekarang ini 'kan kita sedang mengalami masa pancaroba. Kita sedang menolak ekonomi kapitalistik, lalu di sisi lain, karena mayoritas kita adalah Islam, maka banyak yang lari ke agamanya sendiri, yaitu Islam. Itu masuk akal. Tapi mohon dicatat pengalaman Piagam Jakarta tadi. Itu jangan dilupakan, bahwa negara ini bukan negara agama. Makanya saya selalu mengatakan bahwa ekonomi yang tepat adalah Pancasila, yaitu ekonomi pasar yang mengacu pada sila-sila Pancasila, baik satu per satu maupun secara utuh.

Ada asumsi bahwa ketidakpopuleran Ekonomi Pancasila, juga ekonomi kerakyatan, dikarenakan ia memusuhi pengusaha. Sebab, selama ini yang selalu dibicarakan oleh konsep ekonomi tadi hanya masyarakat kecil. Padahal, jangan-jangan nanti pemihakan terhadap masyarakat kecil ini malah memunculkan ketidakadilan terhadap para konglomerat dan pengusaha. Bukankah itu juga buruk?

Lebih-lebih waktu saya memisahkan ekonomi rakyat dengan ekonomi konglomerat, *gitu* ya. Makanya Tutut (maksudnya Mbak Tutut atau Siti Hardiyanti Rukmana, puteri mantan Presiden Soeharto—*Red.*) marah kepada saya karena persoalan itu. "Saya 'kan rakyat juga *to*, Pak?!" *Lha* itu, yang mengatakan "saya rakyat juga" itu *nggak* mengerti pengertian itu. Rakyat itu dalam pengertian tata negara, bukan pengertian ekonomi. Sebab kalau di desa-desa, di daerah-daerah, semua orang—terutama dari fakultas pertanian itu mengerti bahwa ekonomi kerakyatan itu ekonominya *wong cilik*. Ada pertanian rakyat, ada perkebunan rakyat, dan ada perumahan rakyat. Coba siapa bilang perumahan rakyat itu punya orang-orang kaya? Kalau kita mengatakan *wong cilik* itu harus dipihaki, karena ekonomi rakyat itu selama 350 tahun penjajahan diinjak-injak, dipinggirkan. Sekarang, setelah merdeka 58 tahun belum juga tertolong, masih dipinggirkan. Kita itu memihaki mereka supaya mereka ikut menikmati kemerdekaan. Jangan dianggap kalau memihak mereka pasti memusuhi ekonomi konglomerat, jelas tidak. Tetapi *mbok* konglomerat itu sadar bahwa ekonomi rakyat, karena itu juga warga negara, maka perlu ditolong agar bisa menikmati hasil-hasil kemerdekaan. Nah kalau konglomerat sudah curiga sejak dari sananya, sehingga ekonomi rakyat tidak diperbolehkan hidup, itu merupakan sifat yang serakah betul, yang mau "pokoknya rejeki itu hanya punya saya, jangan untuk rakyat yang kecil-kecil".

Artinya yang dipentingkan dalam Ekonomi Pancasila itu bukan hanya pemerataan, tapi juga pertumbuhan?

Jelas itu. Saya memang selalu menekankan pemerataan, karena selama ini perhatian kita terlalu bertumpu pada pertumbuhan. Sekarang 'kan "pertumbuhannya" kebablasan. Coba, sekarang ini koran-koran mengatakan kita mengalami *switch gear*, dari ekonomi yang tumbuh 7% menjadi turun 3%. Kenapa kok itu yang dipentingkan? Sekarang itu yang penting adalah pemerataan. Jadi meskipun pertumbuhan kita 3-4%, tetapi kalau itu dinikmati oleh rakyat, itu lebih baik daripada pertumbuhan 7% saat pra-krisis, tapi tidak merata, timpang sekali! Makanya saya menentang istilah "pemulihan ekonomi", karena itu artinya mengembalikan kita ke kondisi yang timpang tadi. Siapa yang mau, coba? Itu 'kan timpang. Makanya kita tidak perlu lagi pemulihan ekonomi. Kita ini sekarang harus menyusun kebijakan ekonomi, melanjutkan apa yang sudah berjalan. Meskipun pertumbuhannya 3-4%, tetapi bila rakyat berpartisipasi penuh, itu baru namanya demokrasi ekonomi.

Tanggapan pemerintah sendiri sejauh ini terhadap pemikiran Anda bagaimana? Bukankah Anda juga pernah di Bappenas?

Pada 1993 saya diminta masuk Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional—*Red.*). Sebelumnya, saya sudah masuk MPR sejak tahun 1987. Tapi di MPR saya tidak bisa memasukkan kata-kata Ekonomi Pancasila dalam GBHN yang disahkan pada tahun itu. Lalu saya diundang oleh Menko Ekuin/Ketua BAPPENAS, waktu itu Pak Ginandjar Kartasasmita, untuk menjadi asisten menteri. Di situ saya memperoleh peluang untuk mengajukan saran mengenai kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan pemikiran Ekonomi Pancasila, lebih-lebih lagi judul kedudukan saya di situ 'kan asisten menteri bidang pemeratan dan penanggulangan kemiskinan. Itu merupakan bukti bahwa pemerintah waktu itu sebenarnya sudah mempunyai upaya untuk menciutkan kesenjangan. Mengangkat derajat orang miskin itu 'kan berarti menciutkan *gap*, mengurangi ketimpangan sosial. Selama lima tahun saya merumuskan program yang kemudian jadi program IDT (Inpres Desa Tertinggal—*Red.*). Dalam waktu singkat ada anggaran kemiskinan, tiap tahun besarnya Rp420 juta. Jadi selama tiga tahun jumlahnya Rp1,3 triliun. Waktu itu uang segitu memang banyak sekali, sampai-sampai orang-orang miskin itu heran, kok pemerintah banyak memanjakan orang miskin, ya.

Jumlah uang tersebut bagi orang-orang di Gunung Kidul benar-benar *blessing*. Bayangkan, harga kambing muda waktu itu baru 60 ribu. Mereka tiap tahun jatahnya dapat Rp56 ribu, jadi tinggal ditambah empat ribu sudah bisa untuk membeli *cempe* (anak kambing atau kambing muda—*Red.*). Tahun depannya dapat lagi, dapat lagi, hingga pendapatan orang-orang Gunung Kidul itu bisa naik 100% dalam satu tahun. Lain lagi di Sumatera Barat, di sana 'kan jumlah orangnya sedikit. Setiap tahun tiap kepala keluarga menerima Rp750 ribu, tetapi karena hanya digunakan untuk membeli satu ekor sapi, maka per tahun kenaikan pendapatannya hanya diperoleh 1%. Mereka memang menerima jatah lebih besar, karena mereka mengatakan "Rugi *deh* kalau hanya menerima Rp56 ribu per tahun." Oleh karena itu mau tidak mau kami harus membagi mereka menjadi kelompok-kelompok. Tahun sekarang satu kelompok dapat Rp20 juta, dibagi ke anggota kelompoknya.

Tetapi setelah satu tahun orang-orang Gunung Kidul ternyata lebih cepat naik pendapatannya dari pada orang-orang Sumatera Barat tadi, padahal jumlah nominalnya lebih kecil. Tapi saya tidak menghakimi bahwa orang-orang Gunung Kidul itu

lebih baik dari pada orang-orang Sumbar. Kita memberi keleluasaan.

Tapi sejauh mana pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil itu telah berjalan pada rel yang semestinya, tidak sekadar menjadi politik etis, sekadar belas kasihan pemerintah. Itu kan tidak menyelesaikan persoalan?

Ya, memang ada yang bilang kalau IDT itu belas kasihan dari pemerintah untuk rakyat miskin. Rakyat tidak minta kok diberi?! Tetapi kita dapat meyakinkan bahwa dengan jalan memberikan pendampingan, program itu bisa berhasil. Kita 'kan sampai melatih 4000 sarjana yang kemudian dikirim ke 4000 desa termiskin di Indonesia. Desanya pada waktu itu memang ada 20.000, tapi yang miskinnya *nggak* ketulungan itu ya itu yang 4000. Kalau tidak kita berikan pendampingan, saya khawatir mereka tidak bisa memberikan pertolongan untuk dirinya sendiri. Makanya kita kontrak sarjana-sarjana itu, awalnya hanya tiga tahun, kemudian kita perpanjang lagi menjadi empat tahun. Kita berikan pelatihan di Bogor dan Bandung, termasuk latihan militer dan juga fisik. Sebagian memang kita kirim ke luar Jawa.

Pendampingan itu untuk menjamin agar dana bisa sampai dengan efisien, benar-benar bisa dimanfaatkan. Ada cerita menarik sehubungan dengan itu. Waktu saya berkunjung ke Irian, saat itu bulan Januari, coba bayangkan, dalam sepuluh bulan dana itu ternyata belum ada yang dicairkan semua, masih menumpuk di BDN (Bank Dagang Negara—*Red.*). Saya kembali ke Jakarta. Di Jogja saya ditanyai oleh wartawan *Suara Pembaharuan*, "Pak, bagaimana kabarnya IDT di Irian?" Saya jawab, "Saya menangis Mbak, *wong* sudah sepuluh bulan kok dananya belum dicairkan juga. Kita 'kan ingin membantu, kok mereka (daerah—*Red.*) tidak responsif." Hari berikutnya percakapan itu ternyata jadi *headline* di *Suara Pembaharuan*, "Prof. Mubyarto Menangis".

Presiden ternyata baca, kemudian *nelpon* menteri dalam negeri. Menteri *nelpon* Gubernur Irian Jaya, "Bagaimana ini, Prof. Mubyarto kok sampai menangis itu." Gubernurnya jawab, "Tidak kok, Pak! Saya ketemu di bandara tidak menangis kok, biasa-biasa saja?!" Dagelannya seperti itu. Jadi memang banyak hambatannya, terutama di antaranya ya komitmen para pejabat daerah itu. Kalau para pejabat itu masih seenaknya, tidak mau memperhatikan kepentingan rakyat, ya susah.

Sebelumnya Anda kan orang yang berada di luar pagar, berseberangan dengan pemerintah. Kenapa pada 1993 itu bisa masuk ke lingkaran kekuasaan, jadi mesra begitu?

Pada waktu itu 'kan menterinya Pak Ginandjar, dia itu teman dekat saya waktu di MPR. Setelah dilantik menjadi menteri, sorenya dia telpon saya. Dia tanya, Pak Muby mau *nggak* membantu saya melaksanakan program yang kita susun di MPR dulu. Nah, agar konsep ekonomi rakyat dan sebagainya itu sampai ke presiden, ya harus lewat orang-orang seperti Pak Ginandjar itu. Sebab, kalau di departemen lain 'kan ekonomnya betul-betul dari *Barkeley Mafia*.

Sebenarnya kami yang di Bapennas itu 'kan bukan pelaksana ekonomi. Makanya program IDT itu menjadi perkecualian dari kebijakan ekonomi, sebab ekonomi yang di luar itu tetap tidak berubah, tetap dipercayakan pada pasar, tetap memihak pada konglomerat. Saya di Ekuin sampai Habibie diganti, jadi lima tahun. Waktu presidennya Gus Dur, saya tahu yang akan jadi menteri dan ketua Bappenas itu 'kan Pak Kwik Kian Gie. Saya sudah lama tahu kalau Pak Kwik itu pendapatnya banyak yang berseberangan dengan saya, meskipun kini saya banyak setuju dengan gagasan dia. Tapi pada waktu itu pokoknya Kwik sangat percaya dengan kapitalis, pokoknya semua harus kapitalis, sangat berbeda dengan Arief Budiman yang harus sosialis. Saya 'kan kebetulan bukan orang yang percaya pada kapitalisme ataupun sosialisme, tapi saya percaya pada Sistem Ekonomi Pancasila.

Semisal, dulu Pak Kwik bilang kalau dua puluh orang masing-masing punya uang dua puluh juta, itu sudah boleh mendirikan koperasi. Nah, saya bilang, kalau punya uang dua ratus juta itu lebih baik mendirikan perusahaan saja. Jadi pengertian koperasi Pak Kwik itu keliru. Koperasi itu untuk mengumpulkan orang-orang yang tidak berdaya

agar menjadi berdaya. Kalau orang kaya itu jangan mendirikan koperasi, mendirikan perusahaan saja. Jadi, daripada Pak Kwik yang memecat saya, lebih baik saya saja yang pergi. Meski di kemudian hari saya tahu, Pak Kwik ternyata menanyakan keberadaan saya, kenapa saya kok dibolehkan pulang, padahal masih dibutuhkan di sana.

Dalam kaitannya dengan gagasan mengenai Ekonomi Pancasila, ataupun ekonomi kerakyatan, bagaimana Anda menilai kabinet yang sekarang?

Sebenarnya Pak Boediono (Menteri Keuangan—*Red.*) itu dulu bersama-sama saya mengedit masalah perekonomian Pancasila, waktu tahun 1980-1981. Dia itu 'kan junior saya di Fakultas Ekonomi UGM, sehingga banyak sekali pikiran-pikirannya yang sama dengan saya. Tetapi memang kenyataan tidak bisa dibantah, ya. (*Sampai di sini Mubyarto agak terdiam*). Namanya pemerintah, dan pemerintah itu berhubungan dengan IMF, Bank Dunia, dan orang-orang asing, itu 'kan sulit. Begitu masuk pemerintah, mau ngomong keras dengan orang-orang IMF dan Bank Dunia itu 'kan susah, karena diplomasi itu harus dengan bahasa-bahasa, dengan tata krama internasional yang memang sulit untuk mengatakan "*Go to hell* dengan *you*". Tapi betapapun begitu, Pak Boediono itu saya yakin masih percaya dengan Ekonomi Pancasila. Masalahnya, untuk meyakinkan pemerintah bahwa Pancasila itu harus dilaksanakan itu 'kan tidak bisa sendirian. Kendalanya di situ.

Kalau kita melihat ke belakang, sebenarnya sejarah pemikiran ekonomi kita itu dulu bersifat sosialis, seperti Bung Hatta, lalu kemudian Soemitro Djojohadikusumo. Tapi kenapa kemudian kita cenderung menjadi liberal?

Tetapi liberalnya itu setelah kita prihatin *lho*, setelah harga minyak jatuh pada tahun 1981. Sebelum itu 'kan ekonomi kita bersifat etatis. Karena negara menguasai penjualan minyak, melonjaknya harga minyak pada awal 1970-an membuat negara menjadi kaya. Karenanya banyak pemodal yang ingin berinvestasi di Indonesia. Tetapi setelah harga minyak jatuh pada tahun 1982, kita itu mulai prihatin. Pertumbuhan ekonomi hanya 2,2% waktu itu. Maka pemerintah kita berpikir, "Kalau begini terus kita harus mengundang swasta untuk berinvestasi."Lalu swasta nasional diberi kesempatan lebih dahulu untuk berinvestasi, baru modal asing. Nah, tanggal 1 Juni 1983 itu awal dari deregulasi, kemudian dilanjutkan dengan Pakto (Paket Oktober, paket kebijakan deregulasi jilid dua—*Red.*) 1988. Bank-bank boleh meningkatkan tingkat suku bunga pinjaman dan suku bunga deposito.

Pada tahun 1988 itu orang-orang yang punya uang lebih dari 5 miliar boleh mendirikan bank. Makanya kemudian bank-bank tumbuh seperti cendawan di musim hujan. Dari jalan Solo sampai jalan Sudirman itu, ini guyonan, dulu kalau kita melempar batu bunyinya "duk...duk...duk!", maka pada tahun 1988 bunyinya jadi "bang...bang...bang!" karena demikian banyaknya jumlah bank. Bayangkan, dalam tujuh tahun naik tiga kali lipat, dari 70 menjadi 240. Ketika krisis, jumlah itu banyak berkurang. Jadi betul kalau orang asing mengatakan di Indonesia itu terlalu banyak jumlah bank. Saya mengatakannya lebih spesifik, bukan hanya terlalu banyak bank, tapi terlalu banyak bank yang tidak diawasi, *nggugu karepe dhewe* (semaunya sendiri—*Red.*). Karena tidak diawasi, mereka lalu sibuk mengumpulkan uang dari masyarakat, tapi tidak pernah memberikan kredit pada masyarakat. Uangnya digunakan untuk mengembangkan perusahaan pemilik bank itu sendiri. Jadi, sebenarnya mereka hanya menyedot uang masyarakat untuk kepentingan pribadi. Mereka inilah yang kemudian saya sebut sebagai bank tipuan.

Memang, pada saat itu susah sekali untuk menghindarkan diri dari peranan swasta. Pada awal pemerintahan Orde Baru kita itu miskin sekali, sehingga harus minta tolong pada lembaga-lembaga donor, seperti Bank Dunia, IMF, IGGI, dan swasta. Kita betul-betul *nggak* berdaya. Bahasa halusnya ya sekadar "*welcome...*". Tapi yang terjadi kemudian memang semacam perubahan radikal dari sistem ekonomi sosialis ke sistem ekonomi pasar bebas. Kalau waktu itu saya menjadi penentu kebijakan, saya juga mungkin akan berbuat yang sama, *nggak* bisa lain selain *welcome* kepada modal asing.

Jadi, jelasnya, kalau bisa dikatakan sebagai penyimpangan , penyimpangan itu terjadi mulai kapan?

Sejak mulai tahun 1967-1968 itu kita sudah mulai menjauhi sistem sosialis, sebab Ketetapan MPRS No.23 itu mengamanatkan pembaharuan kebijakan ekonomi, terutama berkaitan dengan kata demokrasi ekonomi. Lalu, tahun 1973 terjadi hal yang menarik. Waktu itu 'kan kita lagi prihatin, kok tiba-tiba ditolong oleh Yang Maha Kuasa dengan kenaikan harga minyak. Itu yang menyebabkan kita jadi etatistik. Nah, etatistik kalau dikawinkan dengan liberal, ya menjadi modal asing, yang kemudian berkembang menjadi persekutuan antara pejabat dengan konglomerat. Konglomerat itu mulai berkiprah pada tahun 1974. Kebetulan waktu itu putra-putri Presiden (Soeharto—*Red.*) masih kecil-kecil, walaupun ada kroni-kroni di luar itu. Nah, tahun 1988 itu Tutut, Bambang, Sigit, sudah mulai dewasa. Sejak saat itu KKN lebih merajalela lagi, karena tidak hanya melibatkan kroni, tapi juga anak. Cina-cina itu sudah mulai dari sebelum tahun '83.

Persis pada waktu pidato pengukuhan tahun 1979, saya juga kebetulan sedang mengikuti angkatan kedua Penataran P4 di Kepatihan. Makanya, saya berpidato mengenai Pancasila. Pada
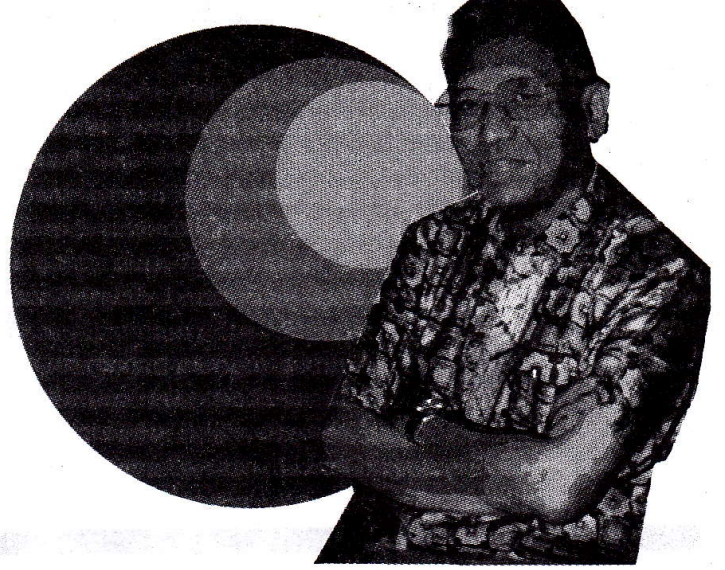
waktu itu saya melihat, kalau pada Pelita I dan Pelita II kita konsen mengenai pertumbuhan dan berhasil, maka pada Pelita III yang menitikberatkan pada pemerataan, saya kok merasa khawatir kalau-kalau teori Barat, yang neoklasik itu *nggak* bisa dipakai. Artinya, teori itu hanya bisa dipakai untuk pertumbuhan saja, tidak bisa untuk pemerataan. Nah, itulah pertama kalinya saya menyebutkan kata Ekonomi Pancasila, meskipun Emil Salim sudah menyebut itu pada tahun '66.

Jadi, sebelum Anda sebenarnya sudah ada yang mengenalkan konsep Ekonomi Pancasila?

Tidak ada! Mungkin, Pak Emil Salim pernah membuat tulisan *Membina Ekonomi Pancasila.* Itu pada tahun 1966. Kekeliruannya, Emil Salim waktu itu menyebutkan hanya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang relevan dengan ekonomi. Dia tidak menyebutkan bahwa sila yang kesatu, kedua, dan ketiga itu ada hubungannya. Saya dan teman-teman lalu menyebutkan, "*Woo*...jangan hanya sila kelima, tapi harus seluruh sila!" Seluruh sila itu menjadikan ekonomi kita jadi bermoral, berbeda dengan Barat. Sebab, dalam ekonomi Barat, moral itu hanya mereka perhatikan pada hari Minggu, pada waktu pergi ke gereja.

Kalau dicermati, kelihatannya ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan antara pemikiran ekonom-ekonom UGM, IPB, dan UI. Ada yang mengatakan kalau pemikiran ekonom UGM dan IPB itu sama, yaitu agak berbau sosialis. Sedangkan ekonom UI itu cenderung kapitalis, liberal, meski pendiri fakultas ekonominya, Soemitro Djojohadikusumo, adalah seorang sosialis. Komentar Anda?

Bahkan Pak Widjojo itu adalah sosialis. Baca saja ceramahnya pada tahun 1966. Tetapi mahasiswanya yang kemudian menjadi sangat kapitalis. Pada waktu saya masih di Badan Pekerja MPR, Maret 2001 lalu, yang membahas amandemen Pasal 33 UUD, sempat terjadi perdebatan di Hotel Sabang (*Mubyarto lalu menyebut beberapa nama ekonom muda yang tidak sepemahaman dengannya*). Waktu itu ada yang mengatakan, "Pak Muby, kita *nggak* bisa deh mengatakan bahwa yang namanya Ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi Indonesia! Pokoknya kita harus *manut* dengan ekonomi yang sekarang menang, sekarang jalan, yaitu ekonomi kapitalis!" Lalu saya bilang, ekonomi kapitalis itu 'kan aturan main. Saudara setuju tidak dengan saya kalau sistem itu dibuat oleh negara-negara yang paling maju, negara-negara yang paling kapitalis. Apakah Saudara percaya kalau sistem itu nanti menguntungkan kita? Jadi kalau sistem ekonomi kapitalis yang kita gunakan, apakah nanti akan menguntungkan kita? Pasti ada bias dengan kepentingan mereka, negara-negara kapitalis. Lebih baik 'kan percaya pada sistem perekonomian kita sendiri.

Dulu pernah ada juga yang bilang, "*If you can't beat them, join them*!" sebuah pernyataan yang betul-betul mengaku kalah sebelum berperang. Mereka teman-teman kita dari ekonomi makro Jakarta, yang memang sebagian besar dari UI. Akan tetapi ada teman kita dari UI, Sri Edi Swasono, itu bergabung dengan kita, mendukung Ekonomi Pancasila. Tapi ya memang minoritas. Sebenarnya bukan hanya UI yang begitu, Fakultas Ekonomi UGM juga sama, tidak semua sepemahaman dengan saya. Makanya, Pustep dapat merekrut sembilan orang itu sudah sangat lumayan, karena sebagian besar memang masih meragukan apakah Ekonomi Pancasila itu ada, masih belum *welcome* terhadap Ekonomi Pancasila. Kalau FE UGM setuju dengan saya, pasti Ekonomi Pancasila itu sudah dikenalkan sebagai mata kuliah. Tapi sebagian besar mereka masih percaya pada teori yang berasal dari Barat.

Kalau ekonom muda sendiri Anda melihatnya bagaimana?

Sebagian besar masih percaya pada ekonomi neoklasik, seperti yang mereka pelajari dari *text book.* Sebenarnya ini adalah kesempatan untuk yang muda-muda. Sebab, persis seperti yang saya tulis di buku *Alternative Development for Indonesia,* yang saya karang bersama orang asing, di situ kami mengatakan bahwa ekonom-ekonom tua, yang sudah senior itu, pahamnya sudah susah diubah, karena sudah mantap. Sebab kalau diubah, apa

"Di Indonesia, ekonomi Barat itu menjadi normatif, karena belum tentu cocok dengan kultur budaya sini."

yang akan mereka ajarkan? *Wong* yang mereka ketahui hanya itu kok. Tapi kalau anak-anak muda, kesempatannya untuk berubah masih sangat terbuka. Makanya, sasaran perjuangan Ekonomi Pancasila adalah anak-anak muda.

Dalam salah satu tulisan Anda, Anda mengakui bahwa perdebatan mengenai Ekonomi Pancasila pada 1981 itu belum sampai pada perdebatan teoritis, yaitu bagaimana menurunkan konsep-konsep ideal Ekonomi Pancasila ke dalam teori praktis. Bagaimana perkembangannya sekarang?

Tiap cabang ilmu ekonomi, atau topik ekonomi khusus, seperti misalnya perdagangan internasional, memang harus diarahkan untuk memiliki teori. Nah, bagaimana perdagangan internasional menurut Ekonomi Pancasila? Itu memerlukan dukungan dari banyak ahli ekonomi. Saya sendirian tidak mungkin bisa. Sebenarnya, teman-teman yang lain sejak dulu sudah ada keinginan untuk merumuskan itu secara detail, tapi keburu "dipukul" oleh pidato presiden pada tanggal 18 Agustus 1981. Waktu itu Presiden mengatakan bahwa tidak usah *neko-neko* mencari Ekonomi Pancasila dari luar. Sudahlah, dicari di dalam negeri saja. Itu 'kan menunjuk saya dan teman-teman, seakan-akan kami itu mau membuat teori Ekonomi Pancasila yang dilihat dari Barat, karena kita semua sekolah di Amerika.

Imbas dari pidato itu adalah semua orang kemudian menganggap Mubyarto dan kawan-kawan yang dari Gadjah Mada itu *ngaco*, jangan *digugu*, lah (dituruti—*Red.*). Pokoknya situasi waktu itu memang berat. Pada 1981 itu, sejak tujuh tahun sebelumnya, 1973, perekonomian Indonesia itu memang *blessing*. Kalau pada waktu itu ada yang bilang bahwa perekonomian kita jelek, seperti yang saya katakan itu, ya memang sulit untuk dipercaya. Perekonomian sebegini bagus kok dibilang jelek. Padahal, yang kelihatan bagus itu hanya permukaannya saja. Tapi ya sudah, terlanjur begitu, jika seorang presiden sudah bicara begitu, lalu semua orang jadi takut semua, *manut*. Saya sebenarnya tidak takut, tapi karena saya sendirian ya sudah, akhirnya tenggelam.

Tapi kita sudah memulai ke arah itu (teori—*Red.*). Dalam situs, saya sudah mempublikasikan tulisan tentang teori inventasi dan pertumbuhan ekonomi. Mudah-mudahan dari staf Pustep di luar saya, yang sembilan orang itu, serta tiga orang dari luar Jogja, seperti Sri Edi Swasono, Dawam Rahardjo, dan Bayu Krisna Murti, juga bisa mulai merumuskan topik-topik khusus. Sony (maksudnya Revrisond Baswir, salah seorang peneliti Pustep—*Red.*), misalnya, sudah konsentrasi di teori privatisasi.

Selama ini, jika menilik tulisan-tulisan tentang Ekonomi Pancasila, baik yang Anda tulis ataupun oleh teman-teman Anda, konsepnya masih terlalu menekankan rekayasa normatif, belum menyentuh rekayasa material. Padahal, untuk ilmu kemanusiaan kedua pendekatan itu sama-sama diperlukan.

Dulu saya belum punya jawaban, tapi sekarang saya sudah punya jawaban. Saya punya jawaban begini, teori ekonomi Barat itu positif kalau adanya di Amerika, di Inggris, dan lain-lain. Di Indonesia, ekonomi Barat itu menjadi normatif, karena belum tentu cocok dengan kultur budaya sini. Jadi, kalau dulu Arief Budiman pernah menuduh bahwa ekonominya Pak Mubyarto itu ahistoris, itu sesungguhnya gampang sekali dibantah. Normatif itu artinya sesuai dengan norma-norma masyarakat. Tapi orang-orang ini apriori duluan pada Ekonomi Pancasila. Maunya, mereka mendukung kalau kita sudah menemukan rumus-rumus perdagangan internasional, atau rumus otonomi daerah menurut Ekonomi Pancasila. Mereka hanya ingin menjadi penonton, tidak mau turut menjadi pemain.

Tuduhan normatif itu barang kali adalah senjata untuk "mematikan" saya. Di Australia, misalnya, meski tidak bicara secara langsung, ada yang ngomong "Kenapa *Indonesia Update* yang diadakan tiap tahun itu tidak pernah mengundang Mubyarto? Karena Mubyarto sekarang sudah menjadi terlalu normatif." Karena saya dianggap normatif, maka apa yang saya omongkan itu *nggak* cocok dengan yang positif, yang nyata. Lha, saya 'kan kaget kalau sekarang dituduh begitu. Karena, selama saya menjadi direktur P3PK (sekarang PSPK, Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan—*Red.*), sebelas tahun

lamanya saya mengadakan penelitian tentang kemiskinan di pedesaan, mengunjungi daerah-daerah. Kalau saya masih juga dituduh normatif, saya tidak tahu yang positif itu seperti apa?! Apa contoh-contoh yang saya omongkan, seperti tentang Gunung Kidul dan Sumatera Barat tadi *nggak* riil?

Sampai sekarang saya tetap tidak mengerti. David Bromley, orang Amerika yang menulis buku *Alternative Development for Indonesia* bersama saya, mengatakan bahwa menurut pengamatannya "Ekonomi Pancasila itu harus menjadi ekonomi bangsamu." Saya jawab, ya, saya sudah berusaha mati-matian selama 45 tahun mengajar ilmu ekonomi, dengan dua puluh lima tahun di antaranya sebagai profesor. Rasanya saya sudah cukup banyak makan garam, sudah *pol* (tuntas—*Red.*) gitu. Jadi, kalau masih ada yang meremehkan Mubyarto, ya *ndak* apa-apa.

Anda mengkritik ekonomi pasar, tapi jika mengamati konsep Ekonomi Pancasila ada kecenderungan peran negara kembali membesar. Apa nantinya tidak menjadi sebuah titik ekstrim buat kita: kita sekarang terlalu percaya pada mekanisme pasar, lalu dalam Ekonomi Pancasila kita beralih menjadi sangat percaya pada negara?

Siapa yang mengatakan terlalu percaya pada negara?! Pengalaman sudah banyak mengajarkan kalau kita terlalu percaya pada negara, maka bentuknya adalah etatisme. Dan itu jelas tidak membantu kita dalam mencapai masyarakat adil makmur. Siapa yang mengatakan Ekonomi Pancasila terlalu percaya pada negara? *Ndak* ada. Memang mereka (yang tidak menyetujui konsep Ekonomi Pancasila—*Red.*) selalu membuat senjata untuk menyerang kita dengan mengatakan bahwa dalam ayat 2 dan 3 Pasal 33 UUD itu perekonomian dikuasai oleh negara. Di belakangnya baru digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.Tapi tidak benar kalau dikatakan negara sangat berkuasa. Penjelasan Pasal 33 itu mengatakan bahwa kemakmuran masyarakat lebih diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sementara produksi itu dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pengawasan, dan pendidikan anggota masyarakat diutamakan. Inilah yang membuat kita kecil hati. Anak-anak muda, seperti yang dipimpin oleh Sjahrir (ekonom UI—*Red.*), dan Adiningsih juga termasuk di situ, memang *nggak* merasakan sama sekali sejarah dibentuknya, ditulisnya Pasal 33 itu. Jadi mereka tidak berkepentingan bahwa kata koperasi itu harus masuk, bahwa kemakmuran masyarakat lebih diutamakan. Betul-betul saya tidak mengerti mengapa mereka bisa seperti itu. Karena mereka baru pulang dari Amerika merasa hebat, bahkan merasa lebih pintar dari gurunya. Mereka merasa Bung Hatta itu sudah kuno.

(*Sebelumnya, Mubyarto bersama beberapa ekonom kawakan memang menjadi Tim Amandemen Pasal 33 UUD 1945. Karena perselisihan mengenai perlu tidaknya perubahan Pasal 33, Mubyarto, yang juga ketua tim, bersama M. Dawam Rahardjo, mengundurkan diri dari tim tersebut. Menurut Mubyarto dan Dawam, Pasal 33 itu jangan diganggu gugat, dan kalau ada perubahan cukuplah dengan pasal-pasal tambahan. Sementara, beberapa ekonom muda, di antaranya Sjahrir dan Sri Adiningsih, beranggapan karena Pasal 33 itu* dubious, *misalnya* "ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan", *tiga ayat dalam Pasal 33 diusulkan untuk diubah.*)

Dalam salah satu wawancara dengan surat kabar, Anda mengatakan bahwa untuk kondisi saat ini konsumsi lebih baik dari investasi. Ada nggak bukti empiris yang membuktikan hal itu? Seberapa signifikan konsumsi bisa memulihkan kembali perekonomian?

Kesimpulan itu salah kaprah. (*Mubyarto lalu berdiri, kemudian menulis di papan tulis*). Dalam teorinya Keynes, ada rumus Y=C+I+G (X-M). (*Rumus ini adalah rumus perhitungan pendapatan nasional, dimana C= Konsumsi, I= Investasi, G= Pengeluaran Pemerintah, X= Ekspor, dan M= Impor*). Kita berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi sekarang ini tidak terjadi karena adanya investasi, tapi dari konsumsi. Sebab investasi asing saat ini *nggak* ada. Bahkan, dalam laporan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal—*Red.*),

“Saya mulai dengan kata-kata, “Go to hell with AFTA!”

bukan hanya menurun, melainkan juga terjadi pelarian modal keluar ke luar negeri. Tetapi kenapa kok pertumbuhan kita masih bisa 3-4% per tahun? Siapa lagi yang bisa membuat itu kalau bukan ekonomi rakyat, ekonomi yang bukan perusahaan, tapi ekonomi kelas menengah ke bawah!?

Kalau itu sudah diketahui, yaitu ekonomi kita tumbuh 4%, meskipun investasinya anjlok, itu artinya 'kan teori itu sudah salah, karena mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu hanya bisa lewat investasi. Itu maksudnya kalau dikatakan konsumsi lebih penting. Tapi saya tidak mengatakan begitu. Saya mengatakan investasi di Indonesia itu sebenarnya tidak anjlok, tetapi sekarang dilakukan oleh orang-orang kecil, oleh ekonomi rakyat. Hanya saja, karena dalam statistik resmi itu ekonomi rakyat *nggak* ada angkanya, maka yang terlihat seakan-akan tidak ada investasi. Padahal ada. Itulah kenapa pertumbuhan ekonomi kita masih 3-4%. Lalu kekeliruan lain, selalu saja dilaporkan bahwa membeli sepeda motor itu adalah konsumsi. Padahal, kalau di sini 'kan sepeda motor itu banyak yang dipakai untuk ngojek. Dan itu mendatangkan pendapatan. Lalu ibu-ibu di pasar itu, sepeda motor dipakai untuk mengangkut barang-barang dagangan. Masak yang seperti itu bukan investasi? Jadi, sekarang itu banyak sekali kekeliruan definisi, investasi dinilai sebagai konsumsi.

Itu mungkin karena selama ini kita terlalu banyak melihat keluar (*outward looking*), dalam melakukan pembangunan atau menyusun kebijakan ekonomi. Sehingga, ketika modal asing berlarian, yang kita pikirkan hanya pada bagaimana membuat investor asing bisa kembali dan merasa nyaman di sini. Dalam keadaan seperti sekarang ini, menurut Anda mana yang lebih baik, *inward looking* atau *outward looking*?

Ya, memang pernah ada yang mempersoalkan itu, yaitu Pak Bambang Sudibyo. Saya juga pernah diwawancara oleh sebuah majalah, di situ saya mengatakan, waktu itu 'kan pertanyaannya apakah PPI (Pameran Produk Indonesia) itu bisa laku atau bersaing tidak dengan barang dari luar negeri, apakah betul kita hanya jago kandang? Saya katakan, kenapa seluruh kegiatan ekonomi itu hanya ditujukan untuk bersaing dengan luar negeri? Kenapa kita tidak pernah menyadari bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar? 210 juta orang penduduk itu 'kan adalah konsumen, dan sejauh ini tidak pernah digarap oleh kita. Kita selalu saja berpikir kalau dapat devisa itu lebih baik dari pada menjual di negeri sendiri. Itu keliru. Kenapa bangsa lain tetap berkeinginan berinvestasi di Indonesia? Karena pasarnya memang besar. Makanya mereka membuka retail atau outlet di mana-mana. Masak kita tidak memperhatikan pasar dalam negeri. Tapi sekarang istilahnya jangan *inward looking*, ya. Sebab kadang-kadang istilah itu dinilai negatif, sedangkan yang *outward* itu selalu bagus. Padahal tidak.

Intinya, pasar dalam negeri itu harus kita garap. Kita 'kan ingin meningkatkan kesejahteraannya bangsa sendiri *tho*, bukan mau meningkatkan kesejahteraan bangsa lain? Masak yang selalu kita pikirkan itu hanya orang-orang luar saja, nggak pernah memikirkan dalam negeri sendiri. Semuanya berpikir *pokoke* ekspor *oriented* itu lebih baik. Sehingga, kalau mengekspor itu kualitasnya bagus-bagus, sementara untuk pasar dalam negeri itu hanya sisa-sisa. Kok kasihan sekali, ya. Jadi, saya kira *inward* dan *outward looking* itu selama ini telah disalahartikan.

Lalu kita juga jangan terlalu pesimis dengan perekonomian nasional. (*Mubyarto kembali berdiri lalu membuat grafik di papan tulis. Guru besar Fakultas Ekonomi UGM ini kelihatan kian bersemangat, meski telah lebih dari tiga jam diwawancara.*). Kekuatan ekonomi kita itu selama tiga puluh tahun, dari 1966 sampai 1996 itu, sudah tinggi sekali. Jangan diremehkan. Jika tiap tahun diasumsikan meningkat rata-rata 7%, berarti selama tiga puluh tahun perekonomian kita sudah meningkat 210%. Jadi, kalau pada tahun 1998 perekonomian kita turun, menjadi -13%, orang kok menghitungnya dari nol kembali? Padahal, kita sudah mencapai titik di sini (*Mubyarto menunjuk angka 210% tadi*), jadi turunnya tidak lagi di titik minus. Artinya, kita masih punya surplus, yaitu akumulasi hasil surplus ekonomi selama tiga puluh tahun. Jadi jangan diasumsikan ekonomi kita kembali

lagi ke nol. Karena itu, kebanyakan ekonom, yang menganggap bahwa ekonomi kita sudah hancur, itu jelas-jelas keliru. Kita itu sudah punya kekayaan yang diakumulasi, kok kembali ke miskin lagi?!

Anda pernah mengatakan akan melakukan revolusi di bidang ekonomi. Bentuk konkretnya seperti apa?

Ya, revolusi itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang berdarah-darah. Revolusi itu perubahan yang radikal, perubahan yang besar, perubahan yang tidak pernah terpikirkan. Sistem ekonomi yang kapitalis ini harus diubah menjadi sistem ekonomi yang memperhatikan Pancasila, bersumber pada dan diinspirasi oleh Pancasila. Tetapi revolusi itu 'kan memerlukan pengikut. Sekarang, orang yang menjalankan dan orang yang mengikuti 'kan masih belum banyak, sehingga kita harus bisa mendorong sebanyak-banyaknya orang untuk mendukung perubahan itu.

Sekarang kita berhadapan dengan perdagangan bebas dan serbuan modal asing yang demikian kuat. Padahal, kondisi internal kita masih demikian rapuh. Mungkin nggak kita melindungi struktur yang ada di dalam dengan cara menutup diri, mencontoh seperti yang pernah dilakukan oleh Cina dulu?

Sebetulnya memang kita sudah keliru, karena terlalu mudah membuka diri. Kita tidak memperhatikan bahwa sebenarnya masuknya modal asing itu untuk kepentingan mereka sendiri, tidak untuk membantu kita. Teman saya, Bromley, itu pernah menulis email pada saya, "Mubyarto, *less globalized world better for your cuntry.*" Jadi, bom Bali itu, lepas dari kontroversi masalah terorisme, 'kan sebenarnya peringatan. Adanya kejiadian itu 'kan kemudian membatasi orang asing yang datang ke Indonesia, karena ada *travel warning*, ya *tho*! Mereka menjadi tidak kerasan lagi tinggal di sini. Artinya, Tuhan saja sudah mengingatkan, kok kita tidak sadar. Maksudnya sama dengan *inward* dan *outward looking* tadi, bukannya menutup diri dari asing, tapi mbok pasar dalam negeri itu digarap dengan baik, jangan hanya berpikir keluar, tentang ekspor saja.

Itu juga menjadi bentuk nasionalisme ekonomi?

Nasionalisme ekonomi kita itu 'kan persatuan Indonesia. Sayangnya yang terjadi adalah, semisal transportasi kita dari Surabaya ke Makasar, atau ke Wamena, itu kok tidak pernah kita garap. Sehingga, justeru malah orang-orang asing itu yang memberikan pelayanan *inter-island*. Jadi, *gimana* kalau seperti ini terus?

Lalu bagaimana cara Ekonomi Pancasila menyiasati persoalan-persoalan itu? Jangan lupa, AFTA juga sudah mulai diberlakukan tahun ini, sementara persoalan domestik kita masih sangat pelik!?

Karena ini begini, ya. Presiden Soeharto waktu menandatangani AFTA itu 'kan menganggap anak-anak dan kroninya sebagai komplotan yang hebat untuk bertanding dalam AFTA. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa ekonomi rakyat akan sangat terpukul. Prinsipnya waktu itu, pokoknya ada orang yang menjadi wakil Indonesia. Itu 'kan jelas salah. Jadi penandatanganan AFTA itu tidak mengerti ekonomi rakyatnya. Makanya, komitmen yang dibuat oleh penandatanganan itu 'kan sebenarnya komitmen yang keliru. Sehingga, jangan dianggap kita juga harus *commit* melaksanakan itu hanya karena sudah tanda tangan. *Wong* jelas-jelas akan merugikan masak kita mati-matian mau mempertahankan dan melaksanakannya?! Malaysia saja 'kan minta mundur untuk otomotif itu, berjuang melindungi industri otomotifnya. Masak kita, hanya karena sudah terlanjur tanda tangan, langsung nurut saja. Akhirnya petani kita yang dirugikan.

Jadi, kalau mahasiswa sekarang itu banyak yang tanya, bagaimana cara melaksanakan AFTA?

itu pertanyaan yang keliru. Teori-teori yang sudah keliru jangan dilaksanakan. Saya tidak akan, katakanlah, memprovokasi. Tetapi marilah kita sadari bahwa WTO saja masih mempunyai aturan-aturan untuk melindungi orang miskin, petani. *Wong* Amerika dan Jepang saja melindungi petaninya. Kok kita, yang sudah jelas-jelas petaninya masih begitu rendah, malah tidak mau melindungi. Itu *gimana*? Jadi hati-hati, jangan sampai melaksanakan kebijakan yang keliru, komitmen yang keliru. Waktu itu, kebijakan mengenai AFTA ditandatangani tidak

"Kalau ekonomi sudah melupakan diri bahwa dia adalah anaknya ilmu sosial, sudah *nggak* ada gunanya."

didasarkan pada kondisi riil. Bisa saja kita melaksanakan tarif nol itu, tapi kalau kemudian petani kita demo tiap hari, apa yang kita lakukan? Itu 'kan sama artinya dengan kita membela petani negara lain, bukan petani negara sendiri. Kalau begitu, apa itu ciri pemerintah yang baik?

Tahun 1984 FAO memberikan penghargaan kepada kita karena bisa mencapai swasembada beras. Sebenarnya calonnya waktu itu ada dua, India dan Indonesia. Tapi Indonesia yang dimenangkan. Sekarang kita lihat, India itu sangat hati-hati ketika membuka diri terhadap asing. Itu kelebihan India, juga RRC. Mengapa pertumbuhan ekonomi RRC 7% per tahun, mengapa sekarang ia ditakuti Amerika, juga banyak negara lain? Karena RRC serius menggarap ekonomi rakyat. Otonominya luas sekali, pada daerah-daerah, propinsi-propinsi. Makanya kalau ditanya, ada nggak negara yang bisa kita tiru sekarang ini? Ya, ada. Yaitu India dan RRC tadi.

Coba, waktu saya ke India dua tahun lalu, saya masih melihat ada sekolah dasar yang *nggak* punya gedung. Mereka sekolah di bawah pohon. Tetapi, gaji gurunya, itu guru SD, Rp1,6 juta per bulan. Jadi, sebenarnya yang penting itu guru dan semangat belajarnya lalu buku-buku, bukan gedungnya. Kalau kita 'kan di sini sekolah di luar ruang itu karena sekolahannya dibakar, kayak di Aceh itu. Makanya pendidikan kita itu banyak yang keliru. Yang penting gedung-gedungnya indah. Masak ada sekolah yang gedungnya kok kayak plaza, seperti mall. Itu gimana? Mahasiswa katanya protes, supaya pendidikan lebih murah. Saya pikir ini juga agak asal. Tuntutlah pendidikan yang baik, yang *bener*, yang berkualitas, jangan nuntut yang murah. Kalau pendidikannya bermutu, mahasiswa bisa memanfaatkan ilmu itu. Tapi ini juga tidak berarti jika berkualitas pasti bermutu.

Sebagai ideologi, Pancasila kan katanya ideologi yang terbuka, artinya bisa menerima hal-hal dari luar. Tapi jika kemudian Ekonomi Pancasila yang tadi katanya berdasarkan ideologi Pancasila itu demikian protektif, sementara ideologinya sendiri bersifat terbuka, bukannya itu bersikap mendua?

Saya kira dilihatnya tidak begitu. Setiap negara harus percaya diri bahwa ia punya ideologi, yang akan jadi pegangan seluruh bangsa. Kalau misalnya ada ideologi bangsa lain yang kita perhatikan itu kok kelihatannya lebih baik, itu ya harus dites dulu dengan ukuran kita, apa betul-betul lebih baik dari pada Pancasila? Jadi, memang Pancasila tidak dianggap *perfect*, sempurna, lalu menjadi dogma. Tidak. Kebanyakan dari kita memang berpikir tidak percaya pada Pancasila. Bukankah Amerika bisa maju bukan karena Pancasila? Jepang bisa maju bukan karena Pancasila? Mereka berpikirnya begitu. Tapi tidak pernah berpikir, jangan-jangan mereka maju karena lebih "Pancasila" dari kita.

Karena itu, jangan buru-buru menilai bahwa kemajuan atau keterbelakangan ini karena ini atau itu. Sebelum menilai Ekonomi Pancasila, atau ekonomi rakyat, harus dilihat dulu dong, kita sudah melaksanakan Pancasila dengan sungguh-sungguh atau belum. Selama ini 'kan kita belum serius melaksanakan ekonomi rakyat, karena memang itu hanya dihapalkan di luar kepala, tidak kita pahami betul.

Itu karena kita terlalu terbuka tadi?

Iya. Bahkan, ilmu-ilmu yang kita ajarkan atau yang kita pelajari itu 'kan betul-betul ilmu impor, yang diajarkan secara keliru, sebagai dogma, tidak kita sempurnakan lewat penelitian-penelitian. Terus sekarang kita lihat makin banyak mahasiswa jurusan perbankan, jurusan manajemen. Di STIE-STIE itu jurusan ekonomi pembangunan tidak ada. Beberapa universitas besar juga (*Mubyarto lalu menyebut beberapa nama perguruan tinggi yang cukup terkenal*) banyak yang *nggak* punya jurusan studi pembangunan. Nah, dengan hancurnya sektor modern seperti sekarang ini, mahasiswa jurusan-jurusan itu mau diapakan? Karena, yang mereka pelajari itu 'kan sempit hanya mengenai teori-teori sektor modern, masalah modal, uang, atau pasar modal. Padahal, saya kira, suasana yang akan datang itu akan berbeda dengan suasana sebelum krisis. Jadi kita itu kebablasan. Ilmu-ilmu yang penting untuk bangsa ini malah tidak kita pelajari. Yang kita
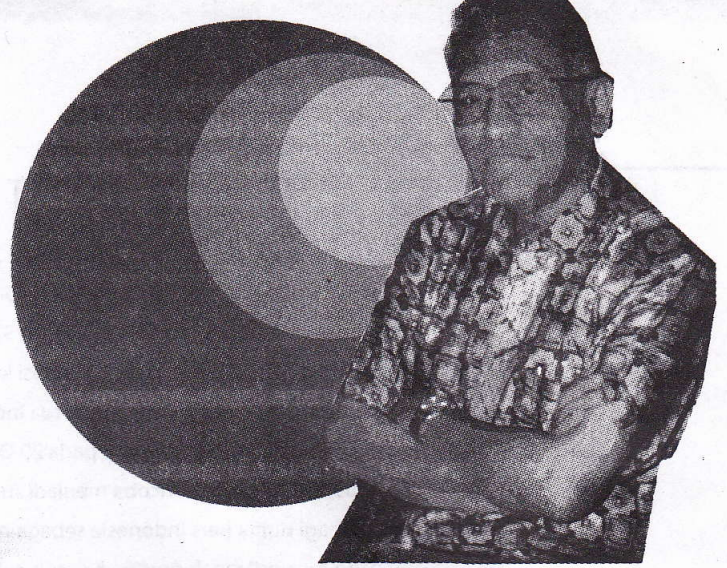
pelajari adalah ilmu-ilmu yang melayani sektor modern, internasional.

Selama ini pemikiran kita 'kan hanya bisnis dan bisnis saja. Seperti *marketing* dan manajemen itu, misalnya. Padahal, ekonomi itu tidak sepenuhnya menyangkut usaha atau bisnis. Sehingga saya sekarang bermusuhan, dalam tanda petik, dengan ahli seperti Bungaran Saragih (menteri pertanian—*Red.*), yang menyatakan bahwa *farming is bussiness. Farming is bussiness, yes*, tapi itu di Amerika. *Farming in Indonesia is not all a bussiness.* Petani-petani kecil itu tidak melaksanakan usahanya karena *profit motive*, tetapi itu *way of life*, untuk *survival*. Mereka tidak memikirkan bagaimana *marginal cost*. Makanya, asumsi-asumsinya Pak Bungaran Saragih yang mengatakan bahwa petani kecil pun mencari untung, itu *nggak* betul. Mereka tidak mengejar untung sama sekali. *Wong* tidur saja susah, bagaimana memikirkan untung?!

Lalu kemarin lagi, waktu saya ikut seminar di kantor koperasi, ada yang mengatakan, "Pak, koperasi itu sekarang harus diubah. Koperasi sekarang harus *profit oriented*!" Saya katakan, Saudara itu salah betul. Kalau koperasi mengejar untung, maka koperasinya bubar. Koperasi tidak boleh mengejar untung, yang boleh mengejar untung adalah anggotanya. Lalu saya cerita, 15 tahun yang lalu saya diundang menghadiri rapat tahunan anggota sebuah koperasi di Mataram. Di sana ketua koperasi mengatakan, setahun kemarin kita untung Rp100 juta, dan yang akan kita bagikan kepada anggota adalah Rp50 juta. *Lho*, saya tanya, yang 50 juta kemana? Dia jawab, yang 50 juta itu usahanya pengurus sendiri, sehingga tidak akan dibagikan pada anggota. Seperti itulah kalau koperasi mencari untung sendiri. Seharusnya anggota yang mencari untung, bukan koperasi. Koperasi hanya membantu anggota untuk mendapatkan keuntungan. Sayangnya, sekarang semua koperasi di Indonesia menjadi seperti itu, mencari keuntungan sendiri. Mereka memisahkan pengurus koperasi dengan anggota.

Makanya, mahasiswa itu *mbok* tahu, kita juga harus belajar ilmu-ilmu Indonesia sendiri, jangan hanya Barat. Bahannya mungkin bisa dari luar, tapi harus kita sesuaikan melalui penelitian-penelitian di sini.

Katanya, Fakultas Ekonomi juga namanya mau diganti?!

Sekarang ini banyak sekali yang keliru dalam menilai ilmu ekonomi. Orang mengatakan bahwa konglomerasi, globalisasi, itu adalah ekonomi, padahal itu keliru. Konglomerasi dan globalisasi adalah ekonomi yang sudah menjadi alat *businessman* untuk mengejar untung. *Economy is not business.* Saya tentang habis-habisan perubahan itu. Lho, ekonomi kok diperkecil hanya menjadi bisnis itu *gimana*? Ekonomi itu moral, sedangkan bisnis itu untung. Jadi 'kan nggak *bener*. Terus sekarang juga ada ekonofisika, itu *nggak* akan bermanfaat. Ekonomi kok dibuat makin eksak, seperti ilmu alam, yang benar saja?! Ekonomi itu ilmu sosial. Mereka tidak pernah turun ke lapangan mempelajari praktek ekonomi orang kecil *sih*, karena hanya puas dengan sebatas menjadi "*computer mind*"; bermain di belakang komputer, tapi merasa sudah bermain ekonomi.

Memang dalam bukunya Kenneth Boulding, ilmu ekonomi itu bisa ilmu moral, sosial, politik, matematika, atau fisika. Memang bisa *macem-macem*. Tapi *at all, economics is social science.* Kalau ekonomi sudah melupakan diri bahwa dia adalah anaknya ilmu sosial, sudah *nggak* ada gunanya.

Sebenarnya fenomena keterpukauan pada ilmu-ilmu impor itu kan tidak hanya terjadi pada ilmu ekonomi, tapi hampir pada semua ilmu-ilmu sosial, juga sains. Sebagai seorang intelektual, Anda melihatnya bagaimana?

Itu mental *inlander*. Kita *nggak* pernah punya semangat untuk mengatakan, "Ini *lho* dadaku!" Selalu saja takut, silau pada pada apapun yang dikatakan orang asing. Kadang-kadang saya jadi kecil hati. Pikiran-Pikiran saya, tulisan-tulisan saya, buku-buku saya, itu dianggap seperti buku putih, *nggak* ada yang mau meresensi. Jadi, memang benar kalau dikatakan orang-orang asing itu lebih dihargai, sementara ilmuwan sendiri *nggak* dihargai.

SEKILAS

BALAIRUNG

Setelah *Gama Intrauniversiter* (1950-an) mati dan *Gelora Mahasiswa* (1970-1979) dibredel, BALAIRUNG adalah generasi ketiga pers mahasiswa di universitas tertua Indonesia ini. Sejak berdiri pertama kali pada 29 Oktober 1985, BALAIRUNG mencoba menjadi suara yang lain bagi dunia pers Indonesia sebagaimana yang menjadi ranah pers mahasiswa selama ini. Tentu saja dengan mewarisi semangat generasi sebelumnya.

Menjadi "cagar alam kebebasan pers", sebagaimana dikatakan Daniel Dhakidae, tentu bukan pekerjaan mudah. Untuk menjadi sesuatu yang alternatif diperlukan kecerdasan, keuletan, dan yang lebih penting adalah keberanian. Termasuk di dalamnya keberanian mengambil keputusan. Menempuh jalan yang kadang harus berlainan dengan jalur mainstream pers pada umumnya: logo BALAIRUNG yang vertikal, rubrik yang unik, perwajahan menarik, dan sistem jurnalisme yang integral.

Semua ditempuh karena BALAIRUNG, mengutip Prof T Jacob, ingin menjadi tempat mahasiswa mengasah pena, melatih diri untuk kehidupan pasca-universiter, dengan tidak meninggalkan ciri-ciri kemahasiswaan, yaitu ingin tahu dan mencoba melihat segala sesuatu secara ilmiah. BALAIRUNG ingin menjadi "balairung", tempat belajar, tempat berteduh, tempat bertemu banyak orang, banyak kepala, banyak keinginan, banyak cita-cita.

Sampai umurnya yang ke-17, BALAIRUNG telah menelurkan 35 edisi reguler dan 4 edisi jurnal, selain mingguan berita BALKON, situs balairung.org, dan Pusat Informasi Pers Mahasiswa Indonesia (PIPMI). Kerja keras ini berbuah manis dengan menyabet tiga kali berturut-turut juara I Lomba Penerbitan Pers Alternatif Institut Studi dan Arus Informasi (ISAI) Jakarta.

Penghargaan ISAI Award 2000

TERIMA KASIH

kepada anda yang telah menjadi pelanggan abadi balairung

Bambang Harymurti
Pimred TEMPO

Jusuf Kalla
Menkokesra

Sampoerna
Direktur POM

Anwar Nasution
Senior Deputy Bank Indonesia

Piet Talo
Gubernur NTT

Formulir pelanggan abadi

Anda akan mendapatkan edisi terbaru Jurnal Mahasiswa Balairung seumur hidup hanya dengan donasi minimal sebesar **Rp. 400.000,-**

Nama lengkap

Alamat

Bersedia menjadi pelanggan abadi Jurnal Balairung dan memberikan donasi sebesar

Melalui transfer **Tahapan BCA Yogyakarta No. 037 207 2120 a.n. Widhi Bidhiartati** (lampirkan bukti transfer ke fax. 0274-566171) atau via wesel ke alamat **Komplek Perumahan Dosen UGM Bulaksumur B-21, Yogyakarta 55281**

Kisah Si Malinkundang dan Subversi Realitas

Imaji Indonesia dalam Tiga Edisi BALAIRUNG

ondhan.Balairung

Tiga orang pemuda datang ke rumah seorang wartawan senior. Mereka berencana menerbitkan sebuah majalah yang belum pernah ada di Indonesia. Bukannya dukungan, mereka malah dicibir sebagai "terlalu melampaui zamannya". Tak putus asa, ketiganya mendatangi seorang wartawan senior lain. Sama saja. Mereka ditakut-takuti dengan pernyataan bahwa pembaca di Indonesia belum siap dengan bacaan seperti itu. Gagasan mereka dinilainya tidak akan laku.

Tiga orang pemuda datang ke rumah seorang wartawan senior. Mereka berencana menerbitkan sebuah majalah yang belum pernah ada di Indonesia. Bukannya dukungan, mereka malah dicibir sebagai "terlalu melampaui zamannya". Tak putus asa, ketiganya mendatangi seorang wartawan senior lain. Sama saja. Mereka ditakut-takuti dengan pernyataan bahwa pembaca di Indonesia belum siap dengan bacaan seperti itu. Gagasan mereka dinilainya tidak akan laku.

Dua puluh tiga tahun kemudian kita menyaksikan bahwa dua wartawan senior tadi layak mengaku keliru. Majalah yang mereka cibir sebagai tak akan laku, terlalu melampaui zamannya, hari itu sedang menoreh sejarah paling penting dalam risalah kebebasan pers di Indonesia. Selasa, 21 Juni 1994, bersama dua media lainnya, Tempo, majalah yang digagas tiga pemuda tadi, secara resmi ditutup oleh pemerintah. Tempo mati. Tapi, sebagai sebuah cerita, Tempo justru sedang memulai legendanya.

Tentu Tempo tak dihargai atau menjadi terkenal karena pembredelan itu. Sejak kelahirannya, majalah "aneh" ini telah cukup layak untuk dicatat dalam bab mahapenting sejarah persuratkabaran. Gaya jurnalistiknya, kegenitan layoutnya, serta manajemennya menandai lahirnya era modern industri media cetak di Indonesia. Adapun perihal Tempo menjadi kian terkenal dan melegenda setelah pembredelan, itu adalah hal lain yang tak menegasikan kehebatannya sejak mula.

Hari itu, andaikan diberi kesempatan untuk kembali ke masa silam dan menjawab kesangsian para seniornya, ketiga pemuda tadi mungkin akan menjawab: Tempo memang melampaui zamannya, tapi justru karena itulah ia harus terbit. Tempo hari itu boleh [telah] mati, tapi semangatnya akan terus hidup dan mewarnai khazanah persuratkabaran.

*****

Hari-hari ini, ketika pikiran kita kian menerima kelaziman sebagai kenyataan yang seharusnya terjadi, membaca ulang riwayat Tempo mungkin akan sangat membantu. Dari Tempo kita bisa belajar bahwa sebuah ketidaklaziman yang mustahil ternyata bisa menjadi sesuatu yang cemerlang—meski dibutuhkan waktu yang panjang untuk membuktikannya. Bukankah Copernicus, enam abad lampau, juga mengusung ketidaklaziman dengan menyangkal bahwa bumi itu pusat alam semesta. Atau, bahkan Galileo harus duduk di kursi terdakwa Vatikan dengan ancaman hukuman mati, persis dua abad berikutnya, karena meyakini prinsip yang sama? Hampir semua orang menyangkal pendapat keduanya dan menuduh mereka sesat pada zaman itu. Hari ini, kita menyaksikan ketidaklaziman itu menjadi sebuah kebenaran.

Entahlah. Barangkali setiap pembangkangan memang ditakdirkan untuk terkucil. Ia adalah dunia sunyi sepi. Kita lebih nyaman dengan normal science, yang dianggap sebagai representasi realitas. Paradigma yang digunakan sewaktu bekerja adalah paradigma yang berlaku saat itu, meski di lapak lain secara tidak sengaja kita menemukan sesuatu yang berbeda. Sayangnya, sesuatu itu tidak bisa kita percayai hanya karena "ia berbeda", menjadi si liyan. Kita percaya dengan apa yang sudah ada sama seperti halnya kita mempercayai esok matahari masih terbit di timur. Tidak ada kebengalan untuk membangkang terhadap pemikiran linier. Padahal, baru dua abad lalu Thomas Huxley memadahkan nasihat yang berharga: "New truths begin as heresies." Kebenaran-kebenaran baru dimulai sebagai kemurtadan.

Tapi sayangnya, mungkin benar seperti yang ditatah Milan Kundera, bahwa perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa.[1] Sehingga kita tetap panggah (bangga) dengan kelaziman yang berulang, serta rutinitas/tradisi (?) yang lasak—dipraktikan terus-menerus. Tak heran, seorang guru yang inspiratif seperti John Keating, seperti dibentangkan dalam film Dead Poet Society, harus diusir dari sekolahnya hanya gara-gara mengenalkan para siswa pada ketidaklaziman.

Ya, Keating mengkritik cara pandang siswa dan koleganya yang terlampau linier dengan menyuruh murid-muridnya berdiri di atas meja. Dengan berdiri di atas meja, katanya, kita akan menemukan dunia dalam bentuk yang berbeda dengan yang kita lihat kalau berdiri biasa di atas tanah. Atau ketika ia menyuruh murid-muridnya menyobek bab tentang puisi dari buku daras yang mereka punya, hanya karena ia jengah dengan pemaparan tentang bagaimana memahami dan menilai sebuah puisi lewat sebuah kuantifikasi teknis. Menurut Keating, sebuah puisi dibaca bukan karena kebagusannya, tapi karena para pembaca adalah bagian dari umat manusia.

Sebuah puisi, meminjam Ignas Kleden, memang adalah sebuah dunia simbolik. Sebuah dunia di mana diproduksi, direproduksi dan disimpan muatan mental dan muatan kognitif kebudayaan, baik berupa pengetahuan dan kepercayaan, baik berupa makna dan simbol, maupun nilai-nilai dan norma yang ada dalam kebudayaan.[2] Puisi adalah materialisasi nilai estetis. Sehingga, kita tak harus menemukan jelmaan dunia sosial di dalamnya (mirror of nature). Dan karena manusia tak hanya hidup dalam dunia sosial, tapi juga dalam dunia simbolik semacam tadi, maka Keating harus menyuruh murid-muridnya merobek bab yang tak lengkap menjelaskan puisi tadi.

Dalam sastra, kelaziman tekstual mungkin telah mendapat kritik—lebih tepatnya diimbangi—oleh keberadaan sastra fantasi. Ia membongkar dan mempersoalkan apa yang disebut realitas, visi monologis, dan cara tunggal dalam mempersepsikan dunia, lewat spekulasi literer dan otonomi fiksionalnya yang bandel.[3] Tapi, barang kali sastra fantasi memang lebih banyak membuat orang berkerut-kerut dan hanya menghasilkan sedikit nama untuk diingat, meski itu tak kemudian berarti kebanyakan aliran sastra lain telah melembagakan kelaziman sebagai pranata yang harus diimani.

Di sinilah sebenarnya kritik terbesar atas paradigma linier. Meski mungkin kita tak harus menerima begitu saja "cibiran" Thomas Kuhn atas normal science, seperti yang tertuang dalam bukunya, The Structure of Scientific Revolutions, setidaknya pada titik ini kita harus menyepakati satu hal: normal science memang menghasilkan kemajuan, tapi tidak perubahan. Dan persoalannya kemudian tidak pada "mana yang lebih kita butuhkan sekarang", kemajuan atau perubahan. Tetapi, pengrusakan sedang menubuh dalam kata ajaib "kemajuan", dan kebanyakan orang tidak menyadarinya.

*****

Pengetahuan, atau pengertian, tidak menurunkan hukum-hukumnya dari, melainkan memaksakannya pada alam.[4] Diktum ini secara telanjang kian banyak dipraktikan untuk menopang apa yang kita sebut sebagai sebuah kemajuan, modernitas. Dunia sedang ditaklukkan oleh reproduksi massif kesadaran palsu: bahwa kebenaran objektif adalah apa yang tampak sebagai realitas. Lebih tajam lagi, kebenaran objektif adalah apa yang diberikan oleh "pengetahuan modern". Sebab, hanya pengetahuan modern yang berhak menggeledah dan merepresentasikan realitas. Di sinilah modernisme sedang menyungkurkan kita pada kerusakan, karena pada akhirnya manusia didorong untuk menyerahkan hidup sepenuhnya pada realitas. Dan kepercayaan ini secara bertahap sedang berevolusi menjadi dogma.

Adegan pertemuan antara Tereza dan Sabina, dua dari tiga tokoh utama novel Milan Kundera, The Unbearable Lightness of Being, bisa dijadikan analog cacat paling vital pengetahuan modern itu. Ketika pasangan "poligamis" Tomas itu ketemu di studio Sabina, dengan penuturan yang kuat, Kundera menuliskan kejengkelan Sabina pada guru-gurunya semasa kuliah dulu. Ia harus rela dikeluarkan dari akademi seni lukis gara-gara tak mau tunduk pada gaya realis yang dipaksakan sekolahnya. Pada waktu itu, seni yang melawan realisme memang dianggap dapat melemahkan dasar-dasar sosialisme.[5] Dan Sabina telah lebih dari cukup untuk dianggap sebagai pembangkang yang membahayakan hanya karena salah satu lukisan yang pernah dibuatnya bercerita tentang sesuatu yang tidak lazim, "sesuatu di balik pemandangan", meski lukisan itu tercipta secara tak sengaja.

Bayangkan, bahkan untuk sebuah lukisan pun mahasiswa dilarang untuk melibatkan perasaannya, mencoba berinterpretasi terhadap realitas. Sindiran itu tentu tak hanya pas ditujukan pada kenaifan (atau ketololan?) tentara komunis Rusia yang menduduki Cekoslovakia kala itu. Kenaifan sejenis juga telah diproduksi ilmu pengetahuan modern dan dipraktikan di seluruh penjuru dunia. Perasaan, sifat-sifat natural kemanusiaan, harus disekap dalam penjara pengap demi objektivitas keilmuan. Segala yang melewati atau tak terpacak pada realitas adalah sesuatu yang "aneh", "luar biasa", "gila", dan seterusnya.[6] Di sinilah kenapa normal science—yang menguasai dunia modern—menjadi "berbahaya" dan tak mendorong "perubahan". Keengganannya untuk menjelajah wilayah tak bertuan yang belum diduduki oleh penafsiran-penafsiran ilmiah dan filosofis, membuatnya lebih "menghayati" realitas ketimbang "memikirkannya". Atau, kalaupun berpikir, hanya berpikir untuk hal-hal praktis yang sudah "barang tentu".[7] Padahal, realitas

kerap kali mengelabui kesadaran. Sebab, bisa jadi "di permukaan terdapat kebohongan yang masuk akal; [sementara] di bawah permukaan ada kebenaran yang tak masuk akal."[8] Dan pengagungan terhadap realitas, pada titik itu, sangat rentan dijadikan alat pembenaran atas kebohongan.

Kegandrungan pada positivisme pada akhirnya memang hanya melahirkan bumerang: pengetahuan menjadi sesuatu yang kian janggal. Ada keberjarakan antara "realitas" dengan apa yang kerap disebut sebagai "kebenaran". Dan jarak itu kian lama semakin lebar, karena pengetahuan sekadar menjelaskan dan menerangkan realitas dengan apa adanya. Comte mungkin tak pernah menyadari implikasi buruk "otonomi liar" ilmu pengetahuan yang dirumuskannya, ketika menganggap positivisme sebagai lingkungan sah otonomi. Ilmu memang kemudian bisa melepaskan diri dari penjara teologis yang mistis dan menghindari lingkungan metafisik yang abstrak. Tapi dia hanya mampu merengkuh ruang dalam potongan-potongan kecil tak utuh bernama empirisisme, menemukan—meminjam Kundera—"apa yang hanya bisa ditemukan".[9] Ketika ilmu pengetahuan menjadi demikian, sekadar memenuhi kepuasan dan kebutuhan praktis-fungsional, dan bukannya kegairahan untuk "mengetahui", maka bisa dipastikan ia telah membiarkan dirinya memajal. Pada titik itu, sebagaimana pernah dirisaukan Octavio Paz, daya dobrak ilmu telah menjadi pengulangan ritual; pemberontakan jadi prosedur; kritik menjadi retorik; dan perlawanan menjadi upacara. Ilmu, dengan begitu, telah menjadi sebuah karnaval lelucon dengan tanpa disadari.

*****

Kita kini hidup dalam sebuah dunia terberi. Barat telah "menciptakan" apa yang kini disebut Timur, Dunia Ketiga, sejak beratus tahun silam. Kita mengenali dunia sekeliling sebagaimana mereka menamainya. Praktis, sejak lama kita tak lagi mengenali apa yang ada di sekitar menurut apa yang kita kenali semula. Dominasi mereka memang tak hanya sekadar melibatkan meriam dan serdadu—lewat kolonialisme gaya klasik, melainkan suatu dominasi berbentuk kedaulatan, meminjam Edward Said, yang melampaui bentuk-bentuk, kiasan, dan imajinasi dari mereka yang dikuasai. Begitu kuatnya dominasi dan proses penamaan yang diberikan, sehingga secara tak sadar kita kian tenggelam dalam proses "pelupaan atas mengada".

Dunia semacam ini terus terang telah menggelisahkan kami. Dan kegelisahan semacam itu pula yang terus mendorong kami, BALAIRUNG, untuk membahas tema-tema yang dekat dengan pelupuk, mencoba mengenali Indonesia tidak dengan meminjam "nama-nama", narasi-narasi besar yang berjarak, tapi lewat pengumpulan kembali imaji yang terlupa. Kita mencoba keluar dari kungkungan realitas dan melihat dunia dalam kemungkinan bentuk yang berbeda, atau mengikuti anjurannya Keating, kami sedang mencoba untuk "berdiri di atas meja" dan melihat dunia dalam perspektif yang lain. Itulah sebabnya kenapa BALAIRUNG pernah mengangkat desa, pesisir, dan kini sektor informal, sebagai tema untuk diperbincangkan. Kami tidak ingin menerima dunia terberi ini dengan apa adanya, tanpa perlawanan. Benda mungkin akan segera mencap kami sebagai kelompok "patriotis-romantik" karena berangkat membincangkan ide-ide itu tak hanya dengan kegelisahan, melainkan juga kecurigaan atas dunia terberi tadi. Tapi dunia semacam ini memang patut dicurigai. Ketika paradigma mainstream cenderung menjelaskan realitas dengan apa adanya (what there is) dan tidak memberikan opini atas apa yang sebaiknya terjadi (what there ought to be), kita memang harus selalu dihantui oleh kegelisahan dan kecurigaan terus-menerus atas realitas.

Pemikiran yang menerima begitu saja dunia terberi tentu saja terlihat bebal, karena sangat membatasi kebebasan berpikir manusia, atau terlampau mengikat manusia dalam ruang dan waktu. Padahal, sebagaimana diimani Arnold Gehlen, seorang antropolog Jerman, manusia adalah umweltfreis wesen, mahluk-bebas-lingkungan.[10] Berbeda dengan binatang, hubungan manusia dengan lingkungannya bersifat labil. Kelabilan ini menjadikan manusia tidak terikat dan bersifat bebas dengan lingkungannya. Sehingga, bagi manusia, lingkungan adalah sesuatu yang harus dicari—dan bahkan harus dibangun, bukan sesuatu yang diberikan (gabe). Karena itulah, dunia terberi ini harus dikritisi dan dikoreksi. Meminjam istilah Heidegger, kita tidak sekadar "berada dalam waktu", tetapi "mengambil sikap terhadapnya".[11]

Di sinilah "kesadaran kritis" kita, intelektual Dunia Ketiga, akan diuji, apakah kita memiliki cukup kegairahan untuk menelanjangi wilayah-wilayah yang belum terjamah—atau yang telah terlupa, atau malah terpenjara dalam gagasan-gagasan yang memampatkan realitas dalam penjara formula-formula mati bernama teori, sebuah fatwa agung dalam ilmu pengetahuan modern.[12] Lewat edisi desa, kita mengkritik proses melupa bahwa desa adalah "ibu", sehingga bukannya kota yang menghidupi desa, tapi desalah yang menghidupi kota. Membincangkan Timur tanpa membincangkan desa adalah omong kosong, sehingga Barat

memandang perlu untuk melemahkan Timur lewat perlucutan kemandirian desa dalam berbagai segi.[13] Dalam edisi itu pula kita didorong untuk mempertanyakan ulang harmoni antara konsep industrialisasi dengan pembangunan sektor pertanian. Betulkah keduanya selalu bisa diharmoniskan? Seperti pernah digelisahkan Dawam Rahardjo, kita selama ini memang hampir tak pernah membincangkan industrialisasi dan pertanian sebagai sesuatu yang menyimpan konflik.

Dalam edisi pesisir kami memaparkan bahwa laut, bahari, tak semata memiliki arti penting secara ekonomis, melainkan juga kultural. Ia adalah entitas peradaban yang mandiri, lengkap dengan segala perangkat sosial budayanya. Tentu bukan sebuah kebetulan jika kejatuhan Nusantara berdekatan waktunya dengan kejatuhan kerajaan-kerajaan maritim terbesar. Atau, konsep otonomi ternyata telah dikenal oleh kerajaan maritim, seperti Majapahit, sejak lama. Dalam edisi itu, kita diajak keluar sejenak dari "peradaban darat" dan menengok betapa demikian kompleksnya "peradaban maritim" yang pernah kita miliki.

Kali ini, lewat edisi yang Anda pegang ini, kami mencoba mengangkat sektor ekonomi yang selalu dipinggirkan: sektor informal. Sangat naif, jika sektor yang menghidupi dan dihidupi sebagian besar masyarakat kita ini tak pernah masuk dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif, hanya karena ilmu ekonomi modern yang kita pelajari tidak mengenal sektor informal.

Pada akhirnya, secara keseluruhan, tiga edisi itu sebenarnya sedang menggugat satu hal: perbedaan ternyata kian dipahami tidak sebagai sesuatu yang netral, horisontal, melainkan mengandung nilai yang bersifat hirarkis, vertikal. Begitulah kita selama ini menempatkan Timur dan Barat. Dengan rasa tidak percaya diri, kita menempatkan diri kita tidak dalam posisi sejajar dengan mereka yang berasal dari "Atas Angin". Sehingga secara terus-menerus kita tetap menjadi dunia yang "diciptakan" Barat, dan tidak menciptakan dirinya sendiri. Dominasi yang berlebih, serta inferioritas yang kelewatan, kemudian membuat kita lupa bahwa kita memiliki "perbedaan-perbedaan" yang setara dengan mereka. Tak heran jika kemudian semua aktivitas kita didayagunakan untuk menyamai Barat, dan bukannya untuk menghidupi diri sendiri. Desa, pesisir, dan sektor informal, adalah perbedaan yang harus kita perlakukan secara berbeda mulai hari ini. Sebab di sana terpacak sebagian imaji Indonesia sebagai sesuatu yang terbentuk, dan bukan terberi.

Namun, tentunya kita menyepakati bahwa terlalu naif jika menganggap kepelikan dunia modern sebagai kutukan belaka yang sekadar menghadirkan kerusakan, dan mempersandingkan Timur dan Barat selalu dalam kacamata hitam-putih. Modernitas, seperti diimani Kundera, juga merengkuh semacam ambiguitas, berupa kemajuan dan kemunduran pada saat bersamaan.[14] Pada titik inilah penafsiran kritis atas realitas menemukan relevansinya. Kemampuan untuk melucuti

"kebenaran yang tidak masuk akal" dari "kebohongan yang masuk akal" hanya bisa diperoleh lewat hasrat yang besar untuk menjelajah labirin tak bernama atau yang terlupa. Dan itu berarti pelampauan terhadap realitas, penggalian makna lewat eksplorasi ingatan dan tafsir.

Pada konteks itulah tiga edisi BALAIRUNG tadi terlahir. Meski dibincangkan oleh generasi yang berbeda, "trilogi" tadi—desa, pesisir, dan sektor informal—bisa dirunut dalam garis pemikiran yang serupa: memberi tafsir atas imaji Indonesia yang tak melulu bergantung pada "nama-nama Barat". Bahwa, boleh jadi, "ketidaklaziman" ini hanya sekadar klaim yang sebenarnya banyak dipengaruhi oleh wacana dominan—sama seperti halnya kritik seorang kawan, bahwa bahasa yang digunakan untuk mendikotomikan darat dan laut dalam edisi pesisir barangkali juga adalah bahasa darat,[15] inipun menjadi bagian dari kritik atas wacana dominan itu sendiri. Ambiguitas pemikiran modern pada akhirnya memang akan melahirkan perlawanan atau kritik yang ambigu pula.

Meskipun begitu, tentu saja, keacakan berupa relativitas tak berujung itu tak seharusnya menjadikan kita terpasung pada kontinuitas sejarah tanpa kebaruan jalan. Dengan mencoba "berdiri di atas meja", kita sedang tak begitu saja membiarkan distorsi terjadi, selalu bertekuk lutut pada realitas dominasi, atau terus-menerus terlibat dalam negosiasi budaya yang tidak sehat. Meski, untuk itu kita harus menjadi Si Malinkundang atas realitas yang sudah "menciptakan" kita sejauh ini.

Tarli Nugroho

CATATAN AKHIR :

1 Lihat Milan Kundera, Kitab Lupa dan Gelak Tawa (The Book of Laughter and Forgetting), (Yogyakarta: Bentang, 2000), hal. 4.
2 Ignas Kleden, Pergeseran Nilai Moral, Perkembangan Kesenian dan Perubahan Sosial , dalam Jurnal Kebudayaan Kalam, edisi 6/1996, hal. 5. Lihat juga Ahmad Sahal, Tafsir: Menuju Puisi? , dalam Jurnal Kebudayaan Kalam, edisi 10/1997, hal. 3.
3 Nirwan Dewanto, Mengolah Pinggiran: Jorge Luis Borges dan Khazanah Amerika Selatan , sebuah kata pengantar untuk karya Jorge Luis Borges, Labirin Impian, (Yogyakarta: LKIS, 1999). Otonomi fiksional di sini bisa diterjemahkan sebagai lepasnya hubungan antara bahasa dengan dunia nyata di luar teks. Artinya, teks tak harus merepresentasikan realitas yang ada di luar dirinya. Teks bisa menciptakan realitasnya sendiri.
4 Diktum Immanuel Kant ini menjadi ciri paradigma modern. Lihat Nirwan Dewanto, Senjakala Kebudayaan, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 1996), hal. 138.
5 Milan Kundera, The Unbearable Lightness of Being (terj.), (Yogyakarta: Kunci Ilmu, 2002), hal. 78.
6 Lihat juga kritik F. Budi Hardiman terhadap positivisme ilmu pengetahuan, Melampaui Positivisme dan Modernitas, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal. 24.
7 Ibid., hal. 25.
8 Milan Kundera, op. cit., hal. 79.
9 Milan Kundera, Art of Novel (terj.), (Yogyakarta: Jalasutra, 2001), hal. 31.
10 Lihat Ignas Kleden, Mencari Landasan Berpikir yang Mendukung Lingkungan Hidup , dalam Ignas Kleden, Sikap Ilmiah (Loc.Cit.), hal. 142.
11 Kutipan dari Martin Heidegger, Sein un Zeit (1927), seperti dikutip Martin Suhartono, Dinamika Ruang-Waktu: Dari Distansiasi ke Transfigurasi ,.dalam Basis, No. 01-02/XLIX, Januari-Februari 2000, hal. 25.
12 Penjelasan mengenai bagaimana kesadaran kritis ini bisa dilihat dalam tulisan Melani Budianta, Yang Memandang dan Yang Dipandang , dalam Jurnal Kebudayaan Kalam, edisi 2/1994, hal. 65.
13 Hs. Bachtiar, Desa, Narasi Kegagapan , Isu dalam Majalah BALAIRUNG edisi 33/Th.XVI/2001, hal. 12.
14 Ibid., hal. 20.
15 Veronica Kusuma, Laut , Isu dalam Majalah BALAIRUNG edisi 35/Th.XVII/2002, hal. 13.

Tantrin.Balairung

Nikmatnya Asap Tembakau di Mulut Pelajar SMU:

Antara Racun dan Identitas

Tulisan ini adalah laporan riset yang dilaksanakan untuk penerbitan Jurnal Edisi 36. Tapi karena kendala teknis, laporan ini baru bisa diturunkan pada edisi ini.

WHO amat gigih dalam melancarkan gerakan anti rokoknya. Namun apa lacur, ternyata tanggapan masyarakat dingin-dingin saja. Hal ini membuat kita bertanya-tanya. Apa yang membuat masyarakat, khususnya para remaja, begitu bersikap masa bodoh dengan semua informasi tentang bahaya rokok? Adakah *hidden factor* yang melekat dalam benak remaja ketika dihadapkan pada pilihan: merokok atau tidak merokok?

Sebenarnya ada catatan-catatan penting atas langkah yang diambil WHO. Di antaranya, WHO secara umum hanya memakai isu kesehatan sebagai amunisi dalam setiap aksinya melawan rokok. Padahal jika kita melihat pertimbangan Stephen Wearing dan Betsy Wearing (Jurnal *Leisure Studies* <1>, 2000), rokok sudah menjadi asesoris *fashion*. Ia bisa berperan sebagai sumber identitas pada diri seseorang. Sehingga, perlu pendekatan lain yang bisa ditempuh untuk mengurangi pengguna rokok, terutama pada usia remaja.

Sebagai langkah awal dalam merumuskan langkah-langkah pendekatan kepada para perokok pemula yang masih remaja, BALAIRUNG melakukan jajak pendapat (*polling*) kepada siswa-siswi SMU dan sederajat di kota Yogyakarta. Pemilihan responden yang terdiri dari para pelajar SMU dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan teknis dan non-teknis. Soal teknis terkait dengan peng-*koding*-an. Dalam hal ini, populasi SMU dan jumlah pelajarnya bisa dikumpulkan dan di*koding* dengan mudah. Data tentang itu bisa diakses dari beberapa lembaga terkait, semisal Kantor Wilayah Pendidikan dan Pengajaran.

Pertimbangan kedua berhubungan dengan faktor usia dan perkembangan psikis, yakni masa peralihan yang terjadi pada remaja usia SMU. Gejala ini terjadi antara kisaran usia 16 sampai 18. Dalam fase itu, tumbuh naluri ingin merdeka. Pembentukan pribadi dan karakter, disertai kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan secara sadar (meski terkadang karena pengaruh lingkungan), akan dilalui oleh remaja.

Hal ini dapat ditilik dari hasil jajak pendapat ini. Pengaruh utama dalam mengambil keputusan merokok sebagian besar (85,4%) adalah berasal dari teman. Artinya, lingkungan pergaulan sesama pelajar mempengaruhi, bahkan acapkali "memaksa" para pelajar untuk merokok. Akan tetapi ada yang secara sadar memilih rokok sebagai simbol kedewasaannya (54,2%), dan hal itu merujuk pada proses pencarian identitas remaja. Jadi meski mereka semua sadar (100%) tentang bahaya merokok, namun karena desakan lingkungan sosialnya disertai dorongan yang kuat dari dalam dirinya (karena efek kecanduan), aktivitas merokok pun tetap mereka teruskan. Sementara itu, jika dilihat dari usia para pemilih yang rata-rata berusia 16 tahun ke atas (41,7%) ketika mulai merokok, semakin memperkuat pandangan bahwa dengan merokok itulah para remaja ini berharap akan menemukan identitasnya.

Pencarian identitas pelajar SMU melalui rokok, memungkinkan perokok remaja menemukan dirinya sebagai seorang pemberontak (perlawanan = 26%). Paling tidak terhadap lingkungan sosial terkecilnya, yaitu keluarga. Dalam keluarga pun terutama ditujukan kepada orang tua yang menerapkan segala macam peraturan dan norma. Hasrat melawan juga erat kaitannya dengan citra rokok yang mewakili semangat kebebasan (40,6%). Paling tidak mereka merasa bebas dari praktek penguasaan tubuh oleh kepentingan di luar dirinya, semisal norma keluarga, norma sosial, ataupun aturan-aturan formal.

Secara tak langsung, para remaja ini telah mengembangkan etika karakter dalam dirinya. Dalam etika karakter, pelajar mampu mengesampingkan nilai-nilai sosial yang dijadikan standardisasi dalam menilai sesuatu. Etika ini memiliki patokan sendiri sesuai dengan keinginan dan kemampuan personal. Dengannya, si person akan mampu menyikapi lingkungannya dengan rasa dan kemampuan yang dimilikinya sendiri. Lingkunganlah yang pada akhirnya harus mampu menyesuaikan dengan personal yang menghidupi dan dihidupi di lingkungan tersebut. Dengan demikian, para remaja ini akan merasa nyaman di manapun dia merokok, selama tidak menggangu kepentingan pihak lain. Sehingga jika suatu saat ia memutuskan untuk meninggalkan rokok, hal itu pun murni karena kesadaran pribadinya yang merdeka tanpa tekanan dari pihak manapun.

Kebalikan dari etika karakter adalah etika kepribadian. Dalam etika ini standardisasi yang sudah melekat kuat di tingkat sosial tertentu turut mempengaruhi seluruh rasa dan kemampuan personal. Akibatnya akan muncul sesuatu yang artifisial, dibuat-buat, agar personal yang bersangkutan bisa diterima dalam lingkungan tertentu. Maka, individu tak akan pernah menemukan dirinya sendiri. Pada akhirnya, etika kepribadian terkadang menjadi penjara bagi kreativitas, sehingga duplikasi menjadi cirinya

yang paling menonjol.

***

Berkenaan tentang tren, telah ditegaskan oleh Simmel (1978) tentang rokok sebagai asesoris *fashion*. Artinya, kaum muda yang selalu ingin mengikuti tren akan merasa lebih *afdol* jika mereka juga melakukan ritual menghisap rokok. Namun hal ini agak sulit dibuktikan dalam lingkup sekolah. Sekolah sebagai lingkungan sosial yang memiliki pola manajemen yang agak ketat dalam menegakkan tata aturan, menyebabkan para pelajar SMU masih malu-malu, bahkan mungkin takut untuk merokok. Terbukti hanya 27,3% responden yang pada tiga bulan terakhir masih aktif merokok. Sedang sisanya (72,7%) memilih untuk tetap tidak merokok.

Bias gender sedikit banyak masih lekat menempel dalam perilaku menghisap rokok, hingga saat ini. Dari sejumlah perokok yang terjaring dalam *polling*, pelajar laki-laki sangat dominan (92,7%) dibandingkan dengan yang perempuan (7,3%). Meski begitu, tak cukup beralasan jika melihat itu sebagai efek dari ungkapan "Jika tidak merokok banci namanya", yang membawa akibat keterpaksaan untuk merokok bagi yang ingin disebut "jantan". Sebab, menurut pengamatan yang telah dilakukan, kaum banci (waria) yang sering berkumpul di bilangan Kotabaru juga banyak yang merokok!

Kegilaan merokok para remaja SMU bisa ditakar dari aras tingkat konsumsinya. Meski ada yang merokok hanya jika ditawari oleh teman (8,3%) yang artinya mereka tak perlu mengeluarkan uang untuknya, sebagian besar dari mereka (54,2%) merogoh kocek pribadi, sekalipun paling banter cuma Rp5 ribu per minggu. Setiap harinya rata-rata mereka menghabiskan Rp700 untuk memenuhi kebutuhan rokok. Kalau dikonversi ke jumlah per batang rokok, maka Rp700 akan memperoleh 3 batang rokok kelas medium (tanggung). Hal sebaliknya akan tampak mencolok jika dibandingkan dengan pencandu berat (3,1%), yang bisa menghabiskan uang minimal Rp20 ribu per minggu. Rata-rata 1 bungkus rokok mereka habiskan tiap harinya. Angka yang luar biasa untuk ukuran pelajar SMU, mengingat pada umumnya pelajar SMU masih bergantung pada uang saku dari orang tuanya. Dalam jatah uang saku tersebut tentu tidak terdapat alokasi dana khusus untuk membiayai hobi jajan asap tembakau. Nyatanya sebagian orang tua (70,8%) melarang putra-putri tercintanya yang masih SMU untuk merokok.

Lalu bagaimana para pelajar ini harus mencukupi kebutuhan rokoknya jika uang sakunya tidak mencukupi? Tidak kami kuak lebih dalam lagi. Namun paling tidak dilihat dari pola konsumsinya tampak bahwa para pelajar SMU yang merokok rata-rata menghabiskan 6 batang rokok perhari. Apakah taraf ini masih tergolong aman?

Terkait dengan taraf aman rokok, 98,9% responden merasa yakin bahwa rokok yang dihisapnya akan mengganggu kesehatan. Meski demikian, ada kesan sikap tak peduli dengan segala macam informasi tentang bahaya merokok. Informasi yang berujar "Merokok dapat menimbulkan gangguan kesehatan, impotensi, dan gangguan pada janin." adalah informasi yang paling sering mereka baca sambil lalu dalam setiap kemasan rokok (70,8%). Namun, "ancaman" mengerikan itu tak menyurutkan minat mereka untuk tetap membuka bungkus rokok, mengambil sebatang, lalu menyalakannya. Simak saja tuturan Setya (bukan nama sebenarnya). "Sepertinya saya sudah sangat menikmati rokok, dan saya *nggak* tahu apa atau siapa yang bisa menghentikan kebiasaan ini". Hal inilah yang membuktikan bahwa langkah WHO, yang hanya mengandalkan isu kesehatan saja untuk mengurangi jumlah perokok belia, masihlah belum efektif.

Sedikit angin segar harapan datang dari cara pandang mereka dalam memilih jenis rokok yang dihisapnya, yaitu dengan memperhatikan kandungan tar (35,4%). Meskipun ini bukan jawaban dengan persentase terbesar, paling tidak hal ini bisa menjadi indikator kesadaran mereka tentang zat-zat berbahaya dalam rokok. Oleh karena alasan itu, para pelajar ini lebih suka memilih rokok yang berkategori *low tar*, semisal A Mild (26%) dan Star Mild (11,5%).

Pertimbangan utama mereka dalam mengkonsumsi merek rokok tertentu adalah masalah cita rasa (74%). Namun, selain persoalan selera, ternyata para pelajar juga cukup arif dengan meminimalisasi efek negatif rokok pada kesehatan. Hal ini tampak pada angka 35% di antara mereka yang memilih merek-merek rokok tertentu dengan kadar tar rendah. Terakhir, faktor yang tak kalah berpengaruh dalam pemilihan merek ialah masalah harga (17,7%). Bisa dipahami, sebab secara finansial mereka memang masih sangat tergantung pada uang saku dari orang tua.

Salah satu tujuan lain aktivitas merokok adalah sebagai sarana pergaulan (39,6%). Fakta ini diperkuat dengan penelitian Syarifuddin (mahasiswa Psikologi UGM), bahwa para perokok cenderung memiliki pribadi yang terbuka (ekstrovert). Hal itu mampu membantunya untuk bergaul dengan siapapun dan dari kalangan manapun. Singkatnya, rokok bisa dipandang sebagai bahasa pergaulan. Suatu teknik pergaulan yang sudah dipakai sejak 2000 tahun silam oleh

suku Indian di benua Amerika. Suku Indian memakai sejenis rokok sebagai sarana penghormatan kepada utusan dari klan lain yang membawa mandat. Jika utusan semacam itu datang, ia segera disambut dengan upacara menghisap tembakau bersama yang dibakar dalam pipa dengan panjang 1,5 meter. Setelah itu baru mereka membicarakan agenda khusus yang dibawa oleh utusan tadi.

Di samping itu semua, tujuan utama para pelajar untuk merokok adalah mengambil manfaat rokok dalam efeknya atas fungsi fisiologis, yakni sebagai pelepas stres (60,4%). Efek nikotin yang menekan pembuluh darah dan memacu kerja jantung, membuat darah mengalir dengan deras ke seluruh tubuh. Meski hal ini hanya bersifat sementara, namun membuat otak tersuplai darah dengan lancar, selanjutnya kerja otak bisa *tok cer*. Hal inilah yang membuat otak bisa bekerja dengan tenang, berpikir lancar, dan menurunkan ketegangan.

***

Secara umum, agak sulit menyimpulkan hasil jejak pendapat ini. Akan tetapi ada salah satu poin yang bisa digarisbawahi, yaitu tentang bagaimana kita menyikapi fenomena merokok di usia remaja. *Innerlichkeit,* jatidiri, yang sedang diupayakan oleh remaja. Pertanyaan-pertanyaan: mengapa, bagaimana, dan demi apa para remaja itu merokok, sebenarnya sudah mereka sadari. Pertanyaan itu boleh jadi sudah menjadi tantangan tersendiri bagi para remaja.

Semua itu akan menjadi sesuatu yang indah, jika lingkungan bisa memahami proses mereka untuk menggali identitasnya melalui rokok. Tentu, disertai kesadaran penuh dari remaja yang merokok bahwa aktivitas merokoknya dapat menggangu kepentingan pihak lain untuk menikmati segarnya udara. Toleransi, itulah yang selayaknya terjadi.

TABEL HASIL RISET ROKOK

Jenis Kelamin Responden (%)

	%
Laki-laki	55,7
Perempuan	44,3

Apakah orang tua Anda melarang Anda merokok? (%)

	%
Ya	70,8
Tidak	29,2

Apakah Anda percaya, rokok dapat mengganggu kesehatan? (%)

	%
Ya	99
Tidak	1

Apakah 3 bulan terakhir Anda pernah merokok? (%)

	%
Tidak	72,7
Ya	27,3

Apakah anda mengetahui bahaya merokok? (%)

	%
Ya	100

Pada usia berapa Anda pertama kali merokok? (%)

	%
15 tahun <	41,7
12-15 tahun	28,1
9-12 tahun	22,9
<9 tahun	7,3

Apakah Anda mengetahui informasi bahaya merokok dari sumber berikut ini ?
(Jawaban bisa lebih dari satu) (%)

	%
Kemasan	70,8
Iklan rokok	63,5
Berita di media elektronik	44,8
Berita media cetak	41,7
Internet	6,2
Teman	30,2
Orang tua	54,2
Pihak sekolah	38,5

Apa tujuan Anda merokok?
(Jawaban bisa lebih dari satu)

	%
Tampil maskulin	5,7
Untuk gengsi	10,5
Sarana bergaul dengan teman	39,6
Percaya diri	20,8
Tampil keren	6,2
Melepas stres	60,4
Menikmati rasa rokok	39,6
Lain-lain	19,8

Berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli rokok tiap minggu? (%)

	%
<Rp.5000	54,2
Rp.5000- Rp.10.000	21,9
Rp.10.000 Rp.15.000	9,4
Rp.15.000 Rp.20.000	3,1
Rp 20.000 <	3,1
Cuma ditawari	8,3

Lima besar merek rokok yang dikonsumsi pelajar (%)

	%
Sampoerna Mild	26
Djarum Super	25
Gudang Garam Filter	15,6
Star Mild	11,5
Marlboro	9,4

Apa alasan Anda memilih merek rokok tersebut?
(Jawaban bisa lebih dari satu) (%)

	%
Iklan	12,5
Lingkungan pergaulan	21,9
Harga	17,7
Rasa	74
Kemasan	5,2
Kadar tar	35,4
Lain-lain	9,4

Apakah hal-hal berikut termasuk faktor yang mempengaruhi Anda untuk merokok? (%)

	%
Orang tua	4.2
Iklan di media cetak	1
Teman	85.4
Iklan di media elektronik	3,1
Promosi	2,1
Baliho/poster	1
Abstain (tidak ada yang mempengaruhi)	3,1

Menurut Anda, apakah rokok mewakili citra berikut? (%)

	Ya	Tidak	Tidak tahu
Jantan	30,2	58,3	11,5
Perlawanan	26	56,4	17,7
Kebebasan	40,6	46,9	12,5
Pemberani	15,6	72	11,5
Petualang	19,8	62,5	17,7
Status/kelas	8,3	71,9	19,8
Solidaritas	30,2	51	18,8
Kedewasaan	54,2	38,5	7,3
Lain-lain			

Roni Wijaya
Tim riset Nurhidayati, Sofyan Rosyidi, Heru Lesmana, A.Suharyanto, Lutfah Ariana, Jemaludin, Cahyanang Uji, Heru Mulyana, Aminullah
Infografis Tingti feat. D'joker

ABHISEKA

Permasalahan penting yang dihadapi oleh lembaga-lembaga ekonomi dan bisnis, lembaga-lembaga sosial serta politik saat ini adalah masalah "hubungan" (relationship). Permasalahan ini berkisar pada pertanyaan "Bagaimana membangun dan mengembangkan hubungan-hubungan yang baik antara lembaga tersebut dengan orang-orang internal dan eksternal (public) demi tercapainya tujuan dari lembaga itu?"

PUBLIC RELATIONS: THE PROBLEM SOLVER

Bayangkan apabila dalam sebuah perusahaan tidak ada hubungan yang baik yang antara lain disebabkan oleh misscommunication (kesalahpahaman) antar individu dan divisi. Kemudian hal itu menyebabkan hubungan keluar pun menjadi buruk sehingga pada akhirnya tercipta image yang buruk dalam masyarakat. Oleh karena itulah dalam setiap perusahaan atau organisasi dibutuhkan adanya Public Relations (PR).

Public Relations adalah usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suatu badan atau organisasi dengan masyarakat melalui suatu proses timbal balik. Hubungan yang harmonis itu timbul dari adanya *mutual under-standing, mutual confidence* dan *image* yang baik.

Untuk dapat mencapai keberhasilan yang optimal, pelaksana PR harus dibekali dengan ketrampilan di bidang komunikasi dan prasyarat mental yang meliputi kejujuran, integritas, dan loyalitas. Selain itu, ia juga harus memiliki wawasan yang luas dan emotional Intellegence yang tangguh karena harus berhadapan dengan berbagai macam orang. Kegiatan PR pada hakekatnya adalah kegiatan komunikasi, maka seorang pelaksana PR harus dapat mengkomunikasikan kepentingan berbagai pihak dengan baik agar dapat mencapai solusi yang terbaik.

Saat ini profesi PR banyak diincar karena banyak dibutuhkan dan merupakan suatu tantangan tersendiri. Banyak lembaga pendidikan dan pelatihan PR bermunculan untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu lembaga pelatihan PR yang terbaik di Indonesia adalah ABHISEKA Training Center. Sebagai center for human resources development, ABHISEKA menjanjikan masa depan yang lebih baik, seperti slogannya yaitu: **promise for better future.**

ABHISEKA TRAINING CENTER
Center for Human Resources Development
Jl. Timoho No. 26 (Ipda Tut harsono)
Yogyakarta 55165

Tep. (0274) 566759, 566777,
Fax. (0274) 555185

Home Pages: www.abhiseka.or.id
Email: info@abhiseka.or.id

HERMAN JOHANNES AWARD

Tema
"Inovasi Energi Terbarukan Untuk Memicu Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan"

Kriteria Penilaian
1. Orisinalitas Ide dan Kepeloporan
2. Manfaat Bagi Masyarakat
3. Solusi Terhadap Masalah, Baik Setempat, Nasional/Global
4. Kontribusi Pada Daya Saing
5. Ramah Lingkungan

Calon
Terbuka Bagi Individual ataupun Kelompok, Ilmuwan, Praktisi, Akademisi, ataupun Masyarakat Umum

Penghargaan
Medali Lapis Emas Dengan Gambar Prof. Herman Johannes, Piagam, dan Uang Rp. 50 Juta

Kerangka Waktu
- Penyerahan Dokumen Selambat-lambatnya 15 Januari 2004
- Evaluasi dan Seleksi Dewan Juri 31 Januari 2004
- Penetapan dan Penyerahan Anugerah Pada Tanggal 18 Februari 2004, di Yogyakarta Bertepatan Dengan HPTT (Hari Pendidikan Teknik Tinggi)

Formulir Pendaftaran Bisa Diminta Di Sekretariat Panitia:
Jl. Birah 1 No.7 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp: (021)72791540/72791560
Fax: (021) 72791550
Email: arya_dea@hotmail.com
Contact Person: Sdri Dina